Laporan Keuangan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Bengkayang

TAHUN 2025

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Bengkayang, 05 Maret 2026

KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BENGKAYANG,

dr. I Made Putra Negara, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19661116 199903 1 002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang ini, dilaksanakan dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Laporan ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dan DPRD Kabupaten Bengkayang serta pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang, dan untuk merumuskan kebijakan yang terarah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bengkayang.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menerima pengabdian yang kita lakukan bagi kemajuan negara, bangsa, dan tanah air ini, khususnya bagi terwujudnya cita-cita dan tujuan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat. Segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan laporan di masa yang akan datang.

Bengkayang, 05 Maret 2026

KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BENGKAYANG,

dr. I Made Putra Negara, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19661116 199903 1 002

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan..... 2

1.2 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan..... 5

BAB II INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI 7

2.1 Domisili dan Bentuk Hukum Suatu Entitas Serta Jurisdiksi Tempat Entitas 7

2.2 Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokoknya 8

BAB III EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 8

3.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional 8

3.2 Kebijakan Keuangan 9

3.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 13

3.4 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan..... 14

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 20

4.1 Basis Akuntansi..... 20

4.2 Kebijakan Akuntansi 21

4.3 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi 139

4.4 Kebijakan Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa Pemberi Konsesi 156

4.5 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 166

4.6 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA 166

4.7 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO 168

4.8 Kebijakan Akuntansi Belanja 170

4.9 Kebijakan Akuntansi Beban 172

4.10 Kebijakan Akuntansi Transfer 173

4.11 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan 174

4.12 Kebijakan Akuntansi Kas dan setara Kas 175

4.13 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek 176
4.14 Kebijakan Akuntansi Piutang 177
4.15 Kebijakan Akuntansi Persediaan 179
4.16 Kebijakan Akuntansi Aset Non Lancar 179
4.17 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap 180
4.18 Kebijakan Akuntansi Kewajiban 182
4.19 Kebijakan Akuntansi Ekuitas 182
BAB V PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN 183
5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 183
5.1.1 Pendapatan – LRA 183
5.1.2 Belanja 183
5.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)..... 184
5.3.1 Pendapatan – LO 184
5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah– LO 184
5.3.1.2 Pendapatan Transfer– LO 184
5.3.1.3 Lain Lain Pendapatan yang Sah- LO 185
5.3.2 Beban Daerah 185
5.3.2.1 Beban Operasi 185
5.3.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi 186
5.3.2.3 Beban Transfer 187
5.3.2.4 Beban Tak Terduga 187
5.3.3 Surplus Non Operasional 187
5.3.4 Defisit Non Operasional 187
5.3.5 Pos Luar Biasa 187
5.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas 188
5.4.1 Ekuitas Awal 188
5.4.2 Penambahan/Pengurangan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO) 188
5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 188
Penjelasan Akun-Akun Neraca 189

5.5	Aset	189
5.5.1	Aset Lancar	190
5.5.1.1	Kas di Bendahara Penerimaan	191
5.5.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	191
5.5.1.3	Kas di BLUD	191
5.5.1.4	Kas di Bendahara FKTP	191
5.5.1.5	Kas Lainnya	191
5.5.1.6	Setara Kas	191
5.5.1.7	Investasi Jangka Pendek	192
5.5.1.8	Piutang Pendapatan	192
5.5.1.9	Piutang Lainnya	192
5.5.1.10	Penyisihan Piutang	192
5.5.1.11	Beban di Bayar Dimuka	192
5.5.1.12	Persediaan	192
5.5.1.13	Investasi Jangka Panjang	192
5.5.2	Aset Tetap	193
5.5.2.1	Tanah	194
5.5.2.2	Peralatan dan Mesin	194
5.5.2.3	Gedung dan Bangunan	194
5.5.2.4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	194
5.5.2.5	Aset Tetap Lainnya	194
5.5.2.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	196
5.5.2.7	Akumulasi Penyusutan	196
5.5.3	Aset Lainnya	196
5.5.3.1	Tagihan Penjualan Lancar	196
5.5.3.2	Tuntutan Ganti Rugi	196
5.5.3.3	Aset Tidak Berwujud	196
5.5.3.4	Aset Lain-Lain	197
5.5.4	Kewajiban	197
5.5.4.1	Kewajiban Jangka Pendek	197
5.5.4.2	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	197

5.5.4.3	Utang Bunga	197
5.5.4.4	Utang Pinjaman Jangka Pendek	197
5.5.4.5	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	197
5.5.4.6	Pendapatan Diterima Dimuka	197
5.5.4.7	Utang Belanja	197
5.5.4.8	Utang jangka Pendek Lainnya	199
5.5.5	Ekuitas.....	199
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN .	199
6.1	Penggantian Manajemen Selama tahun Berjalan	199
6.2	Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi manajemen baru	199
6.3	Komitmen dan kontinjensi	200
6.4	Penggabungan atau pemekaran entitas akuntansi pada tahun berjalan	200
6.5	Kejadian yang berdampak sosial	200
6.6	Pengungkapan Lainnya.....	200
6.6.1	Domisili.....	200
6.6.2	Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional.....	201
6.6.3	Struktur Organisasi.....	202
BAB VII	PENUTUP	210

LAPORAN KEUANGAN

I. PENDAHULUAN

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan

anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.1 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kapitalisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016;
22. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 16);

23. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang Berbasis Akrual (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 50);
24. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang;
25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
26. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 65 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 7);
27. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 38);
28. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025;
29. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025.

1.2 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

I Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

II Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

2.1. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat entitas.

2.2. Sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya.

III Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

3.2. Kebijakan Keuangan

3.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan Pencapaian Target

IV Kebijakan Akuntansi

4.1. Basis Akuntansi

4.2. Kebijakan Akuntansi

4.3. Kebijakan Akuntansi Properti Invenstasi

4.4. Kebijakan Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa Pemberi Konsesi

Penjelasan Akun-AkunLaporan Keuangan

5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1 Pendapatan - LRA

5.1.2 Belanja

5.1.3 Pembiayaan

5.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

5.3 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)

5.2.1 Pendapatan - LO

5.2.2 Beban

5.2.3 Kegiatan Non Operasional

5.2.4 Akun Luar Biasa

5.4 Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

5.5 Penjelasan Akun-Akun Neraca

5.5.1 Aset

5.5.2 Kewajiban

5.5.3 Ekuitas

V Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

6.1 Penggantian Manajemen Selama tahun Berjalan

6.2 Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi manajemen baru

6.3 Komitmen dan kontinjensi

6.4 Penggabungan atau pemekaran entitas akuntansi pada tahun

6.4 berjalan

6.5 Kejadian yang berdampak sosial

6.6 Pengungkapan Lainnya

6.6.1 Domisili

6.6.2 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional (jika tidak disebut di awal)

6.6.3 Struktur Organisasi

VI Penutup

II. INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.

2.1. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat entitas.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang.

Dinas berkedudukan di wilayah Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dan bertanggung jawab kepada Bupati Bengkayang melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang sosial serta urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.

2.2. Sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang Sosial dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a) pelaksanaan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang Sosial;
b) pelaksanaan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
c) pelaksanaan fungsi lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya yang diberi oleh Bupati berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

III. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian daerah. Pertumbuhan tersebut tercermin dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

PDRB Kabupaten Bengkayang atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, PDRB tercatat sebesar Rp10.322,51 miliar, meningkat menjadi Rp11.146,31 miliar pada tahun 2023 atau tumbuh sebesar 7,98 persen. Selanjutnya pada tahun 2024 meningkat kembali menjadi Rp12.237,93 miliar atau tumbuh sebesar 9,79 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan aktivitas ekonomi secara nominal, termasuk pengaruh kenaikan harga barang dan jasa.

Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi riil juga menunjukkan perkembangan positif. Pada tahun 2022 PDRB ADHK sebesar Rp6.161,45 miliar, meningkat menjadi Rp6.449,88 miliar pada tahun 2023 atau tumbuh sebesar 4,68 persen. Pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi Rp6.755,97 miliar atau tumbuh sebesar 4,75 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi riil Kabupaten Bengkayang relatif stabil pada kisaran 4,6–4,8 persen per tahun.

Tabel 1

Perkembangan PDRB Kabupaten Bengkayang

Tahun	PDRB ADHB (Miliar Rp)	Pertumbuhan ADHB (%)	PDRB ADHK (Miliar Rp)	Pertumbuhan ADHK (%)
2022	10.322,51	-	6.161,45	-
2023	11.146,31	7,98	6.449,88	4,68
2024	12.237,93	9,79	6.755,97	4,75

Sumber: https://bengkayangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTkjMg==/produk-domestik-regional-bruto--pdrb--triwulanan-menurut-pengeluaran-atas-dasar-harga-konstan-2010-kabupaten-bengkayang.html

3.2. Kebijakan Keuangan

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara efisien, efektif, transparan, adil, akuntabel dan berbasis kinerja untuk mendanai berbagai program dan kegiatan pembangunan. Pendekatan berbasis kinerja berarti bahwa penetapan anggaran suatu SKPD harus disertai sasaran dan indikator kinerja (masukan, keluaran dan hasil) yang spesifik, terukur, dapat dicapai,

masuk akal dan memperhatikan dimensi waktu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; serta memperhatikan kondisi keuangan daerah. Sedangkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas berarti bahwa penetapan mekanisme pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan berbasis sistem informasi yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan sehingga pengelolaan dana bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah secara berkelanjutan.

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 14.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan keuangan daerah, maka kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bengkayang selama periode tahun 2024 diarahkan pada hal-hal berikut:

a. Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai langkah sebagai berikut:
    1) Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
    2) Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
    3) Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah;
    4) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan;

5) Melakukan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah melalui razia di lapangan secara terus-menerus dan menggali sumber pajak baru dan penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang ditindaklanjuti dengan penagihan secara paksa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga diupayakan melalui peningkatan kendaraan bermotor asal luar daerah yang mutasi ke Kabupaten Bengkayang;
6) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan gedung/asrama/aula yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan retribusi sewa dari gedung/asrama/aula tersebut;
7) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah termasuk meningkatkan bagian laba Bank Kalbar, BRI dan BNI dan laba atas penyertaan modal pada PT MBM; dan
8) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan berbagai pihak terkait lainnya dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pendapatan daerah.

b. Mengupayakan peningkatan penerimaaan dari dana perimbangan terutama dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam secara lebih adil.
1) Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh SKPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
2) Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan.

c. Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam pengelolaan berbagai aset daerah;

d. Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru dan yang sah.

Kebijakan tersebut di atas akan terus dilaksanakan sampai tahun 2029 dalam rangka implementasi kebijakan yang termaktub di dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 – 2029.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Struktur belanja daerah menggambarkan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung diarahkan untuk penyelenggaraan operasional pemerintahan mencakup pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan desa, serta belanja tidak terduga dan belanja langsung diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan khususnya mendukung terwujudnya visi, misi Pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui prioritas pembangunan Kabupaten Bengkayang.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang mengutamakan pada pencapaian hasil program dan kegiatan melalui belanja langsung dengan arah sebagai berikut:

a. Menjalankan kebijakan anggaran deficit sebagai upaya maksimalisasi pelayanan pada masyarakat yang pendanaannya dibebankan pada sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya;
b. Memberikan dukungan yang proporsional baik dari aspek perencanaan maupun pendanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas pembantuan dan pelaksanaan urusan dekonsentrasi di daerah, dalam bentuk pemberian dana pendampingan yang menjadi beban APBD;
c. Pencadangan kembali anggaran untuk belanja tidak langsung khusus belanja gaji PNS berdasarkan kondisi riil

d. Melakukan pergeseran anggaran baik pada rincian objek, maupun kegiatan dan program berikut rincian pembiayaan.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh jumlah belanja daerah lebih besar dibanding pendapatan daerah yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan pembiayaan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan pembiayaan mengacu pada hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan daerah khusus terkait dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) Tahun anggaran 2024;
b. Semua sisa kas yang ada pada bendahara pengeluaran sampai dengan 31 desember 2025 diakui sebagai sisa lebih perhitungan (SILPA) tahun anggaran 2026;
c. Semua sisa UUDP yang ada pada bendahara pengeluaran atau unit kerja yang belum disetor pada kas daerah sampai 31 desember diakui sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun bersangkutan.

3.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2025, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang mempunyai 13 program dan 32 kegiatan serta 79 sub kegiatan dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang mengikutinya.

Program-program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
b. Program Pemberdayaan Sosial;
c. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
d. Program Rehabilitasi Sosial;

e. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
f. Program Penanganan Bencana;
g. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
h. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;
i. Program Perlindungan Perempuan;
j. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
k. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak;
l. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
m. Program Perlindungan Khusus Anak.

3.4. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Realisasi Pendapatan – LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2025 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah nihil.

Realisasi belanja sampai akhir tahun 2025 sebesar Rp4.817.602.963,00 atau 83,67%, yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Operasi		Persentase (%)
		Anggaran	Realisasi	
1		2	3	4
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK		**4.884.747.401,00**	**4.226.943.522,00**	**86,53**
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.002.205.151,00**	**3.599.929.650,00**	**89,95**
1.06.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	4.953.896,00	0	0,00
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.191.036,00	0	0,00
1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.235.480,00	0	0,00
1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	767.460,00	0	0,00

1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	759.820,00	0	0,00
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	0	0,00
1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	3.388.867.896,00	3.223.114.471,00	95,11
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.372.347.727,00	3.215.910.471,00	95,36
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	0	0,00
1.06.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100	0	0,00
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.770.519,00	7.204.000,00	45,68
1.06.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100	0	0,00
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	749.250,00	0	0,00
1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100	0	0,00
1.06.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	1.070,00	0	0,00
1.06.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	380	0	0,00
1.06.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	345	0	0,00
1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	345	0	0,00
1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	198.497.108,00	89.097.266,00	44,89
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.420.000,00	0	0,00
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.283.858,00	11.779.000,00	32,46
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.879.000,00	38.490.000,00	48,19
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.100.000,00	6.726.600,00	20,32
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	250	0	0,00
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.514.000,00	28.801.666,00	76,78
1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00
1.06.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	30.665.500,00	0	0,00
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	5.864.000,00	0	0,00
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.801.500,00	0	0,00
1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	304.006.881,00	275.519.093,00	90,63
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.850.000,00	2.350.000,00	48,45
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.450.000,00	44.117.043,00	76,79
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	241.706.881,00	229.052.050,00	94,76
1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	75.212.450,00	12.198.820,00	16,22

1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.000.000,00	3.865.020,00	24,16
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.200.350,00	6.163.800,00	99,41
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.434.750,00	2.170.000,00	7,37
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.577.000,00	0	0,00
1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.000.350,00	0	0,00
1.06.01.2.13	**Penataan Organisasi**	350	0	0,00
1.06.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	350	0	0,00
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**214.075.200,00**	**151.912.745,00**	**70,96**
1.06.02.2.01	**Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**	87.500.000,00	51.892.745,00	59,31
1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	87.500.000,00	51.892.745,00	59,31
1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	126.575.200,00	100.020.000,00	79,02
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	58.392.200,00	50.970.000,00	87,29
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	68.183.000,00	49.050.000,00	71,94
1.06.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**19.110.000,00**	**7.272.540,00**	**38,06**
1.06.03.2.01	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	19.110.000,00	7.272.540,00	38,06
1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	19.110.000,00	7.272.540,00	38,06
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**397.561.400,00**	**274.956.246,00**	**69,16**
1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	204.716.000,00	113.313.606,00	55,35
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	25.340.000,00	3.336.000,00	13,16
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	32.420.000,00	6.588.600,00	20,32
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	9.770.000,00	0	0,00
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	51.980.000,00	30.000.000,00	57,71
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	10.168.000,00	7.059.540,00	69,43
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	75.038.000,00	66.329.466,00	88,39
1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**	192.845.400,00	161.642.640,00	83,82

	(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	14.838.000,00	0	0,00
1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	7.500.000,00	0	0,00
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	4.345.000,00	0	0,00
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	150.762.400,00	149.642.640,00	99,26
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	15.400.000,00	12.000.000,00	77,92
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**65.683.800,00**	**26.456.541,00**	**40,28**
1.06.05.2.01	**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	26.966.000,00	8.429.000,00	31,26
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	26.966.000,00	8.429.000,00	31,26
1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	38.717.800,00	18.027.541,00	46,56
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	38.717.800,00	18.027.541,00	46,56
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**216.777.000,00**	**166.415.800,00**	**76,77**
1.06.06.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	181.067.000,00	131.423.800,00	72,58
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	57.624.000,00	37.742.800,00	65,50
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	13.300.000,00	12.040.000,00	90,53
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	95.057.000,00	80.521.000,00	84,71
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	15.086.000,00	1.120.000,00	7,42
1.06.06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	35.710.000,00	34.992.000,00	97,99
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	6.500.000,00	5.994.000,00	92,22
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	29.210.000,00	28.998.000,00	99,27
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**350**	**0**	**0,00**
1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	350	0	0,00
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	350	0	0,00
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**242.625.000,00**	**221.597.620,00**	**91,33**
2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	11.282.000,00	5.049.000,00	44,75
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	9.952.000,00	3.719.000,00	37,37
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	1.330.000,00	1.330.000,00	100,00
2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	29.028.000,00	26.126.780,00	90,01

2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	29.028.000,00	26.126.780,00	90,01
2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	202.315.000,00	190.421.840,00	94,12
2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	22.929.000,00	16.121.840,00	70,31
2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	172.500.000,00	172.500.000,00	100,00
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	6.886.000,00	1.800.000,00	26,14
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**185.069.200,00**	**78.289.500,00**	**42,30**
2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	55.265.000,00	45.069.500,00	81,55
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	50.750.000,00	42.274.500,00	83,30
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4.515.000,00	2.795.000,00	61,90
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	95.294.000,00	8.880.000,00	9,32
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	95.294.000,00	8.880.000,00	9,32
2.08.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	34.510.200,00	24.340.000,00	70,53
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	17.254.500,00	16.745.000,00	97,05
2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	17.255.700,00	7.595.000,00	44,01
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**51.571.900,00**	**39.071.240,00**	**75,76**
2.08.04.2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	24.142.000,00	16.887.160,00	69,95
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	24.142.000,00	16.887.160,00	69,95

2.08.04.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	27.429.900,00	22.184.080,00	80,88
2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.429.900,00	22.184.080,00	80,88
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**1.330.000,00**	**1.330.000,00**	**100,00**
2.08.05.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	1.330.000,00	1.330.000,00	100,00
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	1.330.000,00	1.330.000,00	100,00
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**121.445.680,00**	**86.575.112,00**	**71,29**
2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	87.500.000,00	79.392.112,00	90,73
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	87.500.000,00	79.392.112,00	90,73
2.08.06.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	33.945.680,00	7.183.000,00	21,16
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.459.680,00	5.901.600,00	25,16
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.486.000,00	1.281.400,00	12,22
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**240.106.000,00**	**163.795.969,00**	**68,22**
2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	50.750.000,00	35.351.000,00	69,66
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	50.750.000,00	35.351.000,00	69,66
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	154.846.000,00	104.985.349,00	67,80
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	154.846.000,00	104.985.349,00	67,80
2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	34.510.000,00	23.459.620,00	67,98
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan	34.510.000,00	23.459.620,00	67,98

	perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/			
Jumlah		**5.757.560.681,00**	**4.817.602.963,00**	**83,67**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/lra_per_program

Secara lengkap, uraian Belanja dapat dilihat pada lampiran Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang TA.2025, secara lengkap dapat dilihat lampiran 3.

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Basis Akuntansi

Pemerintah Kabupaten Bengkayang menerapkan akuntansi berbasis akrual sejak Tahun 2015 sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan–LO, beban, asset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikan laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersh telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau

kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.2 Kebijakan Akuntansi

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.2.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA

1. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
2. RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
3. SAL adalah jumlah total saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
4. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
5. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
6. Pendapatan LRA terdiri dari:
   a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA
   b. Pendapatan Transfer-LRA
   c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA

Pengakuan

1) Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan (IPSAP) 02 Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya.

2) Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:
   a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD
   b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh bendahara penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
   c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
   d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
   e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran

1) Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

Penyajian dan Pengungkapan

1) Pendapatan–LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:

a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.2.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

1) Pendapatan–LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2) Pendapatan–LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk Pemerintah Daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing- masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
3) Pendapatan-LO terdiri dari:
   a. Pendapatan Asli Daerah-LO;
   b. Pendapatan Transfer-LO;
   c. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO;
   d. Pendapatan Non Operasional-LO; dan
   e. Pos Luar Biasa-LO.

Pengakuan

1) Pendapatan-LO diakui pada saat:
   a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); dan/atau
   b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
2) Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa:
   a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu

pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;

b. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

3) Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

4) Bila dikaitkan dengan penerimaan kas maka pengakuan Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:
   a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas;
   b. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
   c. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.

5) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka pendapatan-LO diakui pada saat terbit atau diterimanya dokumen penetapan walaupun kas belum diterima.

6) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas/penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima.

   Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan-LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi dengan pertimbangan:

   a. Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi; Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi

yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas.

b. Tidak ada dokumen penetapan; Beberapa pendapatan tidak memerlukan dokumen penetapan seperti misalnya pajak daerah dan retribusi daerah dengan sistem *self assesment* (menghitung sendiri) atau dokumen penetapan tidak diterima oleh fungsi akuntansi sampai kas diterima, maka atas transaksi tersebut dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan LO secara bersamaan saat diterimanya kas.

Selain pertimbangan di atas, pengakuan pendapatan yang dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas didasarkan atas pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya dan manfaat.

7) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka pendapatan-LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengukuran

1) Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).
2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.2.3. Kebijakan Akuntansi Beban

1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2) Beban terdiri dari:
   a. Beban Operasi;
   b. Beban Transfer;
   c. Beban Non Operasional
   d. Beban Luar Biasa.

Pengakuan

1) Beban dapat diakui pada saat:
   a. Timbulnya kewajiban;
   b. Terjadinya konsumsi asset; dan
   c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa di ikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
3) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak di dahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
4) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan / berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

   Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

   a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;

b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

5) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Contoh dari transaksi ini misalnya ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan Barang/diterimanya tagihan dari pihak ketiga dan dokumen transaksi lainnya. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
6) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan dalam periode pelaporan. Beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas yaitu pada saat Bendahara Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran dalam mekanisme GU.
7) Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan.
8) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas. Perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas, pengeluaran tersebut belum dapat diakui

sebagai beban karena belum memperoleh manfaat dari barang atau jasa. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai beban dibayar di muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;
2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

4.2.4. Kebijakan Akuntansi Belanja

1) Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
2) Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan LRA;
3) Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer;
4) Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial;
5) Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS

sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal;

6) Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan;
7) Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda;
8) Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat;
9) Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
10) Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
11) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
12) Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan

pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

13) Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
14) Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
15) Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
    - ✓ Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau SKPD Pengguna Anggaran.
    - ✓ Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas
    - ✓ Klasifikasi belanja secara terinci dalam Bagan Akun standar (BAS)

    Pengakuan

    Belanja diakui pada saat:

    1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
    2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
    3) Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

    Pengukuran

    Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokuken anggaran.

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan

1) Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
   a. Belanja Operasi;
   b. Belanja Modal;
   c. Belanja Tak Terduga

   Dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
2) Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
3) Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.2.5. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

1) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah atau investasi jangka pendek yang sangat *likuid* yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
2) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
3) Kas terdiri dari:
   a. Kas di Kas Daerah
   b. Kas di Bendahara Penerimaan
   c. Kas di Bendahara Pengeluaran

d. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
e. Kas Lainnya

4) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat *likuid* yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
5) Setara kas terdiri dari:
   a. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
   b. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat *likuid* atau kurang dari 3 (tiga) bulan.
6) Klasifikasi kas dan setara kas secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan

1. Pengakuan Kas dan Setara Kas
   1) Secara umum pengakuan aset dilakukan:
      a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
      b. pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
   2) Atas dasar poin (1) tersebut, dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.
2. Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas

   Pengakuan Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:
   a. Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau

b. Telah terjadi pengeluaran *(disbursed)* oleh pemberi pinjaman *(lender)* atas beban pinjaman pemerintah.

Pengukuran

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat

kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.2.6. Kebijakan Akuntansi Investasi

a. Investasi Jangka Pendek

1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. (PSAP 06 Paragraf 6 dan 10)
3) Klasifikasi investasi jangka pendek secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan

1) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
   b. Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan /mengidentifikasikan biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.

2) Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan Pemerintah Daerah.
3) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

Pengukuran dan Penilaian

1) Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat mempergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2) Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut:
    a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
        1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan LRA berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
        2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya, dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
        3) Dengan memperhatikan kriteria pada definisi tersebut, maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi Pemerintah Daerah karena dipengaruhi oleh

fluktuasi harga pasar surat berharga, tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:

- ✓ Surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha.
- ✓ Surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi Pemerintah Daerah; atau
- ✓ Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

4) Investasi yang termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:
   - ✓ Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan dan deposito lebih dari 3 (tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposit*) sampai 12 bulan;
   - ✓ Surat Utang Negara (SUN); dan
   - ✓ Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
5) Pengukuran investasi jangka pendek sebagai berikut:
   - ✓ Deposito berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
   - ✓ Surat Utang Negara (SUN) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.

- ✓ Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar

Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

1) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2) Pengungkapan investasi jangka pendek dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
   a. Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki Pemerintah Daerah;
   b. Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
   c. Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);
   d. Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
   e. Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).

4.2.7. Kebijakan Akuntansi Piutang

1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
2. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
3. Penyisihan piutang bertujuan untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Untuk mendapatkan nilai bersih piutang tersebut pertama kali dilakukan perhitungan nilai penyisihan piutang. Nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan diperoleh dari piutang dikurangi dengan penyisihan

piutang (penyisihan piutang bukan merupakan penghapusan piutang).

4. Nilai realisasi bersih (*net realizable value*) piutang adalah jumlah bersih piutang yang diperkirakan dapat ditagih.
5. Nilai penyisihan piutang tidak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan di setiap akhir periode.
6. Penghapus bukuan piutang adalah pengurangan piutang dan penyisihan piutang tidak tertagih yang dicatat dalam neraca.
7. Penghapus tagihan piutang adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana piutang.
8. Umur piutang adalah jangka waktu dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelaporan.
9. Kualitas piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan umur piutang dan/atau upaya tagih Pemerintah Daerah kepada debitur.
10. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.
11. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

    Pengakuan

    1) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
        a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
        b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.
    2) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan,

dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

a) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
b) jumlah piutang dapat diukur;

3) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
4) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
5) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
6) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
   a) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
   b) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
7) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
8) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi

hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

9) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP / TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan / SKP2K / SKTJM / dokumen lain yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).

SK Pembebanan /SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran

1) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
   a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
   b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
   c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

2) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

3) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

a. DBH disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

b. DAU sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
c. DAK disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

4) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
   a. disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
   b. disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.
5) Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing- masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
6) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write off*) dan penghapusbukuan (*writedown*).
7) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
8) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
   a. Kualitas Piutang Lancar
   b. Kualitas Piutang Kurang lancer
   c. Kualitas Piutang Diragukan
   d. Kualitas Piutang macet

9) Penggolongan kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan pajak yang terdiri dari:
   a. Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*).
      Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
   b. Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
      Wajib Pajak memenuhi kewajibannya setelah besarnya pajak yang terutang terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.

10) Penggolongan kualitas piutang pajak daerah yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
   a. Kualitas lancer, dengan kriteria :
      - ✓ Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
      - ✓ Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
      - ✓ Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
      - ✓ Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
      - ✓ Wajib Pajak likuid; dan/atau
      - ✓ Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
   b. Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
      - ✓ Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau

- ✓ Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
- ✓ Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- ✓ Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- ✓ Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

c. Kualitas diragukan, dengan kriteria:

- ✓ Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
- ✓ Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
- ✓ Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- ✓ Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
- ✓ Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d. Kualitas macet, dengan kriteria:

- ✓ Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
- ✓ Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
- ✓ Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
- ✓ Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- ✓ Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

11) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas lancar, dengan kriteria:

- ✓ Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau

- ✓ Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
- ✓ Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
- ✓ Wajib Pajak *likuid*; dan/atau
- ✓ Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b. Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:

- ✓ Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
- ✓ Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
- ✓ Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- ✓ Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

c. Kualitas diragukan, dengan kriteria:

- ✓ Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
- ✓ Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
- ✓ Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
- ✓ Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d. Kualitas macet, dengan kriteria:

- ✓ Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
- ✓ Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
- ✓ Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
- ✓ Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- ✓ Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

12) Penggolongan kualitas piutang retribusi daerah dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

a. Kualitas lancer

- ✓ Umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
- ✓ Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

b. Kualitas kurang lancer
- ✓ Umur piutang lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
- ✓ Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

c. Kualitas diragukan
- ✓ Umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
- ✓ Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

d. Kualitas macet
- ✓ Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
- ✓ Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

13) Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak daerah dan retribusi daerah, dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

b. Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
c. Kualitas iragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
d. Kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

14) Besaran penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditetapkan:
a. Kualitas lancar, sebesar 5% (lima persen) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

15) Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

16) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CALK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih

antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Pemberhentian Pengakuan

1) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
2) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write off*) dan penghapusbukuan (*writedown*).
3) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
4) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
5) Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagihan piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.
6) Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:

- ✓ Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
- ✓ Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
- ✓ Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
- ✓ Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.

7) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca Pemerintah Daerah, sebelum finalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan (apabila perlu).

8) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

9) Penghapus tagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

10) Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan

kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara. Apabila mekanisme penagihan melalui instansi yang menangani pengurusan piutang negara tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari instansi yang menangani pengurusan piutang negara, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

11) Kriteria penghapus tagihan piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
    a. Penghapus tagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
    b. Penghapus tagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
    c. Penghapus tagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
    d. Penghapus tagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.
    e. Penghapus tagihan setelah semua ancangan/usaha dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi

saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.

f. Penghapus tagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.

g. Penghapus tagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk menjadi esktrakomptabel dengan beberapa sebab, misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut*,

Pengungkapan

1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:
   a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
   b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
   c. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
   d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.
2) Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.
3) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan

penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

4.2.8. Kebijakan Akuntansi Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
   a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
   b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
   c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
   d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
3. Klasifikasi persediaan secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

   Pengakuan

   1) Persediaan diakui pada saat :
      a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah.

2) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran

1) Pengukuran Persediaan

a. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO) atau Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) yaitu harga pokok dari barang- barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dikeluarkan pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

2) Persediaan disajikan sebesar:

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Penyajian dan Pengungkapan

1) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:
   a. Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
   b. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.2.9. Kebijakan Aset Non Lancar

Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

4.2.9.1. Akuntansi Investasi Jangka Panjang

1) Definisi investasi jangka Panjang
2) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
3) Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan investasi non-permanen.
4) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
5) Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.
6) Investasi permanen meliputi: 1) penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara dan 2) investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

7) Investasi non-permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.
8) Investasi non-permanen meliputi: 1) investasi jangka panjang kepada entitas lainnya, 2) investasi dalam surat berharga, 3) investasi dalam proyek pembangunan, 4) dana bergulir, 5) deposito jangka panjang, dan 6) investasi non permanen lainnya.
9) Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
10) Klasifikasi investasi jangka panjang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan Investasi Jangka Panjang

1) Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah;
   b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
2) Hasil investasi jangka panjang dapat berupa:
   a. Deviden Tunai;
   b. Deviden Saham; dan
   c. Bagian Laba
3) Pengakuan untuk hasil investasi untuk deviden dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
   a. Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).
   b. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh oleh pemerintah

dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (dalam jurnal dengan basis kas) dan mengurangi nilai investasi pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual).

4) Pengakuan hasil investasi untuk deviden dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.
5) Pengakuan hasil investasi untuk bagian laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
   a. Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari *investee* yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
   b. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

Pengukuran Investasi Jangka Panjang

1) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk investasi permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
2) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi non-permanen yaitu:
   a. Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
   b. Yang dimaksudkan untuk penyehatan / penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
   c. Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya

pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek, sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

d. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
e. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
f. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net realizable value*).

3) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
4) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.
5) Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
   a. Metode Biaya;
   b. Metode Ekuitas;
   c. Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.
6) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

7) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
8) Metode biaya digunakan jika kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
9) Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan lebih besar atau sama dengan 20%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
10) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika kepemilikan bersifat non permanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi Pemerintah Daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.
11) Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi Pemerintah Daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

12) Penyajian dan pengungkapan investasi jangka panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CALK. Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

4.2.9.2. Akuntansi Aset Tetap

Definisi Aset Tetap

a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
c. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
d. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
e. Masa manfaat adalah:
   - ✓ Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
   - ✓ Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
f. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
g. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
h. Klasifikasi aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam

klasifikasi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

i. Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

j. Peralatan dan mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

k. Gedung dan bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

l. Jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
   - ✓ Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
   - ✓ Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
   - ✓ Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
   - ✓ Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

m. Aset tetap lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

n. Aset tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah set tetap renovasi.

o. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang

proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

p. Klasifikasi aset tetap secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan Aset Tetap

1) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
2) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Berwujud;
   b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
   c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
   d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
   e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
   f. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
3) Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
4) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
5) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
6) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti

pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengukuran Aset Tetap

1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
2) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
4) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
5) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
6) Komponen biaya perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Komponen Biaya Perolehan

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
1	*2*
Tanah	Harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
Peralatan dan Mesin	Harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Gedung dan bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
Jalan, Irigasi & Jaringan	Biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
1	*2*
Aset Tetap Lainnya	Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
	Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk aset tetaprenovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

7) Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*).
8) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
9) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

a) Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
b) Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset perjanjian kerjasama fasilitas sosial dan fasilitas umum

a) Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
b) Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos atau fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam BAST. Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos atau fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos atau fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

a) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
b) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang

diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

c) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai- bukukan (*written down)* tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

a) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

b) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non-pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

c) Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

d) Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan *(Subsequent Expenditures)*

a) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*Subsequent Expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*Subsequent Expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.

b) Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
   a) bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
   b) bertambah umur ekonomis; dan/atau
   c) bertambah volume; dan/atau
   d) bertambah kapasitas produksi.
2. Terdapat perubahan bentuk fisik semula, kecuali peralatan dan mesin dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan dan peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 Kw dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 Kw.
3. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang menjadi jalan beraspal.
4. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m2 menjadi 500 m2 .

5. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).

c) Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

d) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pemeliharaan dan perbaikan, pengeluaran untuk persatuan peralatan dan serta pengeluaran untuk gedung dan bangunan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang kapitalisasi.

e) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran tanah, jalan/irigasi /jaringan, dan asset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

f) Pengeluaran yang sifatnya rutin dan berkala untuk memperbaiki/memelihara aset tetap dalam kondisi normalnya termasuk didalamnya pengeluaran untuk suku cadang, merupakan pengeluaran yang substansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun nilainya melebihi batas minimal kapitalisasi.

Penyusutan

1. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*) dengan perhitungan sebagai berikut:
2. Penyusutan dihitung per tahun dari nilai perolehan. Pengakuan penyusutan aset tetap dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan

$$\text{Penyusutan Per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Nilai masa manfaat}}$$

3. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir periode.
4. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
5. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.
6. Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga, aset idle, dan aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang, disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.
7. Penyusutan tidak dilakukan terhadap aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya berupa:
   a) Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
   b) Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
8. Penambahan masa manfaat aset tetap tidak boleh melebihi masa manfaat perolehan awal atas aset tetap tersebut.
9. Semua biaya overhaul/renovasi/perbaikan yang nilainya diatas 100% maka penambahan masa manfaatnya adalah sebesar masa manfaat maksimal masing-masing jenis aset tetap.
10. Barang yang memiliki kriteria barang pecah belah seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai pakai habis tetapi dicatat sebagai barang extrakomptabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah dan rusak.

11. Barang berupa *flashdisk*/USB/sejenisnya yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis (belanja bahan pakai habis), dengan pertimbangan bahwa barang tersebut realtif mudah hilang.
12. Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk pemeliharaan taman diperlakukannya sebagai persediaan (belanja barang dan jasa)

Penilaian kembali aset tetap *(Revaluation)*

a) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
b) Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

Aset tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

- ✓ penambahan;
- ✓ pelepasan;
- ✓ akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
- ✓ mutasi aset tetap lainnya.

3. Informasi penyusutan, meliputi:
   - ✓ Nilai penyusutan;
   - ✓ Metode penyusutan yang digunakan;
   - ✓ Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
   - ✓ Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
2. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
3. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
4. Pemerintah Daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam CaLK.
5. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang

perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

6. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.
7. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
8. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).
9. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Akuntansi konstruksi dalam pengerjaan

1. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
2. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan

1. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
   a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
   b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
   c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
2. Konstruksi dalam pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
3. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserah-terimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Pengukuran konstruksi dalam pengerjaan

1. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
   a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
   b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
   c) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
3. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
   a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
   b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
   c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
   d) Biaya penyewaaan sarana dan prasarana;
   e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.

4. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
   a) Asuransi;
   b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
   c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Pengungkapan konstruksi dalam pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
d) Uang muka kerja yang diberikan; dan
e) Retensi.

4.2.9.3. Dana Cadangan

1. Definisi dana cadangan
   a) Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
   b) Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan Peraturan Daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.
   c) Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
2. Pengakuan dana cadangan

Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.

3. Pengukuran dana cadangan
   a) Dana cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
   b) Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.
   c) Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan.
   d) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah dana cadangan.
4. Penyajian dan pengungkapan dana cadangan
   a) Dana cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok aset non lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK.
   b) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos PAD lainnya, kemudian ditambahkan dalam dana cadangan dengan mekanisme pembentukan dana cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam CaLK

4.2.9.4. Aset Lainnya

1. Definisi aset lainnya
   a) Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
   b) Termasuk di dalam aset lainnya adalah:
      1. Tagihan piutang penjualan angsuran;
      2. Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah;
      3. Kemitraan dengan pihak ketiga;
      4. Aset tidak berwujud;
      5. Aset lain-lain.

c) Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

d) Jenis aset kemitraan dengan pihak ketiga adalah:

1. Aset kerjasama/kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan Kerjasama / kemitraan.
2. Bangun Guna Serah-BGS (*Build Operate Transfer*–BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.
3. Bangun Serah Guna-BSG (*Build Transfer Operate*–BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
4. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara (BMN) oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.

e) Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

f) Aset tidak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

g) Jenis aset tidak berwujud adalah:

1. Goodwill

   Adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/ saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2. Hak Paten/Hak Cipta;

   Adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

3. Royalti;

   Adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

4. *Software*;

   Software komputer yang masuk dalam kategori aset tidak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.

5. Lisensi;

Adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

6. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang;

   Adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Salah satu hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah *Detail Engineering Design* (DED).

7. Aset tidak berwujud lainnya;

   Merupakan jenis aset tidak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tidak berwujud yang ada.

8. Aset tidak berwujud dalam pengerjaan;

   Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tidak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tidak berwujud dalam pengerjaan (*intangible asset-work in progress*) dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tidak berwujud yang bersangkutan.

h) Aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan

karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

i) Klasifikasi aset lainnya secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

2. Pengakuan aset lainnya

a) Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

b) Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.

c) Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria:

1. Telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
2. Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.

d) Kemitraan dengan pihak ketiga diakui saat:

1. Aset kerjasama/kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
2. Aset kerjasama/kemitraan berupa gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
3. Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya utang kemitraan dengan pihak ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah

diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.

4. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
5. Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam BAST barang.
6. Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
7. Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari "aset lainnya" menjadi "aset tetap" sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

e) Aset tidak berwujud diakui pada saat:

Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tidak berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan

f) Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalan aset lain-lain.

3. Pengukuran aset lainnya

a) Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

b) Pengukuran tagihan penjualan angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset bersangkutan yang umurnya lebih dari satu tahun.

c) Pengukuran tuntutan ganti rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

(SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K).

d) Pengukuran aset berdasarkan kemitraan dengan pihak ketiga dinilai berdasarkan:

1) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
2) Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam kerjasama/kemitraan dicatat sebagai penyertaan kerjasama/kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
3) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada Pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

e) Aset tidak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tidak berwujud hingga siap untuk digunakan dan aset tidak berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

f) Biaya untuk memperoleh aset tidak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang

membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

g) Pengukuran aset tidak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

1) Aset tidakberwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tidak berwujud di kemudian hari.
3) Aset tidak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

h) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tidak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

i) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya.

j) Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.

k) Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang- undangan.

4. Penyajian dan pengungkapan aset lainnya

Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK

a. Pengungkapan tagihan penjualan angsuran di laporan keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan

daerah, misalnya klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut debitur.

b. Pengungkapan tuntutan ganti rugi di laporan keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi tuntutan ganti rugi menurut nama pegawai.

c. Pengungkapan kemitraan dengan pihak ketiga di laporan keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya.

d. Aset tak berwujud disajikan dalam Neraca sebagai bagian dari “aset lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan atas aset tidak berwujud antara lain sebagai berikut:
   1. Masa manfaat dan metode amortisasi;
   2. Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa aset tidak berwujud;
   3. Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan aset tidak berwujud.

e. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak dapat diamortisasi.

f. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasikan harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tidak terbatas menjadi terbatas, harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.

g. Aset tidak berwujud diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Namun demikian, pada saatnya

suatu aset tidak berwujud harus dihentikan dari penggunaannya.

h. Beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tidak berwujud antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, dijadikan penyertaan modal atau berakhirnya masa manfaat aset tidak berwujud sehingga perlu diganti dengan baru. Secara umum, penghentian aset tidak berwujud dilakukan pada saat dilepaskan atau aset tidak berwujud tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

i. Dalam hal penghentian aset tidak berwujud merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadi transaksi belum seluruhnya nilai buku aset tidak berwujud yang bersangkutan habis diamortisasikan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukaraannya dengan nilai buku aset tidak berwujud terkait diperlakukan sebagai pendapatan/beban dari kegiatan non operasional laporan operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada LRA. Sedangkan kas penjualan aset tidak berwujud dimaksud sebesar nilai bukunya dikelompokan sebagai kas dari aktivitas investasi pada Laporan Arus Kas.

j. Aset lain-lain disajikan di dalam kelompok aset lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Amortisasi Aset Lainnya- Aset Tak Berwujud

a. Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.

b. Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas

Pengakuan amortisasi aset lainnya-aset tak berwujud pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.

Pengukuran Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud

a. Perhitungan amortisasi menggunakan pendekatan tahunan. Amortisasi dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh beberapa bulan atau bahkan beberapa hari.
b. Pengukuran jumlahamortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.
c. Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak.

Pengungkapan Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud

Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun “akumulasi amortisasi” yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai “beban amortisasi”.

4.2.10. Akuntansi Kewajiban

Umum

1) Tujuan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

2) Ruang Lingkup

a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas Pemerintah Daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.
b. Kebijakan akuntansi ini mengatur:

1. Akuntansi Kewajiban Pemerintah Daerah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari utang dalam negeri dan utang luar negeri.
2. Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

3) Definisi Kewajiban

a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
b. Kewajiban jangka pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.
c. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek

1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

a. Definisi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.
2. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. Pendapatan Pajak, PT. Taspen, PT. Asabri, Bapertarum, dan PT. Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

b. Pengakuan Utang PFK

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang

dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

c. Pengukuran Utang PFK

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh BUD namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

d. Penyajian dan Pengungkapan Utang PFK

1. Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos ewajiban jangka pendek.
2. Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Utang bunga (*accrued interest*)

1. Definisi Utang Bunga (*Accrued Interest*)

a. Utang bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada para pemegang surat utang pemerintah karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.

b. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

2. Pengakuan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan

berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

3. Pengukuran Utang Bunga (*Accrued Interest*)

   Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh Pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

4. Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

   Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada CaLK. Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

Bagian lancar utang jangka panjang

1. Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

   Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

2. Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

   a. Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.

   b. Termasuk dalam bagian lancar utang jangka panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

3. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

   Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

4. Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

   Bagian lancar utang jangka panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian bagian lancar utang jangka panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

Pendapatan diterima dimuka

1) Definisi Pendapatan Diterima Dimuka

   Pendapatan diterima dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain.

2) Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka

   Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari Pemerintah Daerah.

3) Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka

   Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan olh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal Neraca.

4) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rincian pendapatan diterima dimuka diungkapkan dalam CaLK.

Utang beban

1) Definisi Utang Beban

a. Utang beban adalah utang Pemerintah Daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).

b. Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:

1. Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
2. Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telpon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.
3. Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
4. Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

2) Pengakuan Utang Beban

Utang beban diakui pada saat :

a. Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
b. Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada Pemerintah Daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh Pemerintah Daerah.
c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

3) Pengukuran Utang Beban

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal Neraca.

4) Penyajian dan pengungkapan Utang Beban

Utang beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam CaLK.

Utang jangka pendek lainnya

1. Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas.

2. Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul klaim kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

3. Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal Neraca.

4. Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam CaLK.

Kewajiban untuk dikonsolidasikan

1) Definisi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
   a. Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dikelola oleh PPKD dan SKPD.
   b. Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PPKD dengan SKPD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K PPKD atau Rekening Koran PPKD. Akun ini hanya ada pada unit SKPKD yang dipimpin oleh PPKD.
   c. Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun aset untuk dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan.
2) Pengakuan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

   Pengakuan kewajiban untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPKD.
3) Pengukuran Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
   a. Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.
   b. Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.
4) Pengungkapan Kewajiban untuk dikonsolidasikan kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek. Akun ini disajikan hanya pada SKPD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi.

Kewajiban jangka panjang

1) Utang Dalam Negeri

a. Definisi utang dalam negeri

1. Utang dalam negeri adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.
2. Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:
   - ✓ Utang dalam negeri - sektor perbankan;
   - ✓ Utang dalam negeri - sektor lembaga keuangan non bank;
   - ✓ Utang dalam negeri- obligasi;
   - ✓ Utang pemerintah pusat;
   - ✓ Utang pemerintah provinsi; dan
   - ✓ Utang pemerintah kabupaten/kota.

b. Pengakuan utang dalam negeri

1. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
2. Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut,atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

c. Pengukuran utang dalam negeri

1. Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam Neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

2. Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah hutang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam Neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
3. Terkait dengan utang obligasi dicatat sebesar nilai nominal, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal utang obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

d. Penyajian dan Pengungkapan utang dalam negeri

Utang dalam negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di CaLK berdasarkan pemberi pinjaman.

2) Utang Jangka Panjang Lainnya

a. Definisi utang jangka panjang lainnya

1. Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok utang dalam dan utang luar negeri, misalnya utang kemitraan.
2. Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Guna (BSG).
3. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.
4. Utang kemitraan dengan pihak ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.
5. Utang kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan

investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

b. Pengakuan utang jangka panjang lainnya

1. Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
2. Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.

3) Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya

1. Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.
2. Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya

1. Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos utang jangka panjang. Rincian utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam CaLK.
2. Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.

Kebijakan akuntansi ekuitas

1. Umum

a. Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi ekuitas mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi Ekuitas

1. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan.
2. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
3. Saldo Ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam LPE.
4. Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi ekuitas untuk dikonsolidasikan dan ekuitas SAL.
5. Akun ekuitas untuk dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD diakomodasi pada rincian akun kewajiban untuk dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD ada pada klasifikasi aset untuk dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.
6. Dengan tidak diakomodasinya akun ekuitas untuk dikonsolidasikan dan ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

2. Pengakuan Ekuitas

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

3. Pengukuran Ekuitas

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

4. Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas

   Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK.

Kebijakan akuntansi pendapatan- LRA

a. Umum Tujuan

   Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

   Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Ruang Lingkup

   1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan-LRA dalam penyusunan LRA.
   2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi Pendapatan LRA

   1. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
   2. RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
   3. SAL adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

4. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
5. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
6. Pendapatan LRA terdiri dari:
   - ✓ Pendapatan Asli Daerah-LRA;
   - ✓ Pendapatan Transfer-LRA;
   - ✓ Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA.

d. Pengakuan Pendapatan LRA

1. Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya.
2. Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:
   - ✓ Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
   - ✓ Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
   - ✓ Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
   - ✓ Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

- ✓ Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

e. Pengukuran Pendapatan LRA

1. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

1) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan LRA

a. Pendapatan-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:

- ✓ Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- ✓ Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
- ✓ Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
- ✓ Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2) Pendapatan Asli Daerah-LRA

a. Definisi Pendapatan Asli Daerah-LRA

1. Pendapatan Asli Daerah-LRA adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam

periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.

2. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah).

b. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah-LRA

Pendapatan Asli Daerah-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.

c. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LRA

Pendapatan Asli Daerah-LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat Tanda Setoran STS).

d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah-LRA

Pendapatan Asli Daerah-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

3) Pendapatan Transfer-LRA

a. Definisi Pendapatan Transfer-LRA

Pendapatan transfer-LRA atau sering disebut dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

b. Pengakuan Pendapatan Transfer-LRA

1. Pengakuan Pendapatan Transfer-LRA adalah pada saat diterimanya pendapatan transfer-LRA pada RKUD. Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD.

2. Pendapatan transfer-LRA ini hanya diakui dan dicatat di BUD atau dicatat oleh PPKD.

c. Pengukuran Pendapatan Transfer-LRA

Pengukuran pendapatan transfer-LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.

d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer-LRA

Pendapatan transfer-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA

a. Definisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

1. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah-LRA dan pendapatan transfer-LRA (dana perimbangan).
2. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:
   - ✓ Pendapatan Hibah-LRA;
   - ✓ Dana Darurat-LRA;
   - ✓ Pendapatan Lainnya-LRA.

b. Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

1. Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada RKUD.
2. Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA diakui oleh PPKD.

c. Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Pengukuran lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada RKUD.

d. Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah–LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

Kebijakan akuntansi belanja

1) Umum

a. Tujuan

Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

2) Definisi Belanja

a. Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.

b. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan LRA.

c. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

d. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

e. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

f. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya

kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.

g. Belanja bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

h. Belanja subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

i. Belanja hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

j. Belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

k. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

l. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

m. Belanja transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

n. Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
   1. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau SKPD Pengguna Anggaran.
   2. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

o. Klasifikasi belanja secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

3. Pengakuan

   Belanja diakui pada saat:

   a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
   b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
   c. Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

4. Pengukuran

   a. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

b. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

5. Penyajian dan Pengungkapan

a. Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

1. Belanja Operasi;
2. Belanja Modal;
3. Belanja Tak Terduga;

dan dijelaskan dalam CaLK.

b. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

c. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

Kebijakan akuntansi transfer

1) Umum

a. Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan.
2. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi transfer yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

2) Definisi

a. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

b. Transfer masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

c. Transfer keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah.

d. Pendapatan transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

e. Beban transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

f. Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS.

g. Klasifikasi transfer secara terinci diuraikan dalam BAS.

3) Pengakuan

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke RKUD.
b. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada LO, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
   1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
   2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
c. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

a. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada LRA, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
b. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan LO, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa.

4) Pengukuran

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke RKUD.
b. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada LO, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Daerah.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

a. Untuk kepentingan penyusunan LRA, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
b. Untuk kepentingan penyusunan LO, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

5) Penilaian

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

a. Dalam hal terdapat pemotongan dana transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat Pemerintah Daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang Pemerintah Daerah, maka dalam LRA tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam LO. Namun jika pemotongan dana transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan

kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak Pemerintah Daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

b. Dalam hal terdapat pemotongan dana transfer karena adanya kelebihan penyaluran dana transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

6) Pengungkapan

a. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:
   1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada LRA dan realisasi pendapatan transfer pada LO beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya.
   2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
   3. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam LRA dengan realisasi pendapatan transfer pada LO.
   4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

b. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:
   1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada LRA, rincian realisasi beban transfer pada LO beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
   2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
   3. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam LRA dengan realisasi beban transfer pada LO.

4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Kebijakan akuntansi pembiayaan

1) Umum

a. Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pembiayaan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi

1. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Pembiayaan terdiri dari:
   - ✓ Penerimaan pembiayaan, dan
   - ✓ Pengeluaran pembiayaan.

2) Penerimaan Pembiayaan

a. Definisi Penerimaan Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari SiLPA, penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil

privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

2. Transaksi penerimaan pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD.

b. Pengakuan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.

c. Pengukuran Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d. Penyajian dan pengungkapan penerimaan pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

3) Pengeluaran Pembiayaan

a. Definisi Pengeluaran Pembiayaan

1. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, pembentukan dana cadangan, dan pengeluaran investasi non permanen lainnya.
2. Transaksi pengeluaran pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD.

b. Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD.

c. Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi.Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

d. Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan
e. Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

Perlakuan akuntansi atas pembiayaan dana bergulir

a. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
b. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada pengeluaran pembiayaan.
c. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah RKUD dalam APBD dikelompokkan pada penerimaan pembiayaan.
d. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui RKUD, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
e. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/BLUD yang dilakukan secara langsung (tidak melalui RKUD), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

4) Saldo Anggaran Lebih (SAL)

a. Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL)

1. SAL adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
2. Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.
3. Dalam Permendagi Nomor 90 Tahun 2019 akun ini ada dalam kategori ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian aporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan.
4. Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:
   - ✓ Surplus/Defisit-LRA;
   - ✓ Pembiayaan Netto;
   - ✓ SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan); dan
   - ✓ Perubahan SAL;

5) Surplus / defisit-LRA adalah selisih lebih / kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

6) Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

7) SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

8) Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL.

9) Akun Perubahan SAL ini tidak diakomodasi dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Dalam Permendagri

akun ini diakomodasi sebagai akun Ekuitas SAL dengan rincian Estimasi Perubahan SAL.

b. Pengakuan SAL

1. Akun SAL diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.
2. Akun ini akan menutup akun Pendapatan-LO dan beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.

c. Penyajian dan Pengungkapan SAL

SAL merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.

Kebijakan akuntansi pendapatan-LO

1) Umum

a. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam LO untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

2) Pendapatan-LO

a. Definisi Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk

Pemerintah Daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, pendapatan non operasional dan pos luar biasa. Masing- masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

3) Pendapatan-LO terdiri dari:
   - ✓ Pendapatan Asli Daerah-LO;
   - ✓ Pendapatan Transfer-LO;
   - ✓ Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO;
   - ✓ Pendapatan Non Operasional-LO; dan
   - ✓ Pos Luar Biasa-LO.

b. Pengakuan Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:
   - ✓ Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); dan/atau
   - ✓ Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
2. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa:
   - ✓ Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;
   - ✓ Dalam hal BLUD, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.
3. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
4. Bila dikaitkan dengan penerimaan kas maka pengakuan pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:
   - ✓ Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas;
   - ✓ Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan

✓ Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.

5. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka pendapatan–LO diakui pada saat terbit atau diterimanya dokumen penetapan walaupun kas belum diterima.
6. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas/ penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima.

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan-LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi dengan pertimbangan:

a. Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi

   Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas.

b. Tidak ada dokumen penetapan

   Beberapa pendapatan tidak memerlukan dokumen penetapan seperti misalnya pajak daerah dan retribusi daerah dengan sistem *self assesment* (menghitung sendiri) atau dokumen penetapan tidak diterima oleh fungsi akuntansi sampai kas diterima, maka atas transaksi tersebut dapat

dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan LO secara bersamaan saat diterimanya kas.

Selain pertimbangan di atas, pengakuan pendapatan yang dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas didasarkan atas pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya dan manfaat.

7. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan.

a. Pengukuran Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

4) Pendapatan Asli Daerah-LO

a. Definisi Pendapatan Asli Daerah-LO

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang Sah.

b. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah-LO

1. Pendapatan Asli Daerah-LO diakui pada saat telah menjadi hak bagi Pemerintah Daerah.
2. Jika dihubungkan dengan penerimaan kas pengakuan atas Pendapatan Asli Daerah-LO dilakukan sebagaimana kondisi berikut ini:
   - ✓ Pendapatan Asli Daerah-LO diakui sebelum penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada saat hak Pemerintah Daerah sudah terjadi meskipun kas belum diterima. Kondisi ini diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi maupun terbitnya Bukti Memorial Lainnya.
   - ✓ Pendapatan Asli Daerah-LO diakui bersamaan penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada beberapa pendapatan asli daerah-LO yang tidak ada dokumen penetapan sehingga dapat diakui bersamaan dengan penerimaan kas. Kondisi ini dapat diakui dengan berdasarkan bukti setoran seperti Bukti Penerimaan Kas, Surat Tanda Setoran, Nota Kredit, serta bukti setoran pendapatan lainnya yang sah.
   - ✓ Pendapatan Asli Daerah-LO diakui setelah penerimaan kas. Kondisi ini terjadi ketika pendapatan asli daerah-LO belum menjadi hak pada periode akuntansi namun kas sudah diterima. Kondisi ini diakui berdasarkan Nota Kredit, Surat Tanda Setoran, atau Bukti lain yang sah. Bukti Memorial, ataupun dokumen lainnya yang sah.
3. Pengakuan yang dilakukan dengan kondisi bersamaan dengan penerimaan kas memperhatikan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) pada akhir periode

akuntansi atau pada saat penyusunan laporan keuangan agar hak yang disajikan dalam Laporan Keuangan wajar, tidak disajikan kurang (*understated*) maupun lebih (*overstated*).

c. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LO

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LO diukur sesuai jumlah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan tersebut yang dilakukan berdasarkan azas bruto dan tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya untuk mendapatkannya.

d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah-LO Pendapatan Asli Daerah-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

5) Pendapatan Transfer-LO

Definisi Pendapatan Transfer-LO

1. Pendapatan Transfer-LO adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
2. Alokasi Pendapatan Transfer-LO untuk Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Tentang Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak-LO, Dana Alokasi Umum-LO, Dana Alokasi Khusus-LO dan Dana Penyesuaian-LO bagi (yang diterbitkan tiap tahun) dan didistribusikan setiap periode berdasarkan Nota Kredit dari Bank.
   a. Pengakuan Pendapatan Transfer-LO
   1. Pengakuan Pendapatan Transfer-LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
   2. Pengakuan Pendapatan Transfer-LO hanya dilakukan di PPKD.

b. Pengukuran Pendapatan Transfer-LO

Pengukuran Pendapatan Transfer-LO dilakukan berdasarkan jumlah yang diterima di RKUD.

c. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer-LO Pendapatan Transfer-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Pendapatan Transfer-LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

6) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO

a. Definisi Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

1. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah-LO dan Pendapatan Transfer-LO.
2. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO terdiri dari:
   - ✓ Pendapatan Hibah-LO;
   - ✓ Dana Darurat-LO;
   - ✓ Pendapatan Lainnya-LO.

b. Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

1. Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah pada saat pendapatan ini di terima di RKUD.
2. Pendapatan Hibah-LO diakui pada saat di terima di RKUD.
3. Dana Darurat-LO terkait dengan sifat ketidakpastiannya maka diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya Kas di Kas Daerah
4. Pendapatan Lainnya-LO diakui pada saat telah menjadi hak Pemerintah Daerah berdasarkan dokumen yang sah.

c. Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

1. Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO dilakukan sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD.
2. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut.

d. Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

7) Pendapatan Non Operasional-LO

a. Definisi Pendapatan Non Operasional-LO

i. Pendapatan Non Operasional-LO adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama Pemerintah Daerah dan diterima secara tidak rutin tergantung dari timbulnya suatu transaksi.

ii. Pendapatan Non Operasional-LO terdiri dari:

1. Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO.
2. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO.
3. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO.

b. Pengakuan Pendapatan Non Operasional-LO

i. Pengakuan Pendapatan Non Operasional-LO pada saat hak atas pendapatan timbul.

ii. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

c. Pengukuran Pendapatan Non Operasional- LO

Pendapatan Non Operasional-LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak yang diterima.

d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Non Operasional-LO

Pendapatan non operasional-LO disajikan dalam LO setelah pendapatan operasional sebelum pos luar biasa.

Rincian dari pendapatan non operasional-LO dijelaskan dalam CaLK.

8) Pendapatan Luar Biasa-LO

a. Definisi Pendapatan Luar Biasa-LO

Pendapatan luar biasa adalah pendapatan luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

b. Pengakuan Pendapatan Luar Biasa-LO

1. Pendapatan luar biasa-LO diakui pada saat hak atas pendapatan luar biasa timbul.
2. Adanya ketidakpastian serta kejadian yang terjadi di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan maka pendapatan ini diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya kas (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi.

c. Pengukuran Pendapatan Luar Biasa- LO

Pendapatan luar biasa-LO diukur berdasarkan azas bruto atau tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut dan diukur berdasarkan jumlah nominal atas pendapatan tersebut.

d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Luar Biasa-LO

Pendapatan luar biasa-LO disajikan dalam LO setelah pendapatan non operasional. Rincian dari pendapatan non operasional-LO dijelaskan dalam CaLK.

Kebijakan akuntansi beban

1. Umum

a. Tujuan

Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan

pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

2. Beban

a. Definisi Beban

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Beban terdiri dari:
   - ✓ Beban operasi;
   - ✓ Beban transfer;
   - ✓ Beban non operasional; dan
   - ✓ Beban luar biasa.

b. Pengakuan Beban

1. Beban dapat diakui pada saat:
   - ✓ Timbulnya kewajiban;
   - ✓ Terjadinya konsumsi aset; dan
   - ✓ Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
3. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

   Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

   ✓ Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
   ✓ Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
   ✓ Beban diakui setelah pengeluaran kas.

5. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Contoh dari transaksi ini misalnya ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan Barang/diterimanya tagihan dari pihak ketiga dan dokumen transaksi lainnya. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
6. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan dalam periode pelaporan. Beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas yaitu pada saat Bendahara Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran dalam mekanisme GU.
7. Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan

memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan.

8. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas. Perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban karena belum memperoleh manfaat dari barang atau jasa. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai beban dibayar di muka (akun neraca), aset tetap dan aset lainnya.

c. Pengukuran Beban

Beban diukur sesuai dengan:

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

d. Penyajian dan Pengungkapan Beban

Beban disajikan dalam LO. Rincian dari beban dijelaskan dalam CaLK.

3. Beban Operasi

a. Definisi Beban Operasi

1. Beban operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
2. Beban operasi terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban

bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lain

3. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaaan aset tetap.
4. Beban barang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
5. Beban bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
6. Beban subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
7. Beban hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

8. Beban bantuan sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
9. Beban penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.
10. Beban penyisihan piutang merupakan cadangan piutang yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait kolektibilitas piutang.
11. Beban lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut diatas.

b. Pengakuan Beban Operasi

1. Beban pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pegawai. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah.
2. Beban pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan tanggal tagihan.
3. Beban pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui pada saat Bendahara Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran.
4. Beban barang dan jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau BAST ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.
5. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai

beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

6. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
7. Beban hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.
8. Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.
9. Beban penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
10. Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
11. Beban lain-lain diakui pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.

c. Pengukuran Beban Operasi

Pengukuran beban operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

d. Penyajian dan Pengungkapan Beban Operasi

Beban operasi disajikan dalam LO.Rincian dari beban operasi dijelaskan dalam CaLK.

4. Beban Transfer

a. Definisi Beban Transfer

Beban transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Pengakuan Beban Transfer

Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

c. Pengukuran Beban Transfer

Beban transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah.

d. Penyajian dan Pengungkapan Beban Transfer

Beban transfer disajikan dalam LO. Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam CaLK.

5. Beban Non Operasional

a. Definisi Beban Non Operasional

Beban non operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

b. Pengakuan Beban Non Operasional

1. Pengakuan beban non operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban.
2. Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas

c. Pengukuran Beban Non Operasional

Beban non operasional diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. beban non operasional diukur dengan mata uang rupiah.

d. Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional

Beban non operasional disajikan dalam LO. Rincian dari beban non operasional dijelaskan dalam CaLK.

6. Beban Luar Biasa

a. Definisi Beban Luar Biasa

Beban luar biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

b. Pengakuan Beban Luar Biasa

1. Pengakuan beban luar biasa adalah pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.
2. Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas.

c. Pengukuran Beban Luar Biasa

Beban luar biasa diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban Luar Biasa diukur dengan mata uang rupiah.

1. Beban luar biasa disajikan dalam LO.
2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam LO dan disajikan sesudah surplus/defisit dari kegiatan non operasional.
3. Rincian dari beban luar biasa dijelaskan dalam CaLK.

Kebijakan akuntansi koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan

1. Umum

a. Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

b. Ruang Lingkup

1. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.
2. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi

1. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
3. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
4. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
5. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

6. Penyajian kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.
7. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

2. Koreksi Kesalahan
   a. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
   b. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
   c. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
      1. Kesalahan yang tidak berulang;
      2. Kesalahan yang berulang dan sistemik.
   d. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
      1. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
      2. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
   e. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis

transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

f. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

g. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

h. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

i. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

j. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal

mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun SAL.

k. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

l. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

m. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

n. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

o. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah

diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun SAL.

p. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

q. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

r. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas (LAK) tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

s. Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.

3. Perubahan Kebijakan Akuntansi

a. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

b. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

c. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
2. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

d. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

e. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan diungkapkan dalam CaLK.

f. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh, dilakukan:

1. Penyajian kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.
2. Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

4. Perubahan estimasi akuntansi

a. Agar memperoleh laporan keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

b. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

c. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CaLK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

5. Operasi yang tidak dilanjutkan

a. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.

b. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada, harus diungkapkan pada CaLK.

c. Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam laporan keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada laporan keuangan.

d. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun laporan keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau

sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

e. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:
   1. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
   2. Fungsi tersebut tetap pada.
   3. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
   4. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

6. Peristiwa luar biasa
   a. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
   b. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
   c. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar

anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

d. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu.

   Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

e. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

f. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
   1. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
   2. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
   3. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
   4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam CaLK.

4.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

1) Tujuan

Tujuan dari pernyataan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi properti investasi dan pengungkapan yang terkait.

2) Ruang Lingkup

a. Pernyataan kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pemerintah daerah tidak termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

b. Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk:

1. aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan
2. hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui.

3) Definisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertiannya:

a. Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan asset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

c. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.

d. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

e. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif;
2. atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

f. properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasa (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

4) Properti Investasi

a. Pemerintah daerah dapat memiliki digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk properti investasi yang peningkatan nilai dengan keadaan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah mengelola portofolio properti dengan basis komersial; atau
2. Pemerintah daerah memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan yang diperoleh untuk membiayai hasil menggunakan program dan kegiatannya.

b. Properti Investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Hal ini yang membedakan properti investasi dari property yang digunakan sendiri (aset tetap).

c. Berikut ini adalah karakteristik properti investasi:

1. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang (lebih dari 12 bulan sejak dari tanggal neraca periode pelaporan) dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain (antar pemerintah daerah, pemerintah desa, atau instansi vertikal) dalam jangka pendek (dalam 12 bulan sejak dari tanggal Neraca periode pelaporan). Informasi mengenai penguasaan dan/atau kepemilikan dapat berdasarkan pada dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan;
2. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Berdasarkan kepada dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan, apabila pemerintah daerah belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain (antar pemerintah daerah, pemerintah desa, atau instansi vertikal) dalam jangka pendek, yaitu dalam 12 bulan sejak dari tanggal Neraca periode pelaporan, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
3. bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah (atau dikuasai oleh pemerintah daerah melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dipersamakan;

4. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi, sesuai dengan dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan;
5. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan.

d. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:
   1. properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam masyarakat, contohnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan;
   2. properti yang masih dalam proses pengembangan atas nama pihak ketiga sesuai dengan perjanjian pembangunan atau atau perikatan yang dipersamakan;
   3. properti yang secara substansi digunakan sendiri, termasuk di antaranya properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual berdasarkan dokumentasi formal

penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan;

4. properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dipersamakan;
5. properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan tarif sewa di bawah harga pasar;
6. properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur aset tetap.
7. properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan.
8. properti yang keseluruhannya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan.

e. Dalam hal pemerintah daerah memiliki aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, penentuan klasifikasi aset properti investasi adalah sebagai berikut:

1. apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, pemerintah daerah mempertanggungjawab kannya secara terpisah;
2. apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan (kurang dari atau sama dengan 20% dari aset tetap) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
3. Dalam beberapa kasus, Pemerintah daerah menyediakan tambahan layanan kepada penyewa properti yang dimilikinya. Pemerintah daerah memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan kepada para penyewa properti tidak signifikan terhadap nilai keseluruhan perjanjian. Contohnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan layanan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung. Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepad dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas satuan kerja lainnya (entitas yang laporan keuangannya dikonsolidasikan). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansi penyewanya. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah daerah menetapkan suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada pemerintah daerah lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan

konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana diatur dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tetap.

4. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan pada kedua entitas pelaporan.

5) Pengakuan

a. Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria:
   1. besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah daerah di masa yang akan dating dari aset properti investasi; dan
   2. biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

b. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, pemerintah daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Suatu kepastian bahwa pemerintah daerah akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan resiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.

c. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Bukti perolehan dapat berdasarkan kontrak/perjanjian kerjasama atau berita acara serah terima (BAST) atau surat ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah. Apabila suatu pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada properti investasi diperoleh bukan dari tanggal perolehan.

d. Pemerintah daerah mengevaluasi semua biaya properti investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada

awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti, investasi.

e. Berdasarkan prinsip pengakuan pada paragraf 14, pemerintah daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi. Biaya-biaya tersebut diakui sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.

f. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip pengakuan, pemerintah daerah mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian pengakuan dari kebijakan akuntansi ini.

6) Pengukuran Saat Pengakuan Awal

a. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan.

b. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

c. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya.

d. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:

1. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
2. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
3. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya pembangunan masa atau lain yang terjadi selama pengembangan properti investasi.

e. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.

f. Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.

g. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai abilitas.

h. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.

i. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non- moneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar, kecuali

1. transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau
2. nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.

j. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki komersial atau tidak, pemerintah daerah mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
   1. konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
   2. nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
   3. selisih antara (1) atau (2) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

k. Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.

l. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
   1. variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
   2. probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika pemerintah daerah dapat menentukan nilai

wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.

m. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

7) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

a. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

b. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur tentang Aset Tetap.

c. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

d. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

e. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

f. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.

g. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan masa manfaat atas property investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

h. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.

i. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Pemerintah daerah harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.

j. Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis seperti yang diuraikan pada paragraf (i), pemerintah daerah harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:

   1. harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
   2. harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan

3. proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.

k. Dalam melakukan revaluasi pemerintah daerah dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

8) Penyajian Properti Investasi

a. Properti investasi diklasifikasikan sebagai aset non lancar pada neraca.

b. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

c. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, pemerintah daerah dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan pemerintah daerah tidak akan di masa memanfaatkan properti tersebut mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan asset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

9) Pengungkapan

a. Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan properti investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:

1. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. metode penyusutan yang digunakan;
3. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

4. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
5. Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
   - ✓ penambahan pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
   - ✓ penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
   - ✓ pelepasan
   - ✓ penyusutan
   - ✓ alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
   - ✓ perubahan lain.
6. apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
   - ✓ uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
   - ✓ dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
   - ✓ tanggal efektif penilaian kembali;
   - ✓ nilai tercatat sebelum revaluasi
   - ✓ jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
   - ✓ nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
7. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
8. apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.;
9. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila pemerintah daerah

melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat property tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;

10. apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
11. jumlah yang diakui dalam surplus/defisit untuk:
    - ✓ penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
    - ✓ beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
    - ✓ beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
12. Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
13. properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain; dan
14. informasi lain terkait dengan properti investasi.

10) Alih Guna

a. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

1. dimulainya penggunaan properti investasi oleh pemerintah daerah, dialih gunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
2. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
3. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialih gunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
4. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

b. Paragraf a (2) mengharuskan pemerintah daerah mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika pemerintah daerah memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka pemerintah daerah tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan. Demikian juga jika pemerintah daerah mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti investasi.

c. Pemerintah daerah dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.

d. Pemerintah daerah menggunakan metode biaya sehingga alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri, dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan.

11) Pelepasan

a. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat:
   1. pelepasan; atau
   2. ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen; dan
   3. tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan.

b. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.

c. Pemerintah daerah mengakui biaya penggantian untuk bagiantertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut dan jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi.

d. Pemerintah daerah dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun apabila jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat dilakukan secara praktis.

e. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dan diakui dalam tercatat asset jumlah dari pelepasan dan surplus/defisit Non Operasional-LO dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

f. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada nilai wajar. Jika pembayaran awalnya diakui sebesar properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah

nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.

g. Pemerintah daerah mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.

h. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

12) Ketentuan Transisi

a. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi properti investasi ini dengan mengklasifikasikan asetnya ke dalam properti investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai perolehannya.

b. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi ini secara prospektif.

4.4. Kebijakan Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa Pemberi Konsesi

1. Tujuan

Tujuan dari pernyataan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi perjanjian konsesi jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah selaku pemberi konsesi.

2. Ruang Lingkup

a. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi ini untuk akuntansi dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan yang bertujuan umum atas perjanjian konsesi jasa.

b. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang bertujuan umum.

c. Perjanjian konsesi jasa dalam ruang lingkup kebijakan akuntansi ini adalah perjanjian yang melibatkan mitra untuk menyediakan jasa publik yang berkaitan dengan aset konsesi jasa atas nama pemberi konsesi.

d. Perjanjian di luar ruang lingkup kebijakan akuntansi ini adalah perjanjian yang tidak terkait dengan penyediaan jasa pelayanan publik dan komponen penyediaan jasa pelayanan publik dimana aset yang digunakan tidak dikendalikan oleh pemberi konsesi (misalnya alih daya, kontrak jasa, atau privatisasi).

e. Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk akuntansi bagi mitra konsesi, dimana pedoman akuntansi untuk perjanjian konsesi jasa bagi mitra konsesi mengikuti standar akuntansi keuangan yang relevan.

3. Definisi

a. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertiannya:

1. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi 2 konsesi dan mitra dimana:
   - ✓ mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
   - ✓ mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.
2. Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.
3. Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.
4. Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa *public* yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.

5. Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:
   - ✓ disediakan oleh mitra, yang:
     - ➢ dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
     - ➢ merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
   - ✓ disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
     - ➢ merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi;
     - ➢ merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

4. Pengakuan Dan Pengukuran Aset Konsesi Jasa
   a. Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:
      1. pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersbut diberikan, serta penerapan tarifnya; dan
      2. pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.
   b. Kebijakan akuntansi ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika persyaratan dalam paragraf (a) angka (1) terpenuhi.
   c. Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas asset konsensi jasa yang diakui berdasarkan paragraf (a) (atau paragraf (b) - selama umur aset) sebesar nilai wajar, kecuali atas asset yang dimiliki pemberi konsesi sebagaimana diatur dalam paragraf (d)
   d. Ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan sebagaimana dimaksud paragraf (a) angka (1) dan paragraf (a) angka (2) (atau paragraf (b) - untuk selama umur

aset) pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset. Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap atau Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud

e. Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra, dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset sebagaimana dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tetap atau Kebijakan Akuntansi Aset Tidak Berwujud. Sebagai contoh, suatu konstruksi jembatan yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan jalan sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya. Komponen asset konsesi jasa tersebut disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi teknis aset dimaksud dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa.

f. Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasikan ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap atau Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.

5. Pengakuan dan pengukuran kewajiban

a. Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud pada paragraf 4 huruf (a) (atau paragraf (b) - untuk selama umur aset), pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsensi tidak mengakui

kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 4 huruf (d), kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra sebagaimana dijelaskan dalam paragraph 5 huruf (b).

b. Pengakuan kewajiban sebagaimana dimaksud paragraf 5 huruf (a) pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud paragraf 4 huruf (c), disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi. Sifat kewajiban yang diakui, ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum perjanjian yang relevan.

c. Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari:

1. Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (*financial liability model*);
2. Pemberian hak usaha kepada mitra (*grant of a right to the operator model*), misalnya:
   - ✓ Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau
   - ✓ pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan asset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa layanan public

6. Skema kewajiban keuangan
   a. Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa atau syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban sebagaimana dimaksud pada paragraf 5 huruf (a) sebagai kewajiban keuangan. perolehan,
   b. Pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap:
      1. Jumlah tertentu atau dapat ditentukan, atau
      2. Kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau yang dapat ditentukan sebagaimana dimaksud dalam paragraph 6 huruf (b) angka 1, walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu.
   c. Perlakuan atas kewajiban keuangan yang diakui sebagaimana paragraf 5 huruf (a) berpedoman pada standar akuntansi mengenai instrument keuangan, kecuali untuk hal yang telah diatur dan dipandu dalam Kebijakan Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi ini.
   d. Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai:
      1. Pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui sebagaimana dimaksud paragraph 5 huruf (a);
      2. Bagian tagihan atas biaya keuangan; dan
      3. Bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.
   e. Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan sebagaimana dimaksud paragraf 6 huruf (d) angka 2 dan bagian tagihan atas

ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra sebagaimana dimaksud paragraf 6 huruf (d) angka 3 sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban.

f. Ketika kompenen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa
   1. dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik.
   2. Tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan estimasi.

7. Skema pemberian hak usaha kepada mitra
   a. Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain asset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mencatat pengakuan kewajiban sesuai paragraf 5 huruf (a) sebagai bagian tangguhan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra.
   b. Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tangguhan) sebagaimana dimaksud berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa. paragraf 7 huruf (a)
   c. Pada saat pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsensi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain

aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, maka pertukaran dimaksud merupakan transaksi yang menimbulkan pendapatan. Pada saat hak dimaksud diberikan kepada mitra berlaku selama masa konsesi, pemberi konsesi tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran dimaksud. Pemberi konsesi mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban pendapatan tangguhan.

d. Dalam hal skema pemberian hak usaha kepada mitra terdapat pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra sehubungan pemakaian aset konsesi jasa yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat, pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban pendapatan tangguhan. Atas hal ini, pemberi konsesi memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian asset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diakui sebagai beban.

8. Membagi Perjanjian

a. Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan sebagaimana dimaksud paragraf 6 huruf (a) dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra sebagaimana dimaksud paragraf 7 huruf (a), maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul sebagaimana dimaksud paragraf 5 huruf (a) diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut

adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur sebagaimana dimaksud paragraf 5 huruf (b).

b. Pemberi konsesi mencatat masing-masing bagian kewajiban yang dimaksud dalam paragraf 8 huruf (a) berdasarkan masing-masing skema sebagaimana paragraph 6 huruf (a) sampai dengan paragraf 7 huruf (d).

9. Kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontijensi dan aset kontijensi

Pemberi konsesi mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjesi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada kebijakan akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi, dan aset kontinjensi.

10) Pendapatan Lainnya

Pemberi konsesi dari mencatat pendapatan lainnya, selain pendapatan sebagaimana dimaksud paragraf 6 huruf (a) sampai dengan paragraf 6 huruf (d), berpedoman pada kebijakan akuntansi pendapatan dari transaksi pertukaran.

11) Penyajian dan pengungkapan

a. Pemberi konsesi menyajikan informasi sesuai dengan pengaturan pada Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan.

b. Seluruh aspek perjanjian konsesi jasa dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Pemberi jasa mengungkapkan informasi berikut ini terkait dengan perjanjian konsesi jasa pada setiap periode pelaporan:

1. Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan dipersamakan sehubungan dengan perjanjian konsesi jasa;
2. Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat mempengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang);

3. Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
   - ✓ Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
   - ✓ Hak untuk mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
   - ✓ Nilai buku konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
   - ✓ Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
   - ✓ Pembaharuan atau perpanjangan dan Opsi penghentian operasi konsesi jasa;
   - ✓ Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul);
   - ✓ Ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan
4. Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.

c. Pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 11 huruf (b) merupakan pengungkapan tambahan yang material sehubungan dengan adanya perjanjian konsesi jasa. Pengungkapan atas perlakuan akuntansi yang secara khusus diatur dalam kebijakan akuntansi lain, mengikuti pengungkapan sesuai kebijakan akuntansi tersebut.

d. Pengungkapan sebagaimana dimaksud paragraf 11 huruf (b) disajikan secara individual untuk setiap perjanjian konsesi jasa atau disajikan secara dari perjanjian konsesi jasa yang memiliki jenis atau kelompok kelompok perjanjian konsesi jasa merupakan suatu penggabungan keseluruhan untuk setiap kelompok perjanjian konsesi jasa. Suatu kelompok perjanjian

konsesi jasa merupakan suatu penggabungan dari perjanjian konsesi jasa yang memiliki jenis atau kelompok.

4.5. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran serta untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.

4.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA merupakan semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pengakuan

Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) No. 02 menyatakan bahwa pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya. Dengan demikian, pernyataan bahwa pendapatan diakui pada saat diterima pada RKUD sebagaimana paragraph 21 PSAP No.02 Lampiran I PPNo.71 Tahun 2010 dan paragraph 22 PSAP No.02 Lampiran II PP No.71 Tahun 2010 perlu diinterpretasikan, sehingga Pendapatan-LRA sesuai PSAP di atas mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar

negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifkasikan kedalam beberapa alternative:

1. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.

2. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak *(self assessment)* dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak.

3. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.

4. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak *(self assessment)* dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika diterima pemerintah daerah.

5. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh Pemerintah Daerah.

Pengukuran

Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

4.7. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pengakuan

Pendapatan-LO dapat di akui dengan kriteria:

a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan
   1) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;
   2) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan dari dana transfer diakui sebagai berikut:

a) Dana Bagi Hasil diakui berdasarkan realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah atau surat dari Pemerintah Pusat yang menyatakan kekurangan penyaluran dana bagi hasil.
b) Dana Alokasi Umum diakui berdasarkan Peraturan Presiden yang mengatur tentang dana transfer dan dicatat pada tahun yang berkenaan.
c) Dana Alokasi Khusus diakui pada saat terdapat klaim pembayaran oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya. Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal pengakuan pendapatan dan direalisasinya pendapatan dalam bentuk kas, pendapatan dapat diakui pada saat realisasi.

   Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifkasikan kedalam beberapa alternative:

   1. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan.

   2. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak *(self assessment)* dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan

kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan Pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang Pendapatan LO.

3. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui.

4. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak *(self assessment)* dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

5. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO pada saat pembayaran telah diterima oleh Pemerintah Daerah.

Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.8. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Sesuai dengan Paragraf 31 PSAP No.02 Lampiran I PP No.71 Tahun

2010 dan Paragraf 31 PSAP No.02 Lampiran II PP No.71 Tahun 2010 dan telah diinterpretasikan sesuai IPSAP 02, pengakuan Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Oleh karena itu, Belanja diakui pada saat:

a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.
b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
c. Kas yang dikeluarkan untuk belanja yang digunakan langsung oleh satker/SKPD, dimana pendapatan yang digunakan untuk pengeluaran Belanja tersebut tidak disetor ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

Pengukuran

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan

a. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
b. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
c. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, dan

informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.9. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Beban diklasifikasi menurut:

Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Berdasarkan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional (LO), beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Berikut adalah klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas beban tersebut:

Pengakuan

Beban dapat diakui dengan kriteria:

a. Saat timbulnya kewajiban

   adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

b. Saat terjadinya konsumsi aset

   adalah saat pengeluaran kas atau timbulnya kewajiban kepada pihak lain (pencatatan pembelian persediaan dengan metode periodik) dan/atau konsumsi asset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (dengan metode perpetual).

c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

   adalah saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

   Beban diakui pada saat diterimanya Bukti pengeluaran/kwitansi/ sejenisnya untuk pengeluaran yang menggunakan mekanisme

UP/GU/TU, sedangkan untuk pengeluaran yang menggunakan mekanisme LS dengan menggunakan dokumen tagihan seperti Berita Acara Serah Terima 100 % atau dokumen serah terima lainnya yang sejenis.

Beban dibayar dimuka

Apabila terjadi perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran kas daerah, maka kebijakan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar diMuka (akun neraca).

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.10. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer merupakan pengeluaran uang dari provinsi kepada kabupaten/kota atau dari kabupaten/kota kepada desa, yaitu Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi.

Transfer terdiri dari:

a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Transfer Bagi Hasil Pendapatan merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dari suatu pemerintah daerah kepemerintahan daerah yang lebih rendah.

b. Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan, baik yang bersifat umum

maupun bersifat khusus termasuk bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pengakuan

Transfer diakui pada saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pengukuran

Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.11. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup deficit atau memanfaatkan surplus anggaran.

a. Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada Pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengakuan

Sesuai Paragraf 52 PSAP 02 Lamp.I & Paragraf 52 PSAP Lamp.II PP 71/2010, penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Berdasarkan PSAP Nomor 03

Tahun 2010, Penerimaan Pembiayaan mencakup transaksi berikut:

a. Penerimaan pembiayaan yang diterima pada RKUN/RKUD;
b. Penerimaan pembiayaan pada rekening khusus, yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang;
c. Pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah BUN/BUD untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain terkait atas dana pinjaman yang dianggarkan sebagai pembiayaan.

Adapun sesuai Paragraf 56 PSAP 02 Lamp.I dan Paragraf 56 PSAP 02 Lamp.II PP 71/ 2010, Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Sesuai dengan IPSAP Nomor 03 Tahun 2010, Pengeluaran Pembiayaan mencakup transaksi berikut:

- pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan dari RKUD;
- pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui RKUD yang diakui oleh BUD.

Pengukuran

Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.12. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan dibank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah serta investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas meliputi seluruh Uang Persediaan (Sisa UP/TU), saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran, uang tunai atau simpanan dibank yang belum disetorkan ke Kas Daerah, maupun uang tunai atau simpanan dibank yang digunakan

4.13. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisi korendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. (PSAP 06 paragraf 6 dan 10).

Dengan memperhatikan kriteria pada definisi tersebut, maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi pemerintah daerah karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga, tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:

a) Surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
b) Surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah daerah; atau
c) Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Investasi yang termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

a) Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (duabelas) bulan dan Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolvingdeposits*) sampai 12 bulan;
b) Surat Utang Negara (SUN); dan
c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Pengukuran

✓ Deposito berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
✓ Surat Utang Negara (SUN) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat

membentuk nilai pasar.

- ✓ Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.

Pengakuan

Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- ✓ Manfaat ekonomi dan manfaat social atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- ✓ Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/ mengidentifikasikan biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.

Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cashdividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan (Pendapatan Asli Daerah).

4.14. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Sesuai dengan PMK No.238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) pada bagan akun standar, piutang dibagi menjadi:

a) Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan dapat terbagi berdasarkan peristiwa yang mendasari sesuai dengan Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang- PP No.71 Tahun 2010, yang dibedakan menjadi:

- Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan / pungutan pendapatan daerah.

  Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain berdasarkan Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, serta peraturan daerah yang berlaku dipemerintah daerah yang meliputi Piutang Lain-lain PAD yang Sah. (Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang- PP No.71 Tahun 2010).

- Piutang berdasarkan perikatan perjanjian

  Piutang berdasarkan perikatan perjanjian adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian meliputi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Bantuan Keuangan, Piutang Hibah, dan Piutang Pendapatan Lainnya. (Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang- PP No.71 Tahun 2010).

b) Piutang Lainnya

Sesuai dengan Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang, Piutang Lainnya berdasarkan peristiwa yang mendasari dapat dibedakan menjadi:

- Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi

  Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah seperti Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

- Piutang berdasarkan peristiwa lainnya

  Piutang berdasarkan peristiwa lainnya, adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena peristiwa lainnya selain empat peristiwa diatas. Piutang ini meliputi Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Uang Muka Belanja, Beban dibayar Dimuka dan Uang Muka yang Harus Dipertanggungjawabkan.

4.15. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran. Pencatatan persediaan:

- ✓ Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang menerapkan perhitungan Persediaan secara **periodik** berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relative rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, benda berharga, dan yang sejenis.
- ✓ Pengukuran nilai persediaan itu sendiri dilakukan dengan menggunakan Harga Pembelian Terakhir (nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali)

4.16. Kebijakan Akuntansi Aset Non Lancar

a. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang–barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

a) barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;
b) bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;

c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
d) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

Pengukuran

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran. Pencatatan persediaan:

- ✓ Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang menerapkan perhitungan Persediaan secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relative rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, benda berharga, dan yang sejenis.
- ✓ Pengukuran nilai persediaan itu sendiri dilakukan dengan menggunakan Harga Pembelian Terakhir (nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali)

4.17. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yaitu:

a) Tanah;

b) Peralatandan Mesin;

c) Gedung dan Bangunan;

d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

e) Aset Tetap Lainnya;

f) Konstruksi dalam Pengerjaan;

g) Akumulasi Penyusutan.

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai asset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

a) berwujud;

b) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

c) biaya perolehan asset dapat diukur secara andal;

d) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan;

e) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan asset tetap akan andal bila asset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah, saat pengakuan asset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Yang dimaksudkan dengan biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu asset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan asset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Apabila penilaian asset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan asset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya

perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada. Biaya perolehan suatu asset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa asset tersebut kekondisi yang membuat asset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

4.18. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kebijakan akuntansi kewajiban akan mengatur hal-hal yang terkait dengan kewajiban. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena:

a. Penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional;
b. Perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah;
c. kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya; dan
d. Kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

4.19. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit-LRA

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

Pengakuan

Pengakuan atas ekuitas tergantung dari saat pengakuan aset dan kewajiban.

Pengukuran

Pengukuran atas ekuitas tergantung dari pengukuran atas aset dan kewajiban.

V. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Penjelasan masing-masing Akun LRA sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan - LRA

Jumlah Realisasi Pendapatan Tahun 2025 sebesar Rp0,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, perimbangan Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1.1.1
Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan
Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	Uraian	2025
KEGIATAN OPERASIONAL		
7	**PENDAPATAN**	**0**
7.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO**	**0**
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	**0**
	JUMLAH PENDAPATAN	**0**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/operasional

5.1.2 Belanja

Pada Tahun 2025, realisasi Belanja Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat mencapai sebesar Rp**4.817.602.963,00** atau sebesar 83,67% dari anggaran sebesar **Rp5.757.560.681,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2
Rincian Belanja OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	**BELANJA DAERAH**	**5.757.560.681,00**	**4.817.602.963,00**	**83,67**	**5.710.367.125,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**5.726.895.181,00**	**4.817.602.963,00**	**84,12**	**5.699.767.125,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	3.372.347.727,00	3.215.910.471,00	95,36	3.116.472.319,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.970.677.454,00	1.220.887.447,00	61,95	1.952.468.341,00
5.1.05	Belanja Hibah	383.870.000,00	380.805.045,00	99,20	515.976.465,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	114.850.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**5.726.895.181,00**	**4.817.602.963,00**	**84,12**	**5.699.767.125,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**30.665.500,00**	**0,00**	**0,00**	**10.600.000,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.665.500,00	0,00	0,00	10.600.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**30.665.500,00**	**0,00**	**0,00**	**10.600.000,00**
	JUMLAH BELANJA	**5.757.560.681,00**	**4.817.602.963,00**	**83,67**	**5.710.367.125,00**
	SURPLUS/DEFISIT	**(5.757.560.681,00)**	**(4.817.602.963,00)**	**83,67**	**(5.710.367.125,00)**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**(5.757.560.681,00)**	**(4.817.602.963,00)**	**83,67**	**(5.710.367.125,00)**

Sumber https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

5.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2025.

LO tahun 2025 disajikan sebagai perbandingan laporan tahun sebelumnya.

5.3.1 Pendapatan - LO

Tidak ada pendapatan – LO Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang untuk periode Januari 2025 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2025.

5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah– LO

Tidak ada Pendapatan Asli Daerah per 01 Januari 2025 sampai Dengan 31 Desember 2025.

5.3.1.2 Pendapatan Transfer– LO

Tidak ada Pendapatan Transfer per 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

5.3.1.3 Lain Lain Pendapatan yang Sah- LO

Tidak ada Pendapatan Lain- lain yang Sah per 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

5.3.2 Beban Daerah

Jumlah Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp4.950.495.783,21 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2
Realisasi Beban
Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	%
8	**BEBAN**	**4.950.495.783,21**	**5.713.375.368,22**	**(13,35)**
8.1	**BEBAN OPERASI**	**4.850.162.288,00**	**5.603.073.628,00**	**(13,44)**
8.1.01	Beban Pegawai	3.215.910.471,00	3.119.778.822,00	3,08
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	1.253.446.772,00	1.852.468.341,00	(32,34)
8.1.05	Beban Hibah	380.805.045,00	515.976.465,00	(26,20)
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	0,00	114.850.000,00	(100,00)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	**4.850.162.288,00**	**5.603.073.628,00**	**(13,44)**
8.1.08	**Beban Penyusutan dan Amortisasi**	**100.333.495,21**	**110.301.740,22**	**(9,04)**
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	**100.333.495,21**	**110.301.740,22**	**(9,04)**
	JUMLAH BEBAN	**4.950.495.783,21**	**5.713.375.368,22**	**(13,35)**
	SURPLUS/DEFISIT-LO	**(4.950.495.783,21)**	**(5.713.044.717,92)**	**(13,35)**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/operasional

5.3.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang adalah Beban Operasi untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp4.850.162.288,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1
Realisasi Beban Operasi
Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1	**BEBAN OPERASI**	**4.850.162.288,00**	**5.603.073.628,00**	**(752.911.340,00)**	**(13,44)**
8.1.01	Beban Pegawai	3.215.910.471,00	3.119.778.822,00	96.131.649,00	3,08

8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.285.546.100,00	2.192.209.788,00	93.336.312,00	4,26
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	930.364.371,00	837.371.034,00	92.993.337,00	11,11
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	90.198.000,00	(90.198.000,00)	(100,00)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	1.253.446.772,00	1.852.468.341,00	(599.021.569,00)	(32,34)
8.1.02.01	Beban Barang	412.093.715,00	555.223.140,00	(143.129.425,00)	(25,78)
8.1.02.02	Beban Jasa	537.747.377,00	735.555.972,00	(197.808.595,00)	(26,89)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	0,00	6.560.000,00	(6.560.000,00)	(100,00)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	303.605.680,00	555.129.229,00	(251.523.549,00)	(45,31)
8.1.05	Beban Hibah	380.805.045,00	515.976.465,00	(135.171.420,00)	(26,20)
8.1.05.05	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	380.805.045,00	515.976.465,00	(135.171.420,00)	(26,20)
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	0,00	114.850.000,00	(114.850.000,00)	(100,00)
8.1.06.01	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	0,00	90.000.000,00	(90.000.000,00)	(100,00)
8.1.06.04	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	24.850.000,00	(24.850.000,00)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	**4.850.162.288,00**	**5.603.073.628,00**	**(752.911.340,00)**	**(13,44)**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/operasional

5.3.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang adalah Beban penyusutan dan amortisasi untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp100.333.495,21 dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.08	**Beban Penyusutan dan Amortisasi**	**100.333.495,21**	**110.301.740,22**	**(9.968.245,01)**	**(9,04)**
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	45.605.750,00	55.573.995,00	(9.968.245,00)	(17,94)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	22.454.442,55	22.454.442,55	0,00	0,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	6.587.966,66	6.587.966,67	(0,01)	(0,00)
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	25.685.336,00	25.685.336,00	0,00	0,00
JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi		**100.333.495,21**	**110.301.740,22**	**(9.968.245,01)**	**(9,04)**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/operasional

5.3.2.3 Beban Transfer

Tidak ada beban Transfer per 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

5.3.2.4 Beban Tak Terduga

Tidak ada beban Tak Terduga per 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

5.3.3 Surplus Non Operasional

Tidak ada surplus non operasional per 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

5.3.4 Defisit Non Operasional

Tidak ada defisit non operasional per 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

5.3.5 Pos Luar Biasa

Tidak ada pos luar biasa per 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

5.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1 Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas Awal tahun 2025 sebesar **Rp1.298.522.764,92** merupakan reklasifikasi dari Ekuitas akhir Tahun 2024 sebagai berikut :

1.	Ekuitas Awal 2024	Rp1.301.200.357,84
2.	Surplus / Defisit – LO	Rp(4.950.495.783,21)
3.	RK PPKD	Rp4.817.602.963,00
3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar (Koreksi Ekuitas)	Rp0,00
4.	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	4.817.602.963,00
	Ekuitas Akhir 2025	**Rp1.165.629.944,71**

5.4.2 Penambahan/Pengurangan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)

Penambahan / pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus / Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp(4.950.495.783,21).

5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Tidak ada koreksi ekuitas tahun 2025 sehingga tidak ada dampak kumulatif perubahan kebijakan / kesalahan mendasar per tanggal 31 Desember 2025.

a. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan senilai Rp.0,00.

b. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Penilaian kembali aset tetap sebesar (Rp.0,00).

c. Koreksi ekuitas

Koreksi ekuitas sebesar Rp0.

d. Pengakuan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan Tahun 2025

Pengakuan akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp. (2.261.857.570,29), rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.4.3.1
Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Uraian	Jumlah
1	Gedung dan Bangunan	(477.170.038,96)
2	Peralatan dan Mesin	(1.710.674.598,00)
3	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(74.012.933,33)
	Jumlah	(2.261.857.570,29)

e. Pengakuan Akumulasi Amortisasi atas Aset Tak Berwujud sampai dengan Tahun 2025

Pengakuan akumulasi amortisasi aset tak berwujud sebesar Rp. (57.056.008,00)

Koreksi Lainnya

Koreksi lainnya senilai Rp.0,00 merupakan koreksi atas pos-pos yang belum dibukukan sampai akhir tahun 2025, terdiri dari:

No	Uraian	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo (Rp)
1	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
2	Pelunasan Hutang Jamkesda	-	-	-
3	Penyetoran Pendapatan Yang ditangguhkan	-	-	-
4	Piutang pada FKTP		-	-
Jumlah		**-**	**-**	**-**

5.5 Penjelasan Akun-Akun Neraca

Dalam penjelasan Akun-Akun neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut.

Aset

Saldo Aset per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.219.066.085,71 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.1
Rincian Aset Pemerintah
per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Aset Lancar	4.039.050,00	0,00	4.039.050,00
Aset Tetap	1.142.656.363,71	1.217.304.522,92	(74.648.159,21)
Aset Lainnya	72.370.672,00	98.056.008,00	(25.685.336)
Jumlah	**1.219.066.085,71**	**1.315.360.530,92**	**(96.294.445,21)**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/neraca

Berdasarkan rincian pada Tabel 5.5.1 di atas terlihat bahwa terdapat penurunan asset yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang pada Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar **(Rp96.294.445,21)** atau 7,32%. Hal ini terutama disebabkan antara lain oleh:

- Terdapat Penambahan Aset Lancar Tahun 2025 sebesar Rp4.039.050,00
- Terdapat Penurunan Aset Tetap Tahun 2025 sebesar (Rp74.648.159,21)
- Terdapat Penurunan Aset Lainnya Tahun 2025 sebesar (Rp25.685.336)

5.5.1.1 Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp4.039.050,00 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.5.1.1
Rincian Aset Lancar
per 31 Desember 2025

NO	URAIAN	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)
1	**ASET**	**4.039.050,00**	0	**4.039.050,00**
1.1	**ASET LANCAR**	**4.039.050,00**	0	**4.039.050,00**
1.1.12	Persediaan	4.039.050,00	0	4.039.050,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	4.039.050,00	0	4.039.050,00
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	4.039.050,00	0	4.039.050,00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	4.039.050,00	0	4.039.050,00

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/neraca

5.5.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Per tanggal 31 Desember 2025 terdapat Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang sebesar Rp.0,00.

5.5.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayangper 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,00

5.5.1.4 Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,00

5.5.1.5 Kas di Bendahara FKTP

Saldo Kas di Bendahara FKTP di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,00

5.5.1.6 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,00

5.5.1.7 Setara Kas

Saldo Setara Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,00

5.5.1.8 Investasi Jangka Pendek

Saldo Investasi Jangka Pendek di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,00

5.5.1.9 Piutang Pendapatan

Jumlah Piutang Pendapatan di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,00

5.5.1.10 Piutang Lainnya

Jumlah Piutang Lainnya di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,00

5.5.1.11 Penyisihan Piutang

Jumlah Penyisihan Piutang di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,00

5.5.1.12 Beban di Bayar Dimuka

Saldo Beban di Bayar Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

5.5.1.13 Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.4.039.050,00 merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2025 berdasarkan hasil stok opname yang dilakukan pada akhir tahun, yang terdiri atas:

Tabel
Rincian Saldo Persediaan
per 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.1	**ASET LANCAR**	**4.039.050,00**	**0,00**
1.1.12	Persediaan	4.039.050,00	0,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	4.039.050,00	0,00
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	4.039.050,00	0,00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	4.039.050,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	**4.039.050,00**	**0,00**

5.2.1.14 Investasi Jangka Panjang

Jumlah Investasi Jangka Panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen sebesar Rp.0,00.

5.5.2 Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp**1.142.656.363,71** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.2
Nilai Buku Aset Tetap
Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Per 31 Desember 2025		
		Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	114.400.000,00	0	114.400.000,00
2	Peralatan dan Mesin	1.719.461.598,00	(1.710.674.598,00)	8.787.000,00
3	Gedung dan bangunan	1.369.713.336,00	(477.170.038,96)	892.543.297,04
4	Jalan, irigasi dan jaringan	197.639.000,00	(74.012.933,33)	123.626.066,67
5	Aset tetap lainnya	3.300.000,00	0	3.300.000,00
6	Konstruksi dalam pengerjaan	0	0	0
Jumlah		**3.404.513.934,00**	**(2.261.857.570,29)**	**1.142.656.363,71**

Nilai mutasi aset tetap per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.5.2
Rincian Mutasi Aset Tetap
Per 31 Desember 2025

No. Urut	Nama Bidang Barang	Keadaan per 31 Desember 2024	Mutasi Perubahan Selama 1 Januari 2025 S/D 31 Desember 2025		Keadaan per 31 Desember 2025	Ket
			Berkurang	Bertambah		
1	2	3	4	5	6	7
1	TANAH	114.400.000,00	-	-	114.400.000,00	
2	PERALATAN DAN MESIN	1.719.461.598,00	-	-	1.719.461.598,00	
	Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.665.068.848,00)	(45.605.750,00)	-	(1.710.674.598,00)	
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.369.713.336,00	-	-	1.369.713.336,00	
	Penyusutan Gedung dan Bangunan	(454.715.596,41)	(22.454.442,55)	-	(477.170.038,96)	
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	197.639.000,00	-	-	197.639.000,00	
	Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(67.424.966,67)	(6.587.966,66)	-	(74.012.933,33)	
5	ASET TETAP LAINNYA	3.300.000,00	-	-	3.300.000,00	
	Penyusutan Aset tetap lainnya	-	-	-	-	
6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	-	-	-	0,00	
	JUMLAH NILAI PEROLEHAN	3.404.513.934,00	-	-	3.404.513.934,00	
	Akumulasi Penyusutan	(2.187.209.411,08)	(74.648.159,21)	-	(2.261.857.570,29)	
	JUMLAH ASET TETAP	1.217.304.522,92	(74.648.159,21)	-	1.142.656.363,71	

Mutasi kurang sebesar Rp74.648.159,21 terdiri dari Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp45.605.750,00, Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp22.454.442,55 dan Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp6.587.966,66 pada tahun 2025

5.5.2.1 Tanah

Saldo Aset Tetap Tanah pada Tahun 2025 sebesar Rp114.400.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.2.1
Saldo Aset Tetap Tanah
Per 31 Desember 2025

I	**Saldo per 31 Desember 2024**		**114.400.000,00**
II	Koreksi saldo awal 1 Januari 2025		114.400.000,00
III	**Mutasi tambah**		
	1	Belanja modal tahun 2025	0,00
		Jumlah mutasi tambah	**0,00**
IV	**Mutasi Kurang**		
	1	Akumulasi penyusutan	0,00
		Jumlah Mutasi Kurang	**0,00**
V		**Saldo per 31 Desember 2025**	**114.400.000,00**

5.5.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Tahun 2025 sebesar Rp1.719.461.598 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.2.2
Saldo Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2025

I	**Saldo per 31 Desember 2024**		**1.719.461.598,00**
II	Koreksi saldo awal 1 Januari 2025		1.719.461.598,00
III	**Mutasi tambah**		
	1	Belanja modal tahun 2025	0,00
	2	Belanja Modal Hibah 2025	0,00
		Jumlah mutasi tambah	**0,00**
IV	**Mutasi Kurang**		
	1	Penyusutan Peralatan dan Mesin	(45.605.750,00)
		Jumlah Mutasi Kurang	**(45.605.750,00)**
V	**Saldo per 31 Desember 2025**		**1.719.461.598,00**

5.5.2.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Tahun 2025 sebesar Rp1.369.713.336,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.2.3
Saldo Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2025

I	**Saldo per 31 Desember 2024**		**1.369.713.336,00**
II	Koreksi saldo awal 1 Januari 2025		1.369.713.336,00
III	**Mutasi tambah**		
	1	Belanja modal tahun 2025	0,00
	2	Belanja Modal Hibah 2025	0,00
		Jumlah mutasi tambah	**0,00**
IV	**Mutasi Kurang**		
	1	Penyusutan Gedung dan Bangunan	(22.454.442,55)
		Jumlah Mutasi Kurang	(22.454.442,55)
V		**Saldo per 31 Desember 2025**	**1.369.713.336,00**

5.5.2.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Tahun 2025 sebesar Rp197.639.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.2.4
Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi
Per 31 Desember 2024

I	**Saldo per 31 Desember 2024**		**197.639.000,00**
II	Koreksi saldo awal 1 Januari 2025		197.639.000,00
III	**Mutasi tambah**		
	1	Belanja modal tahun 2024	0,00
	2	Belanja Modal Hibah 2024	0,00
		Jumlah mutasi tambah	**0,00**
IV	**Mutasi Kurang**		
	3	Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(6.587.966,66)
		Jumlah Mutasi Kurang	(6.587.966,66)
V		**Saldo per 31 Desember 2025**	**197.639.000,00**

5.5.2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya pada tahun 2025 sebesar Rp.3.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.2.5
Saldo Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2025

I	**Saldo per 31 Desember 2024**		**3.300.000,00**
II	KOREKSI SALDO AWAL 1 JANUARI 2025		3.300.000,00
III	**Mutasi tambah**		
	1	Belanja modal tahun 2024	0,00
		Jumlah mutasi tambah	**0,00**
IV	**Mutasi Kurang**		

	1	Akumulasi penyusutan	0,00
		Jumlah Mutasi Kurang	**0,00**
V		SALDO PER 31 DESEMBER 2025	**3.300.000,00**

5.5.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

(Tidak ada konstruksi dalam pengerjaan)

5.5.2.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan tahun 2025 sebesar Rp(2.261.857.570,29) Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.5.2.7
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2025

No. Urut	Nama Bidang Barang	Keadaan per 31Desember 2024	Mutasi Perubahan Selama 1 Januari 2025 S/D 31 Desember 2025		Keadaan per 31 Desember 2025	Ket
			Berkurang	Bertambah		
1	2	3	4	5	6	7
2	PERALATAN DAN MESIN	1.719.461.598,00	-	-	1.719.461.598,00	
	Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.665.068.848,00)	(45.605.750,00)	-	(1.710.674.598,00)	
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.369.713.336,00	-	-	1.369.713.336,00	
	Penyusutan Gedung dan Bangunan	(454.715.596,41)	(22.454.442,55)	-	(477.170.038,96)	
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	197.639.000,00	-	-	197.639.000,00	
	Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(67.424.966,67)	(6.587.966,66)	-	(74.012.933,33)	
5	ASET TETAP LAINNYA	3.300.000,00	-	-	3.300.000,00	
	Penyusutan Aset tetap lainnya	-	-	-	-	
	JUMLAH NILAI PEROLEHAN	3.404.513.934,00	-	-	3.404.513.934,00	
	Akumulasi Penyusutan	(2.187.209.411,08)	(74.648.159,21)	-	(2.261.857.570,29)	
	JUMLAH ASET TETAP	1.217.304.522,92	(74.648.159,21)	-	1.142.656.363,71	

5.5.3 Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp72.370.672,00

5.5.3.1 Tagihan Penjualan Lancar

Jumlah Tagihan Penjualan Lancar Per 31 Desember 2025 sebesar Rp0.00

5.5.3.2 Tuntutan Ganti Rugi

Jumlah Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2025 sebesar Rp0.00

5.5.3.3 Aset Tidak Berwujud

Jumlah Aset Tidak berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp128.426.680,00

5.5.3.4 Aset Lain-Lain

Jumlah Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp299.790.210,00

5.5.4 Kewajiban

Akun kewajiban per 31 Desember 2025 terdiri dari ;

5.5.4.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp53.436.141,00

5.5.4.2 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar **Rp36.598.375,00** merupakan kewajiban Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang kepada pihak lain yang belum dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan karena **keterbatasan ketersediaan anggaran yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD).**

5.5.4.3 Utang Bunga

Utang Bunga per 31 Desember 2025 sebesar Rp0.00

5.5.4.4 Utang Pinjaman jangka Pendek

Utang Pinjaman jangka Pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp0.00

5.5.4.5 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp0.00

5.5.4.6 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp0.00

5.5.4.7 Utang Belanja

Utang Belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp **53.436.141,00** dengan rincian sebagai berikut :

1. Utang Kekurangan Setoran Iuran IW PNS PEMDA 4% atas TPP Tahun 2023 berdasarkan Surat Tagihan BPJS Nomor 292/IV-10/0224 Tanggal 28 Februari 2024 sebesar Rp16.837.766,00

2. Utang Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor - Bahan Cetak, Cetak Banner / Spanduk Tahun 2025 sebesar Rp12.831.600,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 59948894/PPK.Ekatalog/BAST/2025 tanggal 30 Agustus 2025
3. Utang Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor - Bahan Cetak, Fotocopy dan Jilid Dokumen Tahun 2025 sebesar Rp7.326.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 59948895/PPK.Ekatalog/BAST/2025 tanggal 4 September 2025
4. Utang Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Tahun 2025 sebesar Rp3.937.725,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 59948854/PPK.Ekatalog/BAST/2025 tanggal 26 September 2025
5. Utang Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Tahun 2025 sebesar Rp7.000.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 000.3.2/MKN.06.04/BAST/SOSP3A-C/2025 tanggal 16 April 2025
6. Utang Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar Rp1.464.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 000.3.2/Migran 01.01.22/BAST/SOSP3A-C/2025 tanggal 23 Juni 2025
7. Utang Belanja alat bantu cruch/Tongkat ketiak Tahun 2025 sebesar Rp589.050,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 60085755/PPK.Ekatalog/BAST/2025 tanggal 25 Agustus 2025
8. Utang Belanja alat bantu Kursi Roda Tahun 2025 sebesar Rp 3.450.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 60226824/PPK.Ekatalog/BAST/2025 tanggal 25 Agustus 2025

5.5.4.8 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp0.00

5.5.5 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.165.629.944,71 dengan uraian sebagai berikut:

-	Ekuitas Awal Sebelum Koreksi	Rp. 1.298.522.764,92
-	Surplus/Defisit-LO	Rp(4.950.495.783,21)
	RK PPKD	Rp4.817.602.963,00
-	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/kesalahan Mendasar	
	- Koreksi nilai persediaan	Rp. 0,00
	- Selisih revaluasi aset tetap	Rp. 0,00
	- Koreksi ekuitas lainnya	Rp. 0,00
-	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	Rp. 4.817.602.963,00
-	Ekuitas Akhir	Rp 1.165.629.944,71

Uraian tentang akun ekuitas secara lebih terperinci disajikan pada bagian penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Penjelasan informasi-informasi non keuangan menyajikan informasi tambahan yang dipandang perlu diketahui oleh stakeholders terutama untuk mencegah kesalahan inteprestasi atas laporan keuangan.

6.1 Penggantian Manajemen Selama tahun Berjalan

Menjelaskan apabila selama Tahun 2025 terdapat pergantian pimpinan (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekretaris Daerah/ Kepala SKPD/pejabat lainnya) yang mempengaruhi yang mempengaruhi kelangsungan pemda, kebijakan pemerintah daerah terutama terkait dengan pengungkapan/penyajian atas laporan keuangan secara signifikan/material.

6.2 Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi manajemen baru

Menjelaskan apabila selama Tahun 2025 terdapat koreksi-koreksi dari manajemen baru atas kesalahan manajemen yang lama yang

mempengaruhi kelangsungan pemda, kebijakan pemerintah daerah terutama terkait dengan pengungkapan/penyajian atas laporan keuangan secara signifikan/material.

6.3 Komitmen dan kontinjensi

Menjelaskan apabila selama Tahun 2025 munculnya komitmen yang berupa perikatan yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak yang harus dilaksanakan apabila kesepakatan/persyaratan antara bersama kedua belah pihak telah terpenuhi (antara pinjaman, transaksi valuta asing) dan kontijensi yang merupakan kewajiban bersyarat yang dapat terjadi akibat peristiwa di masa yang akan datang yang memiliki tingkat keterjadian tinggi (contoh tuntutan hukum) yang dapat mempengaruhi kelangsungan pemda, kebijakan pemerintah daerah terutama terkait dengan pengungkapan/ penyajian atas laporan keuangan secara signifikan/material.

6.4 Penggabungan atau pemekaran entitas akuntansi pada tahun berjalan

Menjelaskan apabila selama Tahun 2025 terdapat Penggabungan atau pemekaran entitas akuntansi (SKPD) pada tahun yang mempengaruhi kelangsungan pemda, kebijakan pemerintah daerah terutama terkait dengan pengungkapan/penyajian atas laporan keuangan secara signifikan/material.

6.5 Kejadian yang berdampak sosial

Menjelaskan apabila selama Tahun 2025 terdapat kejadian-kejadian yang mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, politik yang mempengaruhi kelangsungan pemda, kebijakan pemerintah daerah terutama terkait dengan pengungkapan/ penyajian atas laporan keuangan secara signifikan/material.

6.6 Pengungkapan Lainnya

Hal-hal lain yang perlu kami ungkapkan juga adalah sebagai berikut.

6.6.1 Domisili

Kabupaten Bengkayang secara geografis, geoekonomi, dan geopolitik terletak pada 0°33'00" Lintang Utara sampai 1°030'00" Lintang Utara dan 108°039'00" Bujur Timur sampai 110°010'00" Bujur Timur.

Kabupaten Bengkayang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pemerintah pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang.

Sedangkan secara administratif, Kabupaten Bengkayang mempunyai batas-batas wilayah, sebagai berikut.

a. Sebelah Utara : Serawak-Malaysia Timur dan Kabupaten Sambas
b. Sebelah Timur : Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Landak
c. Sebelah Selatan : Kabupaten Mempawah
d. Sebelah Barat : Laut Natuna dan Kota Singkawang

6.6.2 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang .
b. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025
c. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
d. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025;
e. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025;
f. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 59 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 51 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Dan Belanja

Daerah Kabupaten Bengkayang Ta 2025

6.6.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang yang ditindaklanjuti Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang

, terdiri dari:

1. **Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan kebijakan Bupati.
2. **Sekretaris** mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :
   a. penyusunan program kerja;
   b. pengelolaan administrasi umum;
   c. pengelolaan administrasi keuangan;
   d. pengelolaan administrasi sarana dan prasarana;
   e. pengelolaan urusan rumah tangga;
   f. pengelolaan kearsipan, ketatausahaan;

g. pengkoordinasian kegiatan hari-hari besar Nasional yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. **Kepala Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas Kerjasama, hukum, hubungan Masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi serta pengelolaan adiminitrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan. Kepala Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :
   a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
   b. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
   c. Pelaksanaan penatausahaan dan inventarisasi barang;
   d. Pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
   e. Pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
   f. Penyiapan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
   g. Penyiapan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
   h. Penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
   i. Penyiapan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

j. Penyiapan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar Urut Kepangkatan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
k. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai bidang tugas.

4. **Kepala Bidang Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial** mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi dan penyantunan penderita cacat, tunas sosial, korban tindak kekerasan, anak nakal, korban narkotika. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :
   a. penyusunan Program kerja di bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial;
   b. pelaksanaan Pembinaan teknis, penyuluhan dan bimbingan di bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial;
   c. pelaksanaan koordinasi program kerja dan perencanaan di bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial;
   d. pelaksanaan kegiatan dan program sesuai bidang tugas;
   e. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan dan program; dan
   f. pelaksanaan tugas lain dibidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial yang diberikan oleh Kepala Dinas.
5. **Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin** mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang kesejahtaraan sosial, pemberdayaan karang taruna dan Komunitas Adat Terpencil (KAT), kelestarian nilainilai

kepahlawanan kejuangan dan kesetiakawanan sosial, pembinaan panti-panti asuhan, bimbingan organisasi dan bantuan sosial, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan sosial, fakir miskin, anak terlantar dan organisasi sosial masyarakat. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

a. penyusunan Program kerja di bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin;
b. pelaksanaan Pembinaan teknis, penyuluhan dan bimbingan Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin;
c. pelaksanaan penyuluhan, bimbingan dan pemberdayaan karang taruna;
d. pelaksanaan bimbingan dan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Kesejahteraan anak, keluarga dan lanjut usia pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
e. pelaksanaan koordinasi program kerja dan perencanaan bina Pemberdayaan Sosial;
f. pelaksanaan kegiatan dan program sesuai bidang tugas;
g. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan dan program; dan
h. pelaksanaan tugas lain dibidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin yang diberi oleh Kepala Dinas.

6. **Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan** mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, dalam melaksanakan pengendalian dan pengelolaan program pemberdayaan dan perlindungan perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja dan kegiatan dibidang Pemberdayaan Perempuan;

b. perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaran kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Seksi Pembinaan Kelembagaan Perempuan;
c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Seksi Pembinaan Kelembagaan Perempuan;
d. pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Seksi Pembinaan Kelembagaan Perempuan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

7. **Kepala Bidang Perlindungan Anak** mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan pengendalian dan pengelolaan program perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Bidang Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :
   a. penyusunan program kerja dan kegiatan Bidang Perlindungan Anak;
   b. perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaran kegiatan pada Bidang Perlindungan Anak;
   c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Anak;
   d. pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Anak; dan
   e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

8. **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)** dipimpin oleh seorang kepala unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melalui Sekretaris Dinas. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa wilayah Kecamatan.

   Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Sotk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Bengkayang, maka UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memberikan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi layanan:

   a) pengaduan masyarakat;
   b) penjangkauan korban;
   c) pengelolaan kasus;
   d) penampungan sementara;
   e) mediasi; dan
   f) pendampingan korban.

   Susunan Organisasi Unit Pelayanan Teknis Daerah – Perlindungan Perempuan Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Sotk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Bengkayang adalah sebagai berikut :

   Kepala UPTD-PPA mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD-PPA dalam

menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya di Kabupaten Bengkayang. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

a) Mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelengaraan layanan di UPTD-PPA;
b) menyusun rencana kerja di UPTD-PPA;
c) menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
d) mengevaluasi hasil kerja UPTD-PPA;
e) membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD-PPA; dan melaksanakan administrasi UPTD-PPA.

9. **Kelompok Jabatan Fungsional**

a) Kelompok Jabatan fungsional, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional;
b) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c) Kelompok Jabatan Fungsional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator;
d) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional; dan

e) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

g) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

h) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

i) Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.

j) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.

k) Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas Jabatan Fungsional Penyetaraan

Jabatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut.

Sebagaimana Struktur Organisasi terlampir.

VII PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (stakeholder) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 secara keseluruhan.

Bengkayang, 05 Maret 2026

KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BENGKAYANG,

dr. I Made Putra Negara, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19661116 199903 1 002

PEMERINTAHAN KAB. BENGKAYANG

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

NERACA

TAHUN ANGGARAN 2025

1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	**ASET**	**1.219.066.085,71**	**1.315.360.530,92**
1.1	**ASET LANCAR**	**4.039.050,00**	**0,00**
1.1.12	Persediaan	4.039.050,00	0,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	4.039.050,00	0,00
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	4.039.050,00	0,00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	4.039.050,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	**4.039.050,00**	**0,00**
1.3	**ASET TETAP**	**1.142.656.363,71**	**1.217.304.522,92**
1.3.01	Tanah	114.400.000,00	114.400.000,00
1.3.01.01	Tanah	114.400.000,00	114.400.000,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	7.150.000,00	7.150.000,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	7.150.000,00	7.150.000,00
1.3.01.01.02	Tanah Non Persil	107.250.000,00	107.250.000,00
1.3.01.01.02.0002	Tanah Kering	107.250.000,00	107.250.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	1.719.461.598,00	1.719.461.598,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	570.218.000,00	570.218.000,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	570.218.000,00	570.218.000,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	72.680.000,00	72.680.000,00
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	232.950.000,00	232.950.000,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	264.588.000,00	264.588.000,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.380.000,00	3.380.000,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	3.380.000,00	3.380.000,00
1.3.02.03.03.0008	Alat Ukur/Pembanding	3.380.000,00	3.380.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	548.820.650,00	548.820.650,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	185.774.800,00	185.774.800,00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	5.613.250,00	5.613.250,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	123.391.550,00	123.391.550,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	56.770.000,00	56.770.000,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	214.482.750,00	214.482.750,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	80.560.000,00	80.560.000,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	2.000.000,00	2.000.000,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	90.682.000,00	90.682.000,00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	1.000.000,00	1.000.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	40.240.750,00	40.240.750,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	148.563.100,00	148.563.100,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	98.660.000,00	98.660.000,00
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	3.614.100,00	3.614.100,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	20.500.000,00	20.500.000,00
1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	5.864.000,00	5.864.000,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	19.925.000,00	19.925.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	16.475.200,00	16.475.200,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	16.475.200,00	16.475.200,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	7.890.000,00	7.890.000,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	8.585.200,00	8.585.200,00
1.3.02.10	Komputer	580.567.748,00	580.567.748,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	465.979.695,00	465.979.695,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	465.979.695,00	465.979.695,00

1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	114.588.053,00	114.588.053,00
1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Computer	32.226.773,00	32.226.773,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	82.361.280,00	82.361.280,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	1.369.713.336,00	1.369.713.336,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	1.369.713.336,00	1.369.713.336,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.369.713.336,00	1.369.713.336,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	1.369.713.336,00	1.369.713.336,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	197.639.000,00	197.639.000,00
1.3.04.02	Bangunan Air	197.639.000,00	197.639.000,00
1.3.04.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	197.639.000,00	197.639.000,00
1.3.04.02.04.0004	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	121.999.000,00	121.999.000,00
1.3.04.02.04.0005	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	75.640.000,00	75.640.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	3.300.000,00	3.300.000,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	3.300.000,00	3.300.000,00
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	3.300.000,00	3.300.000,00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	3.300.000,00	3.300.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(2.261.857.570,29)	(2.187.209.411,08)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.710.674.598,00)	(1.665.068.848,00)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(570.218.000,00)	(541.099.250,00)
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(72.680.000,00)	(72.680.000,00)
1.3.07.01.02.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(232.950.000,00)	(203.831.250,00)
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(264.588.000,00)	(264.588.000,00)
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(3.380.000,00)	(3.380.000,00)
1.3.07.01.03.0031	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding	(3.380.000,00)	(3.380.000,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(545.333.650,00)	(538.246.650,00)
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(5.613.250,00)	(5.613.250,00)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(122.866.550,00)	(121.741.550,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(56.308.000,00)	(52.846.000,00)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(80.060.000,00)	(79.560.000,00)
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(2.000.000,00)	(2.000.000,00)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(89.682.000,00)	(88.682.000,00)
1.3.07.01.05.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(40.240.750,00)	(40.240.750,00)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(97.660.000,00)	(96.660.000,00)
1.3.07.01.05.0014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(3.614.100,00)	(3.614.100,00)
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(20.500.000,00)	(20.500.000,00)
1.3.07.01.05.0018	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	(5.864.000,00)	(5.864.000,00)
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(19.925.000,00)	(19.925.000,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(16.475.200,00)	(16.475.200,00)

1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(7.890.000,00)	(7.890.000,00)
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(8.585.200,00)	(8.585.200,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(575.267.748,00)	(565.867.748,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(460.679.695,00)	(451.279.695,00)
1.3.07.01.10.0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(32.226.773,00)	(32.226.773,00)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(82.361.280,00)	(82.361.280,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(477.170.038,96)	(454.715.596,41)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(477.170.038,96)	(454.715.596,41)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(477.170.038,96)	(454.715.596,41)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(74.012.933,33)	(67.424.966,67)
1.3.07.03.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(74.012.933,33)	(67.424.966,67)
1.3.07.03.02.0028	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	(51.320.933,33)	(44.732.966,67)
1.3.07.03.02.0029	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	(22.692.000,00)	(22.692.000,00)
	JUMLAH ASET TETAP	**1.142.656.363,71**	**1.217.304.522,92**
1.5	**ASET LAINNYA**	**72.370.672,00**	**98.056.008,00**
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	128.426.680,00	128.426.680,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	128.426.680,00	128.426.680,00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	128.426.680,00	128.426.680,00
1.5.03.01.01.0005	Software	100.000.000,00	100.000.000,00
1.5.03.01.01.0009	Aset Tidak Berwujud Lainnya	28.426.680,00	28.426.680,00
1.5.04	Aset Lain-lain	299.790.210,00	299.790.210,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	299.790.210,00	299.790.210,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	299.790.210,00	299.790.210,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	299.790.210,00	299.790.210,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(57.056.008,00)	(31.370.672,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(57.056.008,00)	(31.370.672,00)
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(57.056.008,00)	(31.370.672,00)
1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(57.056.008,00)	(31.370.672,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(298.790.210,00)	(298.790.210,00)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(298.790.210,00)	(298.790.210,00)
1.5.06.01.02	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(298.790.210,00)	(298.790.210,00)
1.5.06.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(298.790.210,00)	(298.790.210,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	**72.370.672,00**	**98.056.008,00**
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH ASET	**1.219.066.085,71**	**1.315.360.530,92**
2	**KEWAJIBAN**	**53.436.141,00**	**16.837.766,00**
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**53.436.141,00**	**16.837.766,00**
2.1.06	Utang Belanja	53.436.141,00	16.837.766,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	16.837.766,00	16.837.766,00
2.1.06.01.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	16.837.766,00	16.837.766,00
2.1.06.01.01.0017	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	16.837.766,00	16.837.766,00

2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	36.598.375,00	0,00
2.1.06.02.01	Utang Belanja Barang	36.598.375,00	0,00
2.1.06.02.01.0004	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.000.000,00	0,00
2.1.06.02.01.0022	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	1.464.000,00	0,00
2.1.06.02.01.0026	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20.157.600,00	0,00
2.1.06.02.01.0031	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.937.725,00	0,00
2.1.06.02.01.0039	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4.039.050,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**53.436.141,00**	**16.837.766,00**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**53.436.141,00**	**16.837.766,00**
3	**EKUITAS**	**1.165.629.944,71**	**1.298.522.764,92**
3.1	**EKUITAS**	**1.165.629.944,71**	**1.298.522.764,92**
3.1.01	Ekuitas	(3.651.973.018,29)	(4.411.844.360,08)
3.1.01.01	Ekuitas	1.298.522.764,92	1.301.200.357,84
3.1.01.01.01	Ekuitas	1.298.522.764,92	1.301.200.357,84
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	1.298.522.764,92	1.301.200.357,84
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(4.950.495.783,21)	(5.713.044.717,92)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(4.950.495.783,21)	(5.713.044.717,92)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(4.950.495.783,21)	(5.713.044.717,92)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	4.817.602.963,00	5.710.367.125,00
3.1.03.01	RK PPKD	4.817.602.963,00	5.710.367.125,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	4.817.602.963,00	5.710.367.125,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	4.817.602.963,00	5.710.367.125,00
	JUMLAH EKUITAS	**1.165.629.944,71**	**1.298.522.764,92**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**1.219.066.085,71**	**1.315.360.530,92**

Kab. Bengkayang, 5 Maret 2026

KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK



dr. I Made Putra Negara, M.M
NIP.196611161999031002

PEMERINTAHAN KAB. BENGKAYANG

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	= (4/3)*10	6
5	**BELANJA DAERAH**	**5.757.560.681,00**	**4.817.602.963,00**	**83,67**	**5.710.367.125,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**5.726.895.181,00**	**4.817.602.963,00**	**84,12**	**5.699.767.125,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	3.372.347.727,00	3.215.910.471,00	95,36	3.116.472.319,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.332.159.681,00	2.285.546.100,00	98,00	2.188.903.285,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.715.294.505,82	1.698.576.740,00	99,02	1.598.608.110,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.592.921.743,82	1.580.613.440,00	99,22	1.598.608.110,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	122.372.762,00	117.963.300,00	96,39	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	144.236.680,45	138.736.170,00	96,18	152.405.756,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	140.350.532,45	138.736.170,00	98,84	152.405.756,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.886.148,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	119.680.450,00	118.090.000,00	98,67	149.470.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	119.680.450,00	118.090.000,00	98,67	149.470.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	58.325.200,00	57.040.000,00	97,79	33.120.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	58.325.200,00	57.040.000,00	97,79	33.120.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	48.396.205,00	46.105.000,00	95,26	35.910.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	39.692.500,00	38.500.000,00	96,99	35.910.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	8.703.705,00	7.605.000,00	87,37	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	92.681.614,00	87.917.880,00	94,86	89.945.640,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	86.216.614,00	84.876.240,00	98,44	89.945.640,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.465.000,00	3.041.640,00	47,04	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	19.798.083,81	18.736.274,00	94,63	16.820.660,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	19.798.083,81	18.736.274,00	94,63	16.820.660,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.402.424,00	23.689,00	1,68	24.135,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	521.869,00	21.235,00	4,06	24.135,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	880.555,00	2.454,00	0,27	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	114.287.052,15	106.099.963,00	92,83	99.439.117,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	108.243.082,15	101.077.231,00	93,37	99.439.117,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	6.043.970,00	5.022.732,00	83,10	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.455.416,87	3.555.088,00	65,16	3.289.953,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.284.861,87	3.271.969,00	76,36	3.289.953,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.170.555,00	283.119,00	24,18	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	12.602.048,90	10.665.296,00	84,63	9.869.914,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.856.643,90	9.815.963,00	90,41	9.869.914,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.745.405,00	849.333,00	48,66	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.040.188.046,00	930.364.371,00	89,44	837.371.034,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	682.617.525,00	607.132.217,00	88,94	499.774.308,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	682.617.525,00	607.132.217,00	88,94	499.774.308,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	4.910.208,00	4.501.024,00	91,66	3.928.164,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	4.910.208,00	4.501.024,00	91,66	3.928.164,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	352.660.313,00	318.731.130,00	90,37	333.668.562,00

5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	352.660.313,00	318.731.130,00	90,37	333.668.562,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	90.198.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	86.438.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	80.454.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	5.984.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	3.760.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	3.760.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.970.677.454,00	1.220.887.447,00	61,95	1.952.468.341,00
5.1.02.01	Belanja Barang	667.879.672,00	379.534.390,00	56,82	555.223.140,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	667.879.672,00	379.534.390,00	56,82	555.223.140,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.868.859,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00	1.994.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	34.713.000,00	25.545.000,00	73,58	33.207.400,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	762.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	22.000.000,00	3.865.020,00	17,56	13.840.000,00
5.1.02.01.01.0022	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	186.998.000,00	111.200.000,00	59,46	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	64.711.683,00	26.421.095,00	40,82	59.876.400,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.567.540,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	67.854.240,00	23.128.515,00	34,08	42.485.600,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	12.300.000,00	2.350.000,00	19,10	5.120.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	749.250,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.420.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.000,00	0,00	0,00	8.243.500,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	18.600.000,00	17.555.760,00	94,38	141.540.440,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	178.803.100,00	134.026.000,00	74,95	162.217.800,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	25.988.000,00	25.708.000,00	98,92	35.456.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	9.740.000,00	9.735.000,00	99,94	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.375.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	18.980.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	24.190.000,00	0,00	0,00	27.650.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	679.243.311,00	537.747.377,00	79,16	835.555.972,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	594.876.402,00	489.771.327,00	82,33	769.477.940,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	19.920.000,00	14.060.000,00	70,58	3.360.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	78.448.000,00	51.300.000,00	65,39	55.650.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	117.789.998,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	30.600.000,00	30.300.000,00	99,01	32.200.000,00

5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	76.400.000,00	76.392.000,00	99,98	203.425.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	6.800.250,00	3.700.000,00	54,40	19.800.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	61.200.000,00	43.200.000,00	70,58	0,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	78.108.142,00	77.100.000,00	98,70	167.100.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	19.100.000,00	16.870.000,00	88,32	15.600.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	21.600.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	4.800.000,00	1.742.734,00	36,30	1.811.148,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	23.399.680,00	17.222.045,00	73,59	23.876.044,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	32.250.000,00	25.922.748,00	80,38	24.615.750,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.200.000,00	6.163.800,00	99,41	0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	15.068.000,00	7.204.000,00	47,80	1.850.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	106.648.330,00	105.370.000,00	98,80	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	11.424.000,00	11.424.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.205.409,00	5.998.050,00	83,24	11.158.032,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.542.614,00	5.512.050,00	99,44	10.121.232,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	554.265,00	216.000,00	38,97	460.800,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.108.530,00	270.000,00	24,35	576.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	56.403.000,00	21.978.000,00	38,96	18.420.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	56.403.000,00	21.978.000,00	38,96	18.420.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	20.758.500,00	20.000.000,00	96,34	36.500.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	20.758.500,00	20.000.000,00	96,34	0,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	45.942.891,00	0,00	0,00	6.560.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23.577.000,00	0,00	0,00	6.560.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	6.560.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.577.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	22.365.891,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	22.365.891,00	0,00	0,00	0,00

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	577.611.580,00	303.605.680,00	52,56	555.129.229,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	577.611.580,00	303.605.680,00	52,56	555.129.229,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	577.611.580,00	303.605.680,00	52,56	555.129.229,00
5.1.05	Belanja Hibah	383.870.000,00	380.805.045,00	99,20	515.976.465,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	383.870.000,00	380.805.045,00	99,20	515.976.465,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	196.370.000,00	193.305.045,00	98,43	515.976.465,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	196.370.000,00	193.305.045,00	98,43	515.976.465,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	172.500.000,00	172.500.000,00	100,00	0,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	172.500.000,00	172.500.000,00	100,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	114.850.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00	24.850.000,00
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00	24.850.000,00
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00	24.850.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**5.726.895.181,00**	**4.817.602.963,00**	**84,12**	**5.699.767.125,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**30.665.500,00**	**0,00**	**0,00**	**10.600.000,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.665.500,00	0,00	0,00	10.600.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.364.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.864.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	5.864.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	15.801.500,00	0,00	0,00	10.600.000,00

5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	15.801.500,00	0,00	0,00	10.600.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	15.801.500,00	0,00	0,00	10.600.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**30.665.500,00**	**0,00**	**0,00**	**10.600.000,00**
	JUMLAH BELANJA	**5.757.560.681,00**	**4.817.602.963,00**	**83,67**	**5.710.367.125,00**
	SURPLUS/DEFISIT	**(5.757.560.681,00)**	**(4.817.602.963,00)**	**83,67**	**(5.710.367.125,00)**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**(5.757.560.681,00)**	**(4.817.602.963,00)**	**83,67**	**(5.710.367.125,00)**

Kab. Bengkayang, 5 Maret 2026

KEPALA DINAS SOSIAL,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

dr. I Made Putra Negara, M.M

NIP.196611161999031002

PEMERINTAHAN KAB. BENGKAYANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	**PENDAPATAN**	**0,00**	**330.650,30**	**(330.650,30)**	**(100,00)**
7.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO**	**0,00**	**330.650,30**	**(330.650,30)**	**(100,00)**
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	330.650,30	(330.650,30)	(100,00)
7.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian-LO	0,00	330.650,30	(330.650,30)	(100,00)
7.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	0,00	330.650,30	(330.650,30)	(100,00)
7.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	0,00	330.650,30	(330.650,30)	(100,00)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	**0,00**	**330.650,30**	**(330.650,30)**	**(100,00)**
	JUMLAH PENDAPATAN	**0,00**	**330.650,30**	**(330.650,30)**	**(100,00)**
8	**BEBAN**	**4.950.495.783,21**	**5.713.375.368,22**	**(762.879.585,01)**	**(13,35)**
8.1	**BEBAN OPERASI**	**4.850.162.288,00**	**5.603.073.628,00**	**(752.911.340,00)**	**(13,44)**
8.1.01	Beban Pegawai	3.215.910.471,00	3.119.778.822,00	96.131.649,00	3,08
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.285.546.100,00	2.192.209.788,00	93.336.312,00	4,26
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	1.698.576.740,00	1.598.608.110,00	99.968.630,00	6,25
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	1.580.613.440,00	1.598.608.110,00	(17.994.670,00)	(1,13)
8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	117.963.300,00	0,00	117.963.300,00	100,00
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	138.736.170,00	152.405.756,00	(13.669.586,00)	(8,97)
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	138.736.170,00	152.405.756,00	(13.669.586,00)	(8,97)
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	118.090.000,00	149.470.000,00	(31.380.000,00)	(20,99)
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	118.090.000,00	149.470.000,00	(31.380.000,00)	(20,99)
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	57.040.000,00	33.120.000,00	23.920.000,00	72,22
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	57.040.000,00	33.120.000,00	23.920.000,00	72,22
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	46.105.000,00	35.910.000,00	10.195.000,00	28,39
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	38.500.000,00	35.910.000,00	2.590.000,00	7,21
8.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	7.605.000,00	0,00	7.605.000,00	100,00
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	87.917.880,00	89.945.640,00	(2.027.760,00)	(2,25)
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	84.876.240,00	89.945.640,00	(5.069.400,00)	(5,64)
8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	3.041.640,00	0,00	3.041.640,00	100,00
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	18.736.274,00	16.820.660,00	1.915.614,00	11,39
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	18.736.274,00	16.820.660,00	1.915.614,00	11,39
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	23.689,00	24.135,00	(446,00)	(1,85)
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	21.235,00	24.135,00	(2.900,00)	(12,02)
8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2.454,00	0,00	2.454,00	100,00
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	106.099.963,00	102.745.620,00	3.354.343,00	3,26
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	101.077.231,00	102.745.620,00	(1.668.389,00)	(1,62)
8.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.022.732,00	0,00	5.022.732,00	100,00

8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.555.088,00	3.289.953,00	265.135,00	8,06
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.271.969,00	3.289.953,00	(17.984,00)	(0,55)
8.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	283.119,00	0,00	283.119,00	100,00
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	10.665.296,00	9.869.914,00	795.382,00	8,06
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	9.815.963,00	9.869.914,00	(53.951,00)	(0,55)
8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	849.333,00	0,00	849.333,00	100,00
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	930.364.371,00	837.371.034,00	92.993.337,00	11,11
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	607.132.217,00	499.774.308,00	107.357.909,00	21,48
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	607.132.217,00	499.774.308,00	107.357.909,00	21,48
8.1.01.02.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	4.501.024,00	3.928.164,00	572.860,00	14,58
8.1.01.02.03.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	4.501.024,00	3.928.164,00	572.860,00	14,58
8.1.01.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	318.731.130,00	333.668.562,00	(14.937.432,00)	(4,48)
8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	318.731.130,00	333.668.562,00	(14.937.432,00)	(4,48)
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	90.198.000,00	(90.198.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	0,00	86.438.000,00	(86.438.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	80.454.000,00	(80.454.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.07.0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	5.984.000,00	(5.984.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.08	Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	3.760.000,00	(3.760.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.08.0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	3.760.000,00	(3.760.000,00)	(100,00)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	1.253.446.772,00	1.852.468.341,00	(599.021.569,00)	(32,34)
8.1.02.01	Beban Barang	412.093.715,00	555.223.140,00	(143.129.425,00)	(25,78)
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	412.093.715,00	555.223.140,00	(143.129.425,00)	(25,78)
8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia	0,00	1.994.000,00	(1.994.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	32.545.000,00	33.207.400,00	(662.400,00)	(1,99)
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	0,00	762.000,00	(762.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3.865.020,00	13.840.000,00	(9.974.980,00)	(72,07)
8.1.02.01.01.0022	Beban Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	112.664.000,00	0,00	112.664.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	26.421.095,00	59.876.400,00	(33.455.305,00)	(55,87)
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	43.286.115,00	42.485.600,00	800.515,00	1,88
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.350.000,00	5.120.000,00	(2.770.000,00)	(54,10)
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.937.725,00	3.850.000,00	87.725,00	2,28
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	8.243.500,00	(8.243.500,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.555.760,00	141.540.440,00	(123.984.680,00)	(87,60)

8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	134.026.000,00	162.217.800,00	(28.191.800,00)	(17,38)
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	25.708.000,00	35.456.000,00	(9.748.000,00)	(27,49)
8.1.02.01.01.0057	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	9.735.000,00	0,00	9.735.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	18.980.000,00	(18.980.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0076	Beban Pakaian Olahraga	0,00	27.650.000,00	(27.650.000,00)	(100,00)
8.1.02.02	Beban Jasa	537.747.377,00	735.555.972,00	(197.808.595,00)	(26,89)
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	489.771.327,00	669.477.940,00	(179.706.613,00)	(26,84)
8.1.02.02.01.0001	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	14.060.000,00	3.360.000,00	10.700.000,00	318,45
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	51.300.000,00	55.650.000,00	(4.350.000,00)	(7,82)
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	117.789.998,00	(117.789.998,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0005	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	30.300.000,00	32.200.000,00	(1.900.000,00)	(5,90)
8.1.02.02.01.0006	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	76.392.000,00	203.425.000,00	(127.033.000,00)	(62,45)
8.1.02.02.01.0008	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	3.700.000,00	19.800.000,00	(16.100.000,00)	(81,31)
8.1.02.02.01.0020	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	43.200.000,00	0,00	43.200.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0024	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	0,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	77.100.000,00	167.100.000,00	(90.000.000,00)	(53,86)
8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	16.870.000,00	15.600.000,00	1.270.000,00	8,14
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	1.742.734,00	1.811.148,00	(68.414,00)	(3,78)
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	17.222.045,00	23.876.044,00	(6.653.999,00)	(27,87)
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	25.922.748,00	24.615.750,00	1.306.998,00	5,31
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.163.800,00	0,00	6.163.800,00	100,00
8.1.02.02.01.0071	Beban Lembur	7.204.000,00	1.850.000,00	5.354.000,00	289,41
8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	105.370.000,00	0,00	105.370.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0081	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	11.424.000,00	0,00	11.424.000,00	100,00
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	5.998.050,00	11.158.032,00	(5.159.982,00)	(46,24)
8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.512.050,00	10.121.232,00	(4.609.182,00)	(45,54)
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	216.000,00	460.800,00	(244.800,00)	(53,13)
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	270.000,00	576.000,00	(306.000,00)	(53,13)
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	21.978.000,00	18.420.000,00	3.558.000,00	19,32
8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	21.978.000,00	18.420.000,00	3.558.000,00	19,32
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	36.500.000,00	(16.500.000,00)	(45,21)
8.1.02.02.05.0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	16.500.000,00	(16.500.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.05.0030	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00

8.1.02.02.05.0050	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	0,00	6.560.000,00	(6.560.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	6.560.000,00	(6.560.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	6.560.000,00	(6.560.000,00)	(100,00)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	303.605.680,00	555.129.229,00	(251.523.549,00)	(45,31)
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	303.605.680,00	555.129.229,00	(251.523.549,00)	(45,31)
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	303.605.680,00	555.129.229,00	(251.523.549,00)	(45,31)
8.1.05	Beban Hibah	380.805.045,00	515.976.465,00	(135.171.420,00)	(26,20)
8.1.05.05	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	380.805.045,00	515.976.465,00	(135.171.420,00)	(26,20)
8.1.05.05.01	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	193.305.045,00	515.976.465,00	(322.671.420,00)	(62,54)
8.1.05.05.01.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	193.305.045,00	515.976.465,00	(322.671.420,00)	(62,54)
8.1.05.05.02	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
8.1.05.05.02.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
8.1.05.05.03	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	172.500.000,00	0,00	172.500.000,00	100,00
8.1.05.05.03.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	172.500.000,00	0,00	172.500.000,00	100,00
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	0,00	114.850.000,00	(114.850.000,00)	(100,00)
8.1.06.01	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	0,00	90.000.000,00	(90.000.000,00)	(100,00)
8.1.06.01.01	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	90.000.000,00	(90.000.000,00)	(100,00)
8.1.06.01.01.0001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	90.000.000,00	(90.000.000,00)	(100,00)
8.1.06.04	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	24.850.000,00	(24.850.000,00)	(100,00)
8.1.06.04.01	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	24.850.000,00	(24.850.000,00)	(100,00)

8.1.06.04.01.0001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	24.850.000,00	(24.850.000,00)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	**4.850.162.288,00**	**5.603.073.628,00**	**(752.911.340,00)**	**(13,44)**
8.1.08	**Beban Penyusutan dan Amortisasi**	**100.333.495,21**	**110.301.740,22**	**(9.968.245,01)**	**(9,04)**
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	45.605.750,00	55.573.995,00	(9.968.245,00)	(17,94)
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	29.118.750,00	29.118.750,00	0,00	0,00
8.1.08.01.02.0003	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	29.118.750,00	29.118.750,00	0,00	0,00
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.087.000,00	11.826.800,00	(4.739.800,00)	(40,08)
8.1.08.01.05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.125.000,00	1.725.000,00	(600.000,00)	(34,78)
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.462.000,00	3.462.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	500.000,00	2.020.000,00	(1.520.000,00)	(75,25)
8.1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.000.000,00	1.919.800,00	(919.800,00)	(47,91)
8.1.08.01.05.0013	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	1.000.000,00	1.800.000,00	(800.000,00)	(44,44)
8.1.08.01.05.0019	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	900.000,00	(900.000,00)	(100,00)
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	9.400.000,00	14.628.445,00	(5.228.445,00)	(35,74)
8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	9.400.000,00	11.900.000,00	(2.500.000,00)	(21,01)
8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	2.728.445,00	(2.728.445,00)	(100,00)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	22.454.442,55	22.454.442,55	0,00	0,00
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	22.454.442,55	22.454.442,55	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	22.454.442,55	22.454.442,55	0,00	0,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	6.587.966,66	6.587.966,67	(0,01)	(0,00)
8.1.08.03.02	Beban Penyusutan Bangunan Air	6.587.966,66	6.587.966,67	(0,01)	(0,00)
8.1.08.03.02.0028	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	4.066.633,33	4.066.633,34	(0,01)	(0,00)
8.1.08.03.02.0029	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	2.521.333,33	2.521.333,33	0,00	0,00
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	25.685.336,00	25.685.336,00	0,00	0,00
8.1.08.06.01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	25.685.336,00	25.685.336,00	0,00	0,00

8.1.08.06.01.0004	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	25.685.336,00	25.685.336,00	0,00	0,00
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	**100.333.495,21**	**110.301.740,22**	**(9.968.245,01)**	**(9,04)**
	JUMLAH BEBAN	**4.950.495.783,21**	**5.713.375.368,22**	**(762.879.585,01)**	**(13,35)**
	SURPLUS/DEFISIT-LO	**(4.950.495.783,21)**	**(5.713.044.717,92)**	**762.548.934,71**	**(13,35)**

Kab. Bengkayang, 5 Maret 2026

KEPALA DINAS SOSIAL,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

dr. I Made Putra Negara, M.M

NIP.196611161999031002

PEMERINTAH KAB. BENGKAYANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	1.298.522.764,92	1.301.200.357,84
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(4.950.495.783,21)	(5.713.044.717,92)
RK PPKD	4.817.602.963,00	5.710.367.125,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	1.165.629.944,71	1.298.522.764,92

Kab. Bengkayang, 5 Maret 2026
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

dr. I Made Putra Negara, M.M
NIP.196611161999031002

KAB. BENGKAYANG

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Kode		Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
			Operasi		Modal	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1		2	3	4	5	6
1			**4.884.747.401,00**	**4.226.943.522,00**	**30.665.500,00**	**0,00**
1.06			**4.884.747.401,00**	**4.226.943.522,00**	**30.665.500,00**	**0,00**
1.06			**4.884.747.401,00**	**4.226.943.522,00**	**30.665.500,00**	**0,00**
1.06	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**3.971.539.651,00**	**3.599.929.650,00**	**30.665.500,00**	**0,00**
1.06	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**4.953.896,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**1.191.036,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.191.036,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	1.191.036,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.191.036,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	221.556,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	614.940,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	354.540,00	0,00	0,00	0,00
1.06	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**		**2.235.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.235.480,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	2.235.480,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.235.480,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.731.600,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	503.880,00	0,00	0,00	0,00
1.06	**Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**		**767.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	767.460,00	0,00	0,00	0,00

1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	767.460,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	767.460,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	66.600,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	346.320,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	354.540,00	0,00	0,00	0,00
1.06	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar**		**759.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	759.820,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	759.820,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	759.820,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	55.500,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	346.320,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	358.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	100,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	100,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	100,00	0,00	0,00	0,00
1.06	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**3.388.867.896,00**	**3.223.114.471,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**		**3.372.347.727,00**	**3.215.910.471,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.01	Belanja Pegawai	3.372.347.727,00	3.215.910.471,00	0,00	0,00
1.06	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.332.159.681,00	2.285.546.100,00	0,00	0,00
1.06	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.715.294.505,82	1.698.576.740,00	0,00	0,00
1.06	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.592.921.743,82	1.580.613.440,00	0,00	0,00
1.06	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	122.372.762,00	117.963.300,00	0,00	0,00
1.06	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	144.236.680,45	138.736.170,00	0,00	0,00
1.06	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	140.350.532,45	138.736.170,00	0,00	0,00
1.06	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.886.148,00	0,00	0,00	0,00

1.06	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	119.680.450,00	118.090.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	119.680.450,00	118.090.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	58.325.200,00	57.040.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	58.325.200,00	57.040.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	48.396.205,00	46.105.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	39.692.500,00	38.500.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	8.703.705,00	7.605.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	92.681.614,00	87.917.880,00	0,00	0,00
1.06	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	86.216.614,00	84.876.240,00	0,00	0,00
1.06	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.465.000,00	3.041.640,00	0,00	0,00
1.06	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	19.798.083,81	18.736.274,00	0,00	0,00
1.06	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	19.798.083,81	18.736.274,00	0,00	0,00
1.06	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.402.424,00	23.689,00	0,00	0,00
1.06	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	521.869,00	21.235,00	0,00	0,00
1.06	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	880.555,00	2.454,00	0,00	0,00
1.06	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	114.287.052,15	106.099.963,00	0,00	0,00
1.06	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	108.243.082,15	101.077.231,00	0,00	0,00
1.06	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	6.043.970,00	5.022.732,00	0,00	0,00
1.06	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.455.416,87	3.555.088,00	0,00	0,00
1.06	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.284.861,87	3.271.969,00	0,00	0,00
1.06	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.170.555,00	283.119,00	0,00	0,00
1.06	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	12.602.048,90	10.665.296,00	0,00	0,00
1.06	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.856.643,90	9.815.963,00	0,00	0,00
1.06	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.745.405,00	849.333,00	0,00	0,00
1.06	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.040.188.046,00	930.364.371,00	0,00	0,00
1.06	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	682.617.525,00	607.132.217,00	0,00	0,00
1.06	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	682.617.525,00	607.132.217,00	0,00	0,00
1.06	5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	4.910.208,00	4.501.024,00	0,00	0,00
1.06	5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	4.910.208,00	4.501.024,00	0,00	0,00

1.06	5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	352.660.313,00	318.731.130,00	0,00	0,00
1.06	5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	352.660.313,00	318.731.130,00	0,00	0,00
1.06	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**		**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	100,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	100,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	100,00	0,00	0,00	0,00
1.06	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**		**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	100,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	100,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100,00	0,00	0,00	0,00
1.06	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**		**15.770.519,00**	**7.204.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.770.519,00	7.204.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	702.519,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	702.519,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	174.159,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	528.360,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02	Belanja Jasa	15.068.000,00	7.204.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	15.068.000,00	7.204.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	15.068.000,00	7.204.000,00	0,00	0,00
1.06	**Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan**		**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	100,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	100,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100,00	0,00	0,00	0,00
1.06	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/**		**749.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	749.250,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	749.250,00	0,00	0,00	0,00

1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	749.250,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	749.250,00	0,00	0,00	0,00
1.06	**Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**		**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	100,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	100,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100,00	0,00	0,00	0,00
1.06	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**1.070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	**Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**		**380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	380,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	380,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	380,00	0,00	0,00	0,00
1.06	**Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**		**345,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	345,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	345,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	345,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	345,00	0,00	0,00	0,00
1.06	**Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**		**345,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	345,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	345,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	345,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	345,00	0,00	0,00	0,00
1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**198.497.108,00**	**89.097.266,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**		**8.420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.420.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	8.420.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.420.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.420.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**		**36.283.858,00**	**11.779.000,00**	**0,00**	**0,00**

1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.283.858,00	11.779.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	36.283.858,00	11.779.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	36.283.858,00	11.779.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	36.283.858,00	11.779.000,00	0,00	0,00
1.06	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**		**79.879.000,00**	**38.490.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.879.000,00	38.490.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	36.496.000,00	16.512.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	36.496.000,00	16.512.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.592.000,00	9.424.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.088.000,00	7.088.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.375.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	11.440.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02	Belanja Jasa	43.383.000,00	21.978.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	43.383.000,00	21.978.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	43.383.000,00	21.978.000,00	0,00	0,00
1.06	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**		**33.100.000,00**	**6.726.600,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.100.000,00	6.726.600,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	33.100.000,00	6.726.600,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	33.100.000,00	6.726.600,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	33.100.000,00	6.726.600,00	0,00	0,00
1.06	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**		**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02	Belanja Jasa	250,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	250,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	250,00	0,00	0,00	0,00
1.06	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**		**37.514.000,00**	**28.801.666,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.514.000,00	28.801.666,00	0,00	0,00

1.06	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	37.514.000,00	28.801.666,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37.514.000,00	28.801.666,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37.514.000,00	28.801.666,00	0,00	0,00
1.06	**Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD**		**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02	Belanja Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
1.06	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**0,00**	**0,00**	**30.665.500,00**	**0,00**
1.06	**Pengadaan Mebel**		**0,00**	**0,00**	**5.864.000,00**	**0,00**
1.06	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	5.864.000,00	0,00
1.06	5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	5.864.000,00	0,00
1.06	5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	5.864.000,00	0,00
1.06	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	5.864.000,00	0,00
1.06	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**		**0,00**	**0,00**	**24.801.500,00**	**0,00**
1.06	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	24.801.500,00	0,00
1.06	5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00
1.06	5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00
1.06	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00
1.06	5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
1.06	5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
1.06	5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
1.06	5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	15.801.500,00	0,00
1.06	5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	15.801.500,00	0,00
1.06	5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	15.801.500,00	0,00
1.06	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**304.006.881,00**	**275.519.093,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**		**4.850.000,00**	**2.350.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	4.850.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.850.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00

1.06	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.850.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00
1.06	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**		**57.450.000,00**	**44.117.043,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.450.000,00	44.117.043,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02	Belanja Jasa	57.450.000,00	44.117.043,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	57.450.000,00	44.117.043,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	3.200.000,00	1.321.750,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	22.000.000,00	16.872.545,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	32.250.000,00	25.922.748,00	0,00	0,00
1.06	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**		**241.706.881,00**	**229.052.050,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.706.881,00	229.052.050,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02	Belanja Jasa	241.706.881,00	229.052.050,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	234.501.472,00	223.054.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	19.920.000,00	14.060.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	3.500.000,00	400.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	78.108.142,00	77.100.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	14.900.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	106.648.330,00	105.370.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	11.424.000,00	11.424.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.205.409,00	5.998.050,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.542.614,00	5.512.050,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	554.265,00	216.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.108.530,00	270.000,00	0,00	0,00
1.06	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**		**75.212.450,00**	**12.198.820,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak**		**16.000.000,00**	**3.865.020,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	3.865.020,00	0,00	0,00

1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	16.000.000,00	3.865.020,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.000.000,00	3.865.020,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	16.000.000,00	3.865.020,00	0,00	0,00
1.06	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan**		**6.200.350,00**	**6.163.800,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.200.350,00	6.163.800,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	350,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	350,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	350,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02	Belanja Jasa	6.200.000,00	6.163.800,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.200.000,00	6.163.800,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.200.000,00	6.163.800,00	0,00	0,00
1.06	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**		**29.434.750,00**	**2.170.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.434.750,00	2.170.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	2.868.859,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.868.859,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.868.859,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02	Belanja Jasa	4.200.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.200.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	22.365.891,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	22.365.891,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	22.365.891,00	0,00	0,00	0,00
1.06	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau**		**10.577.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.577.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	10.577.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.577.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.577.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung**		**13.000.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.350,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	350,00	0,00	0,00	0,00

1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	350,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	350,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	**Penataan Organisasi**		**350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	**Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan**		**350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	350,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	350,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	350,00	0,00	0,00	0,00
1.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**		**214.075.200,00**	**151.912.745,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	**Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**		**87.500.000,00**	**51.892.745,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	**Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT**		**87.500.000,00**	**51.892.745,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.500.000,00	51.892.745,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	30.471.000,00	28.004.745,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	30.471.000,00	28.004.745,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.981.000,00	7.966.470,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.890.000,00	2.482.515,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	18.600.000,00	17.555.760,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02	Belanja Jasa	16.347.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	16.347.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.347.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	40.682.000,00	23.888.000,00	0,00	0,00

1.06	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40.682.000,00	23.888.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.682.000,00	23.888.000,00	0,00	0,00
1.06	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah**		**126.575.200,00**	**100.020.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	**Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat**		**58.392.200,00**	**50.970.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.392.200,00	50.970.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	5.892.200,00	3.800.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.892.200,00	3.800.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	700.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	892.200,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02	Belanja Jasa	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.100.000,00	5.770.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.100.000,00	5.770.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.100.000,00	5.770.000,00	0,00	0,00
1.06	**Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial**		**68.183.000,00**	**49.050.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.183.000,00	49.050.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	6.273.000,00	5.175.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.273.000,00	5.175.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.273.000,00	5.175.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02	Belanja Jasa	61.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	61.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	61.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	710.000,00	675.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	710.000,00	675.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	710.000,00	675.000,00	0,00	0,00
1.06	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK**		**19.110.000,00**	**7.272.540,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik**		**19.110.000,00**	**7.272.540,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	**Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**		**19.110.000,00**	**7.272.540,00**	**0,00**	**0,00**

1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.110.000,00	7.272.540,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	6.574.000,00	2.535.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.574.000,00	2.535.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0022	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	1.464.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	660.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	2.540.000,00	2.535.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02	Belanja Jasa	1.736.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.736.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.736.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.800.000,00	4.737.540,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.800.000,00	4.737.540,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.800.000,00	4.737.540,00	0,00	0,00
1.06	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		**397.561.400,00**	**274.956.246,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak**		**204.716.000,00**	**113.313.606,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	**Penyediaan Permakanan**		**25.340.000,00**	**3.336.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.340.000,00	3.336.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	20.540.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.540.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0022	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	340.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	600.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	3.336.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.800.000,00	3.336.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.800.000,00	3.336.000,00	0,00	0,00

1.06	**Penyediaan Sandang**		**32.420.000,00**	**6.588.600,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.420.000,00	6.588.600,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	25.060.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	25.060.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0022	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	22.750.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	600.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	640.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.360.000,00	6.588.600,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.360.000,00	6.588.600,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.360.000,00	6.588.600,00	0,00	0,00
1.06	**Penyediaan Alat Bantu**		**9.770.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.770.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	4.970.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.970.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0022	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	720.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	600.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	**Pemberian Layanan Data dan Pengaduan**		**51.980.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.980.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	30.380.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	30.380.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00

1.06	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	380.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02	Belanja Jasa	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	**Pemberian Layanan Kedaruratan**		**10.168.000,00**	**7.059.540,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.168.000,00	7.059.540,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02	Belanja Jasa	868.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	868.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	868.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.800.000,00	7.059.540,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.800.000,00	7.059.540,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.800.000,00	7.059.540,00	0,00	0,00
1.06	**Pemberian Layanan Rujukan**		**75.038.000,00**	**66.329.466,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.168.000,00	12.467.061,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	21.168.000,00	12.467.061,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.168.000,00	12.467.061,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.168.000,00	12.467.061,00	0,00	0,00
1.06	5.1.05	Belanja Hibah	53.870.000,00	53.862.405,00	0,00	0,00
1.06	5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	53.870.000,00	53.862.405,00	0,00	0,00
1.06	5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	38.870.000,00	38.862.405,00	0,00	0,00

1.06	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	38.870.000,00	38.862.405,00	0,00	0,00
1.06	5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
1.06	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**		**192.845.400,00**	**161.642.640,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	**Penyediaan Permakanan**		**14.838.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.838.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	10.450.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.450.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0022	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	10.450.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02	Belanja Jasa	868.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	868.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	868.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	**Penyediaan Sandang**		**7.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0022	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	**Penyediaan Alat Bantu**		**4.345.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.345.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	2.609.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.609.000,00	0,00	0,00	0,00

1.06	5.1.02.01.01.0022	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	534.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	955.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	720.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02	Belanja Jasa	1.736.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.736.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.736.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	**Pemberian Layanan Rujukan**		**150.762.400,00**	**149.642.640,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.262.400,00	7.200.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	8.262.400,00	7.200.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.262.400,00	7.200.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	562.400,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.05	Belanja Hibah	142.500.000,00	142.442.640,00	0,00	0,00
1.06	5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	142.500.000,00	142.442.640,00	0,00	0,00
1.06	5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	142.500.000,00	142.442.640,00	0,00	0,00
1.06	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	142.500.000,00	142.442.640,00	0,00	0,00
1.06	**Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan**		**15.400.000,00**	**12.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.05	Belanja Hibah	15.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	15.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
1.06	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**		**65.683.800,00**	**26.456.541,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**		**26.966.000,00**	**8.429.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	**Penjangkauan Anak-Anak Terlantar**		**26.966.000,00**	**8.429.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.966.000,00	8.429.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	2.130.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.130.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	600.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02	Belanja Jasa	1.736.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.736.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.736.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	23.100.000,00	8.429.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.100.000,00	8.429.000,00	0,00	0,00

1.06	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.100.000,00	8.429.000,00	0,00	0,00
1.06	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**38.717.800,00**	**18.027.541,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	**Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**38.717.800,00**	**18.027.541,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.717.800,00	18.027.541,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	14.177.800,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.177.800,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.292.800,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.885.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	24.540.000,00	18.027.541,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.540.000,00	18.027.541,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.540.000,00	18.027.541,00	0,00	0,00
1.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**		**216.777.000,00**	**166.415.800,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**		**181.067.000,00**	**131.423.800,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	**Penyediaan Makanan**		**57.624.000,00**	**37.742.800,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.624.000,00	37.742.800,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	43.980.000,00	35.300.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	43.980.000,00	35.300.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0022	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	35.300.000,00	35.300.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	880.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	800.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02	Belanja Jasa	2.604.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.604.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.604.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.040.000,00	2.442.800,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.040.000,00	2.442.800,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.040.000,00	2.442.800,00	0,00	0,00
1.06	**Penyediaan Sandang**		**13.300.000,00**	**12.040.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.300.000,00	12.040.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00

1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0022	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	540.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.800.000,00	540.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.800.000,00	540.000,00	0,00	0,00
1.06	**Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi**		**95.057.000,00**	**80.521.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.057.000,00	80.521.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	87.321.000,00	80.521.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	87.321.000,00	80.521.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16.121.000,00	16.121.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0022	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	64.400.000,00	64.400.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	800.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02	Belanja Jasa	1.736.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.736.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.736.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	**Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan**		**15.086.000,00**	**1.120.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.086.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	10.350.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.350.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0022	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	10.350.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02	Belanja Jasa	1.736.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.736.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.736.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.000.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00

1.06	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan**		**35.710.000,00**	**34.992.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	**Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana**		**6.500.000,00**	**5.994.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	5.994.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02	Belanja Jasa	6.000.000,00	5.994.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	5.994.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	6.000.000,00	5.994.000,00	0,00	0,00
1.06	**Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana**		**29.210.000,00**	**28.998.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.210.000,00	28.998.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	210.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	210.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	210.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02	Belanja Jasa	29.000.000,00	28.998.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	29.000.000,00	28.998.000,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	29.000.000,00	28.998.000,00	0,00	0,00
1.06	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**		**350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**		**350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**		**350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01	Belanja Barang	350,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	350,00	0,00	0,00	0,00
1.06	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	350,00	0,00	0,00	0,00
2			**842.147.780,00**	**590.659.441,00**	**0,00**	**0,00**
2.08			**842.147.780,00**	**590.659.441,00**	**0,00**	**0,00**
2.08			**842.147.780,00**	**590.659.441,00**	**0,00**	**0,00**
2.08	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN**		**242.625.000,00**	**221.597.620,00**	**0,00**	**0,00**
2.08	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga**		**11.282.000,00**	**5.049.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.08	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG**		**9.952.000,00**	**3.719.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.08	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.952.000,00	3.719.000,00	0,00	0,00

2.08	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.952.000,00	3.719.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.952.000,00	3.719.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.952.000,00	3.719.000,00	0,00	0,00
2.08	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan**		**1.330.000,00**	**1.330.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.08	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00
2.08	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi**		**29.028.000,00**	**26.126.780,00**	**0,00**	**0,00**
2.08	**Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi**		**29.028.000,00**	**26.126.780,00**	**0,00**	**0,00**
2.08	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.028.000,00	26.126.780,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01	Belanja Barang	12.494.000,00	9.660.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.494.000,00	9.660.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.529.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.965.000,00	9.660.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.02	Belanja Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.134.000,00	11.066.780,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.134.000,00	11.066.780,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.134.000,00	11.066.780,00	0,00	0,00
2.08	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan**		**202.315.000,00**	**190.421.840,00**	**0,00**	**0,00**
2.08	**Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia**		**22.929.000,00**	**16.121.840,00**	**0,00**	**0,00**
2.08	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.929.000,00	16.121.840,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01	Belanja Barang	12.553.000,00	10.721.840,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.553.000,00	10.721.840,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.178.000,00	1.491.840,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.375.000,00	9.230.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.02	Belanja Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00

2.08	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.976.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.976.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.976.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08	**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan**		**172.500.000,00**	**172.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.08	5.1.05	Belanja Hibah	172.500.000,00	172.500.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	172.500.000,00	172.500.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	172.500.000,00	172.500.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	172.500.000,00	172.500.000,00	0,00	0,00
2.08	**Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan**		**6.886.000,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.08	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.886.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01	Belanja Barang	5.086.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.086.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.086.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.02	Belanja Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
2.08	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**		**185.069.200,00**	**78.289.500,00**	**0,00**	**0,00**
2.08	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah**		**55.265.000,00**	**45.069.500,00**	**0,00**	**0,00**
2.08	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan**		**50.750.000,00**	**42.274.500,00**	**0,00**	**0,00**
2.08	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.750.000,00	42.274.500,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01	Belanja Barang	16.400.000,00	15.969.500,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.400.000,00	15.969.500,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.000.000,00	4.939.500,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.400.000,00	11.030.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.02	Belanja Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00

2.08	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	32.550.000,00	24.505.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32.550.000,00	24.505.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32.550.000,00	24.505.000,00	0,00	0,00
2.08	**Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan**		**4.515.000,00**	**2.795.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.08	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.515.000,00	2.795.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01	Belanja Barang	3.075.000,00	2.795.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.075.000,00	2.795.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.075.000,00	2.795.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.02	Belanja Jasa	900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	540.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	540.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	540.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban**		**95.294.000,00**	**8.880.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.08	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan**		**95.294.000,00**	**8.880.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.08	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.294.000,00	8.880.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01	Belanja Barang	29.025.000,00	7.080.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	29.025.000,00	7.080.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.025.000,00	7.080.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.02	Belanja Jasa	2.910.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.910.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	63.359.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	63.359.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	63.359.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan**		**34.510.200,00**	**24.340.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.08	**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan**		**17.254.500,00**	**16.745.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.08	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.254.500,00	16.745.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01	Belanja Barang	4.504.500,00	3.995.000,00	0,00	0,00

2.08	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.504.500,00	3.995.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	467.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.037.500,00	3.995.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00
2.08	**Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan**		**17.255.700,00**	**7.595.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.08	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.255.700,00	7.595.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01	Belanja Barang	4.505.700,00	3.995.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.505.700,00	3.995.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	468.200,00	0,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.037.500,00	3.995.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	12.750.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.750.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.750.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
2.08	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**		**51.571.900,00**	**39.071.240,00**	**0,00**	**0,00**
2.08	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender**		**24.142.000,00**	**16.887.160,00**	**0,00**	**0,00**
2.08	**Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas**		**24.142.000,00**	**16.887.160,00**	**0,00**	**0,00**
2.08	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.142.000,00	16.887.160,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01	Belanja Barang	7.824.000,00	5.599.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.824.000,00	5.599.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.324.000,00	199.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.500.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.02	Belanja Jasa	5.400.000,00	900.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	900.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000,00	900.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.918.000,00	10.388.160,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.918.000,00	10.388.160,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.918.000,00	10.388.160,00	0,00	0,00
2.08	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan**		**27.429.900,00**	**22.184.080,00**	**0,00**	**0,00**

2.08	**Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga**		**27.429.900,00**	**22.184.080,00**	**0,00**	**0,00**
2.08	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.429.900,00	22.184.080,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01	Belanja Barang	11.871.900,00	11.270.280,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.871.900,00	11.270.280,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	881.900,00	830.280,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.550.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.02	Belanja Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.158.000,00	5.513.800,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.158.000,00	5.513.800,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.158.000,00	5.513.800,00	0,00	0,00
2.08	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**		**1.330.000,00**	**1.330.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.08	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak**		**1.330.000,00**	**1.330.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.08	**Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota**		**1.330.000,00**	**1.330.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.08	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00
2.08	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**		**121.445.680,00**	**86.575.112,00**	**0,00**	**0,00**
2.08	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan**		**87.500.000,00**	**79.392.112,00**	**0,00**	**0,00**
2.08	**Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada**		**87.500.000,00**	**79.392.112,00**	**0,00**	**0,00**
2.08	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.500.000,00	79.392.112,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01	Belanja Barang	22.355.000,00	19.939.120,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	22.355.000,00	19.939.120,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.535.000,00	1.434.120,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.200.000,00	18.505.000,00	0,00	0,00

2.08	5.1.02.02	Belanja Jasa	21.600.000,00	21.150.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00	21.150.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	21.600.000,00	21.150.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	43.545.000,00	38.302.992,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.545.000,00	38.302.992,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43.545.000,00	38.302.992,00	0,00	0,00
2.08	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan**		**33.945.680,00**	**7.183.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.08	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan**		**23.459.680,00**	**5.901.600,00**	**0,00**	**0,00**
2.08	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.459.680,00	5.901.600,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01	Belanja Barang	14.531.680,00	0,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.531.680,00	0,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.077.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	704.680,00	0,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	12.750.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.02	Belanja Jasa	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.128.000,00	5.901.600,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.128.000,00	5.901.600,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.128.000,00	5.901.600,00	0,00	0,00
2.08	**Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan**		**10.486.000,00**	**1.281.400,00**	**0,00**	**0,00**
2.08	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.486.000,00	1.281.400,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.486.000,00	1.281.400,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.486.000,00	1.281.400,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.486.000,00	1.281.400,00	0,00	0,00
2.08	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**		**240.106.000,00**	**163.795.969,00**	**0,00**	**0,00**
2.08	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak**		**50.750.000,00**	**35.351.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.08	**Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan**		**50.750.000,00**	**35.351.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.08	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.750.000,00	35.351.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01	Belanja Barang	15.800.000,00	14.251.000,00	0,00	0,00

2.08	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.800.000,00	14.251.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.502.500,00	5.772.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.297.500,00	8.479.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.02	Belanja Jasa	5.400.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	29.550.000,00	16.150.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29.550.000,00	16.150.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.550.000,00	16.150.000,00	0,00	0,00
2.08	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus**		**154.846.000,00**	**104.985.349,00**	**0,00**	**0,00**
2.08	**Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang**		**154.846.000,00**	**104.985.349,00**	**0,00**	**0,00**
2.08	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.846.000,00	104.985.349,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01	Belanja Barang	24.516.820,00	20.730.665,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	24.516.820,00	20.730.665,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.740.320,00	2.110.665,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	720.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.156.500,00	0,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	18.900.000,00	18.620.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.02	Belanja Jasa	57.058.180,00	51.070.484,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	36.299.680,00	31.070.484,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	30.600.000,00	30.300.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.600.000,00	420.984,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1.399.680,00	349.500,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	20.758.500,00	20.000.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	20.758.500,00	20.000.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	73.271.000,00	33.184.200,00	0,00	0,00

2.08	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	73.271.000,00	33.184.200,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	73.271.000,00	33.184.200,00	0,00	0,00
2.08	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak**		**34.510.000,00**	**23.459.620,00**	**0,00**	**0,00**
2.08	**Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan**		**34.510.000,00**	**23.459.620,00**	**0,00**	**0,00**
2.08	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.510.000,00	23.459.620,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01	Belanja Barang	8.860.000,00	8.259.620,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.860.000,00	8.259.620,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.720.000,00	2.377.620,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.140.000,00	5.882.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.02	Belanja Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	21.150.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.150.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00
2.08	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.150.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00
		Jumlah	5.726.895.181,00	4.817.602.963,00	30.665.500,00	0,00

Kab. Bengkayang, 5 Maret 2026

KEPALA DINAS SOSIAL,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

dr. I Made Putra Negara, M.M

NIP.196611161999031002

PEMERINTAH KAB. BENGKAYANG

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA

TAHUN ANGGARAN 2025

Kode		Uraian	Kelompok Belanja							
			Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
01		PELAYANAN UMUM	3.971.539.651,00	3.599.929.650,00	30.665.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	04	Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri	3.971.539.651,00	3.599.929.650,00	30.665.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		KETERTIBAN DAN KEAMANAN	216.777.000,00	166.415.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	02	Penanggulangan Bencana	216.777.000,00	166.415.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		PERLINDUNGAN SOSIAL	1.538.578.530,00	1.051.257.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	01	Perlindungan dan Pelayanan Orang Sakit dan Cacat	397.561.400,00	274.956.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02	Perlindungan dan Pelayanan Manusia Usia Lanjut (Manula)	214.075.200,00	151.912.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	04	Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak-anak dan Keluarga	65.683.800,00	26.456.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	05	Pemberdayaan Perempuan	842.147.780,00	590.659.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	08	Bantuan dan Jaminan Sosial	19.110.000,00	7.272.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	90	Perlindungan Sosial lainnya	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH			**5.726.895.181,00**	**4.817.602.963,00**	**30.665.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kab. Bengkayang, 5 Maret 2026

KEPALA DINAS SOSIAL,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

dr. I Made Putra Negara, M.M

NIP.196611161999031002

KABUPATEN BENGKAYANG

LAPORAN STOCK OPNAME

DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PERIODE S/D 31 Desember 2025

no	Tanggal	Barang		saldo awal				saldo per s/d 31 Desember 2025						Saldo Akhir			Keterangan
								bertambah			berkurang						
				Jumlah	Harga satuan	Jumlah harga	Satuan	Jumlah	Harga satuan	Jumlah harga	Jumlah	Harga satuan	Jumlah harga	Jumlah	Harga satuan	Jumlah harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1.1.7.01.01 BAHAN					**0,00**				**32.545.000,00**			**32.545.000,00**			**0,00**	
	1.1.7.01.01.04 BAHAN BAKAR DAN PELUMAS					**0,00**				**32.545.000,00**			**32.545.000,00**			**0,00**	
	1.1.7.01.01.04.001 Bahan Bakar Minyak					**0,00**				**15.985.000,00**			**15.985.000,00**			**0,00**	
1	19-09-2025	1.1.7.01.01.04.001.0024	BBM	0	0,00	0,00	Liter	6	353.500,00	2.121.000,00	6	353.500,00	2.121.000,00	0	0,00	0,00	
2	17-02-2025	1.1.7.01.01.04.001.0136	Bahan Bakar Minyak Pertalite	0	0,00	0,00	Liter	286	10.000,00	2.860.000,00	286	10.000,00	2.860.000,00	0	0,00	0,00	
3	17-02-2025	1.1.7.01.01.04.001.0136	Bahan Bakar Minyak Pertalite	0	0,00	0,00	lembar	286	14.000,00	4.004.000,00	286	14.000,00	4.004.000,00	0	0,00	0,00	
4	16-04-2025	1.1.7.01.01.04.001.0138	Bahan Bakar Dinas Roda 4 Dinas	0	0,00	0,00	Liter	500	14.000,00	7.000.000,00	500	14.000,00	7.000.000,00	0	0,00	0,00	
	1.1.7.01.01.04.002 Minyak Pelumas					**0,00**				**2.560.000,00**			**2.560.000,00**			**0,00**	
5	08-12-2025	1.1.7.01.01.04.002.0203	BBM Pertalite	0	0,00	0,00	Liter	256	10.000,00	2.560.000,00	256	10.000,00	2.560.000,00	0	0,00	0,00	
	1.1.7.01.01.04.006 Lain-lain					**0,00**				**14.000.000,00**			**14.000.000,00**			**0,00**	
6	19-09-2025	1.1.7.01.01.04.006.0140	Bahan Bakar Minyak	0	0,00	0,00	Liter	1.000	14.000,00	14.000.000,00	1.000	14.000,00	14.000.000,00	0	0,00	0,00	
	1.1.7.01.02 SUKU CADANG					**0,00**				**3.865.020,00**			**3.865.020,00**			**0,00**	
	1.1.7.01.02.01 SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN					**0,00**				**3.865.020,00**			**3.865.020,00**			**0,00**	
	1.1.7.01.02.01.001 Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor					**0,00**				**3.865.020,00**			**3.865.020,00**			**0,00**	
7	02-09-2025	1.1.7.01.02.01.001.0309	Ban Dalam	0	0,00	0,00	buah	1	48.840,00	48.840,00	1	48.840,00	48.840,00	0	0,00	0,00	
8	02-09-2025	1.1.7.01.02.01.001.0363	Kunci Kontak	0	0,00	0,00	Buah	1	247.530,00	247.530,00	1	247.530,00	247.530,00	0	0,00	0,00	
9	02-09-2025	1.1.7.01.02.01.001.0380	Klakson	0	0,00	0,00	Buah	1	31.080,00	31.080,00	1	31.080,00	31.080,00	0	0,00	0,00	
10	02-09-2025	1.1.7.01.02.01.001.0401	Aki	0	0,00	0,00	Buah	2	183.150,00	366.300,00	2	183.150,00	366.300,00	0	0,00	0,00	
11	02-09-2025	1.1.7.01.02.01.001.0480	Busi	0	0,00	0,00	Buah	1	39.960,00	39.960,00	1	39.960,00	39.960,00	0	0,00	0,00	
12	02-09-2025	1.1.7.01.02.01.001.0480	Busi	0	0,00	0,00	Pc	1	43.290,00	43.290,00	1	43.290,00	43.290,00	0	0,00	0,00	
13	02-09-2025	1.1.7.01.02.01.001.0552	Kampas Rem	0	0,00	0,00	Set	2	31.080,00	62.160,00	2	31.080,00	62.160,00	0	0,00	0,00	
14	02-09-2025	1.1.7.01.02.01.001.0592	Sarung Jok	0	0,00	0,00	Buah	2	74.370,00	148.740,00	2	74.370,00	148.740,00	0	0,00	0,00	
15	02-09-2025	1.1.7.01.02.01.001.0675	Saringan Oli	0	0,00	0,00	pc	1	31.080,00	31.080,00	1	31.080,00	31.080,00	0	0,00	0,00	
16	02-09-2025	1.1.7.01.02.01.001.0683	Gear set + Rantai	0	0,00	0,00	Set	1	104.340,00	104.340,00	1	104.340,00	104.340,00	0	0,00	0,00	
17	02-09-2025	1.1.7.01.02.01.001.0737	velg raching	0	0,00	0,00	Buah	2	876.900,00	1.753.800,00	2	876.900,00	1.753.800,00	0	0,00	0,00	
18	02-09-2025	1.1.7.01.02.01.001.0863	Shock Belakang	0	0,00	0,00	Buah	2	266.400,00	532.800,00	2	266.400,00	532.800,00	0	0,00	0,00	
19	02-09-2025	1.1.7.01.02.01.001.1826	BAN LUAR 70/90	0	0,00	0,00	Buah	2	227.550,00	455.100,00	2	227.550,00	455.100,00	0	0,00	0,00	
	1.1.7.01.03 ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR					**0,00**				**75.994.935,00**			**75.994.935,00**			**0,00**	
	1.1.7.01.03.01 ALAT TULIS KANTOR					**0,00**				**33.747.095,00**			**33.747.095,00**			**0,00**	
	1.1.7.01.03.01.001 Alat Tulis					**0,00**				**6.275.245,00**			**6.275.245,00**			**0,00**	
20	19-03-2025	1.1.7.01.03.01.001.0074	Binder Clip 107	0	0,00	0,00	Kotak	20	12.000,00	240.000,00	20	12.000,00	240.000,00	0	0,00	0,00	
21	29-08-2025	1.1.7.01.03.01.001.0081	Binder Clip 260	0	0,00	0,00	Kotak	3	29.415,00	88.245,00	3	29.415,00	88.245,00	0	0,00	0,00	
22	29-08-2025	1.1.7.01.03.01.001.0450	Spidol Permanen	0	0,00	0,00	Buah	5	12.210,00	61.050,00	5	12.210,00	61.050,00	0	0,00	0,00	
23	29-08-2025	1.1.7.01.03.01.001.0601	Amplop	0	0,00	0,00	Kotak	2	29.970,00	59.940,00	2	29.970,00	59.940,00	0	0,00	0,00	
24	29-08-2025	1.1.7.01.03.01.001.0618	pulpen	0	0,00	0,00	Kotak	2	63.270,00	126.540,00	2	63.270,00	126.540,00	0	0,00	0,00	
25	21-11-2025	1.1.7.01.03.01.001.0825	pulpen pilot balliner	0	0,00	0,00	Kotak	12	24.420,00	293.040,00	12	24.420,00	293.040,00	0	0,00	0,00	
26	29-08-2025	1.1.7.01.03.01.001.0861	Stapler Max No.10	0	0,00	0,00	Buah	6	31.080,00	186.480,00	6	31.080,00	186.480,00	0	0,00	0,00	
27	29-08-2025	1.1.7.01.03.01.001.0950	Catride/Toner Canon	0	0,00	0,00	Buah	1	305.250,00	305.250,00	1	305.250,00	305.250,00	0	0,00	0,00	
28	21-11-2025	1.1.7.01.03.01.001.0950	Catride/Toner Canon	0	0,00	0,00	Buah	4	493.950,00	1.975.800,00	4	493.950,00	1.975.800,00	0	0,00	0,00	
29	29-08-2025	1.1.7.01.03.01.001.1018	Pulpen Baliner	0	0,00	0,00	Kotak	2	271.950,00	543.900,00	2	271.950,00	543.900,00	0	0,00	0,00	
30	19-03-2025	1.1.7.01.03.01.001.1066	Pulpen Baliner pilot	0	0,00	0,00	Kotak	10	22.000,00	220.000,00	10	22.000,00	220.000,00	0	0,00	0,00	
31	19-03-2025	1.1.7.01.03.01.001.1066	Pulpen Baliner pilot	0	0,00	0,00	Kotak	87	25.000,00	2.175.000,00	87	25.000,00	2.175.000,00	0	0,00	0,00	
	1.1.7.01.03.01.002 Tinta Tulis, Tinta Stempel					**0,00**				**972.900,00**			**972.900,00**			**0,00**	
32	19-03-2025	1.1.7.01.03.01.002.0126	Tinta Epson 664	0	0,00	0,00	Botol	6	90.000,00	540.000,00	6	90.000,00	540.000,00	0	0,00	0,00	
33	29-08-2025	1.1.7.01.03.01.002.0170	Kertas HVS A4	0	0,00	0,00	Rim	6	72.150,00	432.900,00	6	72.150,00	432.900,00	0	0,00	0,00	
	1.1.7.01.03.01.006 Ordner Dan Map					**0,00**				**1.438.500,00**			**1.438.500,00**			**0,00**	
34	21-11-2025	1.1.7.01.03.01.006.0215	Map Box File	0	0,00	0,00	Buah	10	38.850,00	388.500,00	10	38.850,00	388.500,00	0	0,00	0,00	
35	19-03-2025	1.1.7.01.03.01.006.0258	MAP KERTAS / STOPMAP	0	0,00	0,00	lembar	700	1.500,00	1.050.000,00	700	1.500,00	1.050.000,00	0	0,00	0,00	
	1.1.7.01.03.01.013 Isi Staples					**0,00**				**19.980,00**			**19.980,00**			**0,00**	
36	29-08-2025	1.1.7.01.03.01.013.0055	Isi Staples 24/6	0	0,00	0,00	Kotak	2	9.990,00	19.980,00	2	9.990,00	19.980,00	0	0,00	0,00	
	1.1.7.01.03.01.014 Barang Cetakan					**0,00**				**7.326.000,00**			**7.326.000,00**			**0,00**	
37	22-08-2025	1.1.7.01.03.01.014.0298	Cetak dan Jilid	0	0,00	0,00	buku	60	20.000,00	1.200.000,00	60	20.000,00	1.200.000,00	0	0,00	0,00	
38	22-08-2025	1.1.7.01.03.01.014.0679	FOTOCOPY	0	0,00	0,00	Lembar	20.420	300,00	6.126.000,00	20.420	300,00	6.126.000,00	0	0,00	0,00	
	1.1.7.01.03.01.016 Alat tulis kantor lainnya					**0,00**				**17.714.470,00**			**17.714.470,00**			**0,00**	
39	21-11-2025	1.1.7.01.03.01.016.002010	Tinta Printer conon hitam	0	0,00	0,00	Set	10	122.100,00	1.221.000,00	10	122.100,00	1.221.000,00	0	0,00	0,00	
40	29-08-2025	1.1.7.01.03.01.016.0118	Map Plastik	0	0,00	0,00	Pcs	3	77.700,00	233.100,00	3	77.700,00	233.100,00	0	0,00	0,00	
41	15-12-2025	1.1.7.01.03.01.016.0134	TINTA PRINTER WARNA HITAM	0	0,00	0,00		2	99.500,00	199.000,00	2	99.500,00	199.000,00	0	0,00	0,00	
42	21-11-2025	1.1.7.01.03.01.016.0154	KERTAS HVS F4 70 GRAM	0	0,00	0,00	Rim	25	83.250,00	2.081.250,00	25	83.250,00	2.081.250,00	0	0,00	0,00	
43	15-12-2025	1.1.7.01.03.01.016.0184	Tinta Printer Epson Hitam	0	0,00	0,00	Botol	6	99.900,00	599.400,00	6	99.900,00	599.400,00	0	0,00	0,00	

44	21-11-2025	1.1.7.01.03.01.016.0214	AMPLOP 110 PPS	0	0,00	0,00	Kotak	8	28.860,00	230.880,00	8	28.860,00	230.880,00	0	0,00	0,00	
45	19-03-2025	1.1.7.01.03.01.016.0249	kertas A4 80gram	0	0,00	0,00	Rim	71	84.000,00	5.964.000,00	71	84.000,00	5.964.000,00	0	0,00	0,00	
46	19-03-2025	1.1.7.01.03.01.016.0271	kertas HVS 80gram 500 Lembar	0	0,00	0,00	Rim	25	94.000,00	2.350.000,00	25	94.000,00	2.350.000,00	0	0,00	0,00	
47	29-08-2025	1.1.7.01.03.01.016.0283	Map Biasa	0	0,00	0,00	Lembar	25	12.136,00	303.400,00	25	12.136,00	303.400,00	0	0,00	0,00	
48	21-11-2025	1.1.7.01.03.01.016.0287	Catride /Toner Canon Black 830	0	0,00	0,00	Buah	7	444.000,00	3.108.000,00	7	444.000,00	3.108.000,00	0	0,00	0,00	
49	15-12-2025	1.1.7.01.03.01.016.0289	Kertas A 4 75 gsm	0	0,00	0,00	Rim	12	74.370,00	892.440,00	12	74.370,00	892.440,00	0	0,00	0,00	
50	19-03-2025	1.1.7.01.03.01.016.0298	Kertas F4 sidu	0	0,00	0,00	Rim	7	76.000,00	532.000,00	7	76.000,00	532.000,00	0	0,00	0,00	
	1.1.7.01.03.03 BAHAN CETAK					**0,00**				**35.960.115,00**			**35.960.115,00**			**0,00**	
	1.1.7.01.03.03.001 Transparant Sheet					**0,00**				**26.880.720,00**			**26.880.720,00**			**0,00**	
51	19-09-2025	1.1.7.01.03.03.001.0064	Cetak Leaflet/Brosur	0	0,00	0,00	Lembar	250	19.758,00	4.939.500,00	250	19.758,00	4.939.500,00	0	0,00	0,00	
52	03-12-2025	1.1.7.01.03.03.001.0156	Cetak Spanduk	0	0,00	0,00	Meter	130	44.400,00	5.772.000,00	130	44.400,00	5.772.000,00	0	0,00	0,00	
53	25-08-2025	1.1.7.01.03.03.001.0159	cetak dan penggandaan	0	0,00	0,00	Lembar	60	16.000,00	960.000,00	60	16.000,00	960.000,00	0	0,00	0,00	
54	22-08-2025	1.1.7.01.03.03.001.0188	Spanduk/Baliho	0	0,00	0,00	Buah	340	37.740,00	12.831.600,00	340	37.740,00	12.831.600,00	0	0,00	0,00	
55	16-12-2025	1.1.7.01.03.03.001.0190	Fotocopy Kertas A4-F4	0	0,00	0,00	Lembar	6.800	349,65	2.377.620,00	6.800	349,65	2.377.620,00	0	0,00	0,00	
	1.1.7.01.03.03.007 Lain-lain					**0,00**				**9.079.395,00**			**9.079.395,00**			**0,00**	
56	12-12-2025	1.1.7.01.03.03.007.0017	Spanduk	0	0,00	0,00	Buah	17	48.840,00	830.280,00	17	48.840,00	830.280,00	0	0,00	0,00	
57	25-08-2025	1.1.7.01.03.03.007.0181	Foto Copy	0	0,00	0,00	Lembar	19.222	300,00	5.766.600,00	19.222	300,00	5.766.600,00	0	0,00	0,00	
58	07-11-2025	1.1.7.01.03.03.007.0181	Foto Copy	0	0,00	0,00	Lembar	7.100	349,65	2.482.515,00	7.100	349,65	2.482.515,00	0	0,00	0,00	
	1.1.7.01.03.04 BENDA POS					**0,00**				**2.350.000,00**			**2.350.000,00**			**0,00**	
	1.1.7.01.03.04.001 Materai					**0,00**				**2.350.000,00**			**2.350.000,00**			**0,00**	
59	13-03-2025	1.1.7.01.03.04.001.0006	Materai	0	0,00	0,00	Lembar	235	10.000,00	2.350.000,00	235	10.000,00	2.350.000,00	0	0,00	0,00	
	1.1.7.01.03.08 ALAT LISTRIK					**0,00**				**3.937.725,00**			**3.937.725,00**			**0,00**	
	1.1.7.01.03.08.001 Kabel Listrik					**0,00**				**1.060.605,00**			**1.060.605,00**			**0,00**	
60	19-09-2025	1.1.7.01.03.08.001.0080	Kabel	0	0,00	0,00	Set	2	497.280,00	994.560,00	2	497.280,00	994.560,00	0	0,00	0,00	
61	19-09-2025	1.1.7.01.03.08.001.0086	Paku Kabel	0	0,00	0,00	Kotak	7	9.435,00	66.045,00	7	9.435,00	66.045,00	0	0,00	0,00	
	1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik					**0,00**				**2.457.540,00**			**2.457.540,00**			**0,00**	
62	19-09-2025	1.1.7.01.03.08.002.005009	Lampu LED 50 W	0	0,00	0,00	BUAH	27	91.020,00	2.457.540,00	27	91.020,00	2.457.540,00	0	0,00	0,00	
	1.1.7.01.03.08.003 Stop Kontak					**0,00**				**419.580,00**			**419.580,00**			**0,00**	
63	19-09-2025	1.1.7.01.03.08.003.0029	Terminal Kabel	0	0,00	0,00	Buah	6	69.930,00	419.580,00	6	69.930,00	419.580,00	0	0,00	0,00	
	1.1.7.01.05 PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN					**0,00**				**134.258.810,00**			**130.219.760,00**			**4.039.050,00**	
	1.1.7.01.05.01 PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT					**0,00**				**134.258.810,00**			**130.219.760,00**			**4.039.050,00**	
	1.1.7.01.05.01.008 Barang Persediaan					**0,00**				**134.258.810,00**			**130.219.760,00**			**4.039.050,00**	
64	02-02-2025	1.1.7.01.05.01.008.0701	Minyak goreng BIMOLI /kg	0	0,00	0,00		200	23.000,00	4.600.000,00	200	23.000,00	4.600.000,00	0	0,00	0,00	
65	02-02-2025	1.1.7.01.05.01.008.0703	AIR MINERAL Kemasan Gelas	0	0,00	0,00		100	27.000,00	2.700.000,00	100	27.000,00	2.700.000,00	0	0,00	0,00	
66	02-02-2025	1.1.7.01.05.01.008.0704	Gula Pasir/kg	0	0,00	0,00		200	18.000,00	3.600.000,00	200	18.000,00	3.600.000,00	0	0,00	0,00	
67	02-02-2025	1.1.7.01.05.01.008.0705	Indomie Isi 40	0	0,00	0,00		100	150.000,00	15.000.000,00	100	150.000,00	15.000.000,00	0	0,00	0,00	
68	06-11-2025	1.1.7.01.05.01.008.0706	Buku	0	0,00	0,00		44	48.840,00	2.148.960,00	44	48.840,00	2.148.960,00	0	0,00	0,00	
69	11-11-2025	1.1.7.01.05.01.008.0707	Baju Seragam SMP	0	0,00	0,00		10	377.400,00	3.774.000,00	10	377.400,00	3.774.000,00	0	0,00	0,00	
70	11-11-2025	1.1.7.01.05.01.008.0708	Baju Seragam SD	0	0,00	0,00		23	277.500,00	6.382.500,00	23	277.500,00	6.382.500,00	0	0,00	0,00	
71	11-11-2025	1.1.7.01.05.01.008.0709	Baju Seragam SMA	0	0,00	0,00		11	477.300,00	5.250.300,00	11	477.300,00	5.250.300,00	0	0,00	0,00	
72	22-07-2025	1.1.7.01.05.01.008.0710	Sapu Lantai	0	0,00	0,00		4	40.000,00	160.000,00	4	40.000,00	160.000,00	0	0,00	0,00	
73	22-07-2025	1.1.7.01.05.01.008.0711	Ember	0	0,00	0,00		4	60.000,00	240.000,00	4	60.000,00	240.000,00	0	0,00	0,00	
74	22-07-2025	1.1.7.01.05.01.008.0712	Obat Nyamuk Bakar	0	0,00	0,00		8	8.000,00	64.000,00	8	8.000,00	64.000,00	0	0,00	0,00	
75	22-07-2025	1.1.7.01.05.01.008.0713	Odol Gigi	0	0,00	0,00		50	10.000,00	500.000,00	50	10.000,00	500.000,00	0	0,00	0,00	
76	22-07-2025	1.1.7.01.05.01.008.0714	Sabun Mandi	0	0,00	0,00		100	5.000,00	500.000,00	100	5.000,00	500.000,00	0	0,00	0,00	
77	12-08-2025	1.1.7.01.05.01.008.0715	Kursi Roda	0	0,00	0,00		2	1.725.000,00	3.450.000,00	0	0,00	0,00	2	1.725.000,00	3.450.000,00	
78	12-08-2025	1.1.7.01.05.01.008.0716	cruch/Tongkat ketiak	0	0,00	0,00		2	294.525,00	589.050,00	0	0,00	0,00	2	294.525,00	589.050,00	
79	14-01-2025	1.1.7.01.05.01.008.0800	Minyak Goreng Bimoli	0	0,00	0,00		200	23.000,00	4.600.000,00	200	23.000,00	4.600.000,00	0	0,00	0,00	
80	14-01-2025	1.1.7.01.05.01.008.0801	Beras/Kg	0	0,00	0,00		1.000	18.000,00	18.000.000,00	1.000	18.000,00	18.000.000,00	0	0,00	0,00	
81	14-01-2025	1.1.7.01.05.01.008.0802	Gula/Kg	0	0,00	0,00		200	18.000,00	3.600.000,00	200	18.000,00	3.600.000,00	0	0,00	0,00	
82	14-01-2025	1.1.7.01.05.01.008.0803	Mie Instan/Kg	0	0,00	0,00		100	150.000,00	15.000.000,00	100	150.000,00	15.000.000,00	0	0,00	0,00	
83	14-01-2025	1.1.7.01.05.01.008.0810	Terpal	0	0,00	0,00		10	180.000,00	1.800.000,00	10	180.000,00	1.800.000,00	0	0,00	0,00	
84	14-01-2025	1.1.7.01.05.01.008.0811	Air Mineral	0	0,00	0,00		200	27.000,00	5.400.000,00	200	27.000,00	5.400.000,00	0	0,00	0,00	
85	14-01-2025	1.1.7.01.05.01.008.0812	Tikar 2x3	0	0,00	0,00		100	100.000,00	10.000.000,00	100	100.000,00	10.000.000,00	0	0,00	0,00	
86	14-01-2025	1.1.7.01.05.01.008.0813	Kopi Bubuk	0	0,00	0,00		200	60.000,00	12.000.000,00	200	60.000,00	12.000.000,00	0	0,00	0,00	
87	21-01-2025	1.1.7.01.05.01.008.0814	Baju	0	0,00	0,00		50	150.000,00	7.500.000,00	50	150.000,00	7.500.000,00	0	0,00	0,00	
88	21-01-2025	1.1.7.01.05.01.008.0901	Selimut	0	0,00	0,00		40	100.000,00	4.000.000,00	40	100.000,00	4.000.000,00	0	0,00	0,00	
89	02-02-2025	1.1.7.01.05.01.008.0902	Susu Kental Manis / Kaleng	0	0,00	0,00		200	17.000,00	3.400.000,00	200	17.000,00	3.400.000,00	0	0,00	0,00	
			JUMLAH			**0,00**				**246.663.765,00**			**242.624.715,00**			**4.039.050,00**	

Rabu, 31 Desember 2025

Pengguna Barang

dr. I MADE PUTRA NEGARA, M.M

NIP : 19661116 199903 1 002

Lampiran : Daftar BMD
Tahun : 2025

DAFTAR BMD
TANAH
INTRAKOMTABEL
KABUPATEN BENGKAYANG

Provinsi : KALIMANTAN BARAT
Pemerintah Daerah : BENGKAYANG
Pengguna Barang : DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

no	Kode Barang	Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi nama barang	Spesifikasi lainnya	Jumlah	Satuan	Luas (M2)	Lokasi	Titik koordinat	Bukti Kepemilikan					Harga satuan perolehan	Nilai perolehan	Cara perolehan	Tanggal perolehan	Status penggunaan	Keterangan
												Nama	Nomor	Tanggal	Nama kepemilikan dalam dokumen	Dok						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.1		**Tanah**					**2**		16,000									**114,400,000**				
1.3.1.01		**TANAH**					**2**		16,000									**114,400,000**				
1.3.1.01.01		**TANAH PERSIL**					**1**		1,000									**7,150,000**				
1.3.1.01.01.04		**TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA**					**1**		1,000									**7,150,000**				
1.3.1.01.01.04.001		**Tanah Bangunan Kantor Pemerintah**					**1**		1,000									**7,150,000**				
1	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	429118	0001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Tidak sertifikat	1		1,000	JL. GUNA BARU, RANGKANG BENGKAYANG			-	-			7,150,000	7,150,000	HIBAH	29-12-2000	GEDUNG KANTOR	-(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.1.01.02		**TANAH NON PERSIL**					**1**		15,000									**107,250,000**				
1.3.1.01.02.02		**TANAH KERING**					**1**		15,000									**107,250,000**				
1.3.1.01.02.02.002		**Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan**					**1**		15,000									**107,250,000**				
2	1.3.1.01.02.02.002	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	429135	0001	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Tidak sertifikat	1		15,000	Jl. Rangkang Desa Suka Mulya Kec. Bengkayang			-	-			107,250,000	107,250,000	Pembelian	31-12-2000	Halaman Dinas Sosial	SPT Tgl 14 April 2000(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
																		114,400,000				

Kamis, 5 Maret 2026
Pengguna Barang

dr. I MADE PUTRA NEGARA, M.M
NIP : 19661116 199903 1 002

Lampiran : Daftar BMD
Tahun : 2025

DAFTAR BMD
PERALATAN DAN MESIN
INTRAKOMPTABEL
KABUPATEN BENGKAYANG

Provinsi : KALIMANTAN BARAT
Pemerintah Daerah : BENGKAYANG
Pengguna Barang : **DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

no	Kode Barang	Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi nama barang	Merek / Tipe	Spesifikasi lainnya		Lokasi	Kendaraan Dinas					Jumlah	Kondisi	Harga satuan perolehan	Nilai perolehan	Penyusutan					Nilai Buku	Cara perolehan	Tanggal perolehan	Tahun Susut	Pemegang	Keterangan
							ukuran	Bahan		CC	Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB	Nomor Mesin					umur	Akum s/d tahun lalu	Beban	Koreksi Akumulasi	Akum s/d tahun ini						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.3.2		**Peralatan dan mesin**													**306**			**1,719,461,598**		**1,665,068,848**	**45,605,750**	**0**	**1,710,674,598**	**8,787,000**					
1.3.2.02		**ALAT ANGKUTAN**													**17**			**570,218,000**		**541,099,250**	**29,118,750**	**0**	**570,218,000**	**0**					
1.3.2.02.01		**ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR**													**17**			**570,218,000**		**541,099,250**	**29,118,750**	**0**	**570,218,000**	**0**					
1.3.2.02.01.01		**KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN**													**1**			**72,680,000**		**72,680,000**	**0**	**0**	**72,680,000**	**0**					
1.3.2.02.01.01.003		**Station Wagon**													**1**			**72,680,000**		**72,680,000**	**0**	**0**	**72,680,000**	**0**					
1	1.3.2.02.01.01.003	Station Wagon	429117	0001	Station Wagon	TOYOTA / KIJANG	1800	BESI		0	KB 8039 K	MHF 31 KF 6030022098	-	7 K 05189269	1	Rusak Berat	72,680,000	72,680,000	8	72,680,000	0	0	72,680,000	0	nul	31 Desember 2003	2003	-	WARNA HITAM(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.02.01.03		**KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG**													**1**			**232,950,000**		**203,831,250**	**29,118,750**	**0**	**232,950,000**	**0**					
1.3.2.02.01.03.003		**Yeengler/Trailer**													**1**			**232,950,000**		**203,831,250**	**29,118,750**	**0**	**232,950,000**	**0**					
2	1.3.2.02.01.03.003	Yeengler/Trailer	807899	0001	Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN)	Daihatsu Luxio / 3SZ-VE DOHC VVT-i	4215 x 1710 x 1915	-		1495	KB 1946 KL	MHKW3CA3JHK019638	N-05401920	3S2DGK4873	1	Baik	232,950,000	232,950,000	8	203,831,250	29,118,750	0	232,950,000	0	HIBAH	28 September 2018	2018	NURAT, S.E	Molin, Hibah dari Kemetrian PPPA
1.3.2.02.01.04		**KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA**													**15**			**264,588,000**		**264,588,000**	**0**	**0**	**264,588,000**	**0**					
1.3.2.02.01.04.001		**Sepeda Motor**													**15**			**264,588,000**		**264,588,000**	**0**	**0**	**264,588,000**	**0**					
3	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429061	0001	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z1 CW	114 cc	Campuran		114	KB 5896 KQ	MH3UE1120FJ050364	L07968276	E3R5E-0052270	1	Baik	16,970,000	16,970,000	8	16,970,000	0	0	16,970,000	0	Pembelian	30 November 2015	2015	M. RIDWAN	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
4	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429129	0003	Sepeda Motor	Yamaha (Jupiter-MX) / Jupiter-MX	125 cc	Campuran		0	KB 3077 KH	MH31S7006AK624964	H07031902K	1S7624962	1	Baik	16,029,000	16,029,000	8	16,029,000	0	0	16,029,000	0	Pembelian	3 Desember 2010	2010	ELISABET, S.Sos., M.Si	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
5	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429130	0004	Sepeda Motor	Yamaha (Jupiter-MX) / Jupiter-MX	125 cc	Campuran		0	KB 3078 KH	MH31S7006AK624941	H07031903K	1S7625045	1	Baik	16,029,000	16,029,000	8	16,029,000	0	0	16,029,000	0	Pembelian	3 Desember 2010	2010	NORMILA, S.A.P	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
6	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429131	0005	Sepeda Motor	Yamaha (Jupiter-MX) / Jupiter-MX	125 cc	Campuran		0	KB 3081 KH	MH31S7006AK627493	-	1S7627506	1	Baik	16,029,000	16,029,000	8	16,029,000	0	0	16,029,000	0	Pembelian	3 Desember 2010	2010	HENNI PURWANINGSIH, A.Md	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
7	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429133	0001	Sepeda Motor	HONDA / SUPRA X	110	BESI		0	KB 2219 K	MH 1 KEV 219YK 135596	A.NO.9775448	KEV 2E-1135768	1	Rusak Ringan	7,274,000	7,274,000	8	7,274,000	0	0	7,274,000	0	Pembelian	29 Desember 2000	2000	-	ABU-ABU HITAM(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
8	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429146	0006	Sepeda Motor	Yamaha (V-Ixion) / 3C1 (V-IXION/FZ150)	150 cc	Campuran		0	KB 3072 KH	MH33C100443504153	H07031897K	3C1-505256	1	Baik	20,388,000	20,388,000	8	20,388,000	0	0	20,388,000	0	Pembelian	3 Desember 2010	2010	FREDDY W. LANTU, S.Sos	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
9	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429148	0007	Sepeda Motor	Yamaha (V-Ixion) / V-Ixion	150 cc	Campuran		0	KB 3076 KH	MH33C1004AK301114	-	3C1301913	1	Baik	20,388,000	20,388,000	8	20,388,000	0	0	20,388,000	0	Pembelian	3 Desember 2010	2010	-	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
10	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429149	0008	Sepeda Motor	Yamaha (Jupiter-MX) / Jupiter-MX	125 cc	Campuran		0	KB 3082 KH	MH31S7006AK626695	H07031907K	1S7626740	1	Baik	16,029,000	16,029,000	8	16,029,000	0	0	16,029,000	0	Pembelian	3 Desember 2010	2010	-	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
11	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429158	0002	Sepeda Motor	YAMAHA / JUPITER	102	BESI		0	KB 4423 K	MH 35 LM 0022 K 101140	-	5 LM 101092	1	Rusak Ringan	10,238,000	10,238,000	8	10,238,000	0	0	10,238,000	0	Pembelian	31 Desember 2002	2002	SUMARDIANSAH, S.A.P	HITAM(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
12	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429228	0009	Sepeda Motor	YAMAHA / YUPITER MX-CW	135	besi		0	KB 3662 KH	MH32S6005AK819176	-	2S6-819359	1	Baik	16,377,000	16,377,000	8	16,377,000	0	0	16,377,000	0	Pembelian	17 Desember 2010	2010	Y.Junglin, S.ST	Digunakan Kasi Binkessos(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
13	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429233	0001	Sepeda Motor	YAMAHA / YUPITER MX-CW	135	besi		0	KB 3663 KH	MH32S6005AK794604	-	2S6-795259	1	Baik	16,377,000	16,377,000	8	16,377,000	0	0	16,377,000	0	Pembelian	17 Desember 2010	2010	Mohammad Hasan	Digunakan Mohammad Hasan(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
14	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429300	0002	Sepeda Motor	Kawasaki / New Trail KLX150S	144 cc	Campuran		144	KB 2201 KU	MH4LX150GFJP04963		LX150CEPN9149	1	Baik	29,000,000	29,000,000	8	29,000,000	0	0	29,000,000	0	Pembelian	30 November 2015	2015	DODORIKUS, AP, M.Si	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
15	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429301	0003	Sepeda Motor	Yamaha / Soul GT125	125 cc	Campuran		125	KB 5894 KQ	MH3SE9010FJ125703		E5R4E-0136812	1	Baik	17,490,000	17,490,000	8	17,490,000	0	0	17,490,000	0	Pembelian	30 November 2015	2015	MARTA LINDA, SE	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
16	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429303	0004	Sepeda Motor	Kawasaki / New Trail KLX150S	144 cc	Campuran		144	KB 2202 KU	MH4LX150GFJP04367	-	LX150CEPN7627	1	Baik	29,000,000	29,000,000	8	29,000,000	0	0	29,000,000	0	Pembelian	30 November 2015	2015	FANDI AHMAD	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
17	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429310	0005	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z1 CW	114 cc	Campuran		114	KB 5895 KQ	MH3UE1120FJ053901		E3R5E-0055806	1	Baik	16,970,000	16,970,000	8	16,970,000	0	0	16,970,000	0	Pembelian	30 November 2015	2015	URAI AGUSTIAN, S.KM	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
1.3.2.03		**ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR**													**1**			**3,380,000**		**3,380,000**	**0**	**0**	**3,380,000**	**0**					
1.3.2.03.03		**ALAT UKUR**													**1**			**3,380,000**		**3,380,000**	**0**	**0**	**3,380,000**	**0**					
1.3.2.03.03.08		**ALAT UKUR/PEMBANDING**													**1**			**3,380,000**		**3,380,000**	**0**	**0**	**3,380,000**	**0**					
1.3.2.03.03.08.001		**Ukuran Johanson (Alat Pembanding Standar Ukuran Panjang)**													**1**			**3,380,000**		**3,380,000**	**0**	**0**	**3,380,000**	**0**					
18	1.3.2.03.03.08.001	Ukuran Johanson (Alat Pembanding Standar Ukuran Panjang)	429203	0001		PANASONIC / -	1/2 PK	Besi+Elektronic		0		-		-	1	Baik	3,380,000	3,380,000	5	3,380,000	0	0	3,380,000	0	Pembelian	30 Desember 2006	2006		PEMDA, Ex Dinsos(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.05		**ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA**													**193**			**548,820,650**		**538,246,650**	**7,087,000**	**0**	**545,333,650**	**3,487,000**					
1.3.2.05.01		**ALAT KANTOR**													**53**			**185,774,800**		**180,200,800**	**4,587,000**	**0**	**184,787,800**	**987,000**					

1.3.2.05.01.01		**MESIN KETIK**													**2**			**5,613,250**		**5,613,250**	**0**	**0**	**5,613,250**	**0**					
1.3.2.05.01.01.001		**Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)**													**1**			**4,050,000**		**4,050,000**	**0**	**0**	**4,050,000**	**0**					
19	1.3.2.05.01.01.001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	429219	0001	Mesin Ketik	Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	4,050,000	4,050,000	5	4,050,000	0	0	4,050,000	0	Pembelian	31 Desember 2008	2008		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.05.01.01.003		**Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)**													**1**			**1,563,250**		**1,563,250**	**0**	**0**	**1,563,250**	**0**					
20	1.3.2.05.01.01.003	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	429204	0001		Olympia / -	-	Besi		0		-		-	1	Baik	1,563,250	1,563,250	5	1,563,250	0	0	1,563,250	0	Pembelian	30 Desember 2006	2006		Ex Dinsos(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.05.01.04		**ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR**													**41**			**123,391,550**		**121,741,550**	**1,125,000**	**0**	**122,866,550**	**525,000**					
1.3.2.05.01.04.001		**Lemari Besi/Metal**													**2**			**5,026,250**		**5,026,250**	**0**	**0**	**5,026,250**	**0**					
21	1.3.2.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	429134	0001		Lokal / -	-	Besi		0		-		-	1	Baik	1,426,250	1,426,250	5	1,426,250	0	0	1,426,250	0	Pembelian	30 Desember 2000	2000		Lemari Arsip, Ex Dinsos(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
22	1.3.2.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	429229	0002		Lokal / -	-	besi		0	-	-	-	-	1	Baik	3,600,000	3,600,000	5	3,600,000	0	0	3,600,000	0	Pembelian	17 Desember 2010	2010		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.05.01.04.002		**Lemari Kayu**													**9**			**22,855,200**		**21,205,200**	**1,125,000**	**0**	**22,330,200**	**525,000**					
23	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	429221	0001		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	6,996,000	6,996,000	5	6,996,000	0	0	6,996,000	0	Pembelian	31 Desember 2008	2008		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
24	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	429243	0002		lokal / -	-	kayu		0		-		-	1	Baik	1,034,200	1,034,200	5	1,034,200	0	0	1,034,200	0	Pembelian	31 Desember 2012	2012		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
25	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	429326	0001		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	4,000,000	4,000,000	5	4,000,000	0	0	4,000,000	0	Pembelian	27 Juli 2010	2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
26	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	2401276	0001	Lemari Arsip/Buku	Lokal / -	-	Kayu + Plywood		0		-		-	1	Baik	1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	0	Pembelian	11 Juni 2019	2019		Lemari 2 Pintu
27	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	2401294	0001	Lemari Arsip/Buku	Lokal / -	-	Kayu + Plywood		0		-		-	1	Baik	2,200,000	2,200,000	5	2,200,000	0	0	2,200,000	0	Pembelian	11 Juni 2019	2019		Lemari 3 Pintu
28	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	2401296	0002	Lemari Arsip/Buku	Lokal / -	-	Kayu + Plywood		0		-		-	1	Baik	1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	0	Pembelian	11 Juni 2019	2019		Lemari 2 Pintu
29	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	5428834	0001	Lemari Arsip	Lokal / Lemari 2 Pintu	Standar	Kayu		0		-		-	1	Baik	1,500,000	1,500,000	5	1,200,000	300,000	0	1,500,000	0	Pembelian	20 November 2021	2021	Riyanto, A. Md	
30	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	5428835	0002	Lemari Arsip	Lokal / Lemari 2 Pintu	Standar	Kayu		0		-		-	1	Baik	1,500,000	1,500,000	5	1,200,000	300,000	0	1,500,000	0	Pembelian	20 November 2021	2021	Riyanto, A. Md	
31	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	5449941	0001	Lemari Arsip Pejabat	Lokal / 2 Pintu	1200x400x2000mm	Campuran Kayu + Kaca		0		-		-	1	Baik	2,625,000	2,625,000	5	1,575,000	525,000	0	2,100,000	525,000	Pembelian	21 Oktober 2022	2022	Damianus, SH	Ruang Kadis DSP3A
1.3.2.05.01.04.003		**Rak Besi**													**5**			**8,567,500**		**8,567,500**	**0**	**0**	**8,567,500**	**0**					
32	1.3.2.05.01.04.003	Rak Besi	429065	0001		Boltless Rack / 2 in 1 Rack - 5 Levels	1828 x 350 x 900	-		0		-		-	1	Baik	1,000,000	1,000,000	5	1,000,000	0	0	1,000,000	0	APBD	13 Desember 2016	2016		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
33	1.3.2.05.01.04.003	Rak Besi	429115	0001		LOKAL / RAK PIRING	KECIL	BESI		0		-		-	1	Baik	1,567,500	1,567,500	5	1,567,500	0	0	1,567,500	0	Pembelian	31 Desember 2002	2002		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
34	1.3.2.05.01.04.003	Rak Besi	429260	0001		Lokal / -	DUA PINTU	ALMUNIUM KACA		0		-		-	1	Baik	2,500,000	2,500,000	5	2,500,000	0	0	2,500,000	0	DAU	10 September 2014	2014	CALARA HARYATI, S.Sos	BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
35	1.3.2.05.01.04.003	Rak Besi	429291	0001	Rak televisi	Rak TV / -	-	-		0		-		-	1	Baik	2,500,000	2,500,000	5	2,500,000	0	0	2,500,000	0		27 November 2015	2015	Untuk rumah Singgah	Pengadaan alat rumah tangga (Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
36	1.3.2.05.01.04.003	Rak Besi	429315	0001		Boltless Rack / 2 in 1 Rack - 5 Levels	1828 x 350 x 900	-		0		-		-	1	Baik	1,000,000	1,000,000	5	1,000,000	0	0	1,000,000	0	APBD	13 Desember 2016	2016		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.05.01.04.004		**Rak Kayu**													**9**			**41,750,000**		**41,750,000**	**0**	**0**	**41,750,000**	**0**					
37	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu	429110	0001		Lokal / -	-	Campuran	ruang kerjase	0	-	-	-	-	1	Baik	1,800,000	1,800,000	5	1,800,000	0	0	1,800,000	0	Pembelian	1 Desember 2008	2008		Rak buku(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELURAGA BERENCANA)
38	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu	429317	0001	Rak Kayu	Lokal / -	-	Kayu		0		-		-	1	Baik	20,000,000	20,000,000	5	20,000,000	0	0	20,000,000	0	Pembelian	7 Oktober 2013	2013		Pengadaan Rak Kayu(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
39	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu	807902	0001	Rak Arsip tempel di dinding	- / -	6 x 2 m	kayu		0		-		-	1	Baik	2,850,000	2,850,000	5	2,850,000	0	0	2,850,000	0	Pembelian	12 Maret 2018	2018		Rak Arsip nempel di dinding
40	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu	807903	0001	Rak Arsip tempel di dinding	- / -	6 x 2 m	kayu		0		-		-	1	Baik	2,850,000	2,850,000	5	2,850,000	0	0	2,850,000	0	Pembelian	12 Maret 2018	2018		Rak Arsip nempel di dinding
41	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu	807904	0001	Rak Arsip tempel di dinding	- / -	6 x 2 m	kayu		0		-		-	1	Baik	2,850,000	2,850,000	5	2,850,000	0	0	2,850,000	0	Pembelian	12 Maret 2018	2018		Rak Arsip nempel di dinding
42	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu	807907	0001	Rak Arsip tempel di dinding	- / -	6 x 2 m	kayu		0		-		-	1	Baik	2,850,000	2,850,000	5	2,850,000	0	0	2,850,000	0	Pembelian	12 Maret 2018	2018		Rak Arsip nempel di dinding
43	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu	807908	0002	Rak Arsip tempel di dinding	- / -	6 x 2 m	kayu		0		-		-	1	Baik	2,850,000	2,850,000	5	2,850,000	0	0	2,850,000	0	Pembelian	12 Maret 2018	2018		Rak Arsip nempel di dinding
44	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu	807909	0001	Rak Arsip tempel di dinding	- / -	6 x 2 m	kayu		0		-		-	1	Baik	2,850,000	2,850,000	5	2,850,000	0	0	2,850,000	0	Pembelian	12 Maret 2018	2018		Rak Arsip nempel di dinding
45	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu	807910	0003	Rak Arsip tempel di dinding	- / -	6 x 2 m	kayu		0		-		-	1	Baik	2,850,000	2,850,000	5	2,850,000	0	0	2,850,000	0	Pembelian	12 Maret 2018	2018		Rak Arsip nempel di dinding
1.3.2.05.01.04.005		**Filing Cabinet Besi**													**9**			**16,869,100**		**16,869,100**	**0**	**0**	**16,869,100**	**0**					
46	1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	429116	0001		Brother / -	-	Besi		0		-		-	1	Baik	1,237,500	1,237,500	5	1,237,500	0	0	1,237,500	0	Pembelian	31 Desember 2002	2002		Fiiing kabinet(Lemari Arsip) 4 laci(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
47	1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	429162	0002		ALBA / 4 LACI	-	BESI		0		-		-	1	Baik	1,237,500	1,237,500	5	1,237,500	0	0	1,237,500	0	Pembelian	31 Desember 2002	2002		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
48	1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	429185	0003		BROTHER / 4 LACI	-	BESI		0		-		-	1	Baik	1,260,000	1,260,000	5	1,260,000	0	0	1,260,000	0	Pembelian	31 Desember 2005	2005		DARI DINAS SOSIAL(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
49	1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	429186	0004		ALBA / 4 LACI	-	BESI		0		-		-	1	Baik	1,260,000	1,260,000	5	1,260,000	0	0	1,260,000	0	Pembelian	31 Desember	2005		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama

																										2005			))
50	1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	429211	0005		Lokal / 4 Laci	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	1,494,100	1,494,100	5	1,494,100	0	0	1,494,100	0	Pembelian	3 Desember 2007	2007		Ex Dinsos(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
51	1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	429319	0006		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	2,462,500	2,462,500	5	2,462,500	0	0	2,462,500	0	Pembelian	11 Juni 2010	2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
52	1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	429322	0007		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	2,462,500	2,462,500	5	2,462,500	0	0	2,462,500	0	Pembelian	11 Juni 2010	2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
53	1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	2401261	0001	Filling Cabinet	- / -	-	Besi		0		-		-	1	Baik	2,455,000	2,455,000	5	2,455,000	0	0	2,455,000	0	HIBAH	9 Desember 2019	2019		Sekretariat PUSPAGA Perlindungan Anak
54	1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	5397912	0001	Falling Cabinet	Atlantic / 4 Loker	-	Besi		0		-		-	1	Baik	3,000,000	3,000,000	5	3,000,000	0	0	3,000,000	0	Pembelian	1 November 2020	2020		
1.3.2.05.01.04.006		**Filing Cabinet Kayu**													**1**			**1,014,000**		**1,014,000**	**0**	**0**	**1,014,000**	**0**					
55	1.3.2.05.01.04.006	Filing Cabinet Kayu	429205	0001		Lokal / -	-	Kayu		0		-		-	1	Baik	1,014,000	1,014,000	5	1,014,000	0	0	1,014,000	0	Pembelian	30 Desember 2006	2006		Lemari Arsip(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.05.01.04.007		**Brandkas**													**2**			**16,309,500**		**16,309,500**	**0**	**0**	**16,309,500**	**0**					
56	1.3.2.05.01.04.007	Brandkas	429287	0001		Ucida / STANDAR	SEDANG	-		0		-		-	1	Baik	8,900,000	8,900,000	5	8,900,000	0	0	8,900,000	0	Pembelian	1 April 2015	2015	BENDAHARA PENGELUARAN	BRANKAS(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
57	1.3.2.05.01.04.007	Brandkas	429323	0001		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	7,409,500	7,409,500	5	7,409,500	0	0	7,409,500	0	Pembelian	27 Juli 2010	2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
1.3.2.05.01.04.027		**Lemari Kaca**													**4**			**11,000,000**		**11,000,000**	**0**	**0**	**11,000,000**	**0**					
58	1.3.2.05.01.04.027	Lemari Kaca	429255	0001		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	5,000,000	5,000,000	5	5,000,000	0	0	5,000,000	0	DAU	10 September 2014	2014	CALARA HARYATI, S. Sos	BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
59	1.3.2.05.01.04.027	Lemari Kaca	429290	0001 - 0003	Lemari Pakaian	Kayu lokal / Sedang	Biasa	-		0		-		-	3	Baik	2,000,000	6,000,000	5	6,000,000	0	0	6,000,000	0	Pembelian	27 November 2015	2015	Untuk Rumah Singgah	Pengadaan Alat rumah tangga kantor(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.05.01.05		**ALAT KANTOR LAINNYA**													**10**			**56,770,000**		**52,846,000**	**3,462,000**	**0**	**56,308,000**	**462,000**					
1.3.2.05.01.05.012		**Mesin Absensi**													**7**			**48,660,000**		**45,660,000**	**3,000,000**	**0**	**48,660,000**	**0**					
60	1.3.2.05.01.05.012	Mesin Absensi	429063	0001	Rak Arsip SPj	Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	9,920,000	9,920,000	5	9,920,000	0	0	9,920,000	0	Pembelian	30 November 2015	2015	Pengurus Barang	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
61	1.3.2.05.01.05.012	Mesin Absensi	429144	0001	UPS	- / -	-	-		0		-		-	1	Baik	1,000,000	1,000,000	5	1,000,000	0	0	1,000,000	0	Pembelian	19 September 2014	2014		untuk di BP3K (Mutasi dari (baru) DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK,PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA)
62	1.3.2.05.01.05.012	Mesin Absensi	429145	0002	UPS	- / -	-	-		0		-		-	1	Baik	1,000,000	1,000,000	5	1,000,000	0	0	1,000,000	0	Pembelian	19 September 2014	2014		untuk di BP3K (Mutasi dari (baru) DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK,PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA)
63	1.3.2.05.01.05.012	Mesin Absensi	429299	0002	Rak Arsip SPj	Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	9,920,000	9,920,000	5	9,920,000	0	0	9,920,000	0	Pembelian	30 November 2015	2015	Pengurus Barang	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
64	1.3.2.05.01.05.012	Mesin Absensi	2401289	0001	Projector	Acer / B5 - 20	-	-		0		-		-	1	Baik	6,245,000	6,245,000	5	6,245,000	0	0	6,245,000	0	HIBAH	9 Desember 2019	2019	Liberti Nungkat, S.Sos	Sekretariat PUSPAGA Perlindungan Anak
65	1.3.2.05.01.05.012	Mesin Absensi	2401292	0002	APE (Alat Edukasi Anak)	- / -	1 set	campuran		0		-		-	1	Baik	5,575,000	5,575,000	5	5,575,000	0	0	5,575,000	0	HIBAH	9 Desember 2019	2019	Liberti Nungkat, S.Sos	Sekretariat PUSPAGA Perlindungan Anak
66	1.3.2.05.01.05.012	Mesin Absensi	5428824	0001	Mesin Presensi	Fingerspot / CE1200	6x5 Inch	Fiber		0		-		-	1	Baik	15,000,000	15,000,000	5	12,000,000	3,000,000	0	15,000,000	0	Pembelian	1 November 2021	2021	Riyanto, A. Md	
1.3.2.05.01.05.019		**Alat Pemotong Kertas**													**1**			**2,310,000**		**1,386,000**	**462,000**	**0**	**1,848,000**	**462,000**					
67	1.3.2.05.01.05.019	Alat Pemotong Kertas	5449942	0001	Alat Penghancur Kertas	Joyko / SHD-01 2101100394	360x244x366mm	Plastik		0		-		-	1	Baik	2,310,000	2,310,000	5	1,386,000	462,000	0	1,848,000	462,000	Pembelian	21 Oktober 2022	2022	Fandi Ahmad	Ruang Renja dan Keuangan
1.3.2.05.01.05.076		**Papan Nama Instansi**													**2**			**5,800,000**		**5,800,000**	**0**	**0**	**5,800,000**	**0**					
68	1.3.2.05.01.05.076	Papan Nama Instansi	2401263	0001	Papan Nama PUSPAGA	Lokal / Frame Alumunium	-	Alumunium		0		-		-	1	Baik	1,340,000	1,340,000	5	1,340,000	0	0	1,340,000	0	HIBAH	9 Desember 2019	2019		Sekretariat PUSPAGA Perlindungan Anak
69	1.3.2.05.01.05.076	Papan Nama Instansi	2401288	0002	Papan Nama PUSPAGA	- / Neon Box	-	-		0		-		-	1	Baik	4,460,000	4,460,000	5	4,460,000	0	0	4,460,000	0	HIBAH	9 Desember 2019	2019		Sekretariat PUSPAGA Perlindungan Anak
1.3.2.05.02		**ALAT RUMAH TANGGA**													**67**			**214,482,750**		**211,482,750**	**1,500,000**	**0**	**212,982,750**	**1,500,000**					
1.3.2.05.02.01		**MEUBELAIR**													**31**			**80,560,000**		**79,560,000**	**500,000**	**0**	**80,060,000**	**500,000**					
1.3.2.05.02.01.001		**Meja Kerja Besi/Metal**													**8**			**13,000,000**		**13,000,000**	**0**	**0**	**13,000,000**	**0**					
70	1.3.2.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	429168	0001		Lokal / -	-	terpal		0	-	-	-	-	1	Baik	1,000,000	1,000,000	5	1,000,000	0	0	1,000,000	0	Pembelian	31 Desember 2009	2009		(Mutasi dari (baru) DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK,PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA)
71	1.3.2.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	2401266	0001	Meja Tulis 1 Biro	Lokal / -	-	Kayu		0		-		-	1	Baik	2,600,000	2,600,000	5	2,600,000	0	0	2,600,000	0	Pembelian	11 Juni 2019	2019	Y. APIK	Meja Pejabat Eselon IV
72	1.3.2.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	2401269	0001	Meja Tulis 1/2 Biro	Lokal / -	-	Kayu & Ply wood		0		-		-	1	Baik	1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	0	Pembelian	11 Juni 2019	2019		Meja Kerja Kasi
73	1.3.2.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	2401272	0002	Meja Tulis 1/2 Biro	Lokal / -	-	Kayu & Ply wood		0		-		-	1	Baik	1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	0	Pembelian	11 Juni 2019	2019		Meja Kerja Kasi
74	1.3.2.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	2401273	0003	Meja Tulis 1/2 Biro	Lokal / -	-	Kayu & Ply wood		0		-		-	1	Baik	1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	0	Pembelian	11 Juni 2019	2019		Meja Kerja Kasi
75	1.3.2.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	2401274	0004	Meja Tulis 1/2 Biro	Lokal / -	-	Kayu & Ply wood		0		-		-	1	Baik	1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	0	Pembelian	11 Juni 2019	2019		Meja Kerja Kasi
76	1.3.2.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	2401297	0005	Lemari Pakaian	Lokal / 2 Pintu	-	Kayu & Plywood		0		-		-	1	Baik	1,700,000	1,700,000	5	1,700,000	0	0	1,700,000	0		11 Juni 2019	2019	Djumariana	Shelter Sosial

77	1.3.2.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	2401301	0006	Lemari Pakaian	Lokal / 2 Pintu	-	Kayu & Plywood		0		-		-	1	Baik	1,700,000	1,700,000	5	1,700,000	0	0	1,700,000	0		11 Juni 2019	2019	Djumariana	Shelter Sosial
1.3.2.05.02.01.002		**Meja Kerja Kayu**													**4**			**11,965,000**		**10,965,000**	**500,000**	**0**	**11,465,000**	**500,000**					
78	1.3.2.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	429312	0001	Meja Kerja Pejabat	Lokal / -	-	Plywood		0		-		-	1	Baik	5,675,000	5,675,000	5	5,675,000	0	0	5,675,000	0	Pembelian	30 November 2015	2015	Pengurus Barang	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
79	1.3.2.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2401260	0001	Meja Kerja Kayu	Lokal / -	-	Kayu		0		-		-	1	Baik	1,790,000	1,790,000	5	1,790,000	0	0	1,790,000	0	HIBAH	9 Desember 2019	2019		Sekretariat PUSPAGA Perlindungan Anak
80	1.3.2.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	5397911	0001	Meja Satu Biro	Lokal / -	-	Kayu		0		-		-	1	Baik	2,000,000	2,000,000	5	2,000,000	0	0	2,000,000	0	Pembelian	1 November 2020	2020		
81	1.3.2.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	5449940	0001	Meja Kerja 1/2 Biro	Lokal / -	-	Kayu		0		-		-	1	Baik	2,500,000	2,500,000	5	1,500,000	500,000	0	2,000,000	500,000	Pembelian	21 Oktober 2022	2022	Lidia, A. Md. Kep	UPTD PPA DSP3A
1.3.2.05.02.01.010		**Tempat Tidur Kayu**													**2**			**5,000,000**		**5,000,000**	**0**	**0**	**5,000,000**	**0**					
82	1.3.2.05.02.01.010	Tempat Tidur Kayu	429296	0001 - 0002	Tempat tidur kayu	Lokal / -	sedang	-		0		-		-	2	Baik	2,500,000	5,000,000	5	5,000,000	0	0	5,000,000	0	Pembelian	28 November 2015	2015	Untuk Rumah singgah	Penyediaan peralatan rumah tangga(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.05.02.01.024		**Meja 1/2 Biro**													**1**			**1,500,000**		**1,500,000**	**0**	**0**	**1,500,000**	**0**					
83	1.3.2.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	5397909	0001	Meja Setengah Biro	Lokal / 3 Laci kanan	-	Kayu		0		-		-	1	Baik	1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	0	Pembelian	1 November 2020	2020		
1.3.2.05.02.01.025		**Kasur/Spring Bed**													**2**			**6,600,000**		**6,600,000**	**0**	**0**	**6,600,000**	**0**					
84	1.3.2.05.02.01.025	Kasur/Spring Bed	2401267	0001	Spring Bed Sorong	- / -	120 m x 200 m	Busa		0		-		-	1	Baik	3,300,000	3,300,000	5	3,300,000	0	0	3,300,000	0	Pembelian	11 Juni 2019	2019	Djumariana	Shelter Sosial
85	1.3.2.05.02.01.025	Kasur/Spring Bed	2401275	0002	Spring Bed Sorong	- / -	120 m x 200 m	Busa		0		-		-	1	Baik	3,300,000	3,300,000	5	3,300,000	0	0	3,300,000	0	Pembelian	11 Juni 2019	2019	Djumariana	Shelter Sosial
1.3.2.05.02.01.031		**Kursi Tamu**													**1**			**15,000,000**		**15,000,000**	**0**	**0**	**15,000,000**	**0**					
86	1.3.2.05.02.01.031	Kursi Tamu	429252	0001		Lokal / -	BESAR	KAYU		0		-		-	1	Baik	15,000,000	15,000,000	5	15,000,000	0	0	15,000,000	0	DAU	7 Agustus 2014	2014	CALARA HARYATI, S. Sos	BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.05.02.01.032		**Kursi Putar**													**9**			**12,200,000**		**12,200,000**	**0**	**0**	**12,200,000**	**0**					
87	1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar	429244	0001		Lokal / -	-	besi		0		-		-	1	Baik	2,000,000	2,000,000	5	2,000,000	0	0	2,000,000	0	Pembelian	31 Desember 2012	2012		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
88	1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar	2401277	0001	Kursi Putar	- / -	-	Plastik,Busa dan Besi		0		-		-	1	Baik	1,400,000	1,400,000	5	1,400,000	0	0	1,400,000	0		11 Juni 2019	2019		Kursi Kabid dan Kasi
89	1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar	2401285	0001	Kursi Putar	- / -	-	Busa + Plastik		0		-		-	1	Baik	1,900,000	1,900,000	5	1,900,000	0	0	1,900,000	0	HIBAH	9 Desember 2019	2019		Sekretariat PUSPAGA Perlindungan Anak
90	1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar	2401293	0001	Kursi Putar	- / -	-	Plastik,Busa dan Besi		0		-		-	1	Baik	1,400,000	1,400,000	5	1,400,000	0	0	1,400,000	0		11 Juni 2019	2019		Kursi Kabid dan Kasi
91	1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar	2401295	0002	Kursi Putar	- / -	-	Plastik,Busa dan Besi		0		-		-	1	Baik	1,400,000	1,400,000	5	1,400,000	0	0	1,400,000	0		11 Juni 2019	2019		Kursi Kabid dan Kasi
92	1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar	5397902	0001	Kursi Kerja	- / Putar	-	Fiber Plastik		0		-		-	1	Baik	1,025,000	1,025,000	5	1,025,000	0	0	1,025,000	0	Pembelian	2 November 2020	2020		
93	1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar	5397903	0002	Kursi Kerja	- / Putar	-	Fiber Plastik		0		-		-	1	Baik	1,025,000	1,025,000	5	1,025,000	0	0	1,025,000	0	Pembelian	2 November 2020	2020		
94	1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar	5397908	0003	Kursi Kerja	- / Putar	-	Fiber Plastik		0		-		-	1	Baik	1,025,000	1,025,000	5	1,025,000	0	0	1,025,000	0	Pembelian	2 November 2020	2020		
95	1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar	5397916	0004	Kursi Kerja	- / Putar	-	Fiber Plastik		0		-		-	1	Baik	1,025,000	1,025,000	5	1,025,000	0	0	1,025,000	0	Pembelian	2 November 2020	2020		
1.3.2.05.02.01.033		**Kursi Biasa**													**3**			**11,500,000**		**11,500,000**	**0**	**0**	**11,500,000**	**0**					
96	1.3.2.05.02.01.033	Kursi Biasa	429292	0002 - 0003	Kursi Tamu	Kursi Sofa / -	-	-		0		-		-	2	Baik	3,250,000	6,500,000	5	6,500,000	0	0	6,500,000	0	Pembelian	27 November 2015	2015	Untuk rumah singgah	Pengadaan alat rumah tangga kantor(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
97	1.3.2.05.02.01.033	Kursi Biasa	429308	0001	Kursi Kerja Pejabat	Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	5,000,000	5,000,000	5	5,000,000	0	0	5,000,000	0	Pembelian	30 November 2015	2015	Pengurus Barang	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
1.3.2.05.02.01.048		**Sofa**													**1**			**3,795,000**		**3,795,000**	**0**	**0**	**3,795,000**	**0**					
98	1.3.2.05.02.01.048	Sofa	2401284	0001	Sofa + Meja Kaca	- / -	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	3,795,000	3,795,000	5	3,795,000	0	0	3,795,000	0	HIBAH	9 Desember 2019	2019		Sekretariat PUSPAGA Perlindungan Anak
1.3.2.05.02.03		**ALAT PEMBERSIH**													**1**			**2,000,000**		**2,000,000**	**0**	**0**	**2,000,000**	**0**					
1.3.2.05.02.03.003		**Mesin Pemotong Rumput**													**1**			**2,000,000**		**2,000,000**	**0**	**0**	**2,000,000**	**0**					
99	1.3.2.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	429298	0001	Mesin rumput	- / -	-	-		0		-		-	1	Baik	2,000,000	2,000,000	5	2,000,000	0	0	2,000,000	0		30 November 2015	2015		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.05.02.04		**ALAT PENDINGIN**													**22**			**90,682,000**		**88,682,000**	**1,000,000**	**0**	**89,682,000**	**1,000,000**					
1.3.2.05.02.04.003		**A.C. Window**													**3**			**26,000,000**		**26,000,000**	**0**	**0**	**26,000,000**	**0**					
100	1.3.2.05.02.04.003	A.C. Window	429104	0001		SHARP / -	-	-		0		-		-	1	Baik	6,500,000	6,500,000	5	6,500,000	0	0	6,500,000	0	Pembelian	28 April 2014	2014		BELANJA BARANG INVENTARIS(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
101	1.3.2.05.02.04.003	A.C. Window	429107	0002		SHARP / -	-	-		0		-		-	1	Baik	6,500,000	6,500,000	5	6,500,000	0	0	6,500,000	0	Pembelian	28 April 2014	2014		BELANJA BARANG INVENTARIS(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
102	1.3.2.05.02.04.003	A.C. Window	429327	0001		LG / LG	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	13,000,000	13,000,000	5	13,000,000	0	0	13,000,000	0	Pembelian	6 November 2013	2013		Ruangan Kabid PM(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
1.3.2.05.02.04.004		**A.C. Split**													**9**			**38,099,000**		**36,099,000**	**1,000,000**	**0**	**37,099,000**	**1,000,000**					
103	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	429200	0001		CHANGHONG / -	1/2 PK	BESI		0		-		-	1	Baik	3,380,000	3,380,000	5	3,380,000	0	0	3,380,000	0	Pembelian	29 Desember 2006	2006		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))

104	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	429230	0001		Lokal / -	-	besi		0	-	-	-	-	1	Baik	4,000,000	4,000,000	5	4,000,000	0	0	4,000,000	0	Pembelian	17 Desember 2010	2010		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
105	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	429245	0002		LG / -	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	5,000,000	5,000,000	5	5,000,000	0	0	5,000,000	0	Pembelian	30 September 2013	2013		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
106	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	429328	0001		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	4,120,000	4,120,000	5	4,120,000	0	0	4,120,000	0	Pembelian	31 Desember 2012	2012		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
107	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	5397914	0001	Air Conditioner (AC) Split	Polytron / Split AC	0,5 PK	Fiber Putih		0		-		-	1	Baik	4,599,000	4,599,000	5	4,599,000	0	0	4,599,000	0	Pembelian	2 November 2020	2020	Jerry Leman, SE	155-240V/50Hz, 470 Watt, 5000 BTU/h
108	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	5397924	0002		Lokal / -	-	besi		0	-	-	-	-	1	Baik	4,000,000	4,000,000	5	4,000,000	0	0	4,000,000	0	Pembelian	17 Desember 2010	2010		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
109	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	5397925	0003		Lokal / -	-	besi		0	-	-	-	-	1	Baik	4,000,000	4,000,000	5	4,000,000	0	0	4,000,000	0	Pembelian	17 Desember 2010	2010		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
110	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	5397926	0004		Lokal / -	-	besi		0	-	-	-	-	1	Baik	4,000,000	4,000,000	5	4,000,000	0	0	4,000,000	0	Pembelian	17 Desember 2010	2010		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
111	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	5449938	0001	AC Split	Sharp / Split AH-A5SAY	-	Fiber Putih		0		21398107		-	1	Baik	5,000,000	5,000,000	5	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000	1,000,000	Pembelian	21 Oktober 2022	2022	Nurat, SE	Ruang Adum DSP3A
1.3.2.05.02.04.005		**Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)**													**2**			**11,000,000**		**11,000,000**	**0**	**0**	**11,000,000**	**0**						
112	1.3.2.05.02.04.005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	429253	0001		LG / Low Watt	1 PK	MIKA		0		-		-	1	Baik	5,500,000	5,500,000	5	5,500,000	0	0	5,500,000	0	DAU	7 Agustus 2014	2014	CALARA HARYATI, S. Sos	AC (Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
113	1.3.2.05.02.04.005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	429254	0002		LG / Low Watt	1 PK	MIKA		0		-		-	1	Baik	5,500,000	5,500,000	5	5,500,000	0	0	5,500,000	0	DAU	7 Agustus 2014	2014	CALARA HARYATI, S. Sos	AC (Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.05.02.04.006		**Kipas Angin**													**8**			**15,583,000**		**15,583,000**	**0**	**0**	**15,583,000**	**0**						
114	1.3.2.05.02.04.006	Kipas Angin	429226	0001		Lokal / -	-	besi		0	-	-	-	-	1	Baik	2,093,000	2,093,000	5	2,093,000	0	0	2,093,000	0	Pembelian	31 Desember 2009	2009		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
115	1.3.2.05.02.04.006	Kipas Angin	429241	0002		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	1,125,000	1,125,000	5	1,125,000	0	0	1,125,000	0	Pembelian	28 September 2012	2012		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
116	1.3.2.05.02.04.006	Kipas Angin	429242	0003		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	1,125,000	1,125,000	5	1,125,000	0	0	1,125,000	0	Pembelian	28 September 2012	2012		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
117	1.3.2.05.02.04.006	Kipas Angin	429256	0001		Panasonic / Deck	Besar	Plastik		0		-		-	1	Baik	2,500,000	2,500,000	5	2,500,000	0	0	2,500,000	0	DAU	10 September 2014	2014	CALARA HARYATI, S. Sos	BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
118	1.3.2.05.02.04.006	Kipas Angin	429257	0002		Panasonic / Deck	Besar	Plastik		0		-		-	1	Baik	2,500,000	2,500,000	5	2,500,000	0	0	2,500,000	0	DAU	10 September 2014	2014	CALARA HARYATI, S. Sos	BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
119	1.3.2.05.02.04.006	Kipas Angin	429258	0003		Panasonic / Deck	Besar	Plastik		0		-		-	1	Baik	2,500,000	2,500,000	5	2,500,000	0	0	2,500,000	0	DAU	10 September 2014	2014	CALARA HARYATI, S. Sos	BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
120	1.3.2.05.02.04.006	Kipas Angin	429261	0004		Panasonic / Deck	Besar	Plastik		0		-		-	1	Baik	2,500,000	2,500,000	5	2,500,000	0	0	2,500,000	0	DAU	10 September 2014	2014	CALARA HARYATI, S. Sos	BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
121	1.3.2.05.02.04.006	Kipas Angin	429309	0001		Panasonic / F-EY1511	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	1,240,000	1,240,000	5	1,240,000	0	0	1,240,000	0	Pembelian	30 November 2015	2015	Pengurus Barang	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
1.3.2.05.02.05		**ALAT DAPUR**													**1**			**1,000,000**		**1,000,000**	**0**	**0**	**1,000,000**	**0**						
1.3.2.05.02.05.001		**Kompor Listrik (Alat Dapur)**													**1**			**1,000,000**		**1,000,000**	**0**	**0**	**1,000,000**	**0**						
122	1.3.2.05.02.05.001	Kompor Listrik (Alat Dapur)	429295	0001	Tempat Masak	Lokal / -	-	Kayu Keramik		0		-		-	1	Baik	1,000,000	1,000,000	5	1,000,000	0	0	1,000,000	0	Pembelian	28 November 2015	2015	Asik	Penyediaan peralatan rumah tangga(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.05.02.06		**ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)**													**12**			**40,240,750**		**40,240,750**	**0**	**0**	**40,240,750**	**0**						
1.3.2.05.02.06.001		**Radio**													**2**			**4,000,000**		**4,000,000**	**0**	**0**	**4,000,000**	**0**						
123	1.3.2.05.02.06.001	Radio	429294	0001	lemari makan	Lokal / -	sedang	kaca Almunium		0		-		-	1	Baik	2,000,000	2,000,000	5	2,000,000	0	0	2,000,000	0	Pembelian	28 November 2015	2015	Asik	penyediaan peralatan rumah tangga(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
124	1.3.2.05.02.06.001	Radio	429297	0002	Meja makan	Caserini / -	-	Kayu		0		-		-	1	Baik	2,000,000	2,000,000	5	2,000,000	0	0	2,000,000	0	Pembelian	28 November 2015	2015	Asik	penyediaan peralatan rumah tangga(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.05.02.06.002		**Televisi**													**1**			**3,900,000**		**3,900,000**	**0**	**0**	**3,900,000**	**0**						
125	1.3.2.05.02.06.002	Televisi	2401283	0001	Televisi LED	LG Smart / LED Smart TV	32 inch	Fiber		0		-		-	1	Baik	3,900,000	3,900,000	5	3,900,000	0	0	3,900,000	0	HIBAH	9 Desember 2019	2019		Sekretariat PUSPAGA Perlindungan Anak
1.3.2.05.02.06.008		**Sound System**													**1**			**10,000,000**		**10,000,000**	**0**	**0**	**10,000,000**	**0**						
126	1.3.2.05.02.06.008	Sound System	429259	0001	Sound System	BMB / -	-	BESI		0		-		-	1	Baik	10,000,000	10,000,000	5	10,000,000	0	0	10,000,000	0	DAU	10 September 2014	2014	CALARA HARYATI, S. Sos	BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.05.02.06.012		**Wireless**													**1**			**5,000,000**		**5,000,000**	**0**	**0**	**5,000,000**	**0**						
127	1.3.2.05.02.06.012	Wireless	429284	0001		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	5,000,000	5,000,000	5	5,000,000	0	0	5,000,000	0	DAU	22 Desember 2014	2014	FREDDY WILIAM LANTU, S. Sos	WIRELESS + ROUTER MODEM + LAN(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.05.02.06.018		**Unit Power Supply**													**1**			**1,487,000**		**1,487,000**	**0**	**0**	**1,487,000**	**0**						
128	1.3.2.05.02.06.018	Unit Power Supply	429212	0001		Lokal / UPS	-	Metal		0		-		-	1	Baik	1,487,000	1,487,000	5	1,487,000	0	0	1,487,000	0	Pembelian	3 Desember 2007	2007		Ex Dinsos(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.05.02.06.021		**Camera Video**													**1**			**3,000,000**		**3,000,000**	**0**	**0**	**3,000,000**	**0**						
129	1.3.2.05.02.06.021	Camera Video	429246	0001		SONY / -	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	3,000,000	3,000,000	5	3,000,000	0	0	3,000,000	0	Pembelian	30 September 2013	2013		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.05.02.06.022		**Camera film**													**2**			**9,000,000**		**9,000,000**	**0**	**0**	**9,000,000**	**0**						

130	1.3.2.05.02.06.022	Camera film	429124	0001		Canon / EOS 1200D	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	4,500,000	4,500,000	5	4,500,000	0	0	4,500,000	0	Pembelian	15 Februari 2016	2016	Pengurus Barang	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
131	1.3.2.05.02.06.022	Camera film	429136	0002		Canon / EOS 1200D	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	4,500,000	4,500,000	5	4,500,000	0	0	4,500,000	0	Pembelian	15 Februari 2016	2016	Pengurus Barang	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
1.3.2.05.02.06.038		**Dispenser**													**2**			**2,375,000**		**2,375,000**	**0**	**0**	**2,375,000**	**0**					
132	1.3.2.05.02.06.038	Dispenser	429155	0001		- / -	-	Plastic		0		-		-	1	Baik	1,000,000	1,000,000	5	1,000,000	0	0	1,000,000	0	Pembelian	21 November 2016	2016	Liberti Nungkat, S.Sos	Pengadaan alat rumah tangga P2TP2A(Mutasi dari (baru) DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK,PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA)
133	1.3.2.05.02.06.038	Dispenser	2401262	0001	Dispencer	Miyako / -	-	campuran		0		-		-	1	Baik	1,375,000	1,375,000	5	1,375,000	0	0	1,375,000	0	HIBAH	9 Desember 2019	2019		Sekretariat PUSPAGA Perlindungan Anak
1.3.2.05.02.06.062		**Alat Pemanas Ruangan**													**1**			**1,478,750**		**1,478,750**	**0**	**0**	**1,478,750**	**0**					
134	1.3.2.05.02.06.062	Alat Pemanas Ruangan	429201	0001		LOKAL / MAGIC WARMER	3 Kg	ALUMUNIUM		0		-		-	1	Baik	1,478,750	1,478,750	5	1,478,750	0	0	1,478,750	0	Pembelian	29 Desember 2006	2006		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.05.03		**MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT**													**73**			**148,563,100**		**146,563,100**	**1,000,000**	**0**	**147,563,100**	**1,000,000**					
1.3.2.05.03.01		**MEJA KERJA PEJABAT**													**42**			**98,660,000**		**96,660,000**	**1,000,000**	**0**	**97,660,000**	**1,000,000**					
1.3.2.05.03.01.004		**Meja Kerja Pejabat Eselon II**													**3**			**13,760,000**		**11,760,000**	**1,000,000**	**0**	**12,760,000**	**1,000,000**					
135	1.3.2.05.03.01.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	429191	0001		INVINITY / 1 BIRO	-	KAYU		0		-		-	1	Baik	1,260,000	1,260,000	5	1,260,000	0	0	1,260,000	0	Pembelian	31 Desember 2005	2005		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
136	1.3.2.05.03.01.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	429277	0001		Lokal / -	BESAR	KAYU		0		-		-	1	Baik	7,500,000	7,500,000	5	7,500,000	0	0	7,500,000	0	DAU	16 September 2014	2014	CALARA HARYATI, S.Sos	BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
137	1.3.2.05.03.01.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	5449939	0001	Meja Kerja Kepala Dinas	Lokal / Laci 6 Kiri Kanan	189 cm x 90 cm x 75 cm	Kayu		0		-		-	1	Baik	5,000,000	5,000,000	5	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000	1,000,000	Pembelian	21 Oktober 2022	2022	Damianus, SH	Ruang Kadis DSP3A
1.3.2.05.03.01.005		**Meja Kerja Pejabat Eselon III**													**1**			**15,000,000**		**15,000,000**	**0**	**0**	**15,000,000**	**0**					
138	1.3.2.05.03.01.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	429085	0001		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	15,000,000	15,000,000	5	15,000,000	0	0	15,000,000	0	Pembelian	31 Desember 2009	2009		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
1.3.2.05.03.01.006		**Meja Kerja Pejabat Eselon IV**													**26**			**51,400,000**		**51,400,000**	**0**	**0**	**51,400,000**	**0**					
139	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429088	0001		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	1,100,000	1,100,000	5	1,100,000	0	0	1,100,000	0	Pembelian	11 Juni 2010	2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
140	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429089	0002		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	1,100,000	1,100,000	5	1,100,000	0	0	1,100,000	0	Pembelian	11 Juni 2010	2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
141	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429090	0003		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	1,100,000	1,100,000	5	1,100,000	0	0	1,100,000	0	Pembelian	11 Juni 2010	2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
142	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429091	0004		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	1,100,000	1,100,000	5	1,100,000	0	0	1,100,000	0	Pembelian	11 Juni 2010	2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
143	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429092	0005		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	1,100,000	1,100,000	5	1,100,000	0	0	1,100,000	0	Pembelian	11 Juni 2010	2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
144	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429093	0006		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	1,100,000	1,100,000	5	1,100,000	0	0	1,100,000	0	Pembelian	11 Juni 2010	2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
145	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429121	0001		- / -	-	Plywood, Plastik		0		-		-	1	Baik	2,000,000	2,000,000	5	2,000,000	0	0	2,000,000	0	Pembelian	9 Mei 2016	2016	Pengurus Barang	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
146	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429122	0002		- / -	-	Plywood, Plastik		0		-		-	1	Baik	2,000,000	2,000,000	5	2,000,000	0	0	2,000,000	0	Pembelian	9 Mei 2016	2016	Pengurus Barang	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
147	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429123	0003		- / -	-	Plywood, Plastik		0		-		-	1	Baik	2,000,000	2,000,000	5	2,000,000	0	0	2,000,000	0	Pembelian	9 Mei 2016	2016	Pengurus Barang	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
148	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429125	0004		- / -	-	Plywood, Plastik		0		-		-	1	Baik	2,000,000	2,000,000	5	2,000,000	0	0	2,000,000	0	Pembelian	9 Mei 2016	2016	Pengurus Barang	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
149	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429126	0005		- / -	-	Plywood, Plastik		0		-		-	1	Baik	2,000,000	2,000,000	5	2,000,000	0	0	2,000,000	0	Pembelian	9 Mei 2016	2016	Pengurus Barang	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
150	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429139	0006		- / -	-	Plywood, Plastik		0		-		-	1	Baik	2,000,000	2,000,000	5	2,000,000	0	0	2,000,000	0	Pembelian	9 Mei 2016	2016	Pengurus Barang	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
151	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429140	0007		- / -	-	Plywood, Plastik		0		-		-	1	Baik	2,000,000	2,000,000	5	2,000,000	0	0	2,000,000	0	Pembelian	9 Mei 2016	2016	Pengurus Barang	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
152	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429141	0008		- / -	-	Plywood, Plastik		0		-		-	1	Baik	2,000,000	2,000,000	5	2,000,000	0	0	2,000,000	0	Pembelian	9 Mei 2016	2016	Pengurus Barang	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
153	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429142	0009		- / -	-	Plywood, Plastik		0		-		-	1	Baik	2,000,000	2,000,000	5	2,000,000	0	0	2,000,000	0	Pembelian	9 Mei 2016	2016	Pengurus Barang	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
154	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429143	0010		- / -	-	Plywood, Plastik		0		-		-	1	Baik	2,000,000	2,000,000	5	2,000,000	0	0	2,000,000	0	Pembelian	9 Mei 2016	2016	Pengurus Barang	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
155	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429271	0001		Lokal / -	1 BIRO	KAYU		0		-		-	1	Baik	3,000,000	3,000,000	5	3,000,000	0	0	3,000,000	0	DAU	16 September 2014	2014	CALARA HARYATI, S.Sos	BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
156	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429272	0002		Lokal / -	1 BIRO	KAYU		0		-		-	1	Baik	3,000,000	3,000,000	5	3,000,000	0	0	3,000,000	0	DAU	16 September 2014	2014	CALARA HARYATI, S.Sos	BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
157	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429273	0003		Lokal / -	1 BIRO	KAYU		0		-		-	1	Baik	3,000,000	3,000,000	5	3,000,000	0	0	3,000,000	0	DAU	16 September 2014	2014	CALARA HARYATI, S.Sos	BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))

158	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429278	0004		Lokal / -	1 BIRO	KAYU		0		-		-	1	Baik	3,000,000	3,000,000	5	3,000,000	0	0	3,000,000	0	DAU	16 September 2014	2014	CALARA HARYATI, S.Sos	BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
159	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429279	0005		Lokal / -	1 BIRO	KAYU		0		-		-	1	Baik	3,000,000	3,000,000	5	3,000,000	0	0	3,000,000	0	DAU	16 September 2014	2014	CALARA HARYATI, S.Sos	BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
160	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429280	0006		Lokal / -	1 BIRO	KAYU		0		-		-	1	Baik	3,000,000	3,000,000	5	3,000,000	0	0	3,000,000	0	DAU	16 September 2014	2014	CALARA HARYATI, S.Sos	BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
161	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2401268	0001	Meja Kerja Pejabat	LOkal / -	-	Kayu		0		-		-	1	Baik	1,400,000	1,400,000	5	1,400,000	0	0	1,400,000	0	Pembelian	11 September 2019	2019	Basilius Junaidi, SE	
162	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2401271	0002	Meja Kerja Pejabat	LOkal / -	-	Kayu		0		-		-	1	Baik	1,400,000	1,400,000	5	1,400,000	0	0	1,400,000	0	Pembelian	11 September 2019	2019	Basilius Junaidi, SE	
163	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5397913	0001	Meja Kerja	Lokal / -	Standar	Kayu		0		-		-	1	Baik	2,000,000	2,000,000	5	2,000,000	0	0	2,000,000	0	Pembelian	2 November 2020	2020		
164	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5397923	0002	Meja Kerja	Lokal / -	Standar	Kayu		0		-		-	1	Baik	2,000,000	2,000,000	5	2,000,000	0	0	2,000,000	0	Pembelian	2 November 2020	2020		
1.3.2.05.03.01.007		**Meja Kerja Pejabat Eselon V**													**5**			**7,500,000**		**7,500,000**	**0**	**0**	**7,500,000**	**0**						
165	1.3.2.05.03.01.007	Meja Kerja Pejabat Eselon V	429274	0001		Lokal / SEDANG	1/2 BIRO	KAYU		0		-		-	1	Baik	1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	0	DAU	16 September 2014	2014	CALARA HARYATI, S. Sos	BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
166	1.3.2.05.03.01.007	Meja Kerja Pejabat Eselon V	429275	0002		Lokal / SEDANG	1/2 BIRO	KAYU		0		-		-	1	Baik	1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	0	DAU	16 September 2014	2014	CALARA HARYATI, S. Sos	BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
167	1.3.2.05.03.01.007	Meja Kerja Pejabat Eselon V	429276	0003		Lokal / SEDANG	1/2 BIRO	KAYU		0		-		-	1	Baik	1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	0	DAU	16 September 2014	2014	CALARA HARYATI, S. Sos	BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
168	1.3.2.05.03.01.007	Meja Kerja Pejabat Eselon V	429281	0004		Lokal / SEDANG	1/2 BIRO	KAYU		0		-		-	1	Baik	1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	0	DAU	16 September 2014	2014	CALARA HARYATI, S. Sos	BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
169	1.3.2.05.03.01.007	Meja Kerja Pejabat Eselon V	429282	0005		Lokal / SEDANG	1/2 BIRO	KAYU		0		-		-	1	Baik	1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	0	DAU	16 September 2014	2014	CALARA HARYATI, S. Sos	BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.05.03.01.008		**Meja Kerja Pegawai Non Struktural**													**7**			**11,000,000**		**11,000,000**	**0**	**0**	**11,000,000**	**0**						
170	1.3.2.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	429164	0001		Lokal / -	-	kayu		0	-	-	-	-	1	Baik	1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	0	Pembelian	19 Mei 2009	2009		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELURAGA BERENCANA)
171	1.3.2.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	429165	0002		Lokal / -	-	kayu		0	-	-	-	-	1	Baik	1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	0	Pembelian	19 Mei 2009	2009		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELURAGA BERENCANA)
172	1.3.2.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	429166	0003		Lokal / -	-	kayu		0	-	-	-	-	1	Baik	1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	0	Pembelian	19 Mei 2009	2009		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELURAGA BERENCANA)
173	1.3.2.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	429167	0004		Lokal / -	-	kayu		0	-	-	-	-	1	Baik	1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	0	Pembelian	19 Mei 2009	2009		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELURAGA BERENCANA)
174	1.3.2.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	807911	0001	Meja 1 Biro	Lokal / 1 Biro	-	kayu, Plywood		0		-		-	1	Baik	2,000,000	2,000,000	5	2,000,000	0	0	2,000,000	0	Pembelian	2 Juli 2018	2018		
175	1.3.2.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	807913	0001	Meja Psikolog	Lokal / 1/2 biro	-	Kayu, Plywood		0		-		-	1	Baik	1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	0	Pembelian	2 Juli 2018	2018		P2TP2A
176	1.3.2.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	807919	0002	Meja Psikolog	Lokal / 1/2 biro	-	Kayu, Plywood		0		-		-	1	Baik	1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	0	Pembelian	2 Juli 2018	2018		P2TP2A
1.3.2.05.03.02		**MEJA RAPAT PEJABAT**													**3**			**3,614,100**		**3,614,100**	**0**	**0**	**3,614,100**	**0**						
1.3.2.05.03.02.005		**Meja Rapat Pejabat Eselon III**													**3**			**3,614,100**		**3,614,100**	**0**	**0**	**3,614,100**	**0**						
177	1.3.2.05.03.02.005	Meja Rapat Pejabat Eselon III	429094	0001		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	1,204,700	1,204,700	5	1,204,700	0	0	1,204,700	0	Pembelian	11 Juni 2010	2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
178	1.3.2.05.03.02.005	Meja Rapat Pejabat Eselon III	429095	0002		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	1,204,700	1,204,700	5	1,204,700	0	0	1,204,700	0	Pembelian	11 Juni 2010	2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
179	1.3.2.05.03.02.005	Meja Rapat Pejabat Eselon III	429096	0003		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	1,204,700	1,204,700	5	1,204,700	0	0	1,204,700	0	Pembelian	11 Juni 2010	2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
1.3.2.05.03.03		**KURSI KERJA PEJABAT**													**16**			**20,500,000**		**20,500,000**	**0**	**0**	**20,500,000**	**0**						
1.3.2.05.03.03.004		**Kursi Kerja Pejabat Eselon II**													**1**			**4,000,000**		**4,000,000**	**0**	**0**	**4,000,000**	**0**						
180	1.3.2.05.03.03.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	429262	0001		Gotec / -	Besar	Karet Busa		0		-		-	1	Baik	4,000,000	4,000,000	5	4,000,000	0	0	4,000,000	0	DAU	10 September 2014	2014	CALARA HARYATI, S.Sos	BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.05.03.03.006		**Kursi Kerja Pejabat Eselon IV**													**15**			**16,500,000**		**16,500,000**	**0**	**0**	**16,500,000**	**0**						
181	1.3.2.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	429138	0001 - 0012		- / -	-	Campuran		0		-		-	12	Baik	1,000,000	12,000,000	5	12,000,000	0	0	12,000,000	0	Pembelian	9 Mei 2016	2016	Pengurus Barang	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
182	1.3.2.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	807912	0001		Front Line / OC-079	-	Busa< besi, Plastik		0		-		-	1	Baik	1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	0	Pembelian	2 Juli 2018	2018		
183	1.3.2.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	807920	0002		Front Line / OC-079	-	Busa< besi, Plastik		0		-		-	1	Baik	1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	0	Pembelian	2 Juli 2018	2018		
184	1.3.2.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	807921	0003		Front Line / OC-079	-	Busa< besi, Plastik		0		-		-	1	Baik	1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	0	Pembelian	2 Juli 2018	2018		
1.3.2.05.03.06		**KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT**													**1**			**5,864,000**		**5,864,000**	**0**	**0**	**5,864,000**	**0**						
1.3.2.05.03.06.004		**Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II**													**1**			**5,864,000**		**5,864,000**	**0**	**0**	**5,864,000**	**0**						
185	1.3.2.05.03.06.004	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	429097	0001		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	5,864,000	5,864,000	5	5,864,000	0	0	5,864,000	0	Pembelian	11 Juni 2010	2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)

1.3.2.05.03.07	**LEMARI DAN ARSIP PEJABAT**													**11**			**19,925,000**		**19,925,000**	**0**	**0**	**19,925,000**	**0**					
1.3.2.05.03.07.007	**Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis**													**10**			**18,425,000**		**18,425,000**	**0**	**0**	**18,425,000**	**0**					
186	1.3.2.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	429264	0001		Lokal / BESAR	DUA PINTU	KAYU		0	-	-	-	1	Baik	1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	0	DAU	16 September 2014	2014	CALARA HARYATI, S. Sos	BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
187	1.3.2.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	429265	0002		Lokal / BESAR	DUA PINTU	KAYU		0	-	-	-	1	Baik	1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	0	DAU	16 September 2014	2014	CALARA HARYATI, S. Sos	BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
188	1.3.2.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	429266	0003		Lokal / BESAR	DUA PINTU	KAYU		0	-	-	-	1	Baik	1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	0	DAU	16 September 2014	2014	CALARA HARYATI, S. Sos	BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
189	1.3.2.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	429267	0004		Lokal / BESAR	DUA PINTU	KAYU		0	-	-	-	1	Baik	1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	0	DAU	16 September 2014	2014	CALARA HARYATI, S. Sos	BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
190	1.3.2.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	429268	0005		Lokal / BESAR	DUA PINTU	KAYU		0	-	-	-	1	Baik	1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	0	DAU	16 September 2014	2014	CALARA HARYATI, S. Sos	BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
191	1.3.2.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	429269	0006		Lokal / BESAR	DUA PINTU	KAYU		0	-	-	-	1	Baik	1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	0	DAU	16 September 2014	2014	CALARA HARYATI, S. Sos	BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
192	1.3.2.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	429270	0007		Lokal / BESAR	DUA PINTU	KAYU		0	-	-	-	1	Baik	1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	0	DAU	16 September 2014	2014	CALARA HARYATI, S. Sos	BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
193	1.3.2.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	429306	0001	Lemari Arsip	Lokal / -	180 x 90 x 50	Besi		0	-	-	-	1	Baik	4,925,000	4,925,000	5	4,925,000	0	0	4,925,000	0	Pembelian	30 November 2015	2015	Pengurus Barang	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
194	1.3.2.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	5397904	0001	Lemari Arsip	Lokal / 2 pintu	-	Kayu		0	-	-	-	1	Baik	1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	0	Pembelian	1 November 2020	2020		
195	1.3.2.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	5397918	0002	Lemari Arsip	Lokal / 2 pintu	-	Kayu		0	-	-	-	1	Baik	1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	0	Pembelian	1 November 2020	2020		
1.3.2.05.03.07.008	**Buffet Kayu**													**1**			**1,500,000**		**1,500,000**	**0**	**0**	**1,500,000**	**0**					
196	1.3.2.05.03.07.008	Buffet Kayu	5397917	0001	Buffet	Lokal / Loker 3	-	Kayu		0	-	-	-	1	Baik	1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	0	Pembelian	1 November 2020	2020		Tanpa Pintu
1.3.2.06	**ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR**													**4**			**16,475,200**		**16,475,200**	**0**	**0**	**16,475,200**	**0**					
1.3.2.06.01	**ALAT STUDIO**													**4**			**16,475,200**		**16,475,200**	**0**	**0**	**16,475,200**	**0**					
1.3.2.06.01.01	**PERALATAN STUDIO AUDIO**													**2**			**7,890,000**		**7,890,000**	**0**	**0**	**7,890,000**	**0**					
1.3.2.06.01.01.050	**Head Compensator**													**1**			**2,940,000**		**2,940,000**	**0**	**0**	**2,940,000**	**0**					
197	1.3.2.06.01.01.050	Head Compensator	429192	0001		Promatic / 1200 VA	-	Besi		0	-	-	-	1	Baik	2,940,000	2,940,000	5	2,940,000	0	0	2,940,000	0	Pembelian	31 Desember 2005	2005		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.06.01.01.059	**Power Amplifier**													**1**			**4,950,000**		**4,950,000**	**0**	**0**	**4,950,000**	**0**					
198	1.3.2.06.01.01.059	Power Amplifier	429302	0001	Amplifier	- / -	-	Campuran		0	-	-	-	1	Baik	4,950,000	4,950,000	5	4,950,000	0	0	4,950,000	0	Pembelian	30 November 2015	2015	Pengurus Barang	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
1.3.2.06.01.02	**PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM**													**2**			**8,585,200**		**8,585,200**	**0**	**0**	**8,585,200**	**0**					
1.3.2.06.01.02.044	**Digital Video Effect**													**1**			**4,500,000**		**4,500,000**	**0**	**0**	**4,500,000**	**0**					
199	1.3.2.06.01.02.044	Digital Video Effect	429232	0001		Lokal / -	-	besi		0	-	-	-	1	Baik	4,500,000	4,500,000	5	4,500,000	0	0	4,500,000	0	Pembelian	17 Desember 2010	2010		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.06.01.02.126	**Camera Digital**													**1**			**4,085,200**		**4,085,200**	**0**	**0**	**4,085,200**	**0**					
200	1.3.2.06.01.02.126	Camera Digital	429217	0001	Camera & Attactment	Canon / -	-	metal		0	-	-	-	1	Baik	4,085,200	4,085,200	5	4,085,200	0	0	4,085,200	0	Pembelian	3 Desember 2007	2007		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.10	**KOMPUTER**													**91**			**580,567,748**		**565,867,748**	**9,400,000**	**0**	**575,267,748**	**5,300,000**					
1.3.2.10.01	**KOMPUTER UNIT**													**50**			**465,979,695**		**451,279,695**	**9,400,000**	**0**	**460,679,695**	**5,300,000**					
1.3.2.10.01.02	**PERSONAL KOMPUTER**													**50**			**465,979,695**		**451,279,695**	**9,400,000**	**0**	**460,679,695**	**5,300,000**					
1.3.2.10.01.02.001	**P.C Unit**													**17**			**151,642,000**		**151,642,000**	**0**	**0**	**151,642,000**	**0**					
201	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	429068	0001		acer / Z1602	18,5 inch	-		0	-	-	-	1	Baik	7,500,000	7,500,000	4	7,500,000	0	0	7,500,000	0	Pembelian	14 Maret 2016	2016	Freddy Wiliam Lantu, S.Sos	Personal Komputer(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
202	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	429069	0005		Lokal / -	-	Campuran		0	-	-	-	1	Baik	8,801,000	8,801,000	4	8,801,000	0	0	8,801,000	0	Pembelian	11 Juni 2010	2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
203	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	429197	0001		MILENIUM / -	14 Inc	Electronic		0	-	-	-	1	Baik	5,460,000	5,460,000	4	5,460,000	0	0	5,460,000	0	Pembelian	31 Desember 2005	2005		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
204	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	429202	0002		HP / 7650	17	ELEKTRONIC		0	-	-	-	1	Baik	4,225,000	4,225,000	4	4,225,000	0	0	4,225,000	0	Pembelian	29 Desember 2006	2006		DEPSOS, Ex Dinsos(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
205	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	429207	0001	Personal Komputer	LOKAL / -	-	campuran		0	-	-	-	1	Baik	7,885,000	7,885,000	4	7,885,000	0	0	7,885,000	0	APBD	4 Maret 2014	2014		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
206	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	429213	0003		Advance / Pentium IV	-	Metal		0	-	-	-	1	Baik	10,263,000	10,263,000	4	10,263,000	0	0	10,263,000	0	Pembelian	3 Desember 2007	2007		Ex Dinsos(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
207	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	429247	0001		LG / -	-	Campuran		0	-	-	-	1	Baik	7,500,000	7,500,000	4	7,500,000	0	0	7,500,000	0	Pembelian	30 September 2013	2013		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
208	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	429316	0001		acer / Z1602	18,5 inch	-		0	-	-	-	1	Baik	7,500,000	7,500,000	4	7,500,000	0	0	7,500,000	0	Pembelian	14 Maret 2016	2016	Freddy Wiliam Lantu, S.Sos	Personal Komputer(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
209	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	429330	0004		Lokal / Intel Pentium Duel Core Proces	E.2180	Campuran		0	-	-	-	1	Baik	8,820,000	8,820,000	4	8,820,000	0	0	8,820,000	0	Pembelian	20 Oktober 2009	2009		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
210	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	429331	0006		Lokal / -	-	Campuran		0	-	-	-	1	Baik	8,801,000	8,801,000	4	8,801,000	0	0	8,801,000	0	Pembelian	11 Juni 2010	2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
211	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	429332	0007		Lokal / -	-	Campuran		0	-	-	-	1	Baik	8,801,000	8,801,000	4	8,801,000	0	0	8,801,000	0	Pembelian	11 Juni 2010	2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)

212	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	807900	0002		- / corei3, 4GB, 500GB, DVD	19,5 inch	besi, fiber		0		-		-	1	Baik	8,000,000	8,000,000	4	8,000,000	0	0	8,000,000	0		14 Mei 2018	2018		
213	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	2400225	0003		- / corei3, 4GB, 500GB, DVD	19,5 inch	besi, fiber		0		-		-	1	Baik	8,000,000	8,000,000	4	8,000,000	0	0	8,000,000	0		14 Mei 2018	2018		
214	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	2401259	0004	PC Unit	HP Desktop PC 280 G3 / Small Form Factor	8GB/1TB	Fiber		0		-		-	1	Baik	10,350,000	10,350,000	4	10,350,000	0	0	10,350,000	0	HIBAH	16 Oktober 2019	2019	Dedi (Tenaga PKH)	Direktorat Jaminan Sosial Keluarga (JSK) Kemensos RI
215	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	2401265	0005	PC Unit	HP Desktop PC 280 G3 / Small Form Factor	8GB/1TB	Fiber		0		-		-	1	Baik	10,350,000	10,350,000	4	10,350,000	0	0	10,350,000	0	HIBAH	16 Oktober 2019	2019	Dedi (Tenaga PKH)	Direktorat Jaminan Sosial Keluarga (JSK) Kemensos RI
216	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	2401291	0001	PC Tablet	Samsung Galaxy Tab A.8 / -	-	Fiber		0		-		-	1	Baik	3,494,000	3,494,000	4	3,494,000	0	0	3,494,000	0	HIBAH	16 Oktober 2019	2019	Dedi PKH	Direktorat Jaminan Sosial Keluarga (JSK) Kemensos RI
217	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	5397910	0001	Personal Computer	- / Multi Touch LED-backlight	27 (68.6cm)	Fiber silver/putih		0		-		-	1	Baik	25,892,000	25,892,000	4	25,892,000	0	0	25,892,000	0	Pembelian	2 November 2020	2020		16 GB DDR4 at 2400MHz
1.3.2.10.01.02.002		**Lap Top**													**16**			**161,660,000**		**146,960,000**	**9,400,000**	**0**	**156,360,000**	**5,300,000**					
218	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	429173	0001		LENOVO / 14"	-	-		0		-		-	1	Baik	7,625,000	7,625,000	4	7,625,000	0	0	7,625,000	0		12 Desember 2015	2015		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELURAGA BERENCANA)
219	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	429215	0001		Lokal / -	-	Metal		0		-		-	1	Baik	5,000,000	5,000,000	4	5,000,000	0	0	5,000,000	0	Pembelian	3 Desember 2007	2007		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
220	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	429239	0002		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	6,000,000	6,000,000	4	6,000,000	0	0	6,000,000	0	Pembelian	17 September 2012	2012		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
221	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	429240	0001		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	7,500,000	7,500,000	4	7,500,000	0	0	7,500,000	0	Pembelian	17 September 2012	2012		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
222	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	807901	0002		Asus X441U / X441U	14 inch	-		0		-		-	1	Baik	8,500,000	8,500,000	4	8,500,000	0	0	8,500,000	0	APBD	14 Mei 2018	2018		
223	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	807905	0001		Asus Vivobook A442U / Vivobook A442U	14 inch	-		0		-		-	1	Baik	12,000,000	12,000,000	4	12,000,000	0	0	12,000,000	0		14 Mei 2018	2018	Jerry, L, SE	
224	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	807906	0003		Asus X441U / X441U	14 inch	-		0		-		-	1	Baik	8,500,000	8,500,000	4	8,500,000	0	0	8,500,000	0	APBD	14 Mei 2018	2018		
225	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	2401264	0001		Asus X441 ub / Asus X441 ub	Standar	Fiber	ruang kerjase	0		-		-	1	Baik	10,000,000	10,000,000	4	10,000,000	0	0	10,000,000	0	Pembelian	14 Mei 2019	2019	Edward Haris, S. Sos	Warna Merah
226	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	2401281	0002		ACER ONE 14 Z476 / Acer On Z476	14	Fiber		0		-		-	1	Baik	9,000,000	9,000,000	4	9,000,000	0	0	9,000,000	0	Pembelian	14 Mei 2019	2019	Petrus, SE	Warna Hitam
227	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	2401302	0003		ACER ASPIRE E5-476G-599H / ASPIRE E5-476G-599H	E14	Fiber		0		-		-	1	Baik	11,000,000	11,000,000	4	11,000,000	0	0	11,000,000	0	Pembelian	14 Mei 2019	2019	BASILIUS JUNAIDI, SE	Abu-abu metalik
228	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	5397906	0001	Laptop/Notebook	- / Intel Core i5-9300H	15.6 FHD (1920*1080)	Fiber Hitam		0		-		-	1	Baik	14,467,500	14,467,500	4	14,467,500	0	0	14,467,500	0	Pembelian	2 November 2020	2020	Jerry L, SE	8 GB DDR4, 256GB SSD
229	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	5397915	0002	Laptop/Notebook	- / Intel Core i5-9300H	15.6 FHD (1920*1080)	Fiber Hitam		0		-		-	1	Baik	14,467,500	14,467,500	4	14,467,500	0	0	14,467,500	0	Pembelian	2 November 2020	2020	Jerry L, SE	8 GB DDR4, 256GB SSD
230	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	5428827	0004	Laptop	ACER / N20C4 Aspire 5	12 Inch	Fiber		0		-		-	1	Baik	10,000,000	10,000,000	4	10,000,000	0	0	10,000,000	0	Pembelian	1 November 2021	2021	NORMILA, S.A.P	
231	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	5450069	0001	Laptop	Acer / -	-	Fiber		0		-		-	1	Baik	13,600,000	13,600,000	4	10,200,000	3,400,000	0	13,600,000	0	Pembelian	21 Oktober 2022	2022	Nurat, SE	Sub Bagian Adum dan Kepegawaian
232	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	5450071	0002		Acer / -	-	Fiber		0		-		-	1	Baik	13,400,000	13,400,000	4	10,050,000	3,350,000	0	13,400,000	0	Pembelian	21 Oktober 2022	2022	Elisabet, S.Sos. M. Si	Bidang PJRS
233	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	6000235	00001	-	ASUZ A3202WBAK-WA382W / -	-	campuran		0	-	-	-	-	1	Baik	10,600,000	10,600,000	4	2,650,000	2,650,000	0	5,300,000	5,300,000	DAU	30 April 2024	2024	-	-
1.3.2.10.01.02.003		**Note Book**													**17**			**152,677,695**		**152,677,695**	**0**	**0**	**152,677,695**	**0**					
234	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429070	0003		ACER / Aspire 4721Z	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	10,000,000	10,000,000	4	10,000,000	0	0	10,000,000	0	Pembelian	20 Oktober 2009	2009		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
235	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429071	0004		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	12,240,000	12,240,000	4	12,240,000	0	0	12,240,000	0	Pembelian	11 Juni 2010	2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
236	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429072	0005		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	12,240,000	12,240,000	4	12,240,000	0	0	12,240,000	0	Pembelian	11 Juni 2010	2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
237	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429073	0006		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	11,918,000	11,918,000	4	11,918,000	0	0	11,918,000	0	Pembelian	25 November 2010	2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
238	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429074	0007		HP / 32 BIT	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	7,250,000	7,250,000	4	7,250,000	0	0	7,250,000	0	Pembelian	1 April 2013	2013		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
239	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429075	0008		ASUS / ASUS	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	9,500,000	9,500,000	4	9,500,000	0	0	9,500,000	0	Pembelian	1 April 2013	2013		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
240	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429076	0009		HP / 32 BIT	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	7,250,000	7,250,000	4	7,250,000	0	0	7,250,000	0	Pembelian	1 April 2013	2013		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
241	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429102	0001		ASUS / -	-	-		0		-		-	1	Baik	10,000,000	10,000,000	4	10,000,000	0	0	10,000,000	0	Pembelian	2 April 2014	2014		BELANJA BARANG INVENTARIS(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
242	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429103	0002		ASUS / -	-	-		0		-		-	1	Baik	10,000,000	10,000,000	4	10,000,000	0	0	10,000,000	0	Pembelian	2 April 2014	2014		BELANJA BARANG INVENTARIS(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)

243	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429105	0003		ASUS / -	-	-		0		-		-	1	Baik	10,000,000	10,000,000	4	10,000,000	0	0	10,000,000	0	Pembelian	2 April 2014	2014		BELANJA BARANG INVENTARIS(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
244	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429106	0004		ASUS / -	-	-		0		-		-	1	Baik	10,000,000	10,000,000	4	10,000,000	0	0	10,000,000	0	Pembelian	2 April 2014	2014		BELANJA BARANG INVENTARIS(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
245	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429224	0001		Lokal / -	-	besi		0	-	-	-	-	1	Baik	7,222,655	7,222,655	4	7,222,655	0	0	7,222,655	0	Pembelian	6 Juli 2009	2009		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
246	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429225	0002		Lokal / -	-	besi		0	-	-	-	-	1	Baik	7,222,655	7,222,655	4	7,222,655	0	0	7,222,655	0	Pembelian	6 Juli 2009	2009		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
247	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429285	0001		ASUS / INTEL CORE i3-4030U, 1.9GHz	14 INCH	PLASTIK		0		-		-	1	Baik	8,584,385	8,584,385	4	8,584,385	0	0	8,584,385	0	DAU	22 Desember 2014	2014	FREDDY WILIAM LANTU, Sos	NOTEBOOK ASUS(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
248	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429304	0001		ACER / One 14 Z1 402-POJN	14	Campuran		0		-		-	1	Baik	6,000,000	6,000,000	4	6,000,000	0	0	6,000,000	0	Pembelian	30 November 2015	2015	LIBERTY SIMANJUNTAK	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
249	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429311	0002		ACER / One 14 Z1 402-POJN	14	Campuran		0		-		-	1	Baik	6,000,000	6,000,000	4	6,000,000	0	0	6,000,000	0	Pembelian	30 November 2015	2015	MARTA LINDA, SE	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
250	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	2401290	0001	Note Book	Lenovo / Ideapad 130 3TID	-	Fiber		0		-		-	1	Baik	7,250,000	7,250,000	4	7,250,000	0	0	7,250,000	0	HIBAH	9 Desember 2019	2019	Liberti Nungkat, S.Sos	Sekretariat PUSPAGA Perlindungan Anak
1.3.2.10.02	**PERALATAN KOMPUTER**														**41**			**114,588,053**		**114,588,053**	**0**	**0**	**114,588,053**	**0**					
1.3.2.10.02.02	**PERALATAN MINI KOMPUTER**														**7**			**32,226,773**		**32,226,773**	**0**	**0**	**32,226,773**	**0**					
1.3.2.10.02.02.010	**Computer Compatible**														**1**			**8,456,773**		**8,456,773**	**0**	**0**	**8,456,773**	**0**					
251	1.3.2.10.02.02.010	Computer Compatible	429286	0001		LG / LCD	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	8,456,773	8,456,773	4	8,456,773	0	0	8,456,773	0	DAU	22 Desember 2014	2014	FREDDY WILIAM LANTU, S. Sos	PERSONAL COMPUTER(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.10.02.02.015	**Cut Sheet Feeder**														**6**			**23,770,000**		**23,770,000**	**0**	**0**	**23,770,000**	**0**					
252	1.3.2.10.02.02.015	Cut Sheet Feeder	429078	0001		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	14,520,000	14,520,000	4	14,520,000	0	0	14,520,000	0	Pembelian	11 Juni 2010	2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
253	1.3.2.10.02.02.015	Cut Sheet Feeder	429079	0002		CANON / CANON MP237	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	1,250,000	1,250,000	4	1,250,000	0	0	1,250,000	0	Pembelian	1 April 2013	2013		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
254	1.3.2.10.02.02.015	Cut Sheet Feeder	429171	0003		Lokal / -	-	Plastik		0		-		-	1	Baik	1,000,000	1,000,000	4	1,000,000	0	0	1,000,000	0	Pembelian	31 Desember 2013	2013		(Mutasi dari (baru) DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK,PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA)
255	1.3.2.10.02.02.015	Cut Sheet Feeder	429172	0004		Lokal / -	-	Plastik		0		-		-	1	Baik	1,000,000	1,000,000	4	1,000,000	0	0	1,000,000	0	Pembelian	31 Desember 2013	2013		(Mutasi dari (baru) DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK,PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA)
256	1.3.2.10.02.02.015	Cut Sheet Feeder	429305	0001		EPSON / L220	-	Plastik		0		-		-	1	Baik	3,000,000	3,000,000	4	3,000,000	0	0	3,000,000	0	Pembelian	30 November 2015	2015	URAI AGUSTIAN, S.KM	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
257	1.3.2.10.02.02.015	Cut Sheet Feeder	429313	0002		EPSON / L220	-	Plastik		0		-		-	1	Baik	3,000,000	3,000,000	4	3,000,000	0	0	3,000,000	0	Pembelian	30 November 2015	2015	DODORIKUS, AP, M.Si	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
1.3.2.10.02.03	**PERALATAN PERSONAL KOMPUTER**														**34**			**82,361,280**		**82,361,280**	**0**	**0**	**82,361,280**	**0**					
1.3.2.10.02.03.001	**CPU (Peralatan Personal Komputer)**														**3**			**11,810,000**		**11,810,000**	**0**	**0**	**11,810,000**	**0**					
258	1.3.2.10.02.03.001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	429082	0002		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	2,580,000	2,580,000	4	2,580,000	0	0	2,580,000	0	Pembelian	20 Oktober 2009	2009		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
259	1.3.2.10.02.03.001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	429223	0001		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	2,260,000	2,260,000	4	2,260,000	0	0	2,260,000	0	Pembelian	31 Desember 2008	2008		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
260	1.3.2.10.02.03.001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	429231	0003		Lokal / -	-	besi		0	-	-	-	-	1	Baik	6,970,000	6,970,000	4	6,970,000	0	0	6,970,000	0	Pembelian	17 Desember 2010	2010		keyboard(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.10.02.03.003	**Printer (Peralatan Personal Komputer)**														**28**			**61,713,780**		**61,713,780**	**0**	**0**	**61,713,780**	**0**					
261	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	429064	0001		epson / L210	F4	-		0		-		-	1	Baik	2,000,000	2,000,000	4	2,000,000	0	0	2,000,000	0	Pembelian	14 Maret 2016	2016	Freddy Wiliam Lantu, S.Sos	Printer epson L210(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
262	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	429066	0001		epson / L210	F4	-		0		-		-	1	Baik	2,000,000	2,000,000	4	2,000,000	0	0	2,000,000	0	Pembelian	14 Maret 2016	2016	Freddy Wiliam Lantu, S.Sos	Printer epson L210(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
263	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	429080	0002		CANON / CANON MP237	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	1,250,000	1,250,000	4	1,250,000	0	0	1,250,000	0	Pembelian	1 April 2013	2013		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
264	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	429081	0003		CANON / CANON MP237	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	1,250,000	1,250,000	4	1,250,000	0	0	1,250,000	0	Pembelian	1 April 2013	2013		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
265	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	429111	0001		EPSON / L220	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	3,000,000	3,000,000	4	3,000,000	0	0	3,000,000	0	Pembelian	15 Februari 2016	2016	Pengurus Barang	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
266	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	429127	0002		EPSON / L220	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	3,000,000	3,000,000	4	3,000,000	0	0	3,000,000	0	Pembelian	15 Februari 2016	2016	Pengurus Barang	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
267	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan	429137	0003		EPSON / L220	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	3,000,000	3,000,000	4	3,000,000	0	0	3,000,000	0	Pembelian	15 Februari	2016	Pengurus Barang	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

		Personal Komputer)																								2016			DAN PEMERINTAH DESA)
268	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	429170	0001		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	1,000,000	1,000,000	4	1,000,000	0	0	1,000,000	0	Pembelian	13 September 2012	2012		(Mutasi dari (baru) DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK,PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA)
269	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	429248	0001		CANON / -	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	1,500,000	1,500,000	4	1,500,000	0	0	1,500,000	0	Pembelian	30 September 2013	2013		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
270	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	429249	0002		CANON / -	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	1,500,000	1,500,000	4	1,500,000	0	0	1,500,000	0	Pembelian	30 September 2013	2013		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
271	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	429307	0004		EPSON / L220	-	Campuran		0		-		-	1	Baik	3,000,000	3,000,000	4	3,000,000	0	0	3,000,000	0	Pembelian	15 Februari 2016	2016	Pengurus Barang	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
272	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2401270	0001		Canon Pixma MX 497 / Pixma MX 497	Standar	Fiber	ruang kerjase	0		-		-	1	Baik	2,000,000	2,000,000	4	2,000,000	0	0	2,000,000	0	Pembelian	14 Mei 2019	2019		Warna Hitam
273	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2401278	0003		Canon Pixma MX 497 / Pixma MX 497	Standar	Fiber		0		KKHJ55649		-	1	Baik	2,000,000	2,000,000	4	2,000,000	0	0	2,000,000	0	Pembelian	14 Mei 2019	2019		Warna Hitam
274	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2401279	0001		Canon Pixma MX 497 / Pixma MX 497	Standar	Fiber		0		-		-	1	Baik	2,000,000	2,000,000	4	2,000,000	0	0	2,000,000	0	Pembelian	14 Mei 2019	2019		Warna Hitam
275	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2401280	0001		Canon Pixma MX 497 / Pixma MX 497	Standar	Fiber		0		KKHJ55620		-	1	Baik	2,000,000	2,000,000	4	2,000,000	0	0	2,000,000	0	Pembelian	14 Mei 2019	2019		Warna Hitam
276	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2401286	0002	Printer	Epson L3110 / L3110	-	Fiber		0		-		-	1	Baik	2,800,000	2,800,000	4	2,800,000	0	0	2,800,000	0	HIBAH	9 Desember 2019	2019		Sekretariat PUSPAGA Perlindungan Anak
277	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2401298	0004		Canon Pixma MX 497 / Pixma MX 497	Standar	Fiber		0		KKHJ14633		-	1	Baik	2,000,000	2,000,000	4	2,000,000	0	0	2,000,000	0	Pembelian	14 Mei 2019	2019		Warna Hitam
278	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2401299	0001		Canon Pixma MX 497 / Pixma MX 497	Standar	Fiber		0		KKHJ55632		-	1	Baik	2,000,000	2,000,000	4	2,000,000	0	0	2,000,000	0	Pembelian	14 Mei 2019	2019		Warna Hitam
279	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2401300	0001		Canon Pixma MX 497 / Pixma MX 497	Standar	Fiber		0		KKHJ56471		-	1	Baik	2,000,000	2,000,000	4	2,000,000	0	0	2,000,000	0	Pembelian	14 Mei 2019	2019		Warna Hitam
280	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5397905	0002	Printer	Canon / Pixma G1010	-	Fiber Hitam		0		-		-	1	Baik	1,950,000	1,950,000	4	1,950,000	0	0	1,950,000	0	Pembelian	17 November 2020	2020	Natalia, SE	
281	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5397907	0002	Printer	Canon / Pixma G1010	-	Fiber Hitam		0		-		-	1	Baik	1,950,000	1,950,000	4	1,950,000	0	0	1,950,000	0	Pembelian	17 November 2020	2020	Natalia, SE	
282	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5397919	0005	Printer	Epson / L3110	-	Fiber Hitam		0		-		-	1	Baik	3,050,000	3,050,000	4	3,050,000	0	0	3,050,000	0	Pembelian	17 November 2020	2020	Riyanto, A.Md	Printer Camscannaer
283	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5397921	0001	Printer	Epson / L3110	-	Fiber Hitam		0		-		-	1	Baik	3,050,000	3,050,000	4	3,050,000	0	0	3,050,000	0	Pembelian	17 November 2020	2020	Riyanto, A.Md	Printer Camscannaer
284	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5397922	0001	Printer	Canon / Pixma MP287	-	Fiber hItam		0		-		-	1	Baik	1,500,000	1,500,000	4	1,500,000	0	0	1,500,000	0	Pembelian	2 November 2020	2020		Flatbed
285	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5428820	0002		Canon / Pixma MP287	32 cm x 32 cm	Fiber		0		-		-	1	Baik	2,728,445	2,728,445	4	2,728,445	0	0	2,728,445	0	Pembelian	30 November 2021	2021	Riyanto, A. Md	
286	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5428821	0003		Canon / Pixma MP287	32 cm x 32 cm	Fiber		0		-		-	1	Baik	2,728,445	2,728,445	4	2,728,445	0	0	2,728,445	0	Pembelian	30 November 2021	2021	Riyanto, A. Md	
287	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5428822	0004		Epson / L3110	32 cm x 32 cm	Fiber		0		-		-	1	Baik	2,728,445	2,728,445	4	2,728,445	0	0	2,728,445	0	Pembelian	30 November 2021	2021	Riyanto, A. Md	
288	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5428823	0005		Epson / L3110	32 cm x 32 cm	Fiber		0		-		-	1	Baik	2,728,445	2,728,445	4	2,728,445	0	0	2,728,445	0	Pembelian	30 November 2021	2021	Riyanto, A. Md	
1.3.2.10.02.03.007		**External**													**3**			**8,837,500**		**8,837,500**	**0**	**0**	**8,837,500**	**0**					
289	1.3.2.10.02.03.007	External	429194	0001	Stabilizer	TWIN 006 / -	-	Besi		0		-		-	1	Baik	2,940,000	2,940,000	4	2,940,000	0	0	2,940,000	0	Pembelian	31 Desember 2005	2005		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
290	1.3.2.10.02.03.007	External	429195	0002	Stabilzer	TWIN DOG / -	-	Besi		0		-		-	1	Baik	2,940,000	2,940,000	4	2,940,000	0	0	2,940,000	0	Pembelian	31 Desember 2005	2005		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))

291	1.3.2.10.02.03.007	External	429198	0003	Stabilizer	TOYOSAKI / -	kecil	Besi		0		-		-	1	Baik	2,957,500	2,957,500	4	2,957,500	0	0	2,957,500	0	Pembelian	8 Desember 2006	2006		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
J U M L A H																	**1,719,461,598**		**1,665,068,848**	**45,605,750**	**0**	**1,710,674,598**	**8,787,000**					

Kamis, 5 Maret 2026
Pengguna Barang

dr. I MADE PUTRA NEGARA, M.M
NIP : 19661116 199903 1 002

DAFTAR BMD
GEDUNG DAN BANGUNAN
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2025

Provinsi : KALIMANTAN BARAT
Pemerintah Daerah : BENGKAYANG
Pengguna Barang : **DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

no	Kode Barang	Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi nama barang	Spesifikasi lainnya	Jumlah	Lokasi	Unit	Sub Unit	Jumlah Lantai	Satuan	Harga satuan perolehan	Status penggunaan	Cara perolehan	Tanggal perolehan	Nilai Perolehan	Umur	Akumulasi Penyusutan sebelumnya	Beban	Koreksi Akumulasi	Akumulasi Penyusutan akhir	Nilai Buku	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Gedung dan bangunan																**1,369,713,336**		**454,715,596.41**	**22,454,442.55**	**0**	**477,170,038.96**	**892,543,297.04**	
	BANGUNAN GEDUNG																**1,369,713,336**		**454,715,596.41**	**22,454,442.55**	**0**	**477,170,038.96**	**892,543,297.04**	
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA																**1,369,713,336**		**454,715,596.41**	**22,454,442.55**	**0**	**477,170,038.96**	**892,543,297.04**	
	BANGUNAN GEDUNG KANTOR																**1,369,713,336**		**454,715,596.41**	**22,454,442.55**	**0**	**477,170,038.96**	**892,543,297.04**	
1	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	429289	0001	Paving Blok	0.00 m2	0	Halaman Rumah Singgah	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				94,580,000		Pembelian	26/11/2015	94,580,000	50	56,344,050	5,634,405	0	61,978,455		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
2	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	429333	0001		40.00 m2	0	Garasi samping Gedung Kantor Dinsosnakertrans					13,236,086		APBD	01/11/2016	13,236,086	50	151,380,337.96	16,820,037.55	0	168,200,375.51		Penambahan garasi(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
3	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	429334	0001		0.00 m2	1	JL. GUNA BARU, RANGKANG BEGKAYANG					674,977,000		HIBAH	29/12/2000	674,977,000	50	107,996,320	0	0	107,996,320		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
4	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	429335	0002		0.00 m2	0						20,000,000		Pembelian	31/12/2008	20,000,000	47	12,488,950.64	0	0	12,488,950.64		PENGADAAN TRALIS(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
5	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	429336	0003		0.00 m2	0	Bengkayang					334,280,000		Pembelian	28/07/2009	334,280,000	50	54,526,303.76	0	0	54,526,303.76		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
6	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	429337	0001		0.00 m2	0						45,500,000		Pembelian	31/12/2012	45,500,000	50	71,979,634.05	0	0	71,979,634.05		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
7	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	429338	0001	Rumah Singgah	0.00 m2	1	Di belakang kantor dinsosnakertrans	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				187,140,250		Pembelian	16/11/2015	187,140,250	50	0	0	0	0		Pembangunan Rumah Singgah(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
																	1,369,713,336		**454,715,596.41**	**22,454,442.55**	**0**	**477,170,038.96**	**892,543,297.04**	

Kamis, 5 Maret 2026
Pengguna Barang

dr. I MADE PUTRA NEGARA, M.M
NIP : 19661116 199903 1 002

DAFTAR BMD
JALAN , IRIGASI DAN JARINGAN
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2025

Provinsi : KALIMANTAN BARAT
Pemerintah Daerah : BENGKAYANG
Pengguna Barang : **DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

no	Kode Barang	Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi nama barang	Konstruksi	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan/ Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilkan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga satuan perolehan	Status penggunaan	Cara perolehan	Tanggal perolehan	Nilai Perolehan	Umur	Akumulasil Penyusutan	Beban	Koreksi Akumulasi	Jumlah Akumulasi	Nilai Buku	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Jalan, irigasi dan jaringan										**112.5**						**197,639,000**		**67,424,966.67**	**6,587,966.66**	**0**	**74,012,933.33**	**123,626,066.67**	
	BANGUNAN AIR										**114.5**						**395,278,000**		**134,849,933.34**	**13,175,933.32**	**0**	**148,025,866.66**	**247,252,133.34**	
	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALA										**112.5**						**197,639,000**		**67,424,966.67**	**6,587,966.66**	**0**	**74,012,933.33**	**123,626,066.67**	
	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI										**0**						**121,999,000**		**44,732,966.67**	**4,066,633.33**	**0**	**48,799,600**	**73,199,400**	
1	1.3.4.02.04.04.002	Saluran Drainage	429283	0001	'	PENGADAAN DRAINASE		KELILING DINAS SOSNAKERTRANS KABUPATEN BENGKAYANG	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Kasubbag Renja dan Keuangan	0		121,999,000	DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DAU	12/12/2014	121,999,000	30	44,732,966.67	4,066,633.33	0	48,799,600	73,199,400	Sudah Termasuk Honor Panitia Sebesar Rp. 712.000(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
	BANGUNAN PENGAMANAN SUNGAI/PANTAI										**112.5**						**75,640,000**		**22,692,000**	**2,521,333.33**	**0**	**25,213,333.33**	**50,426,666.67**	
2	1.3.4.02.04.05.008	Bangunan Pelimpah Banjir	429067	0001	'Rabat Beton dan Turap	Rabat Beton dan Turap		Diantara gedung Dinsosnakretrans dan Rumah Singgah			112.5	M2	75,640,000	DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	APBD	26/04/2016	75,640,000	30	22,692,000	2,521,333.33	0	25,213,333.33	50,426,666.67	(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
																	197,639,000		**67,424,966.67**	**6,587,966.66**	**0**	**74,012,933.33**	**123,626,066.67**	

Kamis, 5 Maret 2026
Pengguna Barang

dr. I MADE PUTRA NEGARA, M.M
NIP : 19661116 199903 1 002

DAFTAR BMD
ASET TETAP LAINNYA
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2025

Provinsi : KALIMANTAN BARAT
Pemerintah Daerah : BENGKAYANG
Pengguna Barang : **DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

no	Kode Barang	Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi nama barang	Spesifikasi	Jumlah	Judul	Pencipta	Ukuran	Bahan	Satuan	Harga satuan perolehan	Sub Unit	Cara perolehan	Tanggal perolehan	Nilai Perolehan	umur	Akumulasi Awal	Beban	Koreksi Akumulasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.5		**Asset tetap lainnya**					**1**										**3,300,000**					
1.3.5.01		**BAHAN PERPUSTAKAAN**					**1**										**3,300,000**					
1.3.5.01.01		**BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK**					**1**										**3,300,000**					
1.3.5.01.01.01		**BUKU UMUM**					**1**										**3,300,000**					
1.3.5.01.01.01.001		**Monograf**					**1**										**3,300,000**					
1	1.3.5.01.01.01.001	Monograf	429109	0001	Buku Perpustakaan		1						3,300,000		Pembelian	30/12/2011	3,300,000	0	0	0	0	TPL 10(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
Jumlah																	3,300,000		0	0	0	

Kamis, 5 Maret 2026
Pengguna Barang

dr. I MADE PUTRA NEGARA, M.M
NIP : 19661116 199903 1 002

DAFTAR BMD
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2025

Provinsi : KALIMANTAN BARAT
Pemerintah Daerah : BENGKAYANG
Pengguna Barang : **DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

no	Kode Barang	Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi nama barang	Spesifikasi lainnya	Jumlah	Lokasi	Titik koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah Lantai	Satuan	Harga satuan perolehan	Status penggunaan	Cara perolehan	Tanggal perolehan	Nilai Perolehan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Nihil.....	m2	0						0				0	

Kamis, 5 Maret 2026
Pengguna Barang

dr. I MADE PUTRA NEGARA, M.M
NIP : 19661116 199903 1 002

DAFTAR BMD
ASET TAK BERWUJUD
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2025

Provinsi : KALIMANTAN BARAT
Pemerintah Daerah : BENGKAYANG
Pengguna Barang : DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

no	Kode Barang	Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi nama barang	Spesifikasi lainnya	Jumlah	Lokasi	Satuan	Harga satuan perolehan	Status penggunaan	Cara perolehan	Tanggal perolehan	Nilai Perolehan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.5.3		**ASET TAK BERWUJUD**					**2**							**128,426,680**	
1.5.3.01		**Aset Tak Berwujud**					**2**							**128,426,680**	
1.5.3.01.01		**Aset tak berwujud**					**2**							**128,426,680**	
1.5.3.01.01.01		**Aset Tak Berwujud**					**2**							**128,426,680**	
1.5.3.01.01.01.0001		**Aset Tak Berwujud**					**2**							**128,426,680**	
1	1.5.3.01.01.01.0001	Aset Tak Berwujud	5464483	00001	Website Kantor Dinsos PPPA		1	INSTITUT SHANTI BUANA		28,426,680		-	29/05/2023	28,426,680	
2	1.5.3.01.01.01.0001	Aset Tak Berwujud	6000240	00001	-	aplikasi	1			100,000,000		DAU	31/12/2024	100,000,000	

Kamis, 5 Maret 2026
Pengguna Barang

dr. I MADE PUTRA NEGARA, M.M
NIP : 19661116 199903 1 002

DAFTAR BMD

BUKU INVENTARIS

KABUPATEN BENGKAYANG

TAHUN 2025

Provinsi : KALIMANTAN BARAT

Pemerintah Daerah : BENGKAYANG

Pengguna Barang : DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

no	Kode Barang	Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi nama barang	Merek / Tipe	Spesifikasi lainnya		Lokasi	Kendaraan Dinas					Jumlah	Satuan	Harga satuan perolehan	Nilai perolehan	Penyusutan					Cara perolehan	Tanggal perolehan	Status peng gunaan	Keterangan
							ukuran	Bahan		CC	Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB	Nomor Mesin					umur	Akum s/d tahun lalu	Beban	Korekis	Akum s/d tahun ini				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.3.1		**Tanah**													**2**			**114,400,000**		**0**	**0**	**0**	**0**				
1.3.1.01		**TANAH**													**2**			**114,400,000**		**0**	**0**	**0**	**0**				
1.3.1.01.01		**TANAH PERSIL**													**1**			**7,150,000**		**0**	**0**	**0**	**0**				
1.3.1.01.01.04		**TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA**													**1**			**7,150,000**		**0**	**0**	**0**	**0**				
1.3.1.01.01.04.0001		**Tanah Bangunan Kantor Pemerintah**													**1**			**7,150,000**		**0**	**0**	**0**	**0**				
1	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	429118	0001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	/									1		7,150,000	7,150,000	0	0	0	0	0	HIBAH	29/12/2000		
1.3.1.01.02		**TANAH NON PERSIL**													**1**			**107,250,000**		**0**	**0**	**0**	**0**				
1.3.1.01.02.02		**TANAH KERING**													**1**			**107,250,000**		**0**	**0**	**0**	**0**				
1.3.1.01.02.02.0002		**Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan**													**1**			**107,250,000**		**0**	**0**	**0**	**0**				
2	1.3.1.01.02.02.002	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	429135	0001	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	/									1		107,250,000	107,250,000	0	0	0	0	0	Pembelian	31/12/2000		
1.3.2		**Peralatan dan mesin**													**306**			**1,719,461,598**		**1,665,068,848**	**45,605,750**	**0**	**1,710,674,598**				
1.3.2.02		**ALAT ANGKUTAN**													**17**			**570,218,000**		**541,099,250**	**29,118,750**	**0**	**570,218,000**				
1.3.2.02.01		**ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR**													**17**			**570,218,000**		**541,099,250**	**29,118,750**	**0**	**570,218,000**				
1.3.2.02.01.01		**KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN**													**1**			**72,680,000**		**72,680,000**	**0**	**0**	**72,680,000**				
1.3.2.02.01.01.0003		**Station Wagon**													**1**			**72,680,000**		**72,680,000**	**0**	**0**	**72,680,000**				
3	1.3.2.02.01.01.003	Station Wagon	429117	0001	Station Wagon	TOYOTA / KIJANG	1800	BESI		0	KB 8039 K	MHF 31 KF 6030022098	-	7 K 05189269	1		72,680,000	72,680,000	8	72,680,000	0	0	72,680,000		31/12/2003		WARNA HITAM(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.02.01.03		**KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG**													**1**			**232,950,000**		**203,831,250**	**29,118,750**	**0**	**232,950,000**				
1.3.2.02.01.03.0003		**Yeengler/Trailer**													**1**			**232,950,000**		**203,831,250**	**29,118,750**	**0**	**232,950,000**				
4	1.3.2.02.01.03.003	Yeengler/Trailer	807899	0001	Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN)	Daihatsu Luxio / 3SZ-VE DOHC VVT-i	4215 x 1710 x 1915	-		1495	KB 1946 KL	MHKW3CA3JHK019638	N-05401920	3S2DGK4873	1		232,950,000	232,950,000	8	203,831,250	29,118,750	0	232,950,000	HIBAH	28/09/2018		Molin, Hibah dari Kemetrian PPPA
1.3.2.02.01.04		**KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA**													**15**			**264,588,000**		**264,588,000**	**0**	**0**	**264,588,000**				
1.3.2.02.01.04.0001		**Sepeda Motor**													**15**			**264,588,000**		**264,588,000**	**0**	**0**	**264,588,000**				
5	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429061	0001	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z1 CW	114 cc	Campuran		114	KB 5896 KQ	MH3UE1120FJ050364	L07968276	E3R5E-0052270	1		16,970,000	16,970,000	8	16,970,000	0	0	16,970,000	Pembelian	30/11/2015		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
6	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429129	0003	Sepeda Motor	Yamaha (Jupiter-MX) / Jupiter-MX	125 cc	Campuran		0	KB 3077 KH	MH31S7006AK624964	H07031902K	1S7624962	1		16,029,000	16,029,000	8	16,029,000	0	0	16,029,000	Pembelian	03/12/2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
7	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429130	0004	Sepeda Motor	Yamaha (Jupiter-MX) / Jupiter-MX	125 cc	Campuran		0	KB 3078 KH	MH31S7006AK624941	H07031903K	1S7625045	1		16,029,000	16,029,000	8	16,029,000	0	0	16,029,000	Pembelian	03/12/2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
8	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429131	0005	Sepeda Motor	Yamaha (Jupiter-MX) / Jupiter-MX	125 cc	Campuran		0	KB 3081 KH	MH31S7006AK627493	-	1S7627506	1		16,029,000	16,029,000	8	16,029,000	0	0	16,029,000	Pembelian	03/12/2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
9	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429133	0001	Sepeda Motor	HONDA / SUPRA X	110	BESI		0	KB 2219 K	MH 1 KEV 219YK 135596	A.NO.9775448	KEV 2E-1135768	1		7,274,000	7,274,000	8	7,274,000	0	0	7,274,000	Pembelian	29/12/2000		ABU-ABU HITAM(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
10	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429146	0006	Sepeda Motor	Yamaha (V-Ixion) / 3C1 (V-IXION/FZ150)	150 cc	Campuran		0	KB 3072 KH	MH33C100443504153	H07031897K	3C1-505256	1		20,388,000	20,388,000	8	20,388,000	0	0	20,388,000	Pembelian	03/12/2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
11	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429148	0007	Sepeda Motor	Yamaha (V-Ixion) / V-Ixion	150 cc	Campuran		0	KB 3076 KH	MH33C1004AK301114	-	3C1301913	1		20,388,000	20,388,000	8	20,388,000	0	0	20,388,000	Pembelian	03/12/2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
12	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429149	0008	Sepeda Motor	Yamaha (Jupiter-MX) / Jupiter-MX	125 cc	Campuran		0	KB 3082 KH	MH31S7006AK626695	H07031907K	1S7626740	1		16,029,000	16,029,000	8	16,029,000	0	0	16,029,000	Pembelian	03/12/2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
13	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429158	0002	Sepeda Motor	YAMAHA / JUPITER	102	BESI		0	KB 4423 K	MH 35 LM 0022 K 101140	-	5 LM 101092	1		10,238,000	10,238,000	8	10,238,000	0	0	10,238,000	Pembelian	31/12/2002		HITAM(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
14	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429228	0009	Sepeda Motor	YAMAHA / YUPITER MX-CW	135	besi		0	KB 3662 KH	MH32S6005AK819176	-	2S6-819359	1		16,377,000	16,377,000	8	16,377,000	0	0	16,377,000	Pembelian	17/12/2010		Digunakan Kasi Binkessos(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
15	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429233	0001	Sepeda Motor	YAMAHA / YUPITER MX-CW	135	besi		0	KB 3663 KH	MH32S6005AK794604	-	2S6-795259	1		16,377,000	16,377,000	8	16,377,000	0	0	16,377,000	Pembelian	17/12/2010		Digunakan Mohammad Hasan(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
16	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429300	0002	Sepeda Motor	Kawasaki / New Trail KLX150S	144 cc	Campuran		144	KB 2201 KU	MH4LX150GFJP04963		LX150CEPN9149	1		29,000,000	29,000,000	8	29,000,000	0	0	29,000,000	Pembelian	30/11/2015		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
17	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429301	0003	Sepeda Motor	Yamaha / Soul GT125	125 cc	Campuran		125	KB 5894 KQ	MH3SE9010FJ125703		E5R4E-0136812	1		17,490,000	17,490,000	8	17,490,000	0	0	17,490,000	Pembelian	30/11/2015		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
18	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429303	0004	Sepeda Motor	Kawasaki / New Trail KLX150S	144 cc	Campuran		144	KB 2202 KU	MH4LX150GFJP04367	-	LX150CEPN7627	1		29,000,000	29,000,000	8	29,000,000	0	0	29,000,000	Pembelian	30/11/2015		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
19	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429310	0005	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z1 CW	114 cc	Campuran		114	KB 5895 KQ	MH3UE1120FJ053901		E3R5E-0055806	1		16,970,000	16,970,000	8	16,970,000	0	0	16,970,000	Pembelian	30/11/2015		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
1.3.2.03		**ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR**													**1**			**3,380,000**		**3,380,000**	**0**	**0**	**3,380,000**				
1.3.2.03.03		**ALAT UKUR**													**1**			**3,380,000**		**3,380,000**	**0**	**0**	**3,380,000**				
1.3.2.03.03.08		**ALAT UKUR/PEMBANDING**													**1**			**3,380,000**		**3,380,000**	**0**	**0**	**3,380,000**				
1.3.2.03.03.08.0001		**Ukuran Johanson (Alat Pembanding Standar Ukuran Panjang)**													**1**			**3,380,000**		**3,380,000**	**0**	**0**	**3,380,000**				
20	1.3.2.03.03.08.001	Ukuran Johanson (Alat Pembanding Standar Ukuran Panjang)	429203	0001		PANASONIC / -	1/2 PK	Besi+Elektronic		0		-		-	1		3,380,000	3,380,000	5	3,380,000	0	0	3,380,000	Pembelian	30/12/2006		PEMDA, Ex Dinsos(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.05		**ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA**													**193**			**548,820,650**		**538,246,650**	**7,087,000**	**0**	**545,333,650**				
1.3.2.05.01		**ALAT KANTOR**													**53**			**185,774,800**		**180,200,800**	**4,587,000**	**0**	**184,787,800**				
1.3.2.05.01.01		**MESIN KETIK**													**2**			**5,613,250**		**5,613,250**	**0**	**0**	**5,613,250**				
1.3.2.05.01.01.0001		**Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)**													**1**			**4,050,000**		**4,050,000**	**0**	**0**	**4,050,000**				

21	1.3.2.05.01.01.001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	429219	0001	Mesin Ketik	Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1		4,050,000	4,050,000	5	4,050,000	0	0	4,050,000	Pembelian	31/12/2008		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.05.01.01.0003		**Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)**													**1**			**1,563,250**		**1,563,250**	**0**	**0**	**1,563,250**				
22	1.3.2.05.01.01.003	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	429204	0001		Olympia / -	-	Besi		0		-		-	1		1,563,250	1,563,250	5	1,563,250	0	0	1,563,250	Pembelian	30/12/2006		Ex Dinsos(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.05.01.04		**ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR**													**41**			**123,391,550**		**121,741,550**	**1,125,000**	**0**	**122,866,550**				
1.3.2.05.01.04.0001		**Lemari Besi/Metal**													**2**			**5,026,250**		**5,026,250**	**0**	**0**	**5,026,250**				
23	1.3.2.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	429134	0001		Lokal / -	-	Besi		0		-		-	1		1,426,250	1,426,250	5	1,426,250	0	0	1,426,250	Pembelian	30/12/2000		Lemari Arsip, Ex Dinsos(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
24	1.3.2.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	429229	0002		Lokal / -	-	besi		0	-	-	-	-	1		3,600,000	3,600,000	5	3,600,000	0	0	3,600,000	Pembelian	17/12/2010		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.05.01.04.0002		**Lemari Kayu**													**9**			**22,855,200**		**21,205,200**	**1,125,000**	**0**	**22,330,200**				
25	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	429221	0001		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1		6,996,000	6,996,000	5	6,996,000	0	0	6,996,000	Pembelian	31/12/2008		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
26	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	429243	0002		lokal / -	-	kayu		0		-		-	1		1,034,200	1,034,200	5	1,034,200	0	0	1,034,200	Pembelian	31/12/2012		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
27	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	429326	0001		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1		4,000,000	4,000,000	5	4,000,000	0	0	4,000,000	Pembelian	27/07/2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
28	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	2401276	0001	Lemari Arsip/Buku	Lokal / -	-	Kayu + Plywood		0		-		-	1		1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	Pembelian	11/06/2019		Lemari 2 Pintu
29	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	2401294	0001	Lemari Arsip/Buku	Lokal / -	-	Kayu + Plywood		0		-		-	1		2,200,000	2,200,000	5	2,200,000	0	0	2,200,000	Pembelian	11/06/2019		Lemari 3 Pintu
30	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	2401296	0002	Lemari Arsip/Buku	Lokal / -	-	Kayu + Plywood		0		-		-	1		1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	Pembelian	11/06/2019		Lemari 2 Pintu
31	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	5428834	0001	Lemari Arsip	Lokal / Lemari 2 Pintu	Standar	Kayu		0		-		-	1		1,500,000	1,500,000	5	1,200,000	300,000	0	1,500,000	Pembelian	20/11/2021		
32	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	5428835	0002	Lemari Arsip	Lokal / Lemari 2 Pintu	Standar	Kayu		0		-		-	1		1,500,000	1,500,000	5	1,200,000	300,000	0	1,500,000	Pembelian	20/11/2021		
33	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	5449941	0001	Lemari Arsip Pejabat	Lokal / 2 Pintu	1200x400x2000mm	Campuran Kayu + Kaca		0		-		-	1		2,625,000	2,625,000	5	1,575,000	525,000	0	2,100,000	Pembelian	21/10/2022		Ruang Kadis DSP3A
1.3.2.05.01.04.0003		**Rak Besi**													**5**			**8,567,500**		**8,567,500**	**0**	**0**	**8,567,500**				
34	1.3.2.05.01.04.003	Rak Besi	429065	0001		Boltless Rack / 2 in 1 Rack - 5 Levels	1828 x 350 x 900	-		0		-		-	1		1,000,000	1,000,000	5	1,000,000	0	0	1,000,000	APBD	13/12/2016		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
35	1.3.2.05.01.04.003	Rak Besi	429115	0001		LOKAL / RAK PIRING	KECIL	BESI		0		-		-	1		1,567,500	1,567,500	5	1,567,500	0	0	1,567,500	Pembelian	31/12/2002		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
36	1.3.2.05.01.04.003	Rak Besi	429260	0001		Lokal / -	DUA PINTU	ALMUNIUM KACA		0		-		-	1		2,500,000	2,500,000	5	2,500,000	0	0	2,500,000	DAU	10/09/2014		BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
37	1.3.2.05.01.04.003	Rak Besi	429291	0001	Rak televisi	Rak TV / -	-	-		0		-		-	1		2,500,000	2,500,000	5	2,500,000	0	0	2,500,000		27/11/2015		Pengadaan alat rumah tangga (Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
38	1.3.2.05.01.04.003	Rak Besi	429315	0001		Boltless Rack / 2 in 1 Rack - 5 Levels	1828 x 350 x 900	-		0		-		-	1		1,000,000	1,000,000	5	1,000,000	0	0	1,000,000	APBD	13/12/2016		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.05.01.04.0004		**Rak Kayu**													**9**			**41,750,000**		**41,750,000**	**0**	**0**	**41,750,000**				
39	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu	429110	0001		Lokal / -	-	Campuran		0	-	-	-	-	1		1,800,000	1,800,000	5	1,800,000	0	0	1,800,000	Pembelian	01/12/2008		Rak buku(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELURAGA BERENCANA)
40	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu	429317	0001	Rak Kayu	Lokal / -	-	Kayu		0		-		-	1		20,000,000	20,000,000	5	20,000,000	0	0	20,000,000	Pembelian	07/10/2013		Pengadaan Rak Kayu(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
41	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu	807902	0001	Rak Arsip tempel di dinding	- / -	6 x 2 m	kayu		0		-		-	1		2,850,000	2,850,000	5	2,850,000	0	0	2,850,000	Pembelian	12/03/2018		Rak Arsip nempel di dinding
42	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu	807903	0001	Rak Arsip tempel di dinding	- / -	6 x 2 m	kayu		0		-		-	1		2,850,000	2,850,000	5	2,850,000	0	0	2,850,000	Pembelian	12/03/2018		Rak Arsip nempel di dinding
43	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu	807904	0001	Rak Arsip tempel di dinding	- / -	6 x 2 m	kayu		0		-		-	1		2,850,000	2,850,000	5	2,850,000	0	0	2,850,000	Pembelian	12/03/2018		Rak Arsip nempel di dinding
44	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu	807907	0001	Rak Arsip tempel di dinding	- / -	6 x 2 m	kayu		0		-		-	1		2,850,000	2,850,000	5	2,850,000	0	0	2,850,000	Pembelian	12/03/2018		Rak Arsip nempel di dinding
45	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu	807908	0002	Rak Arsip tempel di dinding	- / -	6 x 2 m	kayu		0		-		-	1		2,850,000	2,850,000	5	2,850,000	0	0	2,850,000	Pembelian	12/03/2018		Rak Arsip nempel di dinding
46	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu	807909	0001	Rak Arsip tempel di dinding	- / -	6 x 2 m	kayu		0		-		-	1		2,850,000	2,850,000	5	2,850,000	0	0	2,850,000	Pembelian	12/03/2018		Rak Arsip nempel di dinding
47	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu	807910	0003	Rak Arsip tempel di dinding	- / -	6 x 2 m	kayu		0		-		-	1		2,850,000	2,850,000	5	2,850,000	0	0	2,850,000	Pembelian	12/03/2018		Rak Arsip nempel di dinding
1.3.2.05.01.04.0005		**Filing Cabinet Besi**													**9**			**16,869,100**		**16,869,100**	**0**	**0**	**16,869,100**				
48	1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	429116	0001		Brother / -	-	Besi		0		-		-	1		1,237,500	1,237,500	5	1,237,500	0	0	1,237,500	Pembelian	31/12/2002		Fiiing kabinet(Lemari Arsip) 4 laci(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
49	1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	429162	0002		ALBA / 4 LACI	-	BESI		0		-		-	1		1,237,500	1,237,500	5	1,237,500	0	0	1,237,500	Pembelian	31/12/2002		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
50	1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	429185	0003		BROTHER / 4 LACI	-	BESI		0		-		-	1		1,260,000	1,260,000	5	1,260,000	0	0	1,260,000	Pembelian	31/12/2005		DARI DINAS SOSIAL(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
51	1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	429186	0004		ALBA / 4 LACI	-	BESI		0		-		-	1		1,260,000	1,260,000	5	1,260,000	0	0	1,260,000	Pembelian	31/12/2005		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
52	1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	429211	0005		Lokal / 4 Laci	-	Campuran		0		-		-	1		1,494,100	1,494,100	5	1,494,100	0	0	1,494,100	Pembelian	03/12/2007		Ex Dinsos(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
53	1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	429319	0006		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1		2,462,500	2,462,500	5	2,462,500	0	0	2,462,500	Pembelian	11/06/2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
54	1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	429322	0007		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1		2,462,500	2,462,500	5	2,462,500	0	0	2,462,500	Pembelian	11/06/2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
55	1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	2401261	0001	Filling Cabinet	- / -	-	Besi		0		-		-	1		2,455,000	2,455,000	5	2,455,000	0	0	2,455,000	HIBAH	10/12/2019		Sekretariat PUSPAGA Perlindungan Anak
56	1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	5397912	0001	Falling Cabinet	Atlantic / 4 Loker	-	Besi		0		-		-	1		3,000,000	3,000,000	5	3,000,000	0	0	3,000,000	Pembelian	01/11/2020		
1.3.2.05.01.04.0006		**Filing Cabinet Kayu**													**1**			**1,014,000**		**1,014,000**	**0**	**0**	**1,014,000**				
57	1.3.2.05.01.04.006	Filing Cabinet Kayu	429205	0001		Lokal / -	-	Kayu		0		-		-	1		1,014,000	1,014,000	5	1,014,000	0	0	1,014,000	Pembelian	30/12/2006		Lemari Arsip(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.05.01.04.0007		**Brandkas**													**2**			**16,309,500**		**16,309,500**	**0**	**0**	**16,309,500**				
58	1.3.2.05.01.04.007	Brandkas	429287	0001		Ucida / STANDAR	SEDANG	-		0		-		-	1		8,900,000	8,900,000	5	8,900,000	0	0	8,900,000	Pembelian	01/04/2015		BRANKAS(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
59	1.3.2.05.01.04.007	Brandkas	429323	0001		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1		7,409,500	7,409,500	5	7,409,500	0	0	7,409,500	Pembelian	27/07/2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
1.3.2.05.01.04.0027		**Lemari Kaca**													**4**			**11,000,000**		**11,000,000**	**0**	**0**	**11,000,000**				
60	1.3.2.05.01.04.027	Lemari Kaca	429255	0001		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1		5,000,000	5,000,000	5	5,000,000	0	0	5,000,000	DAU	10/09/2014		BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))

61	1.3.2.05.01.04.027	Lemari Kaca	429290	0001 - 0003	Lemari Pakaian	Kayu lokal / Sedang	Biasa	-		0		-		-	3		2,000,000	6,000,000	5	6,000,000	0	0	6,000,000	Pembelian	27/11/2015		Pengadaan Alat rumah tangga kantor(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.05.01.05		**ALAT KANTOR LAINNYA**													**10**			**56,770,000**		**52,846,000**	**3,462,000**	**0**	**56,308,000**				
1.3.2.05.01.05.0012		**Mesin Absensi**													**7**			**48,660,000**		**45,660,000**	**3,000,000**	**0**	**48,660,000**				
62	1.3.2.05.01.05.012	Mesin Absensi	429063	0001	Rak Arsip SPj	Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1		9,920,000	9,920,000	5	9,920,000	0	0	9,920,000	Pembelian	30/11/2015		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
63	1.3.2.05.01.05.012	Mesin Absensi	429144	0001	UPS	- / -	-	-		0		-		-	1		1,000,000	1,000,000	5	1,000,000	0	0	1,000,000	Pembelian	19/09/2014		untuk di BP3K (Mutasi dari (baru) DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK,PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA)
64	1.3.2.05.01.05.012	Mesin Absensi	429145	0002	UPS	- / -	-	-		0		-		-	1		1,000,000	1,000,000	5	1,000,000	0	0	1,000,000	Pembelian	19/09/2014		untuk di BP3K (Mutasi dari (baru) DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK,PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA)
65	1.3.2.05.01.05.012	Mesin Absensi	429299	0002	Rak Arsip SPj	Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1		9,920,000	9,920,000	5	9,920,000	0	0	9,920,000	Pembelian	30/11/2015		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
66	1.3.2.05.01.05.012	Mesin Absensi	2401289	0001	Projector	Acer / B5 - 20	-	-		0		-		-	1		6,245,000	6,245,000	5	6,245,000	0	0	6,245,000	HIBAH	09/12/2019		Sekretariat PUSPAGA Perlindungan Anak
67	1.3.2.05.01.05.012	Mesin Absensi	2401292	0002	APE (Alat Edukasi Anak)	- / -	1 set	campuran		0		-		-	1		5,575,000	5,575,000	5	5,575,000	0	0	5,575,000	HIBAH	10/12/2019		Sekretariat PUSPAGA Perlindungan Anak
68	1.3.2.05.01.05.012	Mesin Absensi	5428824	0001	Mesin Presensi	Fingerspot / CE1200	6x5 Inch	Fiber		0		-		-	1		15,000,000	15,000,000	5	12,000,000	3,000,000	0	15,000,000	Pembelian	01/11/2021		
1.3.2.05.01.05.0019		**Alat Pemotong Kertas**													**1**			**2,310,000**		**1,386,000**	**462,000**	**0**	**1,848,000**				
69	1.3.2.05.01.05.019	Alat Pemotong Kertas	5449942	0001	Alat Penghancur Kertas	Joyko / SHD-01 2101100394	360x244x366mm	Plastik		0		-		-	1		2,310,000	2,310,000	5	1,386,000	462,000	0	1,848,000	Pembelian	21/10/2022		Ruang Renja dan Keuangan
1.3.2.05.01.05.0076		**Papan Nama Instansi**													**2**			**5,800,000**		**5,800,000**	**0**	**0**	**5,800,000**				
70	1.3.2.05.01.05.076	Papan Nama Instansi	2401263	0001	Papan Nama PUSPAGA	Lokal / Frame Alumunium	-	Alumunium		0		-		-	1		1,340,000	1,340,000	5	1,340,000	0	0	1,340,000	HIBAH	10/12/2019		Sekretariat PUSPAGA Perlindungan Anak
71	1.3.2.05.01.05.076	Papan Nama Instansi	2401288	0002	Papan Nama PUSPAGA	- / Neon Box	-	-		0		-		-	1		4,460,000	4,460,000	5	4,460,000	0	0	4,460,000	HIBAH	10/12/2019		Sekretariat PUSPAGA Perlindungan Anak
1.3.2.05.02		**ALAT RUMAH TANGGA**													**67**			**214,482,750**		**211,482,750**	**1,500,000**	**0**	**212,982,750**				
1.3.2.05.02.01		**MEUBELAIR**													**31**			**80,560,000**		**79,560,000**	**500,000**	**0**	**80,060,000**				
1.3.2.05.02.01.0001		**Meja Kerja Besi/Metal**													**8**			**13,000,000**		**13,000,000**	**0**	**0**	**13,000,000**				
72	1.3.2.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	429168	0001		Lokal / -	-	terpal		0	-	-	-	-	1		1,000,000	1,000,000	5	1,000,000	0	0	1,000,000	Pembelian	31/12/2009		(Mutasi dari (baru) DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK,PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA)
73	1.3.2.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	2401266	0001	Meja Tulis 1 Biro	Lokal / -	-	Kayu		0		-		-	1		2,600,000	2,600,000	5	2,600,000	0	0	2,600,000	Pembelian	11/06/2019		Meja Pejabat Eselon IV
74	1.3.2.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	2401269	0001	Meja Tulis 1/2 Biro	Lokal / -	-	Kayu & Ply wood		0		-		-	1		1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	Pembelian	11/06/2019		Meja Kerja Kasi
75	1.3.2.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	2401272	0002	Meja Tulis 1/2 Biro	Lokal / -	-	Kayu & Ply wood		0		-		-	1		1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	Pembelian	11/06/2019		Meja Kerja Kasi
76	1.3.2.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	2401273	0003	Meja Tulis 1/2 Biro	Lokal / -	-	Kayu & Ply wood		0		-		-	1		1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	Pembelian	11/06/2019		Meja Kerja Kasi
77	1.3.2.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	2401274	0004	Meja Tulis 1/2 Biro	Lokal / -	-	Kayu & Ply wood		0		-		-	1		1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	Pembelian	11/06/2019		Meja Kerja Kasi
78	1.3.2.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	2401297	0005	Lemari Pakaian	Lokal / 2 Pintu	-	Kayu & Plywood		0		-		-	1		1,700,000	1,700,000	5	1,700,000	0	0	1,700,000		11/06/2019		Shelter Sosial
79	1.3.2.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	2401301	0006	Lemari Pakaian	Lokal / 2 Pintu	-	Kayu & Plywood		0		-		-	1		1,700,000	1,700,000	5	1,700,000	0	0	1,700,000		11/06/2019		Shelter Sosial
1.3.2.05.02.01.0002		**Meja Kerja Kayu**													**4**			**11,965,000**		**10,965,000**	**500,000**	**0**	**11,465,000**				
80	1.3.2.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	429312	0001	Meja Kerja Pejabat	Lokal / -	-	Plywood		0		-		-	1		5,675,000	5,675,000	5	5,675,000	0	0	5,675,000	Pembelian	30/11/2015		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
81	1.3.2.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2401260	0001	Meja Kerja Kayu	Lokal / -	-	Kayu		0		-		-	1		1,790,000	1,790,000	5	1,790,000	0	0	1,790,000	HIBAH	10/12/2019		Sekretariat PUSPAGA Perlindungan Anak
82	1.3.2.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	5397911	0001	Meja Satu Biro	Lokal / -	-	Kayu		0		-		-	1		2,000,000	2,000,000	5	2,000,000	0	0	2,000,000	Pembelian	01/11/2020		
83	1.3.2.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	5449940	0001	Meja Kerja 1/2 Biro	Lokal / -	-	Kayu		0		-		-	1		2,500,000	2,500,000	5	1,500,000	500,000	0	2,000,000	Pembelian	21/10/2022		UPTD PPA DSP3A
1.3.2.05.02.01.0010		**Tempat Tidur Kayu**													**2**			**5,000,000**		**5,000,000**	**0**	**0**	**5,000,000**				
84	1.3.2.05.02.01.010	Tempat Tidur Kayu	429296	0001 - 0002	Tempat tidur kayu	Lokal / -	sedang	-		0		-		-	2		2,500,000	5,000,000	5	5,000,000	0	0	5,000,000	Pembelian	28/11/2015		Penyediaan peralatan rumah tangga(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.05.02.01.0024		**Meja 1/2 Biro**													**1**			**1,500,000**		**1,500,000**	**0**	**0**	**1,500,000**				
85	1.3.2.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	5397909	0001	Meja Setengah Biro	Lokal / 3 Laci kanan	-	Kayu		0		-		-	1		1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	Pembelian	01/11/2020		
1.3.2.05.02.01.0025		**Kasur/Spring Bed**													**2**			**6,600,000**		**6,600,000**	**0**	**0**	**6,600,000**				
86	1.3.2.05.02.01.025	Kasur/Spring Bed	2401267	0001	Spring Bed Sorong	- / -	120 m x 200 m	Busa		0		-		-	1		3,300,000	3,300,000	5	3,300,000	0	0	3,300,000	Pembelian	11/06/2019		Shelter Sosial
87	1.3.2.05.02.01.025	Kasur/Spring Bed	2401275	0002	Spring Bed Sorong	- / -	120 m x 200 m	Busa		0		-		-	1		3,300,000	3,300,000	5	3,300,000	0	0	3,300,000	Pembelian	11/06/2019		Shelter Sosial
1.3.2.05.02.01.0031		**Kursi Tamu**													**1**			**15,000,000**		**15,000,000**	**0**	**0**	**15,000,000**				
88	1.3.2.05.02.01.031	Kursi Tamu	429252	0001		Lokal / -	BESAR	KAYU		0		-		-	1		15,000,000	15,000,000	5	15,000,000	0	0	15,000,000	DAU	07/08/2014		BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.05.02.01.0032		**Kursi Putar**													**9**			**12,200,000**		**12,200,000**	**0**	**0**	**12,200,000**				
89	1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar	429244	0001		Lokal / -	-	besi		0		-		-	1		2,000,000	2,000,000	5	2,000,000	0	0	2,000,000	Pembelian	31/12/2012		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
90	1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar	2401277	0001	Kursi Putar	- / -	-	Plastik,Busa dan Besi		0		-		-	1		1,400,000	1,400,000	5	1,400,000	0	0	1,400,000		11/06/2019		Kursi Kabid dan Kasi
91	1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar	2401285	0001	Kursi Putar	- / -	-	Busa + Plastik		0		-		-	1		1,900,000	1,900,000	5	1,900,000	0	0	1,900,000	HIBAH	10/12/2019		Sekretariat PUSPAGA Perlindungan Anak
92	1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar	2401293	0001	Kursi Putar	- / -	-	Plastik,Busa dan Besi		0		-		-	1		1,400,000	1,400,000	5	1,400,000	0	0	1,400,000		11/06/2019		Kursi Kabid dan Kasi
93	1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar	2401295	0002	Kursi Putar	- / -	-	Plastik,Busa dan Besi		0		-		-	1		1,400,000	1,400,000	5	1,400,000	0	0	1,400,000		11/06/2019		Kursi Kabid dan Kasi
94	1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar	5397902	0001	Kursi Kerja	- / Putar	-	Fiber Plastik		0		-		-	1		1,025,000	1,025,000	5	1,025,000	0	0	1,025,000	Pembelian	02/11/2020		
95	1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar	5397903	0002	Kursi Kerja	- / Putar	-	Fiber Plastik		0		-		-	1		1,025,000	1,025,000	5	1,025,000	0	0	1,025,000	Pembelian	02/11/2020		
96	1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar	5397908	0003	Kursi Kerja	- / Putar	-	Fiber Plastik		0		-		-	1		1,025,000	1,025,000	5	1,025,000	0	0	1,025,000	Pembelian	02/11/2020		
97	1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar	5397916	0004	Kursi Kerja	- / Putar	-	Fiber Plastik		0		-		-	1		1,025,000	1,025,000	5	1,025,000	0	0	1,025,000	Pembelian	02/11/2020		
1.3.2.05.02.01.0033		**Kursi Biasa**													**3**			**11,500,000**		**11,500,000**	**0**	**0**	**11,500,000**				
98	1.3.2.05.02.01.033	Kursi Biasa	429292	0002 - 0003	Kursi Tamu	Kursi Sofa / -	-	-		0		-		-	2		3,250,000	6,500,000	5	6,500,000	0	0	6,500,000	Pembelian	27/11/2015		Pengadaan alat rumah tangga kantor(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
99	1.3.2.05.02.01.033	Kursi Biasa	429308	0001	Kursi Kerja Pejabat	Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1		5,000,000	5,000,000	5	5,000,000	0	0	5,000,000	Pembelian	30/11/2015		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)

1.3.2.05.02.01.0048		**Sofa**													**1**			**3,795,000**		**3,795,000**	**0**	**0**	**3,795,000**				
100	1.3.2.05.02.01.048	Sofa	2401284	0001	Sofa + Meja Kaca	- / -	-	Campuran		0		-		-	1		3,795,000	3,795,000	5	3,795,000	0	0	3,795,000	HIBAH	10/12/2019		Sekretariat PUSPAGA Perlindungan Anak
1.3.2.05.02.03		**ALAT PEMBERSIH**													**1**			**2,000,000**		**2,000,000**	**0**	**0**	**2,000,000**				
1.3.2.05.02.03.0003		**Mesin Pemotong Rumput**													**1**			**2,000,000**		**2,000,000**	**0**	**0**	**2,000,000**				
101	1.3.2.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	429298	0001	Mesin rumput	- / -	-	-		0		-		-	1		2,000,000	2,000,000	5	2,000,000	0	0	2,000,000		30/11/2015		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.05.02.04		**ALAT PENDINGIN**													**22**			**90,682,000**		**88,682,000**	**1,000,000**	**0**	**89,682,000**				
1.3.2.05.02.04.0003		**A.C. Window**													**3**			**26,000,000**		**26,000,000**	**0**	**0**	**26,000,000**				
102	1.3.2.05.02.04.003	A.C. Window	429104	0001		SHARP / -	-	-		0		-		-	1		6,500,000	6,500,000	5	6,500,000	0	0	6,500,000	Pembelian	28/04/2014		BELANJA BARANG INVENTARIS(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
103	1.3.2.05.02.04.003	A.C. Window	429107	0002		SHARP / -	-	-		0		-		-	1		6,500,000	6,500,000	5	6,500,000	0	0	6,500,000	Pembelian	28/04/2014		BELANJA BARANG INVENTARIS(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
104	1.3.2.05.02.04.003	A.C. Window	429327	0001		LG / LG	-	Campuran		0		-		-	1		13,000,000	13,000,000	5	13,000,000	0	0	13,000,000	Pembelian	06/11/2013		Ruangan Kabid PM(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
1.3.2.05.02.04.0004		**A.C. Split**													**9**			**38,099,000**		**36,099,000**	**1,000,000**	**0**	**37,099,000**				
105	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	429200	0001		CHANGHONG / -	1/2 PK	BESI		0		-		-	1		3,380,000	3,380,000	5	3,380,000	0	0	3,380,000	Pembelian	29/12/2006		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
106	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	429230	0001		Lokal / -	-	besi		0	-	-	-	-	1		4,000,000	4,000,000	5	4,000,000	0	0	4,000,000	Pembelian	17/12/2010		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
107	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	429245	0002		LG / -	-	Campuran		0		-		-	1		5,000,000	5,000,000	5	5,000,000	0	0	5,000,000	Pembelian	30/09/2013		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
108	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	429328	0001		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1		4,120,000	4,120,000	5	4,120,000	0	0	4,120,000	Pembelian	31/12/2012		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
109	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	5397924	0002		Lokal / -	-	besi		0	-	-	-	-	1		4,000,000	4,000,000	5	4,000,000	0	0	4,000,000	Pembelian	17/12/2010		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
110	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	5397926	0004		Lokal / -	-	besi		0	-	-	-	-	1		4,000,000	4,000,000	5	4,000,000	0	0	4,000,000	Pembelian	17/12/2010		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
111	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	5397914	0001	Air Conditioner (AC) Split	Polytron / Split AC	0,5 PK	Fiber Putih		0		-		-	1		4,599,000	4,599,000	5	4,599,000	0	0	4,599,000	Pembelian	02/11/2020		155-240V/50Hz, 470 Watt, 5000 BTU/h
112	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	5397925	0003		Lokal / -	-	besi		0	-	-	-	-	1		4,000,000	4,000,000	5	4,000,000	0	0	4,000,000	Pembelian	17/12/2010		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
113	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	5449938	0001	AC Split	Sharp / Split AH-A5SAY	-	Fiber Putih		0		21398107		-	1		5,000,000	5,000,000	5	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000	Pembelian	21/10/2022		Ruang Adum DSP3A
1.3.2.05.02.04.0005		**Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)**													**2**			**11,000,000**		**11,000,000**	**0**	**0**	**11,000,000**				
114	1.3.2.05.02.04.005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	429253	0001		LG / Low Watt	1 PK	MIKA		0		-		-	1		5,500,000	5,500,000	5	5,500,000	0	0	5,500,000	DAU	07/08/2014		AC (Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
115	1.3.2.05.02.04.005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	429254	0002		LG / Low Watt	1 PK	MIKA		0		-		-	1		5,500,000	5,500,000	5	5,500,000	0	0	5,500,000	DAU	07/08/2014		AC (Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.05.02.04.0006		**Kipas Angin**													**8**			**15,583,000**		**15,583,000**	**0**	**0**	**15,583,000**				
116	1.3.2.05.02.04.006	Kipas Angin	429226	0001		Lokal / -	-	besi		0	-	-	-	-	1		2,093,000	2,093,000	5	2,093,000	0	0	2,093,000	Pembelian	31/12/2009		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
117	1.3.2.05.02.04.006	Kipas Angin	429241	0002		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1		1,125,000	1,125,000	5	1,125,000	0	0	1,125,000	Pembelian	28/09/2012		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
118	1.3.2.05.02.04.006	Kipas Angin	429242	0003		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1		1,125,000	1,125,000	5	1,125,000	0	0	1,125,000	Pembelian	28/09/2012		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
119	1.3.2.05.02.04.006	Kipas Angin	429256	0001		Panasonic / Deck	Besar	Plastik		0		-		-	1		2,500,000	2,500,000	5	2,500,000	0	0	2,500,000	DAU	10/09/2014		BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
120	1.3.2.05.02.04.006	Kipas Angin	429257	0002		Panasonic / Deck	Besar	Plastik		0		-		-	1		2,500,000	2,500,000	5	2,500,000	0	0	2,500,000	DAU	10/09/2014		BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
121	1.3.2.05.02.04.006	Kipas Angin	429258	0003		Panasonic / Deck	Besar	Plastik		0		-		-	1		2,500,000	2,500,000	5	2,500,000	0	0	2,500,000	DAU	10/09/2014		BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
122	1.3.2.05.02.04.006	Kipas Angin	429261	0004		Panasonic / Deck	Besar	Plastik		0		-		-	1		2,500,000	2,500,000	5	2,500,000	0	0	2,500,000	DAU	10/09/2014		BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
123	1.3.2.05.02.04.006	Kipas Angin	429309	0001		Panasonic / F-EY1511	-	Campuran		0		-		-	1		1,240,000	1,240,000	5	1,240,000	0	0	1,240,000	Pembelian	30/11/2015		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
1.3.2.05.02.05		**ALAT DAPUR**													**1**			**1,000,000**		**1,000,000**	**0**	**0**	**1,000,000**				
1.3.2.05.02.05.0001		**Kompor Listrik (Alat Dapur)**													**1**			**1,000,000**		**1,000,000**	**0**	**0**	**1,000,000**				
124	1.3.2.05.02.05.001	Kompor Listrik (Alat Dapur)	429295	0001	Tempat Masak	Lokal / -	-	Kayu Keramik		0		-		-	1		1,000,000	1,000,000	5	1,000,000	0	0	1,000,000	Pembelian	28/11/2015		Penyediaan peralatan rumah tangga(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.05.02.06		**ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)**													**12**			**40,240,750**		**40,240,750**	**0**	**0**	**40,240,750**				
1.3.2.05.02.06.0001		**Radio**													**2**			**4,000,000**		**4,000,000**	**0**	**0**	**4,000,000**				
125	1.3.2.05.02.06.001	Radio	429294	0001	lemari makan	Lokal / -	sedang	kaca Almunium		0		-		-	1		2,000,000	2,000,000	5	2,000,000	0	0	2,000,000	Pembelian	28/11/2015		penyediaan peralatan rumah tangga(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
126	1.3.2.05.02.06.001	Radio	429297	0002	Meja makan	Caserini / -	-	Kayu		0		-		-	1		2,000,000	2,000,000	5	2,000,000	0	0	2,000,000	Pembelian	28/11/2015		penyediaan peralatan rumah tangga(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.05.02.06.0002		**Televisi**													**1**			**3,900,000**		**3,900,000**	**0**	**0**	**3,900,000**				
127	1.3.2.05.02.06.002	Televisi	2401283	0001	Televisi LED	LG Smart / LED Smart TV	32 inch	Fiber		0		-		-	1		3,900,000	3,900,000	5	3,900,000	0	0	3,900,000	HIBAH	10/12/2019		Sekretariat PUSPAGA Perlindungan Anak
1.3.2.05.02.06.0008		**Sound System**													**1**			**10,000,000**		**10,000,000**	**0**	**0**	**10,000,000**				
128	1.3.2.05.02.06.008	Sound System	429259	0001	Sound System	BMB / -	-	BESI		0		-		-	1		10,000,000	10,000,000	5	10,000,000	0	0	10,000,000	DAU	10/09/2014		BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.05.02.06.0012		**Wireless**													**1**			**5,000,000**		**5,000,000**	**0**	**0**	**5,000,000**				
129	1.3.2.05.02.06.012	Wireless	429284	0001		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1		5,000,000	5,000,000	5	5,000,000	0	0	5,000,000	DAU	22/12/2014		WIRELESS + ROUTER MODEM + LAN(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.05.02.06.0018		**Unit Power Supply**													**1**			**1,487,000**		**1,487,000**	**0**	**0**	**1,487,000**				
130	1.3.2.05.02.06.018	Unit Power Supply	429212	0001		Lokal / UPS	-	Metal		0		-		-	1		1,487,000	1,487,000	5	1,487,000	0	0	1,487,000	Pembelian	03/12/2007		Ex Dinsos(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.05.02.06.0021		**Camera Video**													**1**			**3,000,000**		**3,000,000**	**0**	**0**	**3,000,000**				
131	1.3.2.05.02.06.021	Camera Video	429246	0001		SONY / -	-	Campuran		0		-		-	1		3,000,000	3,000,000	5	3,000,000	0	0	3,000,000	Pembelian	30/09/2013		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.05.02.06.0022		**Camera film**													**2**			**9,000,000**		**9,000,000**	**0**	**0**	**9,000,000**				
132	1.3.2.05.02.06.022	Camera film	429124	0001		Canon / EOS 1200D	-	Campuran		0		-		-	1		4,500,000	4,500,000	5	4,500,000	0	0	4,500,000	Pembelian	15/02/2016		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)

133	1.3.2.05.02.06.022	Camera film	429136	0002		Canon / EOS 1200D	-	Campuran		0		-		-	1		4,500,000	4,500,000	5	4,500,000	0	0	4,500,000	Pembelian	15/02/2016		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
1.3.2.05.02.06.0038		**Dispenser**													**2**			**2,375,000**		**2,375,000**	**0**	**0**	**2,375,000**				
134	1.3.2.05.02.06.038	Dispenser	429155	0001		- / -	-	Plastic		0		-		-	1		1,000,000	1,000,000	5	1,000,000	0	0	1,000,000	Pembelian	21/11/2016		Pengadaan alat rumah tangga P2TP2A(Mutasi dari (baru) DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK,PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA)
135	1.3.2.05.02.06.038	Dispenser	2401262	0001	Dispencer	Miyako / -	-	campuran		0		-		-	1		1,375,000	1,375,000	5	1,375,000	0	0	1,375,000	HIBAH	10/12/2019		Sekretariat PUSPAGA Perlindungan Anak
1.3.2.05.02.06.0062		**Alat Pemanas Ruangan**													**1**			**1,478,750**		**1,478,750**	**0**	**0**	**1,478,750**				
136	1.3.2.05.02.06.062	Alat Pemanas Ruangan	429201	0001		LOKAL / MAGIC WARMER	3 Kg	ALUMUNIUM		0		-		-	1		1,478,750	1,478,750	5	1,478,750	0	0	1,478,750	Pembelian	29/12/2006		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.05.03		**MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT**													**73**			**148,563,100**		**146,563,100**	**1,000,000**	**0**	**147,563,100**				
1.3.2.05.03.01		**MEJA KERJA PEJABAT**													**42**			**98,660,000**		**96,660,000**	**1,000,000**	**0**	**97,660,000**				
1.3.2.05.03.01.0004		**Meja Kerja Pejabat Eselon II**													**3**			**13,760,000**		**11,760,000**	**1,000,000**	**0**	**12,760,000**				
137	1.3.2.05.03.01.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	429191	0001		INVINITY / 1 BIRO	-	KAYU		0		-		-	1		1,260,000	1,260,000	5	1,260,000	0	0	1,260,000	Pembelian	31/12/2005		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
138	1.3.2.05.03.01.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	429277	0001		Lokal / -	BESAR	KAYU		0		-		-	1		7,500,000	7,500,000	5	7,500,000	0	0	7,500,000	DAU	16/09/2014		BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
139	1.3.2.05.03.01.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	5449939	0001	Meja Kerja Kepala Dinas	Lokal / Laci 6 Kiri Kanan	189 cm x 90 cm x 75 cm	Kayu		0		-		-	1		5,000,000	5,000,000	5	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000	Pembelian	21/10/2022		Ruang Kadis DSP3A
1.3.2.05.03.01.0005		**Meja Kerja Pejabat Eselon III**													**1**			**15,000,000**		**15,000,000**	**0**	**0**	**15,000,000**				
140	1.3.2.05.03.01.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	429085	0001		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1		15,000,000	15,000,000	5	15,000,000	0	0	15,000,000	Pembelian	31/12/2009		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
1.3.2.05.03.01.0006		**Meja Kerja Pejabat Eselon IV**													**26**			**51,400,000**		**51,400,000**	**0**	**0**	**51,400,000**				
141	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5397913	0001	Meja Kerja	Lokal / -	Standar	Kayu		0		-		-	1		2,000,000	2,000,000	5	2,000,000	0	0	2,000,000	Pembelian	02/11/2020		
142	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2401271	0002	Meja Kerja Pejabat	LOkal / -	-	Kayu		0		-		-	1		1,400,000	1,400,000	5	1,400,000	0	0	1,400,000	Pembelian	11/09/2019		
143	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2401268	0001	Meja Kerja Pejabat	LOkal / -	-	Kayu		0		-		-	1		1,400,000	1,400,000	5	1,400,000	0	0	1,400,000	Pembelian	11/09/2019		
144	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429280	0006		Lokal / -	1 BIRO	KAYU		0		-		-	1		3,000,000	3,000,000	5	3,000,000	0	0	3,000,000	DAU	16/09/2014		BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
145	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429279	0005		Lokal / -	1 BIRO	KAYU		0		-		-	1		3,000,000	3,000,000	5	3,000,000	0	0	3,000,000	DAU	16/09/2014		BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
146	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429278	0004		Lokal / -	1 BIRO	KAYU		0		-		-	1		3,000,000	3,000,000	5	3,000,000	0	0	3,000,000	DAU	16/09/2014		BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
147	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429273	0003		Lokal / -	1 BIRO	KAYU		0		-		-	1		3,000,000	3,000,000	5	3,000,000	0	0	3,000,000	DAU	16/09/2014		BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
148	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429272	0002		Lokal / -	1 BIRO	KAYU		0		-		-	1		3,000,000	3,000,000	5	3,000,000	0	0	3,000,000	DAU	16/09/2014		BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
149	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429271	0001		Lokal / -	1 BIRO	KAYU		0		-		-	1		3,000,000	3,000,000	5	3,000,000	0	0	3,000,000	DAU	16/09/2014		BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
150	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429143	0010		- / -	-	Plywood, Plastik		0		-		-	1		2,000,000	2,000,000	5	2,000,000	0	0	2,000,000	Pembelian	09/05/2016		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
151	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429142	0009		- / -	-	Plywood, Plastik		0		-		-	1		2,000,000	2,000,000	5	2,000,000	0	0	2,000,000	Pembelian	09/05/2016		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
152	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429141	0008		- / -	-	Plywood, Plastik		0		-		-	1		2,000,000	2,000,000	5	2,000,000	0	0	2,000,000	Pembelian	09/05/2016		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
153	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5397923	0002	Meja Kerja	Lokal / -	Standar	Kayu		0		-		-	1		2,000,000	2,000,000	5	2,000,000	0	0	2,000,000	Pembelian	02/11/2020		
154	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429139	0006		- / -	-	Plywood, Plastik		0		-		-	1		2,000,000	2,000,000	5	2,000,000	0	0	2,000,000	Pembelian	09/05/2016		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
155	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429126	0005		- / -	-	Plywood, Plastik		0		-		-	1		2,000,000	2,000,000	5	2,000,000	0	0	2,000,000	Pembelian	09/05/2016		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
156	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429125	0004		- / -	-	Plywood, Plastik		0		-		-	1		2,000,000	2,000,000	5	2,000,000	0	0	2,000,000	Pembelian	09/05/2016		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
157	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429123	0003		- / -	-	Plywood, Plastik		0		-		-	1		2,000,000	2,000,000	5	2,000,000	0	0	2,000,000	Pembelian	09/05/2016		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
158	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429122	0002		- / -	-	Plywood, Plastik		0		-		-	1		2,000,000	2,000,000	5	2,000,000	0	0	2,000,000	Pembelian	09/05/2016		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
159	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429121	0001		- / -	-	Plywood, Plastik		0		-		-	1		2,000,000	2,000,000	5	2,000,000	0	0	2,000,000	Pembelian	09/05/2016		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
160	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429093	0006		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1		1,100,000	1,100,000	5	1,100,000	0	0	1,100,000	Pembelian	11/06/2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
161	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429092	0005		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1		1,100,000	1,100,000	5	1,100,000	0	0	1,100,000	Pembelian	11/06/2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
162	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429091	0004		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1		1,100,000	1,100,000	5	1,100,000	0	0	1,100,000	Pembelian	11/06/2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
163	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429090	0003		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1		1,100,000	1,100,000	5	1,100,000	0	0	1,100,000	Pembelian	11/06/2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
164	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429089	0002		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1		1,100,000	1,100,000	5	1,100,000	0	0	1,100,000	Pembelian	11/06/2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
165	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429088	0001		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1		1,100,000	1,100,000	5	1,100,000	0	0	1,100,000	Pembelian	11/06/2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
166	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429140	0007		- / -	-	Plywood, Plastik		0		-		-	1		2,000,000	2,000,000	5	2,000,000	0	0	2,000,000	Pembelian	09/05/2016		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
1.3.2.05.03.01.0007		**Meja Kerja Pejabat Eselon V**													**5**			**7,500,000**		**7,500,000**	**0**	**0**	**7,500,000**				
167	1.3.2.05.03.01.007	Meja Kerja Pejabat Eselon V	429274	0001		Lokal / SEDANG	1/2 BIRO	KAYU		0		-		-	1		1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	DAU	16/09/2014		BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
168	1.3.2.05.03.01.007	Meja Kerja Pejabat Eselon V	429275	0002		Lokal / SEDANG	1/2 BIRO	KAYU		0		-		-	1		1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	DAU	16/09/2014		BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
169	1.3.2.05.03.01.007	Meja Kerja Pejabat Eselon V	429276	0003		Lokal / SEDANG	1/2 BIRO	KAYU		0		-		-	1		1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	DAU	16/09/2014		BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
170	1.3.2.05.03.01.007	Meja Kerja Pejabat Eselon V	429281	0004		Lokal / SEDANG	1/2 BIRO	KAYU		0		-		-	1		1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	DAU	16/09/2014		BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
171	1.3.2.05.03.01.007	Meja Kerja Pejabat Eselon V	429282	0005		Lokal / SEDANG	1/2 BIRO	KAYU		0		-		-	1		1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	DAU	16/09/2014		BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.05.03.01.0008		**Meja Kerja Pegawai Non Struktural**													**7**			**11,000,000**		**11,000,000**	**0**	**0**	**11,000,000**				
172	1.3.2.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	429164	0001		Lokal / -	-	kayu		0	-	-	-	-	1		1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	Pembelian	19/05/2009		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELURAGA BERENCANA)

173	1.3.2.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	429165	0002		Lokal / -	-	kayu		0	-	-	-	-	1		1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	Pembelian	19/05/2009		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELURAGA BERENCANA)
174	1.3.2.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	429166	0003		Lokal / -	-	kayu		0	-	-	-	-	1		1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	Pembelian	19/05/2009		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELURAGA BERENCANA)
175	1.3.2.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	429167	0004		Lokal / -	-	kayu		0	-	-	-	-	1		1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	Pembelian	19/05/2009		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELURAGA BERENCANA)
176	1.3.2.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	807911	0001	Meja 1 Biro	Lokal / 1 Biro	-	kayu, Plywood		0		-		-	1		2,000,000	2,000,000	5	2,000,000	0	0	2,000,000	Pembelian	02/07/2018		
177	1.3.2.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	807913	0001	Meja Psikolog	Lokal / 1/2 biro	-	Kayu, Plywood		0		-		-	1		1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	Pembelian	02/07/2018		P2TP2A
178	1.3.2.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	807919	0002	Meja Psikolog	Lokal / 1/2 biro	-	Kayu, Plywood		0		-		-	1		1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	Pembelian	02/07/2018		P2TP2A
1.3.2.05.03.02		**MEJA RAPAT PEJABAT**													**3**			**3,614,100**		**3,614,100**	**0**	**0**	**3,614,100**				
1.3.2.05.03.02.0005		**Meja Rapat Pejabat Eselon III**													**3**			**3,614,100**		**3,614,100**	**0**	**0**	**3,614,100**				
179	1.3.2.05.03.02.005	Meja Rapat Pejabat Eselon III	429094	0001		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1		1,204,700	1,204,700	5	1,204,700	0	0	1,204,700	Pembelian	11/06/2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
180	1.3.2.05.03.02.005	Meja Rapat Pejabat Eselon III	429095	0002		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1		1,204,700	1,204,700	5	1,204,700	0	0	1,204,700	Pembelian	11/06/2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
181	1.3.2.05.03.02.005	Meja Rapat Pejabat Eselon III	429096	0003		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1		1,204,700	1,204,700	5	1,204,700	0	0	1,204,700	Pembelian	11/06/2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
1.3.2.05.03.03		**KURSI KERJA PEJABAT**													**16**			**20,500,000**		**20,500,000**	**0**	**0**	**20,500,000**				
1.3.2.05.03.03.0004		**Kursi Kerja Pejabat Eselon II**													**1**			**4,000,000**		**4,000,000**	**0**	**0**	**4,000,000**				
182	1.3.2.05.03.03.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	429262	0001		Gotec / -	Besar	Karet Busa		0		-		-	1		4,000,000	4,000,000	5	4,000,000	0	0	4,000,000	DAU	10/09/2014		BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.05.03.03.0006		**Kursi Kerja Pejabat Eselon IV**													**15**			**16,500,000**		**16,500,000**	**0**	**0**	**16,500,000**				
183	1.3.2.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	429138	0001 - 0012		- / -	-	Campuran		0		-		-	12		1,000,000	12,000,000	5	12,000,000	0	0	12,000,000	Pembelian	09/05/2016		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
184	1.3.2.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	807912	0001		Front Line / OC-079	-	Busa< besi, Plastik		0		-		-	1		1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	Pembelian	02/07/2018		
185	1.3.2.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	807920	0002		Front Line / OC-079	-	Busa< besi, Plastik		0		-		-	1		1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	Pembelian	02/07/2018		
186	1.3.2.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	807921	0003		Front Line / OC-079	-	Busa< besi, Plastik		0		-		-	1		1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	Pembelian	02/07/2018		
1.3.2.05.03.06		**KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT**													**1**			**5,864,000**		**5,864,000**	**0**	**0**	**5,864,000**				
1.3.2.05.03.06.0004		**Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II**													**1**			**5,864,000**		**5,864,000**	**0**	**0**	**5,864,000**				
187	1.3.2.05.03.06.004	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	429097	0001		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1		5,864,000	5,864,000	5	5,864,000	0	0	5,864,000	Pembelian	11/06/2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
1.3.2.05.03.07		**LEMARI DAN ARSIP PEJABAT**													**11**			**19,925,000**		**19,925,000**	**0**	**0**	**19,925,000**				
1.3.2.05.03.07.0007		**Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis**													**10**			**18,425,000**		**18,425,000**	**0**	**0**	**18,425,000**				
188	1.3.2.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	429264	0001		Lokal / BESAR	DUA PINTU	KAYU		0		-		-	1		1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	DAU	16/09/2014		BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
189	1.3.2.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	429265	0002		Lokal / BESAR	DUA PINTU	KAYU		0		-		-	1		1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	DAU	16/09/2014		BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
190	1.3.2.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	429266	0003		Lokal / BESAR	DUA PINTU	KAYU		0		-		-	1		1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	DAU	16/09/2014		BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
191	1.3.2.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	429267	0004		Lokal / BESAR	DUA PINTU	KAYU		0		-		-	1		1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	DAU	16/09/2014		BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
192	1.3.2.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	429268	0005		Lokal / BESAR	DUA PINTU	KAYU		0		-		-	1		1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	DAU	16/09/2014		BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
193	1.3.2.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	429269	0006		Lokal / BESAR	DUA PINTU	KAYU		0		-		-	1		1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	DAU	16/09/2014		BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
194	1.3.2.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	429270	0007		Lokal / BESAR	DUA PINTU	KAYU		0		-		-	1		1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	DAU	16/09/2014		BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
195	1.3.2.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	429306	0001	Lemari Arsip	Lokal / -	180 x 90 x 50	Besi		0		-		-	1		4,925,000	4,925,000	5	4,925,000	0	0	4,925,000	Pembelian	30/11/2015		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
196	1.3.2.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	5397904	0001	Lemari Arsip	Lokal / 2 pintu	-	Kayu		0		-		-	1		1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	Pembelian	01/11/2020		
197	1.3.2.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	5397918	0002	Lemari Arsip	Lokal / 2 pintu	-	Kayu		0		-		-	1		1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	Pembelian	01/11/2020		
1.3.2.05.03.07.0008		**Buffet Kayu**													**1**			**1,500,000**		**1,500,000**	**0**	**0**	**1,500,000**				
198	1.3.2.05.03.07.008	Buffet Kayu	5397917	0001	Buffet	Lokal / Loker 3	-	Kayu		0		-		-	1		1,500,000	1,500,000	5	1,500,000	0	0	1,500,000	Pembelian	01/11/2020		Tanpa Pintu
1.3.2.06		**ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR**													**4**			**16,475,200**		**16,475,200**	**0**	**0**	**16,475,200**				
1.3.2.06.01		**ALAT STUDIO**													**4**			**16,475,200**		**16,475,200**	**0**	**0**	**16,475,200**				
1.3.2.06.01.01		**PERALATAN STUDIO AUDIO**													**2**			**7,890,000**		**7,890,000**	**0**	**0**	**7,890,000**				
1.3.2.06.01.01.0050		**Head Compensator**													**1**			**2,940,000**		**2,940,000**	**0**	**0**	**2,940,000**				
199	1.3.2.06.01.01.050	Head Compensator	429192	0001		Promatic / 1200 VA	-	Besi		0		-		-	1		2,940,000	2,940,000	5	2,940,000	0	0	2,940,000	Pembelian	31/12/2005		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.06.01.01.0059		**Power Amplifier**													**1**			**4,950,000**		**4,950,000**	**0**	**0**	**4,950,000**				
200	1.3.2.06.01.01.059	Power Amplifier	429302	0001	Amplifier	- / -	-	Campuran		0		-		-	1		4,950,000	4,950,000	5	4,950,000	0	0	4,950,000	Pembelian	30/11/2015		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
1.3.2.06.01.02		**PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM**													**2**			**8,585,200**		**8,585,200**	**0**	**0**	**8,585,200**				
1.3.2.06.01.02.0044		**Digital Video Effect**													**1**			**4,500,000**		**4,500,000**	**0**	**0**	**4,500,000**				
201	1.3.2.06.01.02.044	Digital Video Effect	429232	0001		Lokal / -	-	besi		0	-	-	-	-	1		4,500,000	4,500,000	5	4,500,000	0	0	4,500,000	Pembelian	17/12/2010		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.06.01.02.0126		**Camera Digital**													**1**			**4,085,200**		**4,085,200**	**0**	**0**	**4,085,200**				
202	1.3.2.06.01.02.126	Camera Digital	429217	0001	Camera & Attactment	Canon / -	-	metal		0		-		-	1		4,085,200	4,085,200	5	4,085,200	0	0	4,085,200	Pembelian	03/12/2007		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.10		**KOMPUTER**													**91**			**580,567,748**		**565,867,748**	**9,400,000**	**0**	**575,267,748**				
1.3.2.10.01		**KOMPUTER UNIT**													**50**			**465,979,695**		**451,279,695**	**9,400,000**	**0**	**460,679,695**				
1.3.2.10.01.02		**PERSONAL KOMPUTER**													**50**			**465,979,695**		**451,279,695**	**9,400,000**	**0**	**460,679,695**				
1.3.2.10.01.02.0001		**P.C Unit**													**17**			**151,642,000**		**151,642,000**	**0**	**0**	**151,642,000**				
203	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	429068	0001		acer / Z1602	18,5 inch	-		0		-		-	1		7,500,000	7,500,000	4	7,500,000	0	0	7,500,000	Pembelian	14/03/2016		Personal Komputer(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
204	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	429069	0005		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1		8,801,000	8,801,000	4	8,801,000	0	0	8,801,000	Pembelian	11/06/2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
205	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	429197	0001		MILENIUM / -	14 Inc	Electronic		0		-		-	1		5,460,000	5,460,000	4	5,460,000	0	0	5,460,000	Pembelian	31/12/2005		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
206	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	429202	0002		HP / 7650	17	ELEKTRONIC		0		-		-	1		4,225,000	4,225,000	4	4,225,000	0	0	4,225,000	Pembelian	29/12/2006		DEPSOS, Ex Dinsos(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))

207	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	429207	0001	Personal Komputer	LOKAL / -	-	campuran		0		-		-	1		7,885,000	7,885,000	4	7,885,000	0	0	7,885,000	APBD	04/03/2014		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
208	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	429213	0003		Advance / Pentium IV	-	Metal		0		-		-	1		10,263,000	10,263,000	4	10,263,000	0	0	10,263,000	Pembelian	03/12/2007		Ex Dinsos(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
209	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	429247	0001		LG / -	-	Campuran		0		-		-	1		7,500,000	7,500,000	4	7,500,000	0	0	7,500,000	Pembelian	30/09/2013		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
210	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	429316	0001		acer / Z1602	18,5 inch	-		0		-		-	1		7,500,000	7,500,000	4	7,500,000	0	0	7,500,000	Pembelian	14/03/2016		Personal Komputer(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
211	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	429330	0004		Lokal / Intel Pentium Duel Core Proces	E.2180	Campuran		0		-		-	1		8,820,000	8,820,000	4	8,820,000	0	0	8,820,000	Pembelian	20/10/2009		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
212	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	429331	0006		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1		8,801,000	8,801,000	4	8,801,000	0	0	8,801,000	Pembelian	11/06/2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
213	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	429332	0007		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1		8,801,000	8,801,000	4	8,801,000	0	0	8,801,000	Pembelian	11/06/2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
214	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	807900	0002		- / corei3, 4GB, 500GB, DVD	19,5 inch	besi, fiber		0		-		-	1		8,000,000	8,000,000	4	8,000,000	0	0	8,000,000		14/05/2018		
215	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	2400225	0003		- / corei3, 4GB, 500GB, DVD	19,5 inch	besi, fiber		0		-		-	1		8,000,000	8,000,000	4	8,000,000	0	0	8,000,000		14/05/2018		
216	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	2401259	0004	PC Unit	HP Desktop PC 280 G3 / Small Form Factor	8GB/1TB	Fiber		0		-		-	1		10,350,000	10,350,000	4	10,350,000	0	0	10,350,000	HIBAH	04/11/2019		Direktorat Jaminan Sosial Keluarga (JSK) Kemensos RI
217	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	2401265	0005	PC Unit	HP Desktop PC 280 G3 / Small Form Factor	8GB/1TB	Fiber		0		-		-	1		10,350,000	10,350,000	4	10,350,000	0	0	10,350,000	HIBAH	04/11/2019		Direktorat Jaminan Sosial Keluarga (JSK) Kemensos RI
218	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	2401291	0001	PC Tablet	Samsung Galaxy Tab A 8 / -	-	Fiber		0		-		-	1		3,494,000	3,494,000	4	3,494,000	0	0	3,494,000	HIBAH	04/11/2019		Direktorat Jaminan Sosial Keluarga (JSK) Kemensos RI
219	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	5397910	0001	Personal Computer	- / Multi Touch LED-backlight	27 (68.6cm)	Fiber silver/putih		0		-		-	1		25,892,000	25,892,000	4	25,892,000	0	0	25,892,000	Pembelian	02/11/2020		16 GB DDR4 at 2400MHz
1.3.2.10.01.02.0002		**Lap Top**													**16**			**161,660,000**		**146,960,000**	**9,400,000**	**0**	**156,360,000**				
220	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	429173	0001		LENOVO / 14"	-	-		0		-		-	1		7,625,000	7,625,000	4	7,625,000	0	0	7,625,000		12/12/2015		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELURAGA BERENCANA)
221	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	429215	0001		Lokal / -	-	Metal		0		-		-	1		5,000,000	5,000,000	4	5,000,000	0	0	5,000,000	Pembelian	03/12/2007		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
222	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	429239	0002		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1		6,000,000	6,000,000	4	6,000,000	0	0	6,000,000	Pembelian	17/09/2012		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
223	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	429240	0001		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1		7,500,000	7,500,000	4	7,500,000	0	0	7,500,000	Pembelian	17/09/2012		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
224	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	807901	0002		Asus X441U / X441U	14 inch	-		0		-		-	1		8,500,000	8,500,000	4	8,500,000	0	0	8,500,000	APBD	14/05/2018		
225	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	807905	0001		Asus Vivobook A442U / Vivobook A442U	14 inch	-		0		-		-	1		12,000,000	12,000,000	4	12,000,000	0	0	12,000,000		14/05/2018		
226	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	807906	0003		Asus X441U / X441U	14 inch	-		0		-		-	1		8,500,000	8,500,000	4	8,500,000	0	0	8,500,000	APBD	14/05/2018		
227	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	2401264	0001		Asus X441 ub / Asus X441 ub	Standar	Fiber		0		-		-	1		10,000,000	10,000,000	4	10,000,000	0	0	10,000,000	Pembelian	14/05/2019		Warna Merah
228	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	2401281	0002		ACER ONE 14 Z476 / Acer On Z476	14	Fiber		0		-		-	1		9,000,000	9,000,000	4	9,000,000	0	0	9,000,000	Pembelian	14/05/2019		Warna Hitam
229	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	2401302	0003		ACER ASPIRE E5-476G-599H / ASPIRE E5-476G-599H	E14	Fiber		0		-		-	1		11,000,000	11,000,000	4	11,000,000	0	0	11,000,000	Pembelian	14/05/2019		Abu-abu metalik
230	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	5397906	0001	Laptop/Notebook	- / Intel Core i5-9300H	15.6 FHD (1920*1080)	Fiber Hitam		0		-		-	1		14,467,500	14,467,500	4	14,467,500	0	0	14,467,500	Pembelian	02/11/2020		8 GB DDR4, 256GB SSD
231	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	5397915	0002	Laptop/Notebook	- / Intel Core i5-9300H	15.6 FHD (1920*1080)	Fiber Hitam		0		-		-	1		14,467,500	14,467,500	4	14,467,500	0	0	14,467,500	Pembelian	02/11/2020		8 GB DDR4, 256GB SSD
232	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	5428827	0004	Laptop	ACER / N20C4 Aspire 5	12 Inch	Fiber		0		-		-	1		10,000,000	10,000,000	4	10,000,000	0	0	10,000,000	Pembelian	01/11/2021		
233	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	5450069	0001	Laptop	Acer / -	-	Fiber		0		-		-	1		13,600,000	13,600,000	4	10,200,000	3,400,000	0	13,600,000	Pembelian	21/10/2022		Sub Bagian Adum dan Kepegawaian
234	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	5450071	0002		Acer / -	-	Fiber		0		-		-	1		13,400,000	13,400,000	4	10,050,000	3,350,000	0	13,400,000	Pembelian	21/10/2022		Bidang PJRS
235	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	6000235	00001	-	ASUZ A3202WBAK-WA382W / -	-	campuran		0	-	-	-	-	1		10,600,000	10,600,000	4	2,650,000	2,650,000	0	5,300,000	DAU	30/04/2024		-
1.3.2.10.01.02.0003		**Note Book**													**17**			**152,677,695**		**152,677,695**	**0**	**0**	**152,677,695**				
236	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429070	0003		ACER / Aspire 4721Z	-	Campuran		0		-		-	1		10,000,000	10,000,000	4	10,000,000	0	0	10,000,000	Pembelian	20/10/2009		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
237	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429071	0004		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1		12,240,000	12,240,000	4	12,240,000	0	0	12,240,000	Pembelian	11/06/2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
238	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429072	0005		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1		12,240,000	12,240,000	4	12,240,000	0	0	12,240,000	Pembelian	11/06/2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
239	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429073	0006		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1		11,918,000	11,918,000	4	11,918,000	0	0	11,918,000	Pembelian	25/11/2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
240	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429074	0007		HP / 32 BIT	-	Campuran		0		-		-	1		7,250,000	7,250,000	4	7,250,000	0	0	7,250,000	Pembelian	01/04/2013		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
241	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429075	0008		ASUS / ASUS	-	Campuran		0		-		-	1		9,500,000	9,500,000	4	9,500,000	0	0	9,500,000	Pembelian	01/04/2013		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
242	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429076	0009		HP / 32 BIT	-	Campuran		0		-		-	1		7,250,000	7,250,000	4	7,250,000	0	0	7,250,000	Pembelian	01/04/2013		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
243	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429102	0001		ASUS / -	-	-		0		-		-	1		10,000,000	10,000,000	4	10,000,000	0	0	10,000,000	Pembelian	02/04/2014		BELANJA BARANG INVENTARIS(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
244	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429103	0002		ASUS / -	-	-		0		-		-	1		10,000,000	10,000,000	4	10,000,000	0	0	10,000,000	Pembelian	02/04/2014		BELANJA BARANG INVENTARIS(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
245	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429105	0003		ASUS / -	-	-		0		-		-	1		10,000,000	10,000,000	4	10,000,000	0	0	10,000,000	Pembelian	02/04/2014		BELANJA BARANG INVENTARIS(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
246	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429106	0004		ASUS / -	-	-		0		-		-	1		10,000,000	10,000,000	4	10,000,000	0	0	10,000,000	Pembelian	02/04/2014		BELANJA BARANG INVENTARIS(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)

247	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429224	0001		Lokal / -	-	besi		0	-	-	-	-	1		7,222,655	7,222,655	4	7,222,655	0	0	7,222,655	Pembelian	06/07/2009		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
248	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429225	0002		Lokal / -	-	besi		0	-	-	-	-	1		7,222,655	7,222,655	4	7,222,655	0	0	7,222,655	Pembelian	06/07/2009		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
249	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429285	0001		ASUS / INTEL CORE i3-4030U, 1.9GHz	14 INCH	PLASTIK		0		-		-	1		8,584,385	8,584,385	4	8,584,385	0	0	8,584,385	DAU	22/12/2014		NOTEBOOK ASUS(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
250	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429304	0001		ACER / One 14 Z1 402-POJN	14	Campuran		0		-		-	1		6,000,000	6,000,000	4	6,000,000	0	0	6,000,000	Pembelian	30/11/2015		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
251	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429311	0002		ACER / One 14 Z1 402-POJN	14	Campuran		0		-		-	1		6,000,000	6,000,000	4	6,000,000	0	0	6,000,000	Pembelian	30/11/2015		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
252	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	2401290	0001	Note Book	Lenovo / Ideapad 130 3TID	-	Fiber		0				-	1		7,250,000	7,250,000	4	7,250,000	0	0	7,250,000	HIBAH	10/12/2019		Sekretariat PUSPAGA Perlindungan Anak
1.3.2.10.02	**PERALATAN KOMPUTER**														**41**			**114,588,053**		**114,588,053**	**0**	**0**	**114,588,053**				
1.3.2.10.02.02	**PERALATAN MINI KOMPUTER**														**7**			**32,226,773**		**32,226,773**	**0**	**0**	**32,226,773**				
1.3.2.10.02.02.0010	**Computer Compatible**														**1**			**8,456,773**		**8,456,773**	**0**	**0**	**8,456,773**				
253	1.3.2.10.02.02.010	Computer Compatible	429286	0001		LG / LCD	-	Campuran		0		-		-	1		8,456,773	8,456,773	4	8,456,773	0	0	8,456,773	DAU	22/12/2014		PERSONAL COMPUTER(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.10.02.02.0015	**Cut Sheet Feeder**														**6**			**23,770,000**		**23,770,000**	**0**	**0**	**23,770,000**				
254	1.3.2.10.02.02.015	Cut Sheet Feeder	429078	0001		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1		14,520,000	14,520,000	4	14,520,000	0	0	14,520,000	Pembelian	11/06/2010		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
255	1.3.2.10.02.02.015	Cut Sheet Feeder	429079	0002		CANON / CANON MP237	-	Campuran		0		-		-	1		1,250,000	1,250,000	4	1,250,000	0	0	1,250,000	Pembelian	01/04/2013		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
256	1.3.2.10.02.02.015	Cut Sheet Feeder	429171	0003		Lokal / -	-	Plastik		0		-		-	1		1,000,000	1,000,000	4	1,000,000	0	0	1,000,000	Pembelian	31/12/2013		(Mutasi dari (baru) DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK,PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA)
257	1.3.2.10.02.02.015	Cut Sheet Feeder	429172	0004		Lokal / -	-	Plastik		0		-		-	1		1,000,000	1,000,000	4	1,000,000	0	0	1,000,000	Pembelian	31/12/2013		(Mutasi dari (baru) DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK,PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA)
258	1.3.2.10.02.02.015	Cut Sheet Feeder	429305	0001		EPSON / L220	-	Plastik		0		-		-	1		3,000,000	3,000,000	4	3,000,000	0	0	3,000,000	Pembelian	30/11/2015		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
259	1.3.2.10.02.02.015	Cut Sheet Feeder	429313	0002		EPSON / L220	-	Plastik		0		-		-	1		3,000,000	3,000,000	4	3,000,000	0	0	3,000,000	Pembelian	30/11/2015		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
1.3.2.10.02.03	**PERALATAN PERSONAL KOMPUTER**														**34**			**82,361,280**		**82,361,280**	**0**	**0**	**82,361,280**				
1.3.2.10.02.03.0001	**CPU (Peralatan Personal Komputer)**														**3**			**11,810,000**		**11,810,000**	**0**	**0**	**11,810,000**				
260	1.3.2.10.02.03.001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	429082	0002		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1		2,580,000	2,580,000	4	2,580,000	0	0	2,580,000	Pembelian	20/10/2009		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
261	1.3.2.10.02.03.001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	429223	0001		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1		2,260,000	2,260,000	4	2,260,000	0	0	2,260,000	Pembelian	31/12/2008		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
262	1.3.2.10.02.03.001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	429231	0003		Lokal / -	-	besi		0	-	-	-	-	1		6,970,000	6,970,000	4	6,970,000	0	0	6,970,000	Pembelian	17/12/2010		keyboard(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.2.10.02.03.0003	**Printer (Peralatan Personal Komputer)**														**28**			**61,713,780**		**61,713,780**	**0**	**0**	**61,713,780**				
263	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5428822	0004		Epson / L3110	32 cm x 32 cm	Fiber		0		-		-	1		2,728,445	2,728,445	4	2,728,445	0	0	2,728,445	Pembelian	30/11/2021		
264	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5428821	0003		Canon / Pixma MP287	32 cm x 32 cm	Fiber		0		-		-	1		2,728,445	2,728,445	4	2,728,445	0	0	2,728,445	Pembelian	30/11/2021		
265	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5428820	0002		Canon / Pixma MP287	32 cm x 32 cm	Fiber		0		-		-	1		2,728,445	2,728,445	4	2,728,445	0	0	2,728,445	Pembelian	30/11/2021		
266	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5397922	0001	Printer	Canon / Pixma MP287	-	Fiber hItam		0		-		-	1		1,500,000	1,500,000	4	1,500,000	0	0	1,500,000	Pembelian	02/11/2020		Flatbed
267	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5397921	0001	Printer	Epson / L3110	-	Fiber Hitam		0		-		-	1		3,050,000	3,050,000	4	3,050,000	0	0	3,050,000	Pembelian	17/11/2020		Printer Camscannaer
268	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5397919	0005	Printer	Epson / L3110	-	Fiber Hitam		0		-		-	1		3,050,000	3,050,000	4	3,050,000	0	0	3,050,000	Pembelian	17/11/2020		Printer Camscannaer
269	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5397907	0002	Printer	Canon / Pixma G1010	-	Fiber Hitam		0		-		-	1		1,950,000	1,950,000	4	1,950,000	0	0	1,950,000	Pembelian	17/11/2020		
270	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5397905	0002	Printer	Canon / Pixma G1010	-	Fiber Hitam		0		-		-	1		1,950,000	1,950,000	4	1,950,000	0	0	1,950,000	Pembelian	17/11/2020		
271	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2401300	0001		Canon Pixma MX 497 / Pixma MX 497	Standar	Fiber		0		KKHJ56471		-	1		2,000,000	2,000,000	4	2,000,000	0	0	2,000,000	Pembelian	14/05/2019		Warna Hitam
272	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2401299	0001		Canon Pixma MX 497 / Pixma MX 497	Standar	Fiber		0		KKHJ55632		-	1		2,000,000	2,000,000	4	2,000,000	0	0	2,000,000	Pembelian	14/05/2019		Warna Hitam
273	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2401298	0004		Canon Pixma MX 497 / Pixma MX 497	Standar	Fiber		0		KKHJ14633		-	1		2,000,000	2,000,000	4	2,000,000	0	0	2,000,000	Pembelian	14/05/2019		Warna Hitam
274	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2401286	0002	Printer	Epson L3110 / L3110	-	Fiber		0		-		-	1		2,800,000	2,800,000	4	2,800,000	0	0	2,800,000	HIBAH	10/12/2019		Sekretariat PUSPAGA Perlindungan Anak
275	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2401280	0001		Canon Pixma MX 497 / Pixma MX 497	Standar	Fiber		0		KKHJ55620		-	1		2,000,000	2,000,000	4	2,000,000	0	0	2,000,000	Pembelian	14/05/2019		Warna Hitam
276	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5428823	0005		Epson / L3110	32 cm x 32 cm	Fiber		0		-		-	1		2,728,445	2,728,445	4	2,728,445	0	0	2,728,445	Pembelian	30/11/2021		
277	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2401278	0003		Canon Pixma MX 497 / Pixma MX 497	Standar	Fiber		0		KKHJ55649		-	1		2,000,000	2,000,000	4	2,000,000	0	0	2,000,000	Pembelian	14/05/2019		Warna Hitam
278	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2401270	0001		Canon Pixma MX 497 / Pixma MX 497	Standar	Fiber		0		-		-	1		2,000,000	2,000,000	4	2,000,000	0	0	2,000,000	Pembelian	14/05/2019		Warna Hitam
279	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	429307	0004		EPSON / L220	-	Campuran		0		-		-	1		3,000,000	3,000,000	4	3,000,000	0	0	3,000,000	Pembelian	15/02/2016		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
280	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	429249	0002		CANON / -	-	Campuran		0		-		-	1		1,500,000	1,500,000	4	1,500,000	0	0	1,500,000	Pembelian	30/09/2013		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
281	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	429248	0001		CANON / -	-	Campuran		0		-		-	1		1,500,000	1,500,000	4	1,500,000	0	0	1,500,000	Pembelian	30/09/2013		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))

282	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	429170	0001		Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1		1,000,000	1,000,000	4	1,000,000	0	0	1,000,000	Pembelian	13/09/2012		(Mutasi dari (baru) DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK,PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA)
283	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	429137	0003		EPSON / L220	-	Campuran		0		-		-	1		3,000,000	3,000,000	4	3,000,000	0	0	3,000,000	Pembelian	15/02/2016		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
284	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	429127	0002		EPSON / L220	-	Campuran		0		-		-	1		3,000,000	3,000,000	4	3,000,000	0	0	3,000,000	Pembelian	15/02/2016		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
285	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	429111	0001		EPSON / L220	-	Campuran		0		-		-	1		3,000,000	3,000,000	4	3,000,000	0	0	3,000,000	Pembelian	15/02/2016		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
286	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	429081	0003		CANON / CANON MP237	-	Campuran		0		-		-	1		1,250,000	1,250,000	4	1,250,000	0	0	1,250,000	Pembelian	01/04/2013		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
287	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	429080	0002		CANON / CANON MP237	-	Campuran		0		-		-	1		1,250,000	1,250,000	4	1,250,000	0	0	1,250,000	Pembelian	01/04/2013		(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
288	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	429066	0001		epson / L210	F4	-		0		-		-	1		2,000,000	2,000,000	4	2,000,000	0	0	2,000,000	Pembelian	14/03/2016		Printer epson L210(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
289	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	429064	0001		epson / L210	F4	-		0		-		-	1		2,000,000	2,000,000	4	2,000,000	0	0	2,000,000	Pembelian	14/03/2016		Printer epson L210(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
290	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2401279	0001		Canon Pixma MX 497 / Pixma MX 497	Standar	Fiber		0		-		-	1		2,000,000	2,000,000	4	2,000,000	0	0	2,000,000	Pembelian	14/05/2019		Warna Hitam
1.3.2.10.02.03.0007		**External**													**3**			**8,837,500**		**8,837,500**	**0**	**0**	**8,837,500**				
291	1.3.2.10.02.03.007	External	429194	0001	Stabilizer	TWIN 006 / -	-	Besi		0		-		-	1		2,940,000	2,940,000	4	2,940,000	0	0	2,940,000	Pembelian	31/12/2005		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
292	1.3.2.10.02.03.007	External	429195	0002	Stabilzer	TWIN DOG / -	-	Besi		0		-		-	1		2,940,000	2,940,000	4	2,940,000	0	0	2,940,000	Pembelian	31/12/2005		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
293	1.3.2.10.02.03.007	External	429198	0003	Stabilizer	TOYOSAKI / -	kecil	Besi		0		-		-	1		2,957,500	2,957,500	4	2,957,500	0	0	2,957,500	Pembelian	08/12/2006		(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
1.3.3		**Gedung dan bangunan**													**2**			**1,369,713,336**		**454,715,596.41**	**22,454,442.55**	**0**	**477,170,038.96**				
1.3.3.01		**BANGUNAN GEDUNG**													**2**			**1,369,713,336**		**454,715,596.41**	**22,454,442.55**	**0**	**477,170,038.96**				
1.3.3.01.01		**BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA**													**2**			**1,369,713,336**		**454,715,596.41**	**22,454,442.55**	**0**	**477,170,038.96**				
1.3.3.01.01.01		**BANGUNAN GEDUNG KANTOR**													**2**			**1,369,713,336**		**454,715,596.41**	**22,454,442.55**	**0**	**477,170,038.96**				
1.3.3.01.01.01.0001		**Bangunan Gedung Kantor Permanen**													**2**			**1,369,713,336**		**454,715,596.41**	**22,454,442.55**	**0**	**477,170,038.96**				
294	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	429289	0001	Paving Blok	/									0		∞	94,580,000	50	56,344,050	5,634,405	0	61,978,455	Pembelian	26/11/2015		
295	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	429333	0001		/									0		∞	13,236,086	50	151,380,337.96	16,820,037.55	0	168,200,375.51	APBD	01/11/2016		
296	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	429334	0001		/									1		674,977,000	674,977,000	50	107,996,320	0	0	107,996,320	HIBAH	29/12/2000		
297	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	429335	0002		/									0		∞	20,000,000	47	12,488,950.64	0	0	12,488,950.64	Pembelian	31/12/2008		
298	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	429336	0003		/									0		∞	334,280,000	50	54,526,303.76	0	0	54,526,303.76	Pembelian	28/07/2009		
299	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	429337	0001		/									0		∞	45,500,000	50	71,979,634.05	0	0	71,979,634.05	Pembelian	31/12/2012		
300	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	429338	0001	Rumah Singgah	/									1		187,140,250	187,140,250	50	0	0	0	0	Pembelian	16/11/2015		
1.3.4		**Jalan, irigasi dan jaringan**													**2**			**197,639,000**		**67,424,966.67**	**6,587,966.66**	**0**	**74,012,933.33**				
1.3.4.02		**BANGUNAN AIR**													**2**			**197,639,000**		**67,424,966.67**	**6,587,966.66**	**0**	**74,012,933.33**				
1.3.4.02.04		**BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALA**													**2**			**197,639,000**		**67,424,966.67**	**6,587,966.66**	**0**	**74,012,933.33**				
1.3.4.02.04.04		**BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI**													**1**			**121,999,000**		**44,732,966.67**	**4,066,633.33**	**0**	**48,799,600**				
1.3.4.02.04.04.0002		**Saluran Drainage**													**1**			**121,999,000**		**44,732,966.67**	**4,066,633.33**	**0**	**48,799,600**				
301	1.3.4.02.04.04.002	Saluran Drainage	429283	0001		/									1		121,999,000	121,999,000	30	44,732,966.67	4,066,633.33	0	48,799,600	DAU	12/12/2014		
1.3.4.02.04.05		**BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN SUNGAI/PANTAI**													**1**			**75,640,000**		**22,692,000**	**2,521,333.33**	**0**	**25,213,333.33**				
1.3.4.02.04.05.0008		**Bangunan Pelimpah Banjir**													**1**			**75,640,000**		**22,692,000**	**2,521,333.33**	**0**	**25,213,333.33**				
302	1.3.4.02.04.05.008	Bangunan Pelimpah Banjir	429067	0001	Rabat Beton dan Turap	/									1		75,640,000	75,640,000	30	22,692,000	2,521,333.33	0	25,213,333.33	APBD	26/04/2016		
1.3.5		**Asset tetap lainnya**													**1**			**3,300,000**		**0**	**0**	**0**	**0**				
1.3.5.01		**BAHAN PERPUSTAKAAN**													**1**			**3,300,000**		**0**	**0**	**0**	**0**				
1.3.5.01.01		**BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK**													**1**			**3,300,000**		**0**	**0**	**0**	**0**				
1.3.5.01.01.01		**BUKU UMUM**													**1**			**3,300,000**		**0**	**0**	**0**	**0**				
1.3.5.01.01.01.0001		**Monograf**													**1**			**3,300,000**		**0**	**0**	**0**	**0**				
303	1.3.5.01.01.01.001	Monograf	429109	0001	Buku Perpustakaan	/									1		3,300,000	3,300,000	0	0	0	0	0	Pembelian	30/12/2011		

Kamis, 5 Maret 2026

Pengguna Barang

dr. I MADE PUTRA NEGARA, M.M

NIP : 19661116 199903 1 002

DAFTAR BMD
ASET LAIN LAINNYA
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2025

Provinsi : KALIMANTAN BARAT
Pemerintah Daerah : BENGKAYANG
Pengguna Barang : DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

no	Kode Barang	Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi nama barang	Merek / Tipe	Spesifikasi lainnya		Kondisi	Kendaraan Dinas					Jumlah	Tahun Mutasi	Harga satuan perolehan	Nilai perolehan	Penyusutan					Cara perolehan	Tanggal perolehan	Keterangan
							ukuran	Bahan		CC	Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB	Nomor Mesin					umur	Akum s/d tahun lalu	Beban	Korekis	Akum s/d tahun ini	Nilai Buku			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.5.4		**Aset Lain-Lain**													**58**			**299.790.210**		**298.790.210**	**0**	**0**	**298.790.210**	**1.000.000**			
1.5.4.01		**Aset Lain-lain**													**58**			**299.790.210**		**298.790.210**	**0**	**0**	**298.790.210**	**1.000.000**			
1.5.4.01.01		**ASET LAIN-LAIN**													**58**			**299.790.210**		**298.790.210**	**0**	**0**	**298.790.210**	**1.000.000**			
1.5.4.01.01.01		**ASET RUSAK BERAT ATAU USANG**													**36**			**138.980.830**		**137.980.830**	**0**	**0**	**137.980.830**	**1.000.000**			
1.5.4.01.01.01.002		**Peralatan dan mesin rusak berat**													**36**			**138.980.830**		**137.980.830**	**0**	**0**	**137.980.830**	**1.000.000**			
1	1.5.4.01.01.01.0002	Peralatan dan mesin rusak berat	429062	0001	Note Book	ACER / One 14 Z1 402-POJN	14"	Campuran	Rusak Berat	0		-		-	1	2019	6.000.000	6.000.000	4	6.000.000	0	0	6.000.000	0	Pembelian	30/11/2015	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
2	1.5.4.01.01.01.0002	Peralatan dan mesin rusak berat	429083	0003	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Lokal / -	-	Campuran	Rusak Berat	0		-		-	1	2020	3.717.580	3.717.580	4	3.717.580	0	0	3.717.580	0	Pembelian	01/12/2010	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
3	1.5.4.01.01.01.0002	Peralatan dan mesin rusak berat	429086	0001	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal / -	-	Campuran	Rusak Berat	0		-		-	1	2019	1.100.000	1.100.000	5	1.100.000	0	0	1.100.000	0	Pembelian	11/06/2010	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
4	1.5.4.01.01.01.0002	Peralatan dan mesin rusak berat	429087	0002	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal / -	-	Campuran	Rusak Berat	0		-		-	1	2019	1.100.000	1.100.000	5	1.100.000	0	0	1.100.000	0	Pembelian	11/06/2010	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
5	1.5.4.01.01.01.0002	Peralatan dan mesin rusak berat	429099	0002	Facsimile	Lokal / -	-	Campuran	Rusak Berat	0		-		-	1	2019	2.500.000	2.500.000	5	2.500.000	0	0	2.500.000	0	Pembelian	30/12/2011	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
6	1.5.4.01.01.01.0002	Peralatan dan mesin rusak berat	429100	0001	Televisi	Lokal / -	-	Campuran	Rusak Berat	0		-		-	1	2019	3.000.000	3.000.000	5	3.000.000	0	0	3.000.000	0	Pembelian	03/12/2010	TELEVISI(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
7	1.5.4.01.01.01.0002	Peralatan dan mesin rusak berat	429108	0001	Note Book	ACER / -	-	-	Rusak Berat	0		-		-	1	2020	10.000.000	10.000.000	4	10.000.000	0	0	10.000.000	0	Pembelian	13/10/2014	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
8	1.5.4.01.01.01.0002	Peralatan dan mesin rusak berat	429114	0002	Sepeda Motor	HONDA / SUPRA X	110	BESI	Rusak Berat	0	KB 3470 K	MH 1 KEV 8171 K 0901		KEV 8E-1091538	1	2020	9.056.000	9.056.000	5	9.056.000	0	0	9.056.000	0	Pembelian	31/12/2002	HITAM(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
9	1.5.4.01.01.01.0002	Peralatan dan mesin rusak berat	429119	0001	Filing Cabinet Besi	Brother / -	-	Besi	Rusak Berat	0		-		-	1	2019	1.222.500	1.222.500	5	1.222.500	0	0	1.222.500	0	Pembelian	30/12/2000	Filling kabinet 4 laci(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
10	1.5.4.01.01.01.0002	Peralatan dan mesin rusak berat	429120	0001	Filing Cabinet Besi	ATLANTIC / -	4 Laci	Besi	Rusak Berat	0		-		-	1	2019	1.230.000	1.230.000	5	1.230.000	0	0	1.230.000	0	Pembelian	31/12/2001	(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
11	1.5.4.01.01.01.0002	Peralatan dan mesin rusak berat	429169	0002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Lokal / -	-	Campuran	Rusak Berat	0		-		-	1	2020	1.000.000	1.000.000	4	1.000.000	0	0	1.000.000	0	Pembelian	22/05/2012	(Mutasi dari (baru) DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK,PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA)
12	1.5.4.01.01.01.0002	Peralatan dan mesin rusak berat	429181	0001	Sofa	Lokal / -	-	Kayu	Rusak Berat	0		-		-	1	2019	1.867.500	1.867.500	5	1.867.500	0	0	1.867.500	0	Pembelian	31/12/2003	1 set, Ex Dinsos(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
13	1.5.4.01.01.01.0002	Peralatan dan mesin rusak berat	429182	0002	Sofa	Lokal / -	-	Kayu+plastik	Rusak Berat	0		-		-	1	2019	1.878.750	1.878.750	5	1.878.750	0	0	1.878.750	0	Pembelian	31/12/2004	(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
14	1.5.4.01.01.01.0002	Peralatan dan mesin rusak berat	429183	0004	Sepeda Motor	YAMAHA / YT 115	115 CC	BESI	Rusak Berat	0	KB 2266 KB	MH33WL0045K160841	D-3163091K	3HB-332364	1	2019	12.416.000	12.416.000	5	12.416.000	0	0	12.416.000	0	Pembelian	31/12/2005	(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
15	1.5.4.01.01.01.0002	Peralatan dan mesin rusak berat	429187	0003	Sofa	LOKAL / -	-	KAYU/BUSA	Rusak Berat	0		-		-	1	2019	1.890.000	1.890.000	5	1.890.000	0	0	1.890.000	0	Pembelian	31/12/2005	DARI DINAS SOSIAL(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
16	1.5.4.01.01.01.0002	Peralatan dan mesin rusak berat	429188	0001	A.C. Split	NATIONAL / -	1 PK	BESI/PLASTIK	Rusak Berat	0		-		-	1	2019	3.360.000	3.360.000	5	3.360.000	0	0	3.360.000	0	Pembelian	31/12/2005	(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
17	1.5.4.01.01.01.0002	Peralatan dan mesin rusak berat	429189	0001	P.C Unit	LOKAL / PENTIUM IV	-	BESI	Rusak Berat	0		-		-	1	2019	4.200.000	4.200.000	4	4.200.000	0	0	4.200.000	0	Pembelian	31/12/2005	DARI DINAS SOSIAL(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
18	1.5.4.01.01.01.0002	Peralatan dan mesin rusak berat	429190	0002	P.C Unit	LOKAL / PENTIUM III	-	BESI/PLASTIK	Rusak Berat	0		-		-	1	2019	4.200.000	4.200.000	4	4.200.000	0	0	4.200.000	0	Pembelian	31/12/2005	DARI DINAS SOSIAL(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
19	1.5.4.01.01.01.0002	Peralatan dan mesin rusak berat	429193	0001	Facsimile	PANASONIC / -	-	PLASTIK	Rusak Berat	0		-		-	1	2019	1.260.000	1.260.000	5	1.260.000	0	0	1.260.000	0	Pembelian	31/12/2005	(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
20	1.5.4.01.01.01.0002	Peralatan dan mesin rusak berat	429196	0001	Personal Computer	MILENIUM / -	14 INC	Electronic	Rusak Berat	0		-		-	1	2019	5.460.000	5.460.000	10	5.460.000	0	0	5.460.000	0	Pembelian	31/12/2005	(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
21	1.5.4.01.01.01.0002	Peralatan dan mesin rusak berat	429199	0002	Rak Besi	LOKAL / RAK PIRING	KECIL	ALUMUNIUM	Rusak Berat	0		-		-	1	2019	1.605.500	1.605.500	5	1.605.500	0	0	1.605.500	0	Pembelian	29/12/2006	(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
22	1.5.4.01.01.01.0002	Peralatan dan mesin rusak berat	429206	0001	Sofa	LOKAL / -	-	BUSA	Rusak Berat	0		-		-	1	2019	1.901.250	1.901.250	5	1.901.250	0	0	1.901.250	0	Pembelian	31/12/2006	(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
23	1.5.4.01.01.01.0002	Peralatan dan mesin rusak berat	429209	0005	Sepeda Motor	Honda / NF 125 TD	125	Metal	Rusak Berat	0	KB 2682 KD	MHIJB81157K022833		JB81E-1025512	1	2019	14.550.750	14.550.750	5	14.550.750	0	0	14.550.750	0	Pembelian	03/12/2007	Dipakai Kasubdin PM(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
24	1.5.4.01.01.01.0002	Peralatan dan mesin rusak berat	429210	0006	Filing Cabinet Besi	Lokal / -	-	Besi	Rusak Berat	0		-		-	1	2019	1.650.000	1.650.000	5	1.650.000	0	0	1.650.000	0	Pembelian	03/12/2007	(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
25	1.5.4.01.01.01.0002	Peralatan dan mesin rusak berat	429214	0001	Lap Top	Lokal / -	-	Metal	Rusak Berat	0		-		-	1	2019	5.000.000	5.000.000	4	5.000.000	0	0	5.000.000	0	Pembelian	03/12/2007	(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
26	1.5.4.01.01.01.0002	Peralatan dan mesin rusak berat	429216	0001	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Lokal / -	-	Metal	Rusak Berat	0		-		-	1	2020	1.050.000	1.050.000	4	1.050.000	0	0	1.050.000	0	Pembelian	03/12/2007	Ex Dinsos(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
27	1.5.4.01.01.01.0002	Peralatan dan mesin rusak berat	429220	0008	Filing Cabinet Besi	Lokal / -	-	Campuran	Rusak Berat	0		-		-	1	2019	4.900.000	4.900.000	5	4.900.000	0	0	4.900.000	0	Pembelian	31/12/2008	(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
28	1.5.4.01.01.01.0002	Peralatan dan mesin rusak berat	429222	0003	P.C Unit	Lokal / -	-	Campuran	Rusak Berat	0		-		-	1	2019	3.240.000	3.240.000	4	3.240.000	0	0	3.240.000	0	Pembelian	31/12/2008	(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
29	1.5.4.01.01.01.0002	Peralatan dan mesin rusak berat	429250	0001	Facsimile	PANASONIC / -	-	Campuran	Rusak Berat	0		-		-	1	2020	2.500.000	2.500.000	5	2.500.000	0	0	2.500.000	0	Pembelian	30/09/2013	(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
30	1.5.4.01.01.01.0002	Peralatan dan mesin rusak berat	429251	0002	Lap Top	acer / -	-	Campuran	Rusak Berat	0		-		-	1	2020	8.500.000	8.500.000	4	8.500.000	0	0	8.500.000	0	Pembelian	29/11/2013	(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
31	1.5.4.01.01.01.0002	Peralatan dan mesin rusak berat	429288	0001	Televisi	Sharp Lc-24 LE1071 AQUOS / Sedang	21 Inc	-	Rusak Berat	0		-		-	1	2020	3.500.000	3.500.000	5	3.500.000	0	0	3.500.000	0	Pembelian	26/11/2015	Pengadaan Peralatan gedung kantor(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
32	1.5.4.01.01.01.0002	Peralatan dan mesin rusak berat	429314	0001	Genset	PAUS / PS5700NDD	2500	metal	Rusak Berat	0		-		-	1	2020	5.000.000	5.000.000	5	4.000.000	0	0	4.000.000	1.000.000	APBD	13/12/2016	(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
33	1.5.4.01.01.01.0002	Peralatan dan mesin rusak berat	429318	0009	Filing Cabinet Besi	Lokal / -	-	Campuran	Rusak Berat	0		-		-	1	2019	2.200.000	2.200.000	5	2.200.000	0	0	2.200.000	0	Pembelian	31/12/2009	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
34	1.5.4.01.01.01.0002	Peralatan dan mesin rusak berat	429320	0011	Filing Cabinet Besi	Lokal / -	-	Campuran	Rusak Berat	0		-		-	1	2020	2.462.500	2.462.500	5	2.462.500	0	0	2.462.500	0	Pembelian	11/06/2010	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)

35	1.5.4.01.01.01.0002	Peralatan dan mesin rusak berat	429321	0012	Filing Cabinet Besi	Lokal / -	-	Campuran	Rusak Berat	0		-		-	1	2020	2.462.500	2.462.500	5	2.462.500	0	0	2.462.500	0	Pembelian	11/06/2010	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
36	1.5.4.01.01.01.0002	Peralatan dan mesin rusak berat	429329	0001	Dispenser	Lokal / -	-	Campuran	Rusak Berat	0		-		-	1	2020	2.000.000	2.000.000	5	2.000.000	0	0	2.000.000	0	Pembelian	31/12/2009	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
1.5.4.01.01.02	**ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAH**														**7**			**79.555.880**		**79.555.880**	**0**	**0**	**79.555.880**	**0**			
1.5.4.01.01.02.002	**Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah**														**7**			**79.555.880**		**79.555.880**	**0**	**0**	**79.555.880**	**0**			
37	1.5.4.01.01.02.0002	Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	429151	0006	Sepeda Motor	Lokal / -	-	Campuran	Baik	0		-		-	1	2018	14.493.740	14.493.740	8	14.493.740	0	0	14.493.740	0	Pembelian	01/12/2010	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
38	1.5.4.01.01.02.0002	Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	429152	0007	Sepeda Motor	Lokal / -	-	Campuran	Baik	0		-		-	1	2018	14.493.740	14.493.740	8	14.493.740	0	0	14.493.740	0	Pembelian	01/12/2010	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
39	1.5.4.01.01.02.0002	Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	429153	0008	Sepeda Motor	Lokal / -	-	Campuran	Baik	0		-		-	1	2018	14.493.740	14.493.740	8	14.493.740	0	0	14.493.740	0	Pembelian	01/12/2010	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
40	1.5.4.01.01.02.0002	Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	429174	0001	Note Book	ASUS / INTEL CORE i3-4030U, 1.9GHz	14 INCH	PLASTIK	Baik	0		-		-	1	2017	8.584.385	8.584.385	4	8.584.385	0	0	8.584.385	0	DAU	22/12/2014	NOTEBOOK ASUS(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
41	1.5.4.01.01.02.0002	Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	429236	0002	Gorden	Lokal / -	-	Campuran	Baik	0		-		-	1	2019	6.994.275	6.994.275	5	6.994.275	0	0	6.994.275	0	Pembelian	06/12/2011	gorden(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
42	1.5.4.01.01.02.0002	Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	429237	0003	Gorden	Lokal / 42 meter	-	kain	Baik	0		-		-	1	2019	9.996.000	9.996.000	5	9.996.000	0	0	9.996.000	0	Pembelian	09/07/2012	gorden(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
43	1.5.4.01.01.02.0002	Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	429325	0002	Gorden Jendela	Lokal / -	-	Kain	Baik	0		-		-	1	2019	10.500.000	10.500.000	5	10.500.000	0	0	10.500.000	0	Pembelian	26/11/2013	Pengadaan Horden Jendela Kantor(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
1.5.4.01.01.03	**ASET LAIN-LAIN LAINNYA**														**15**			**81.253.500**		**81.253.500**	**0**	**0**	**81.253.500**	**0**			
1.5.4.01.01.03.001	**Aset lain-lain lainnya**														**15**			**81.253.500**		**81.253.500**	**0**	**0**	**81.253.500**	**0**			
44	1.5.4.01.01.03.0001	Aset lain-lain lainnya	429077	0001	Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	Lokal / -	-	Campuran	Tidak diketahui	0		-		-	1	2022	1.475.000	1.475.000	4	1.475.000	0	0	1.475.000	0	Pembelian	21/10/2010	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
45	1.5.4.01.01.03.0001	Aset lain-lain lainnya	429098	0002	Photo Tustel	Lokal / -	-	Campuran	Tidak diketahui	0		-		-	1	2022	4.562.500	4.562.500	5	4.562.500	0	0	4.562.500	0	Pembelian	21/10/2010	KAMERA DIGITAL(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
46	1.5.4.01.01.03.0001	Aset lain-lain lainnya	429101	0001	All Band Receiver	Lokal / -	-	Campuran	Tidak diketahui	0		-		-	1	2022	1.500.000	1.500.000	10	1.500.000	0	0	1.500.000	0	Pembelian	03/12/2010	DIGITAL RECEIVER(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
47	1.5.4.01.01.03.0001	Aset lain-lain lainnya	429113	0006	Sepeda Motor	Yamaha (V-Ixion) / V-Ixion	150 cc	Campuran	Tidak diketahui	0	KB 3075 KH	MH33C1004AK310195		3C1510942	1	2022	20.388.000	20.388.000	8	20.388.000	0	0	20.388.000	0	Pembelian	03/12/2010	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA) Hilang
48	1.5.4.01.01.03.0001	Aset lain-lain lainnya	429128	0001	Sepeda Motor	Yamaha (Jupiter-Z) / Jupiter-Z	115 cc	Campuran	Tidak diketahui	0	KB 3117 KH	MH331B002AJ528417		31B528453	1	2022	14.950.000	14.950.000	8	14.950.000	0	0	14.950.000	0	Pembelian	03/12/2010	Fisik berada di Dinas Kesehatan dan KB
49	1.5.4.01.01.03.0001	Aset lain-lain lainnya	429132	0001	Mesin Ketik	- / -	-	-	Tidak diketahui	0		-		-	1	2022	4.900.000	4.900.000	5	4.900.000	0	0	4.900.000	0	Pembelian	25/04/2009	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
50	1.5.4.01.01.03.0001	Aset lain-lain lainnya	429154	0001	Mesin Jahit Terpal	Lokal / -	-	Campuran	Tidak diketahui	0		-		-	1	2022	4.249.000	4.249.000	10	4.249.000	0	0	4.249.000	0	Pembelian	31/12/2012	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
51	1.5.4.01.01.03.0001	Aset lain-lain lainnya	429163	0001	Televisi	SHARP / -	21 inc	Plastik /elektronic	Tidak diketahui	0		-		-	1	2022	1.650.000	1.650.000	5	1.650.000	0	0	1.650.000	0	Pembelian	31/12/2002	(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
52	1.5.4.01.01.03.0001	Aset lain-lain lainnya	429184	0001	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	LOKAL / 18	-	BESI	Tidak diketahui	0		-		-	1	2022	1.554.000	1.554.000	5	1.554.000	0	0	1.554.000	0	Pembelian	31/12/2005	(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
53	1.5.4.01.01.03.0001	Aset lain-lain lainnya	429208	0001	Wood Cutting (pemotong Kayu)	Lokal / Wood Cutting	-	Campuran	Tidak diketahui	0		-		-	1	2022	3.275.000	3.275.000	10	3.275.000	0	0	3.275.000	0	Pembelian	28/11/2007	(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
54	1.5.4.01.01.03.0001	Aset lain-lain lainnya	429218	0001	Mesin Las Listrik	Lokal / Diesel Engine DS 1115	-	Campuran	Tidak diketahui	0		-		-	1	2022	10.750.000	10.750.000	10	10.750.000	0	0	10.750.000	0	Pembelian	04/12/2007	(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
55	1.5.4.01.01.03.0001	Aset lain-lain lainnya	429227	0001	Photo Tustel	Lokal / -	-	Campuran	Tidak diketahui	0	-	-	-	-	1	2022	4.500.000	4.500.000	5	4.500.000	0	0	4.500.000	0	Pembelian	31/12/2009	kamera(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
56	1.5.4.01.01.03.0001	Aset lain-lain lainnya	429263	0001	Tangga Aluminium	TANGGA / PANJANG	4 METER	ALMUNIUM	Tidak diketahui	0		-		-	1	2022	2.000.000	2.000.000	5	2.000.000	0	0	2.000.000	0	DAU	16/09/2014	BAIK(Mutasi dari DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (lama))
57	1.5.4.01.01.03.0001	Aset lain-lain lainnya	429324	0001	Alat Penghancur Kertas	Lokal / -	-	Campuran	Tidak diketahui	0		-		-	1	2022	2.800.000	2.800.000	5	2.800.000	0	0	2.800.000	0	Pembelian	27/05/2010	(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
58	1.5.4.01.01.03.0001	Aset lain-lain lainnya	429084	0001	Aset Tak Berwujud	Lokal / -	-	Campuran		0		-		-	1	2022	2.700.000	2.700.000	5	2.700.000	0	0	2.700.000	0	Pembelian	27/05/2010	INTERNET(Mutasi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA)
TOTAL																		**299.790.210**		**298.790.210**	**0**	**0**	**298.790.210**				

Kamis, 5 Maret 2026
Pengguna Barang

dr. I MADE PUTRA NEGARA, M.M
NIP : 19661116 199903 1 002

DAFTAR BMD PADA PENGGUNA BARANG
DAFTAR PENYUSUTAN
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2025

Provinsi : KALIMANTAN BARAT
Pemerintah Daerah : BENGKAYANG
Pengguna Barang : DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

no	Kode Barang	Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi nama barang	Tanggal Perolehan	Masa Manfaat	Penyusutan atau amortisasi tahun sebelumnya						Penyusutan atau amortisasi tahun berjalan								Total Nilai Perolehan terakhir	Akumulasi penyusutan / amortisasi	Sisa Manfaat
								Nilai Perolehan Sebelumnya	Penyusutan / Amortisasi per 2024	Masa Manfaat yang telah dilalui	Nilai Akumulasi Penyusutan atau Amortisasi	Nilai buku sebelumnya	Sisa Masa manfaat sebelumnya	Nilai Perolehan	Nilai Kapitalisasi	Nilai buku setelah kapitalisasi	Penambahan masa manfaat	Total Masa Manfaat	Koreksi Akumulasi	Masa manfaat yang telah dilalui	Beban Penyusutan / Amortisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.3.2		**Peralatan dan mesin**						**1,719,461,598**	**1,665,068,848**		**1,665,068,848**	**54,392,750**		**1,719,461,598**		**54,392,750**			**0**		**45,605,750**	**1,719,461,598**	**1,710,674,598**	
1.3.2.02		**ALAT ANGKUTAN**						**570,218,000**	**541,099,250**		**541,099,250**	**29,118,750**		**570,218,000**		**29,118,750**			**0**		**29,118,750**	**570,218,000**	**570,218,000**	
1.3.2.02.01		**ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR**						**570,218,000**	**541,099,250**		**541,099,250**	**29,118,750**		**570,218,000**		**29,118,750**			**0**		**29,118,750**	**570,218,000**	**570,218,000**	
1.3.2.02.01.01		**KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN**						**72,680,000**	**72,680,000**		**72,680,000**	**0**		**72,680,000**		**0**			**0**		**0**	**72,680,000**	**72,680,000**	
1	1.3.2.02.01.01.003	Station Wagon	429117	0001	Station Wagon TOYOTA / KIJANG KB 8039 K	31-12-2003	8	72,680,000	72,680,000	7	72,680,000	0	0	72,680,000	0	0	0	8	0	8	0	72,680,000	72,680,000	
1.3.2.02.01.03		**KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG**						**232,950,000**	**203,831,250**		**203,831,250**	**29,118,750**		**232,950,000**		**29,118,750**			**0**		**29,118,750**	**232,950,000**	**232,950,000**	
2	1.3.2.02.01.03.003	Yeengler/Trailer	807899	0001	Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN) Daihatsu Luxio / 3SZ-VE DOHC VVT-i KB 1946 KL	28-09-2018	8	232,950,000	203,831,250	7	203,831,250	29,118,750	0	232,950,000	0	29,118,750	0	8	0	8	29,118,750	232,950,000	232,950,000	
1.3.2.02.01.04		**KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA**						**264,588,000**	**264,588,000**		**264,588,000**	**0**		**264,588,000**		**0**			**0**		**0**	**264,588,000**	**264,588,000**	
3	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429133	0001	Sepeda Motor HONDA / SUPRA X KB 2219 K	29-12-2000	8	7,274,000	7,274,000	7	7,274,000	0	0	7,274,000	0	0	0	8	0	8	0	7,274,000	7,274,000	
4	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429233	0001	Sepeda Motor YAMAHA / YUPITER MX-CW KB 3663 KH	17-12-2010	8	16,377,000	16,377,000	7	16,377,000	0	0	16,377,000	0	0	0	8	0	8	0	16,377,000	16,377,000	
5	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429310	0005	Sepeda Motor Yamaha / Jupiter Z1 CW KB 5895 KQ	30-11-2015	8	16,970,000	16,970,000	7	16,970,000	0	0	16,970,000	0	0	0	8	0	8	0	16,970,000	16,970,000	
6	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429158	0002	Sepeda Motor YAMAHA / JUPITER KB 4423 K	31-12-2002	8	10,238,000	10,238,000	7	10,238,000	0	0	10,238,000	0	0	0	8	0	8	0	10,238,000	10,238,000	
7	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429301	0003	Sepeda Motor Yamaha / Soul GT125 KB 5894 KQ	30-11-2015	8	17,490,000	17,490,000	7	17,490,000	0	0	17,490,000	0	0	0	8	0	8	0	17,490,000	17,490,000	
8	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429300	0002	Sepeda Motor Kawasaki / New Trail KLX150S KB 2201 KU	30-11-2015	8	29,000,000	29,000,000	7	29,000,000	0	0	29,000,000	0	0	0	8	0	8	0	29,000,000	29,000,000	
9	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429061	0001	Sepeda Motor Yamaha / Jupiter Z1 CW KB 5896 KQ	30-11-2015	8	16,970,000	16,970,000	7	16,970,000	0	0	16,970,000	0	0	0	8	0	8	0	16,970,000	16,970,000	
10	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429303	0004	Sepeda Motor Kawasaki / New Trail KLX150S KB 2202 KU	30-11-2015	8	29,000,000	29,000,000	7	29,000,000	0	0	29,000,000	0	0	0	8	0	8	0	29,000,000	29,000,000	
11	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429228	0009	Sepeda Motor YAMAHA / YUPITER MX-CW KB 3662 KH	17-12-2010	8	16,377,000	16,377,000	7	16,377,000	0	0	16,377,000	0	0	0	8	0	8	0	16,377,000	16,377,000	
12	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429149	0008	Sepeda Motor Yamaha (Jupiter-MX) / Jupiter-MX KB 3082 KH	03-12-2010	8	16,029,000	16,029,000	7	16,029,000	0	0	16,029,000	0	0	0	8	0	8	0	16,029,000	16,029,000	
13	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429148	0007	Sepeda Motor Yamaha (V-Ixion) / V-Ixion KB 3076 KH	03-12-2010	8	20,388,000	20,388,000	7	20,388,000	0	0	20,388,000	0	0	0	8	0	8	0	20,388,000	20,388,000	
14	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429146	0006	Sepeda Motor Yamaha (V-Ixion) / 3C1 (V-IXION/FZ150) KB 3072 KH	03-12-2010	8	20,388,000	20,388,000	7	20,388,000	0	0	20,388,000	0	0	0	8	0	8	0	20,388,000	20,388,000	
15	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429131	0005	Sepeda Motor Yamaha (Jupiter-MX) / Jupiter-MX KB 3081 KH	03-12-2010	8	16,029,000	16,029,000	7	16,029,000	0	0	16,029,000	0	0	0	8	0	8	0	16,029,000	16,029,000	
16	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429130	0004	Sepeda Motor Yamaha (Jupiter-MX) / Jupiter-MX KB 3078 KH	03-12-2010	8	16,029,000	16,029,000	7	16,029,000	0	0	16,029,000	0	0	0	8	0	8	0	16,029,000	16,029,000	
17	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	429129	0003	Sepeda Motor Yamaha (Jupiter-MX) / Jupiter-MX KB 3077 KH	03-12-2010	8	16,029,000	16,029,000	7	16,029,000	0	0	16,029,000	0	0	0	8	0	8	0	16,029,000	16,029,000	
1.3.2.03		**ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR**						**3,380,000**	**3,380,000**		**3,380,000**	**0**		**3,380,000**		**0**			**0**		**0**	**3,380,000**	**3,380,000**	
1.3.2.03.03		**ALAT UKUR**						**3,380,000**	**3,380,000**		**3,380,000**	**0**		**3,380,000**		**0**			**0**		**0**	**3,380,000**	**3,380,000**	
1.3.2.03.03.08		**ALAT UKUR/PEMBANDING**						**3,380,000**	**3,380,000**		**3,380,000**	**0**		**3,380,000**		**0**			**0**		**0**	**3,380,000**	**3,380,000**	
18	1.3.2.03.03.08.001	Ukuran Johanson (Alat Pembanding Standar Ukuran Panjang)	429203	0001	PANASONIC / -	30-12-2006	5	3,380,000	3,380,000	4	3,380,000	0	0	3,380,000	0	0	0	5	0	5	0	3,380,000	3,380,000	
1.3.2.05		**ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA**						**548,820,650**	**538,246,650**		**538,246,650**	**10,574,000**		**548,820,650**		**10,574,000**			**0**		**7,087,000**	**548,820,650**	**545,333,650**	
1.3.2.05.01		**ALAT KANTOR**						**185,774,800**	**180,200,800**		**180,200,800**	**5,574,000**		**185,774,800**		**5,574,000**			**0**		**4,587,000**	**185,774,800**	**184,787,800**	
1.3.2.05.01.01		**MESIN KETIK**						**5,613,250**	**5,613,250**		**5,613,250**	**0**		**5,613,250**		**0**			**0**		**0**	**5,613,250**	**5,613,250**	
19	1.3.2.05.01.01.001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	429219	0001	Mesin Ketik Lokal / -	31-12-2008	5	4,050,000	4,050,000	4	4,050,000	0	0	4,050,000	0	0	0	5	0	5	0	4,050,000	4,050,000	
20	1.3.2.05.01.01.003	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	429204	0001	Olympia / -	30-12-2006	5	1,563,250	1,563,250	4	1,563,250	0	0	1,563,250	0	0	0	5	0	5	0	1,563,250	1,563,250	
1.3.2.05.01.04		**ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR**						**123,391,550**	**121,741,550**		**121,741,550**	**1,650,000**		**123,391,550**		**1,650,000**			**0**		**1,125,000**	**123,391,550**	**122,866,550**	
21	1.3.2.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	429134	0001	Lokal / -	30-12-2000	5	1,426,250	1,426,250	4	1,426,250	0	0	1,426,250	0	0	0	5	0	5	0	1,426,250	1,426,250	
22	1.3.2.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	429229	0002	Lokal / - -	17-12-2010	5	3,600,000	3,600,000	4	3,600,000	0	0	3,600,000	0	0	0	5	0	5	0	3,600,000	3,600,000	
23	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	429326	0001	Lokal / -	27-07-2010	5	4,000,000	4,000,000	4	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	5	0	5	0	4,000,000	4,000,000	
24	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	2401276	0001	Lemari Arsip/Buku Lokal / -	11-06-2019	5	1,500,000	1,500,000	4	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	5	0	5	0	1,500,000	1,500,000	
25	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	2401294	0001	Lemari Arsip/Buku Lokal / -	11-06-2019	5	2,200,000	2,200,000	4	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0	0	5	0	5	0	2,200,000	2,200,000	
26	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	2401296	0002	Lemari Arsip/Buku Lokal / -	11-06-2019	5	1,500,000	1,500,000	4	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	5	0	5	0	1,500,000	1,500,000	
27	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	5428834	0001	Lemari Arsip Lokal / Lemari 2 Pintu	20-11-2021	5	1,500,000	1,200,000	4	1,200,000	300,000	0	1,500,000	0	300,000	0	5	0	5	300,000	1,500,000	1,500,000	
28	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	429221	0001	Lokal / -	31-12-2008	5	6,996,000	6,996,000	4	6,996,000	0	0	6,996,000	0	0	0	5	0	5	0	6,996,000	6,996,000	
29	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	5428835	0002	Lemari Arsip Lokal / Lemari 2 Pintu	20-11-2021	5	1,500,000	1,200,000	4	1,200,000	300,000	0	1,500,000	0	300,000	0	5	0	5	300,000	1,500,000	1,500,000	
30	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	429243	0002	lokal / -	31-12-2012	5	1,034,200	1,034,200	4	1,034,200	0	0	1,034,200	0	0	0	5	0	5	0	1,034,200	1,034,200	
31	1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	5449941	0001	Lemari Arsip Pejabat Lokal / 2 Pintu	21-10-2022	5	2,625,000	1,575,000	3	1,575,000	1,050,000	1	2,625,000	0	1,050,000	0	5	0	4	525,000	2,625,000	2,100,000	
32	1.3.2.05.01.04.003	Rak Besi	429291	0001	Rak televisi Rak TV / -	27-11-2015	5	2,500,000	2,500,000	4	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	5	0	5	0	2,500,000	2,500,000	
33	1.3.2.05.01.04.003	Rak Besi	429260	0001	Lokal / -	10-09-2014	5	2,500,000	2,500,000	4	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	5	0	5	0	2,500,000	2,500,000	
34	1.3.2.05.01.04.003	Rak Besi	429115	0001	LOKAL / RAK PIRING	31-12-2002	5	1,567,500	1,567,500	4	1,567,500	0	0	1,567,500	0	0	0	5	0	5	0	1,567,500	1,567,500	
35	1.3.2.05.01.04.003	Rak Besi	429065	0001	Boltless Rack / 2 in 1 Rack - 5 Levels	13-12-2016	5	1,000,000	1,000,000	4	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	5	0	5	0	1,000,000	1,000,000	
36	1.3.2.05.01.04.003	Rak Besi	429315	0001	Boltless Rack / 2 in 1 Rack - 5 Levels	13-12-2016	5	1,000,000	1,000,000	4	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	5	0	5	0	1,000,000	1,000,000	

37	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu	807902	0001	Rak Arsip tempel di dinding - / -	12-03-2018	5	2,850,000	2,850,000	4	2,850,000	0	0	2,850,000	0	0	0	5	0	5	0	2,850,000	2,850,000	
38	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu	807910	0003	Rak Arsip tempel di dinding - / -	12-03-2018	5	2,850,000	2,850,000	4	2,850,000	0	0	2,850,000	0	0	0	5	0	5	0	2,850,000	2,850,000	
39	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu	807909	0001	Rak Arsip tempel di dinding - / -	12-03-2018	5	2,850,000	2,850,000	4	2,850,000	0	0	2,850,000	0	0	0	5	0	5	0	2,850,000	2,850,000	
40	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu	807908	0002	Rak Arsip tempel di dinding - / -	12-03-2018	5	2,850,000	2,850,000	4	2,850,000	0	0	2,850,000	0	0	0	5	0	5	0	2,850,000	2,850,000	
41	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu	429317	0001	Rak Kayu Lokal / -	07-10-2013	5	20,000,000	20,000,000	4	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	5	0	5	0	20,000,000	20,000,000	
42	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu	807907	0001	Rak Arsip tempel di dinding - / -	12-03-2018	5	2,850,000	2,850,000	4	2,850,000	0	0	2,850,000	0	0	0	5	0	5	0	2,850,000	2,850,000	
43	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu	807904	0001	Rak Arsip tempel di dinding - / -	12-03-2018	5	2,850,000	2,850,000	4	2,850,000	0	0	2,850,000	0	0	0	5	0	5	0	2,850,000	2,850,000	
44	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu	807903	0001	Rak Arsip tempel di dinding - / -	12-03-2018	5	2,850,000	2,850,000	4	2,850,000	0	0	2,850,000	0	0	0	5	0	5	0	2,850,000	2,850,000	
45	1.3.2.05.01.04.004	Rak Kayu	429110	0001	Lokal / - -	01-12-2008	5	1,800,000	1,800,000	4	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0	5	0	5	0	1,800,000	1,800,000	
46	1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	2401261	0001	Filling Cabinet - / -	10-12-2019	5	2,455,000	2,455,000	4	2,455,000	0	0	2,455,000	0	0	0	5	0	5	0	2,455,000	2,455,000	
47	1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	429319	0006	Lokal / -	11-06-2010	5	2,462,500	2,462,500	4	2,462,500	0	0	2,462,500	0	0	0	5	0	5	0	2,462,500	2,462,500	
48	1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	5397912	0001	Falling Cabinet Atlantic / 4 Loker	01-11-2020	5	3,000,000	3,000,000	4	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	5	0	5	0	3,000,000	3,000,000	
49	1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	429116	0001	Brother / -	31-12-2002	5	1,237,500	1,237,500	4	1,237,500	0	0	1,237,500	0	0	0	5	0	5	0	1,237,500	1,237,500	
50	1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	429322	0007	Lokal / -	11-06-2010	5	2,462,500	2,462,500	4	2,462,500	0	0	2,462,500	0	0	0	5	0	5	0	2,462,500	2,462,500	
51	1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	429162	0002	ALBA / 4 LACI	31-12-2002	5	1,237,500	1,237,500	4	1,237,500	0	0	1,237,500	0	0	0	5	0	5	0	1,237,500	1,237,500	
52	1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	429185	0003	BROTHER / 4 LACI	31-12-2005	5	1,260,000	1,260,000	4	1,260,000	0	0	1,260,000	0	0	0	5	0	5	0	1,260,000	1,260,000	
53	1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	429186	0004	ALBA / 4 LACI	31-12-2005	5	1,260,000	1,260,000	4	1,260,000	0	0	1,260,000	0	0	0	5	0	5	0	1,260,000	1,260,000	
54	1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	429211	0005	Lokal / 4 Laci	03-12-2007	5	1,494,100	1,494,100	4	1,494,100	0	0	1,494,100	0	0	0	5	0	5	0	1,494,100	1,494,100	
55	1.3.2.05.01.04.006	Filing Cabinet Kayu	429205	0001	Lokal / -	30-12-2006	5	1,014,000	1,014,000	4	1,014,000	0	0	1,014,000	0	0	0	5	0	5	0	1,014,000	1,014,000	
56	1.3.2.05.01.04.007	Brandkas	429323	0001	Lokal / -	27-07-2010	5	7,409,500	7,409,500	4	7,409,500	0	0	7,409,500	0	0	0	5	0	5	0	7,409,500	7,409,500	
57	1.3.2.05.01.04.007	Brandkas	429287	0001	Ucida / STANDAR	01-04-2015	5	8,900,000	8,900,000	4	8,900,000	0	0	8,900,000	0	0	0	5	0	5	0	8,900,000	8,900,000	
58	1.3.2.05.01.04.027	Lemari Kaca	429290	0001 - 0003	Lemari Pakaian Kayu lokal / Sedang	27-11-2015	5	6,000,000	6,000,000	4	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0	5	0	5	0	6,000,000	6,000,000	
59	1.3.2.05.01.04.027	Lemari Kaca	429255	0001	Lokal / -	10-09-2014	5	5,000,000	5,000,000	4	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	5	0	5	0	5,000,000	5,000,000	
1.3.2.05.01.05	**ALAT KANTOR LAINNYA**							**56,770,000**	**52,846,000**		**52,846,000**	**3,924,000**		**56,770,000**		**3,924,000**			**0**		**3,462,000**	**56,770,000**	**56,308,000**	
60	1.3.2.05.01.05.012	Mesin Absensi	429063	0001	Rak Arsip SPj Lokal / -	30-11-2015	5	9,920,000	9,920,000	4	9,920,000	0	0	9,920,000	0	0	0	5	0	5	0	9,920,000	9,920,000	
61	1.3.2.05.01.05.012	Mesin Absensi	429299	0002	Rak Arsip SPj Lokal / -	30-11-2015	5	9,920,000	9,920,000	4	9,920,000	0	0	9,920,000	0	0	0	5	0	5	0	9,920,000	9,920,000	
62	1.3.2.05.01.05.012	Mesin Absensi	429145	0002	UPS - / -	19-09-2014	5	1,000,000	1,000,000	4	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	5	0	5	0	1,000,000	1,000,000	
63	1.3.2.05.01.05.012	Mesin Absensi	2401289	0001	Projector Acer / B5 - 20	09-12-2019	5	6,245,000	6,245,000	4	6,245,000	0	0	6,245,000	0	0	0	5	0	5	0	6,245,000	6,245,000	
64	1.3.2.05.01.05.012	Mesin Absensi	5428824	0001	Mesin Presensi Fingerspot / CE1200	01-11-2021	5	15,000,000	12,000,000	4	12,000,000	3,000,000	0	15,000,000	0	3,000,000	0	5	0	5	3,000,000	15,000,000	15,000,000	
65	1.3.2.05.01.05.012	Mesin Absensi	2401292	0002	APE (Alat Edukasi Anak) - / -	10-12-2019	5	5,575,000	5,575,000	4	5,575,000	0	0	5,575,000	0	0	0	5	0	5	0	5,575,000	5,575,000	
66	1.3.2.05.01.05.012	Mesin Absensi	429144	0001	UPS - / -	19-09-2014	5	1,000,000	1,000,000	4	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	5	0	5	0	1,000,000	1,000,000	
67	1.3.2.05.01.05.019	Alat Pemotong Kertas	5449942	0001	Alat Penghancur Kertas Joyko / SHD-01 2101100394	21-10-2022	5	2,310,000	1,386,000	3	1,386,000	924,000	1	2,310,000	0	924,000	0	5	0	4	462,000	2,310,000	1,848,000	
68	1.3.2.05.01.05.076	Papan Nama Instansi	2401263	0001	Papan Nama PUSPAGA Lokal / Frame Alumunium	10-12-2019	5	1,340,000	1,340,000	4	1,340,000	0	0	1,340,000	0	0	0	5	0	5	0	1,340,000	1,340,000	
69	1.3.2.05.01.05.076	Papan Nama Instansi	2401288	0002	Papan Nama PUSPAGA - / Neon Box	10-12-2019	5	4,460,000	4,460,000	4	4,460,000	0	0	4,460,000	0	0	0	5	0	5	0	4,460,000	4,460,000	
1.3.2.05.02	**ALAT RUMAH TANGGA**							**214,482,750**	**211,482,750**		**211,482,750**	**3,000,000**		**214,482,750**		**3,000,000**			**0**		**1,500,000**	**214,482,750**	**212,982,750**	
1.3.2.05.02.01	**MEUBELAIR**							**80,560,000**	**79,560,000**		**79,560,000**	**1,000,000**		**80,560,000**		**1,000,000**			**0**		**500,000**	**80,560,000**	**80,060,000**	
70	1.3.2.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	2401301	0006	Lemari Pakaian Lokal / 2 Pintu	11-06-2019	5	1,700,000	1,700,000	4	1,700,000	0	0	1,700,000	0	0	0	5	0	5	0	1,700,000	1,700,000	
71	1.3.2.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	2401297	0005	Lemari Pakaian Lokal / 2 Pintu	11-06-2019	5	1,700,000	1,700,000	4	1,700,000	0	0	1,700,000	0	0	0	5	0	5	0	1,700,000	1,700,000	
72	1.3.2.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	2401266	0001	Meja Tulis 1 Biro Lokal / -	11-06-2019	5	2,600,000	2,600,000	4	2,600,000	0	0	2,600,000	0	0	0	5	0	5	0	2,600,000	2,600,000	
73	1.3.2.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	2401274	0004	Meja Tulis 1/2 Biro Lokal / -	11-06-2019	5	1,500,000	1,500,000	4	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	5	0	5	0	1,500,000	1,500,000	
74	1.3.2.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	429168	0001	Lokal / - -	31-12-2009	5	1,000,000	1,000,000	4	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	5	0	5	0	1,000,000	1,000,000	
75	1.3.2.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	2401273	0003	Meja Tulis 1/2 Biro Lokal / -	11-06-2019	5	1,500,000	1,500,000	4	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	5	0	5	0	1,500,000	1,500,000	
76	1.3.2.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	2401272	0002	Meja Tulis 1/2 Biro Lokal / -	11-06-2019	5	1,500,000	1,500,000	4	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	5	0	5	0	1,500,000	1,500,000	
77	1.3.2.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	2401269	0001	Meja Tulis 1/2 Biro Lokal / -	11-06-2019	5	1,500,000	1,500,000	4	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	5	0	5	0	1,500,000	1,500,000	
78	1.3.2.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	2401260	0001	Meja Kerja Kayu Lokal / -	10-12-2019	5	1,790,000	1,790,000	4	1,790,000	0	0	1,790,000	0	0	0	5	0	5	0	1,790,000	1,790,000	
79	1.3.2.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	429312	0001	Meja Kerja Pejabat Lokal / -	30-11-2015	5	5,675,000	5,675,000	4	5,675,000	0	0	5,675,000	0	0	0	5	0	5	0	5,675,000	5,675,000	
80	1.3.2.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	5397911	0001	Meja Satu Biro Lokal / -	01-11-2020	5	2,000,000	2,000,000	4	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	5	0	5	0	2,000,000	2,000,000	
81	1.3.2.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	5449940	0001	Meja Kerja 1/2 Biro Lokal / -	21-10-2022	5	2,500,000	1,500,000	3	1,500,000	1,000,000	1	2,500,000	0	1,000,000	0	5	0	4	500,000	2,500,000	2,000,000	
82	1.3.2.05.02.01.010	Tempat Tidur Kayu	429296	0001 - 0002	Tempat tidur kayu Lokal / -	28-11-2015	5	5,000,000	5,000,000	4	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	5	0	5	0	5,000,000	5,000,000	
83	1.3.2.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	5397909	0001	Meja Setengah Biro Lokal / 3 Laci kanan	01-11-2020	5	1,500,000	1,500,000	4	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	5	0	5	0	1,500,000	1,500,000	
84	1.3.2.05.02.01.025	Kasur/Spring Bed	2401275	0002	Spring Bed Sorong - / -	11-06-2019	5	3,300,000	3,300,000	4	3,300,000	0	0	3,300,000	0	0	0	5	0	5	0	3,300,000	3,300,000	
85	1.3.2.05.02.01.025	Kasur/Spring Bed	2401267	0001	Spring Bed Sorong - / -	11-06-2019	5	3,300,000	3,300,000	4	3,300,000	0	0	3,300,000	0	0	0	5	0	5	0	3,300,000	3,300,000	
86	1.3.2.05.02.01.031	Kursi Tamu	429252	0001	Lokal / -	07-08-2014	5	15,000,000	15,000,000	4	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	0	5	0	5	0	15,000,000	15,000,000	
87	1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar	429244	0001	Lokal / -	31-12-2012	5	2,000,000	2,000,000	4	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	5	0	5	0	2,000,000	2,000,000	
88	1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar	5397908	0003	Kursi Kerja - / Putar	02-11-2020	5	1,025,000	1,025,000	4	1,025,000	0	0	1,025,000	0	0	0	5	0	5	0	1,025,000	1,025,000	
89	1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar	5397903	0002	Kursi Kerja - / Putar	02-11-2020	5	1,025,000	1,025,000	4	1,025,000	0	0	1,025,000	0	0	0	5	0	5	0	1,025,000	1,025,000	
90	1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar	5397902	0001	Kursi Kerja - / Putar	02-11-2020	5	1,025,000	1,025,000	4	1,025,000	0	0	1,025,000	0	0	0	5	0	5	0	1,025,000	1,025,000	
91	1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar	2401285	0001	Kursi Putar - / -	10-12-2019	5	1,900,000	1,900,000	4	1,900,000	0	0	1,900,000	0	0	0	5	0	5	0	1,900,000	1,900,000	
92	1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar	2401295	0002	Kursi Putar - / -	11-06-2019	5	1,400,000	1,400,000	4	1,400,000	0	0	1,400,000	0	0	0	5	0	5	0	1,400,000	1,400,000	
93	1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar	2401293	0001	Kursi Putar - / -	11-06-2019	5	1,400,000	1,400,000	4	1,400,000	0	0	1,400,000	0	0	0	5	0	5	0	1,400,000	1,400,000	
94	1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar	2401277	0001	Kursi Putar - / -	11-06-2019	5	1,400,000	1,400,000	4	1,400,000	0	0	1,400,000	0	0	0	5	0	5	0	1,400,000	1,400,000	
95	1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar	5397916	0004	Kursi Kerja - / Putar	02-11-2020	5	1,025,000	1,025,000	4	1,025,000	0	0	1,025,000	0	0	0	5	0	5	0	1,025,000	1,025,000	
96	1.3.2.05.02.01.033	Kursi Biasa	429308	0001	Kursi Kerja Pejabat Lokal / -	30-11-2015	5	5,000,000	5,000,000	4	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	5	0	5	0	5,000,000	5,000,000	
97	1.3.2.05.02.01.033	Kursi Biasa	429292	0002 - 0003	Kursi Tamu Kursi Sofa / -	27-11-2015	5	6,500,000	6,500,000	4	6,500,000	0	0	6,500,000	0	0	0	5	0	5	0	6,500,000	6,500,000	
98	1.3.2.05.02.01.048	Sofa	2401284	0001	Sofa + Meja Kaca - / -	10-12-2019	5	3,795,000	3,795,000	4	3,795,000	0	0	3,795,000	0	0	0	5	0	5	0	3,795,000	3,795,000	
1.3.2.05.02.03	**ALAT PEMBERSIH**							**2,000,000**	**2,000,000**		**2,000,000**	**0**		**2,000,000**		**0**			**0**		**0**	**2,000,000**	**2,000,000**	
99	1.3.2.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	429298	0001	Mesin rumput - / -	30-11-2015	5	2,000,000	2,000,000	4	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	5	0	5	0	2,000,000	2,000,000	
1.3.2.05.02.04	**ALAT PENDINGIN**							**90,682,000**	**88,682,000**		**88,682,000**	**2,000,000**		**90,682,000**		**2,000,000**			**0**		**1,000,000**	**90,682,000**	**89,682,000**	
100	1.3.2.05.02.04.003	A.C. Window	429327	0001	LG / LG	06-11-2013	5	13,000,000	13,000,000	4	13,000,000	0	0	13,000,000	0	0	0	5	0	5	0	13,000,000	13,000,000	
101	1.3.2.05.02.04.003	A.C. Window	429104	0001	SHARP / -	28-04-2014	5	6,500,000	6,500,000	4	6,500,000	0	0	6,500,000	0	0	0	5	0	5	0	6,500,000	6,500,000	
102	1.3.2.05.02.04.003	A.C. Window	429107	0002	SHARP / -	28-04-2014	5	6,500,000	6,500,000	4	6,500,000	0	0	6,500,000	0	0	0	5	0	5	0	6,500,000	6,500,000	
103	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	5397926	0004	Lokal / - -	17-12-2010	5	4,000,000	4,000,000	4	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	5	0	5	0	4,000,000	4,000,000	
104	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	5397925	0003	Lokal / - -	17-12-2010	5	4,000,000	4,000,000	4	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	5	0	5	0	4,000,000	4,000,000	
105	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	429328	0001	Lokal / -	31-12-2012	5	4,120,000	4,120,000	4	4,120,000	0	0	4,120,000	0	0	0	5	0	5	0	4,120,000	4,120,000	
106	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	429245	0002	LG / -	30-09-2013	5	5,000,000	5,000,000	4	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	5	0	5	0	5,000,000	5,000,000	
107	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	429230	0001	Lokal / - -	17-12-2010	5	4,000,000	4,000,000	4	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	5	0	5	0	4,000,000	4,000,000	
108	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	5397924	0002	Lokal / - -	17-12-2010	5	4,000,000	4,000,000	4	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	5	0	5	0	4,000,000	4,000,000	
109	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	5397914	0001	Air Conditioner (AC) Split Polytron / Split AC	02-11-2020	5	4,599,000	4,599,000	4	4,599,000	0	0	4,599,000	0	0	0	5	0	5	0	4,599,000	4,599,000	
110	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	429200	0001	CHANGHONG / -	29-12-2006	5	3,380,000	3,380,000	4	3,380,000	0	0	3,380,000	0	0	0	5	0	5	0	3,380,000	3,380,000	
111	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	5449938	0001	AC Split Sharp / Split AH-A5SAY	21-10-2022	5	5,000,000	3,000,000	3	3,000,000	2,000,000	1	5,000,000	0	2,000,000	0	5	0	4	1,000,000	5,000,000	4,000,000	

112	1.3.2.05.02.04.005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	429253	0001	LG / Low Watt	07-08-2014	5	5,500,000	5,500,000	4	5,500,000	0	0	5,500,000	0	0	0	5	0	5	0	5,500,000	5,500,000	
113	1.3.2.05.02.04.005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	429254	0002	LG / Low Watt	07-08-2014	5	5,500,000	5,500,000	4	5,500,000	0	0	5,500,000	0	0	0	5	0	5	0	5,500,000	5,500,000	
114	1.3.2.05.02.04.006	Kipas Angin	429258	0003	Panasonic / Deck	10-09-2014	5	2,500,000	2,500,000	4	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	5	0	5	0	2,500,000	2,500,000	
115	1.3.2.05.02.04.006	Kipas Angin	429257	0002	Panasonic / Deck	10-09-2014	5	2,500,000	2,500,000	4	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	5	0	5	0	2,500,000	2,500,000	
116	1.3.2.05.02.04.006	Kipas Angin	429242	0003	Lokal / -	28-09-2012	5	1,125,000	1,125,000	4	1,125,000	0	0	1,125,000	0	0	0	5	0	5	0	1,125,000	1,125,000	
117	1.3.2.05.02.04.006	Kipas Angin	429261	0004	Panasonic / Deck	10-09-2014	5	2,500,000	2,500,000	4	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	5	0	5	0	2,500,000	2,500,000	
118	1.3.2.05.02.04.006	Kipas Angin	429309	0001	Panasonic / F-EY1511	30-11-2015	5	1,240,000	1,240,000	4	1,240,000	0	0	1,240,000	0	0	0	5	0	5	0	1,240,000	1,240,000	
119	1.3.2.05.02.04.006	Kipas Angin	429256	0001	Panasonic / Deck	10-09-2014	5	2,500,000	2,500,000	4	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	5	0	5	0	2,500,000	2,500,000	
120	1.3.2.05.02.04.006	Kipas Angin	429241	0002	Lokal / -	28-09-2012	5	1,125,000	1,125,000	4	1,125,000	0	0	1,125,000	0	0	0	5	0	5	0	1,125,000	1,125,000	
121	1.3.2.05.02.04.006	Kipas Angin	429226	0001	Lokal / - -	31-12-2009	5	2,093,000	2,093,000	4	2,093,000	0	0	2,093,000	0	0	0	5	0	5	0	2,093,000	2,093,000	
1.3.2.05.02.05		**ALAT DAPUR**						**1,000,000**	**1,000,000**		**1,000,000**	**0**		**1,000,000**			**0**			**0**		**0**	**1,000,000**	
122	1.3.2.05.02.05.001	Kompor Listrik (Alat Dapur)	429295	0001	Tempat Masak Lokal / -	28-11-2015	5	1,000,000	1,000,000	4	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	5	0	5	0	1,000,000	1,000,000	
1.3.2.05.02.06		**ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)**						**40,240,750**	**40,240,750**		**40,240,750**	**0**		**40,240,750**			**0**			**0**		**0**	**40,240,750**	**40,240,750**
123	1.3.2.05.02.06.001	Radio	429297	0002	Meja makan Caserini / -	28-11-2015	5	2,000,000	2,000,000	4	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	5	0	5	0	2,000,000	2,000,000	
124	1.3.2.05.02.06.001	Radio	429294	0001	lemari makan Lokal / -	28-11-2015	5	2,000,000	2,000,000	4	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	5	0	5	0	2,000,000	2,000,000	
125	1.3.2.05.02.06.002	Televisi	2401283	0001	Televisi LED LG Smart / LED Smart TV	10-12-2019	5	3,900,000	3,900,000	4	3,900,000	0	0	3,900,000	0	0	0	5	0	5	0	3,900,000	3,900,000	
126	1.3.2.05.02.06.008	Sound System	429259	0001	Sound System BMB / -	10-09-2014	5	10,000,000	10,000,000	4	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	5	0	5	0	10,000,000	10,000,000	
127	1.3.2.05.02.06.012	Wireless	429284	0001	Lokal / -	22-12-2014	5	5,000,000	5,000,000	4	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	5	0	5	0	5,000,000	5,000,000	
128	1.3.2.05.02.06.018	Unit Power Supply	429212	0001	Lokal / UPS	03-12-2007	5	1,487,000	1,487,000	4	1,487,000	0	0	1,487,000	0	0	0	5	0	5	0	1,487,000	1,487,000	
129	1.3.2.05.02.06.021	Camera Video	429246	0001	SONY / -	30-09-2013	5	3,000,000	3,000,000	4	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	5	0	5	0	3,000,000	3,000,000	
130	1.3.2.05.02.06.022	Camera film	429136	0002	Canon / EOS 1200D	15-02-2016	5	4,500,000	4,500,000	4	4,500,000	0	0	4,500,000	0	0	0	5	0	5	0	4,500,000	4,500,000	
131	1.3.2.05.02.06.022	Camera film	429124	0001	Canon / EOS 1200D	15-02-2016	5	4,500,000	4,500,000	4	4,500,000	0	0	4,500,000	0	0	0	5	0	5	0	4,500,000	4,500,000	
132	1.3.2.05.02.06.038	Dispenser	2401262	0001	Dispencer Miyako / -	10-12-2019	5	1,375,000	1,375,000	4	1,375,000	0	0	1,375,000	0	0	0	5	0	5	0	1,375,000	1,375,000	
133	1.3.2.05.02.06.038	Dispenser	429155	0001	- / -	21-11-2016	5	1,000,000	1,000,000	4	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	5	0	5	0	1,000,000	1,000,000	
134	1.3.2.05.02.06.062	Alat Pemanas Ruangan	429201	0001	LOKAL / MAGIC WARMER	29-12-2006	5	1,478,750	1,478,750	4	1,478,750	0	0	1,478,750	0	0	0	5	0	5	0	1,478,750	1,478,750	
1.3.2.05.03		**MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT**						**148,563,100**	**146,563,100**		**146,563,100**	**2,000,000**		**148,563,100**		**2,000,000**				**0**		**1,000,000**	**148,563,100**	**147,563,100**
1.3.2.05.03.01		**MEJA KERJA PEJABAT**						**98,660,000**	**96,660,000**		**96,660,000**	**2,000,000**		**98,660,000**		**2,000,000**				**0**		**1,000,000**	**98,660,000**	**97,660,000**
135	1.3.2.05.03.01.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	429191	0001	INVINITY / 1 BIRO	31-12-2005	5	1,260,000	1,260,000	4	1,260,000	0	0	1,260,000	0	0	0	5	0	5	0	1,260,000	1,260,000	
136	1.3.2.05.03.01.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	429277	0001	Lokal / -	16-09-2014	5	7,500,000	7,500,000	4	7,500,000	0	0	7,500,000	0	0	0	5	0	5	0	7,500,000	7,500,000	
137	1.3.2.05.03.01.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	5449939	0001	Meja Kerja Kepala Dinas Lokal / Laci 6 Kiri Kanan	21-10-2022	5	5,000,000	3,000,000	3	3,000,000	2,000,000	1	5,000,000	0	2,000,000	0	5	0	4	1,000,000	5,000,000	4,000,000	
138	1.3.2.05.03.01.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	429085	0001	Lokal / -	31-12-2009	5	15,000,000	15,000,000	4	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	0	5	0	5	0	15,000,000	15,000,000	
139	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429126	0005	- / -	09-05-2016	5	2,000,000	2,000,000	4	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	5	0	5	0	2,000,000	2,000,000	
140	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429089	0002	Lokal / -	11-06-2010	5	1,100,000	1,100,000	4	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0	0	5	0	5	0	1,100,000	1,100,000	
141	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429090	0003	Lokal / -	11-06-2010	5	1,100,000	1,100,000	4	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0	0	5	0	5	0	1,100,000	1,100,000	
142	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429091	0004	Lokal / -	11-06-2010	5	1,100,000	1,100,000	4	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0	0	5	0	5	0	1,100,000	1,100,000	
143	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429092	0005	Lokal / -	11-06-2010	5	1,100,000	1,100,000	4	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0	0	5	0	5	0	1,100,000	1,100,000	
144	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2401271	0002	Meja Kerja Pejabat LOkal / -	11-09-2019	5	1,400,000	1,400,000	4	1,400,000	0	0	1,400,000	0	0	0	5	0	5	0	1,400,000	1,400,000	
145	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2401268	0001	Meja Kerja Pejabat LOkal / -	11-09-2019	5	1,400,000	1,400,000	4	1,400,000	0	0	1,400,000	0	0	0	5	0	5	0	1,400,000	1,400,000	
146	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429093	0006	Lokal / -	11-06-2010	5	1,100,000	1,100,000	4	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0	0	5	0	5	0	1,100,000	1,100,000	
147	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5397923	0002	Meja Kerja Lokal / -	02-11-2020	5	2,000,000	2,000,000	4	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	5	0	5	0	2,000,000	2,000,000	
148	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429125	0004	- / -	09-05-2016	5	2,000,000	2,000,000	4	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	5	0	5	0	2,000,000	2,000,000	
149	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429273	0003	Lokal / -	16-09-2014	5	3,000,000	3,000,000	4	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	5	0	5	0	3,000,000	3,000,000	
150	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429271	0001	Lokal / -	16-09-2014	5	3,000,000	3,000,000	4	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	5	0	5	0	3,000,000	3,000,000	
151	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429122	0002	- / -	09-05-2016	5	2,000,000	2,000,000	4	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	5	0	5	0	2,000,000	2,000,000	
152	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429278	0004	Lokal / -	16-09-2014	5	3,000,000	3,000,000	4	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	5	0	5	0	3,000,000	3,000,000	
153	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429279	0005	Lokal / -	16-09-2014	5	3,000,000	3,000,000	4	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	5	0	5	0	3,000,000	3,000,000	
154	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429272	0002	Lokal / -	16-09-2014	5	3,000,000	3,000,000	4	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	5	0	5	0	3,000,000	3,000,000	
155	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429143	0010	- / -	09-05-2016	5	2,000,000	2,000,000	4	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	5	0	5	0	2,000,000	2,000,000	
156	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429142	0009	- / -	09-05-2016	5	2,000,000	2,000,000	4	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	5	0	5	0	2,000,000	2,000,000	
157	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429123	0003	- / -	09-05-2016	5	2,000,000	2,000,000	4	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	5	0	5	0	2,000,000	2,000,000	
158	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5397913	0001	Meja Kerja Lokal / -	02-11-2020	5	2,000,000	2,000,000	4	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	5	0	5	0	2,000,000	2,000,000	
159	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429088	0001	Lokal / -	11-06-2010	5	1,100,000	1,100,000	4	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0	0	5	0	5	0	1,100,000	1,100,000	
160	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429121	0001	- / -	09-05-2016	5	2,000,000	2,000,000	4	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	5	0	5	0	2,000,000	2,000,000	
161	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429280	0006	Lokal / -	16-09-2014	5	3,000,000	3,000,000	4	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	5	0	5	0	3,000,000	3,000,000	
162	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429141	0008	- / -	09-05-2016	5	2,000,000	2,000,000	4	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	5	0	5	0	2,000,000	2,000,000	
163	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429140	0007	- / -	09-05-2016	5	2,000,000	2,000,000	4	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	5	0	5	0	2,000,000	2,000,000	
164	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	429139	0006	- / -	09-05-2016	5	2,000,000	2,000,000	4	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	5	0	5	0	2,000,000	2,000,000	

165	1.3.2.05.03.01.007	Meja Kerja Pejabat Eselon V	429274	0001	Lokal / SEDANG	16-09-2014	5	1,500,000	1,500,000	4	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	5	0	5	0	1,500,000	1,500,000	
166	1.3.2.05.03.01.007	Meja Kerja Pejabat Eselon V	429275	0002	Lokal / SEDANG	16-09-2014	5	1,500,000	1,500,000	4	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	5	0	5	0	1,500,000	1,500,000	
167	1.3.2.05.03.01.007	Meja Kerja Pejabat Eselon V	429281	0004	Lokal / SEDANG	16-09-2014	5	1,500,000	1,500,000	4	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	5	0	5	0	1,500,000	1,500,000	
168	1.3.2.05.03.01.007	Meja Kerja Pejabat Eselon V	429282	0005	Lokal / SEDANG	16-09-2014	5	1,500,000	1,500,000	4	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	5	0	5	0	1,500,000	1,500,000	
169	1.3.2.05.03.01.007	Meja Kerja Pejabat Eselon V	429276	0003	Lokal / SEDANG	16-09-2014	5	1,500,000	1,500,000	4	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	5	0	5	0	1,500,000	1,500,000	
170	1.3.2.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	429166	0003	Lokal / - -	19-05-2009	5	1,500,000	1,500,000	4	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	5	0	5	0	1,500,000	1,500,000	
171	1.3.2.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	429167	0004	Lokal / - -	19-05-2009	5	1,500,000	1,500,000	4	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	5	0	5	0	1,500,000	1,500,000	
172	1.3.2.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	429165	0002	Lokal / - -	19-05-2009	5	1,500,000	1,500,000	4	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	5	0	5	0	1,500,000	1,500,000	
173	1.3.2.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	807919	0002	Meja Psikolog Lokal / 1/2 biro	02-07-2018	5	1,500,000	1,500,000	4	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	5	0	5	0	1,500,000	1,500,000	
174	1.3.2.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	807913	0001	Meja Psikolog Lokal / 1/2 biro	02-07-2018	5	1,500,000	1,500,000	4	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	5	0	5	0	1,500,000	1,500,000	
175	1.3.2.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	807911	0001	Meja 1 Biro Lokal / 1 Biro	02-07-2018	5	2,000,000	2,000,000	4	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	5	0	5	0	2,000,000	2,000,000	
176	1.3.2.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	429164	0001	Lokal / - -	19-05-2009	5	1,500,000	1,500,000	4	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	5	0	5	0	1,500,000	1,500,000	
1.3.2.05.03.02		**MEJA RAPAT PEJABAT**						**3,614,100**	**3,614,100**		**3,614,100**	**0**		**3,614,100**			**0**			**0**		**3,614,100**	**3,614,100**	
177	1.3.2.05.03.02.005	Meja Rapat Pejabat Eselon III	429094	0001	Lokal / -	11-06-2010	5	1,204,700	1,204,700	4	1,204,700	0	0	1,204,700	0	0	0	5	0	5	0	1,204,700	1,204,700	
178	1.3.2.05.03.02.005	Meja Rapat Pejabat Eselon III	429095	0002	Lokal / -	11-06-2010	5	1,204,700	1,204,700	4	1,204,700	0	0	1,204,700	0	0	0	5	0	5	0	1,204,700	1,204,700	
179	1.3.2.05.03.02.005	Meja Rapat Pejabat Eselon III	429096	0003	Lokal / -	11-06-2010	5	1,204,700	1,204,700	4	1,204,700	0	0	1,204,700	0	0	0	5	0	5	0	1,204,700	1,204,700	
1.3.2.05.03.03		**KURSI KERJA PEJABAT**						**20,500,000**	**20,500,000**		**20,500,000**	**0**		**20,500,000**			**0**			**0**		**20,500,000**	**20,500,000**	
180	1.3.2.05.03.03.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	429262	0001	Gotec / -	10-09-2014	5	4,000,000	4,000,000	4	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	5	0	5	0	4,000,000	4,000,000	
181	1.3.2.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	429138	0001 - 0012	- / -	09-05-2016	5	12,000,000	12,000,000	4	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	5	0	5	0	12,000,000	12,000,000	
182	1.3.2.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	807920	0002	Front Line / OC-079	02-07-2018	5	1,500,000	1,500,000	4	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	5	0	5	0	1,500,000	1,500,000	
183	1.3.2.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	807912	0001	Front Line / OC-079	02-07-2018	5	1,500,000	1,500,000	4	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	5	0	5	0	1,500,000	1,500,000	
184	1.3.2.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	807921	0003	Front Line / OC-079	02-07-2018	5	1,500,000	1,500,000	4	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	5	0	5	0	1,500,000	1,500,000	
1.3.2.05.03.06		**KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT**						**5,864,000**	**5,864,000**		**5,864,000**	**0**		**5,864,000**			**0**			**0**		**5,864,000**	**5,864,000**	
185	1.3.2.05.03.06.004	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	429097	0001	Lokal / -	11-06-2010	5	5,864,000	5,864,000	4	5,864,000	0	0	5,864,000	0	0	0	5	0	5	0	5,864,000	5,864,000	
1.3.2.05.03.07		**LEMARI DAN ARSIP PEJABAT**						**19,925,000**	**19,925,000**		**19,925,000**	**0**		**19,925,000**			**0**			**0**		**19,925,000**	**19,925,000**	
186	1.3.2.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	429268	0005	Lokal / BESAR	16-09-2014	5	1,500,000	1,500,000	4	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	5	0	5	0	1,500,000	1,500,000	
187	1.3.2.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	429267	0004	Lokal / BESAR	16-09-2014	5	1,500,000	1,500,000	4	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	5	0	5	0	1,500,000	1,500,000	
188	1.3.2.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	5397918	0002	Lemari Arsip Lokal / 2 pintu	01-11-2020	5	1,500,000	1,500,000	4	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	5	0	5	0	1,500,000	1,500,000	
189	1.3.2.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	5397904	0001	Lemari Arsip Lokal / 2 pintu	01-11-2020	5	1,500,000	1,500,000	4	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	5	0	5	0	1,500,000	1,500,000	
190	1.3.2.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	429306	0001	Lemari Arsip Lokal / -	30-11-2015	5	4,925,000	4,925,000	4	4,925,000	0	0	4,925,000	0	0	0	5	0	5	0	4,925,000	4,925,000	
191	1.3.2.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	429264	0001	Lokal / BESAR	16-09-2014	5	1,500,000	1,500,000	4	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	5	0	5	0	1,500,000	1,500,000	
192	1.3.2.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	429265	0002	Lokal / BESAR	16-09-2014	5	1,500,000	1,500,000	4	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	5	0	5	0	1,500,000	1,500,000	
193	1.3.2.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	429266	0003	Lokal / BESAR	16-09-2014	5	1,500,000	1,500,000	4	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	5	0	5	0	1,500,000	1,500,000	
194	1.3.2.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	429270	0007	Lokal / BESAR	16-09-2014	5	1,500,000	1,500,000	4	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	5	0	5	0	1,500,000	1,500,000	
195	1.3.2.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	429269	0006	Lokal / BESAR	16-09-2014	5	1,500,000	1,500,000	4	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	5	0	5	0	1,500,000	1,500,000	
196	1.3.2.05.03.07.008	Buffet Kayu	5397917	0001	Buffet Lokal / Loker 3	01-11-2020	5	1,500,000	1,500,000	4	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	5	0	5	0	1,500,000	1,500,000	
1.3.2.06		**ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR**						**16,475,200**	**16,475,200**		**16,475,200**	**0**		**16,475,200**			**0**			**0**		**16,475,200**	**16,475,200**	
1.3.2.06.01		**ALAT STUDIO**						**16,475,200**	**16,475,200**		**16,475,200**	**0**		**16,475,200**			**0**			**0**		**16,475,200**	**16,475,200**	
1.3.2.06.01.01		**PERALATAN STUDIO AUDIO**						**7,890,000**	**7,890,000**		**7,890,000**	**0**		**7,890,000**			**0**			**0**		**7,890,000**	**7,890,000**	
197	1.3.2.06.01.01.050	Head Compensator	429192	0001	Promatic / 1200 VA	31-12-2005	5	2,940,000	2,940,000	4	2,940,000	0	0	2,940,000	0	0	0	5	0	5	0	2,940,000	2,940,000	
198	1.3.2.06.01.01.059	Power Amplifier	429302	0001	Amplifier - / -	30-11-2015	5	4,950,000	4,950,000	4	4,950,000	0	0	4,950,000	0	0	0	5	0	5	0	4,950,000	4,950,000	
1.3.2.06.01.02		**PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM**						**8,585,200**	**8,585,200**		**8,585,200**	**0**		**8,585,200**			**0**			**0**		**8,585,200**	**8,585,200**	
199	1.3.2.06.01.02.044	Digital Video Effect	429232	0001	Lokal / - -	17-12-2010	5	4,500,000	4,500,000	4	4,500,000	0	0	4,500,000	0	0	0	5	0	5	0	4,500,000	4,500,000	
200	1.3.2.06.01.02.126	Camera Digital	429217	0001	Camera & Attactment Canon / -	03-12-2007	5	4,085,200	4,085,200	4	4,085,200	0	0	4,085,200	0	0	0	5	0	5	0	4,085,200	4,085,200	
1.3.2.10		**KOMPUTER**						**580,567,748**	**565,867,748**		**565,867,748**	**14,700,000**		**580,567,748**		**14,700,000**			**0**		**9,400,000**	**580,567,748**	**575,267,748**	
1.3.2.10.01		**KOMPUTER UNIT**						**465,979,695**	**451,279,695**		**451,279,695**	**14,700,000**		**465,979,695**		**14,700,000**			**0**		**9,400,000**	**465,979,695**	**460,679,695**	
1.3.2.10.01.02		**PERSONAL KOMPUTER**						**465,979,695**	**451,279,695**		**451,279,695**	**14,700,000**		**465,979,695**		**14,700,000**			**0**		**9,400,000**	**465,979,695**	**460,679,695**	
201	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	429069	0005	Lokal / -	11-06-2010	4	8,801,000	8,801,000	3	8,801,000	0	0	8,801,000	0	0	0	4	0	4	0	8,801,000	8,801,000	
202	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	807900	0002	- / corei3, 4GB, 500GB, DVD	14-05-2018	4	8,000,000	8,000,000	3	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	0	4	0	4	0	8,000,000	8,000,000	
203	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	429207	0001	Personal Komputer LOKAL / -	04-03-2014	4	7,885,000	7,885,000	3	7,885,000	0	0	7,885,000	0	0	0	4	0	4	0	7,885,000	7,885,000	
204	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	2400225	0003	- / corei3, 4GB, 500GB, DVD	14-05-2018	4	8,000,000	8,000,000	3	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	0	4	0	4	0	8,000,000	8,000,000	
205	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	429247	0001	LG / -	30-09-2013	4	7,500,000	7,500,000	3	7,500,000	0	0	7,500,000	0	0	0	4	0	4	0	7,500,000	7,500,000	
206	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	2401259	0004	PC Unit HP Desktop PC 280 G3 / Small Form Factor	04-11-2019	4	10,350,000	10,350,000	3	10,350,000	0	0	10,350,000	0	0	0	4	0	4	0	10,350,000	10,350,000	
207	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	2401265	0005	PC Unit HP Desktop PC 280 G3 / Small Form Factor	04-11-2019	4	10,350,000	10,350,000	3	10,350,000	0	0	10,350,000	0	0	0	4	0	4	0	10,350,000	10,350,000	
208	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	2401291	0001	PC Tablet Samsung Galaxy Tab A.8 / -	04-11-2019	4	3,494,000	3,494,000	3	3,494,000	0	0	3,494,000	0	0	0	4	0	4	0	3,494,000	3,494,000	
209	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	429068	0001	acer / Z1602	14-03-2016	4	7,500,000	7,500,000	3	7,500,000	0	0	7,500,000	0	0	0	4	0	4	0	7,500,000	7,500,000	
210	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	429332	0007	Lokal / -	11-06-2010	4	8,801,000	8,801,000	3	8,801,000	0	0	8,801,000	0	0	0	4	0	4	0	8,801,000	8,801,000	

211	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	429331	0006	Lokal / -	11-06-2010	4	8,801,000	8,801,000	3	8,801,000	0	0	8,801,000	0	0	0	4	0	4	0	8,801,000	8,801,000	
212	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	5397910	0001	Personal Computer - / Multi Touch LED-backlight	02-11-2020	4	25,892,000	25,892,000	3	25,892,000	0	0	25,892,000	0	0	0	4	0	4	0	25,892,000	25,892,000	
213	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	429316	0001	acer / Z1602	14-03-2016	4	7,500,000	7,500,000	3	7,500,000	0	0	7,500,000	0	0	0	4	0	4	0	7,500,000	7,500,000	
214	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	429197	0001	MILENIUM / -	31-12-2005	4	5,460,000	5,460,000	3	5,460,000	0	0	5,460,000	0	0	0	4	0	4	0	5,460,000	5,460,000	
215	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	429330	0004	Lokal / Intel Pentium Duel Core Proces	20-10-2009	4	8,820,000	8,820,000	3	8,820,000	0	0	8,820,000	0	0	0	4	0	4	0	8,820,000	8,820,000	
216	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	429202	0002	HP / 7650	29-12-2006	4	4,225,000	4,225,000	3	4,225,000	0	0	4,225,000	0	0	0	4	0	4	0	4,225,000	4,225,000	
217	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	429213	0003	Advance / Pentium IV	03-12-2007	4	10,263,000	10,263,000	3	10,263,000	0	0	10,263,000	0	0	0	4	0	4	0	10,263,000	10,263,000	
218	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	429215	0001	Lokal / -	03-12-2007	4	5,000,000	5,000,000	3	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	4	0	4	0	5,000,000	5,000,000	
219	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	6000235	00001	- ASUZ A3202WBAK-WA382W / - -	30-04-2024	4	10,600,000	2,650,000	1	2,650,000	7,950,000	2	10,600,000	0	7,950,000	0	4	0	2	2,650,000	10,600,000	5,300,000	
220	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	807901	0002	Asus X441U / X441U	14-05-2018	4	8,500,000	8,500,000	3	8,500,000	0	0	8,500,000	0	0	0	4	0	4	0	8,500,000	8,500,000	
221	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	807905	0001	Asus Vivobook A442U / Vivobook A442U	14-05-2018	4	12,000,000	12,000,000	3	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	4	0	4	0	12,000,000	12,000,000	
222	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	429173	0001	LENOVO / 14"	12-12-2015	4	7,625,000	7,625,000	3	7,625,000	0	0	7,625,000	0	0	0	4	0	4	0	7,625,000	7,625,000	
223	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	807906	0003	Asus X441U / X441U	14-05-2018	4	8,500,000	8,500,000	3	8,500,000	0	0	8,500,000	0	0	0	4	0	4	0	8,500,000	8,500,000	
224	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	5450071	0002	Acer / -	21-10-2022	4	13,400,000	10,050,000	3	10,050,000	3,350,000	0	13,400,000	0	3,350,000	0	4	0	4	3,350,000	13,400,000	13,400,000	
225	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	5450069	0001	Laptop Acer / -	21-10-2022	4	13,600,000	10,200,000	3	10,200,000	3,400,000	0	13,600,000	0	3,400,000	0	4	0	4	3,400,000	13,600,000	13,600,000	
226	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	2401264	0001	Asus X441 ub / Asus X441 ub	14-05-2019	4	10,000,000	10,000,000	3	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	4	0	4	0	10,000,000	10,000,000	
227	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	2401302	0003	ACER ASPIRE E5-476G-599H / ASPIRE E5-476G-599H	14-05-2019	4	11,000,000	11,000,000	3	11,000,000	0	0	11,000,000	0	0	0	4	0	4	0	11,000,000	11,000,000	
228	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	2401281	0002	ACER ONE 14 Z476 / Acer On Z476	14-05-2019	4	9,000,000	9,000,000	3	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	0	4	0	4	0	9,000,000	9,000,000	
229	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	5428827	0004	Laptop ACER / N20C4 Aspire 5	01-11-2021	4	10,000,000	10,000,000	3	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	4	0	4	0	10,000,000	10,000,000	
230	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	5397915	0002	Laptop/Notebook - / Intel Core i5-9300H	02-11-2020	4	14,467,500	14,467,500	3	14,467,500	0	0	14,467,500	0	0	0	4	0	4	0	14,467,500	14,467,500	
231	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	429240	0001	Lokal / -	17-09-2012	4	7,500,000	7,500,000	3	7,500,000	0	0	7,500,000	0	0	0	4	0	4	0	7,500,000	7,500,000	
232	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	429239	0002	Lokal / -	17-09-2012	4	6,000,000	6,000,000	3	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0	4	0	4	0	6,000,000	6,000,000	
233	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	5397906	0001	Laptop/Notebook - / Intel Core i5-9300H	02-11-2020	4	14,467,500	14,467,500	3	14,467,500	0	0	14,467,500	0	0	0	4	0	4	0	14,467,500	14,467,500	
234	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429304	0001	ACER / One 14 Z1 402-POJN	30-11-2015	4	6,000,000	6,000,000	3	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0	4	0	4	0	6,000,000	6,000,000	
235	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429072	0005	Lokal / -	11-06-2010	4	12,240,000	12,240,000	3	12,240,000	0	0	12,240,000	0	0	0	4	0	4	0	12,240,000	12,240,000	
236	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429070	0003	ACER / Aspire 4721Z	20-10-2009	4	10,000,000	10,000,000	3	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	4	0	4	0	10,000,000	10,000,000	
237	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429225	0002	Lokal / - -	06-07-2009	4	7,222,655	7,222,655	3	7,222,655	0	0	7,222,655	0	0	0	4	0	4	0	7,222,655	7,222,655	
238	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429224	0001	Lokal / - -	06-07-2009	4	7,222,655	7,222,655	3	7,222,655	0	0	7,222,655	0	0	0	4	0	4	0	7,222,655	7,222,655	
239	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429311	0002	ACER / One 14 Z1 402-POJN	30-11-2015	4	6,000,000	6,000,000	3	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0	4	0	4	0	6,000,000	6,000,000	
240	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429106	0004	ASUS / -	02-04-2014	4	10,000,000	10,000,000	3	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	4	0	4	0	10,000,000	10,000,000	
241	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429285	0001	ASUS / INTEL CORE i3-4030U, 1.9GHz	22-12-2014	4	8,584,385	8,584,385	3	8,584,385	0	0	8,584,385	0	0	0	4	0	4	0	8,584,385	8,584,385	
242	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429076	0009	HP / 32 BIT	01-04-2013	4	7,250,000	7,250,000	3	7,250,000	0	0	7,250,000	0	0	0	4	0	4	0	7,250,000	7,250,000	
243	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429105	0003	ASUS / -	02-04-2014	4	10,000,000	10,000,000	3	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	4	0	4	0	10,000,000	10,000,000	
244	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429103	0002	ASUS / -	02-04-2014	4	10,000,000	10,000,000	3	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	4	0	4	0	10,000,000	10,000,000	
245	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429102	0001	ASUS / -	02-04-2014	4	10,000,000	10,000,000	3	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	4	0	4	0	10,000,000	10,000,000	
246	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	2401290	0001	Note Book Lenovo / Ideapad 130 3TID	10-12-2019	4	7,250,000	7,250,000	3	7,250,000	0	0	7,250,000	0	0	0	4	0	4	0	7,250,000	7,250,000	
247	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429071	0004	Lokal / -	11-06-2010	4	12,240,000	12,240,000	3	12,240,000	0	0	12,240,000	0	0	0	4	0	4	0	12,240,000	12,240,000	
248	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429074	0007	HP / 32 BIT	01-04-2013	4	7,250,000	7,250,000	3	7,250,000	0	0	7,250,000	0	0	0	4	0	4	0	7,250,000	7,250,000	
249	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429075	0008	ASUS / ASUS	01-04-2013	4	9,500,000	9,500,000	3	9,500,000	0	0	9,500,000	0	0	0	4	0	4	0	9,500,000	9,500,000	
250	1.3.2.10.01.02.003	Note Book	429073	0006	Lokal / -	25-11-2010	4	11,918,000	11,918,000	3	11,918,000	0	0	11,918,000	0	0	0	4	0	4	0	11,918,000	11,918,000	
1.3.2.10.02	**PERALATAN KOMPUTER**							**114,588,053**	**114,588,053**		**114,588,053**	**0**		**114,588,053**		**0**			**0**		**0**	**114,588,053**	**114,588,053**	
1.3.2.10.02.02	**PERALATAN MINI KOMPUTER**							**32,226,773**	**32,226,773**		**32,226,773**	**0**		**32,226,773**		**0**			**0**		**0**	**32,226,773**	**32,226,773**	
251	1.3.2.10.02.02.010	Computer Compatible	429286	0001	LG / LCD	22-12-2014	4	8,456,773	8,456,773	3	8,456,773	0	0	8,456,773	0	0	0	4	0	4	0	8,456,773	8,456,773	
252	1.3.2.10.02.02.015	Cut Sheet Feeder	429305	0001	EPSON / L220	30-11-2015	4	3,000,000	3,000,000	3	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	4	0	4	0	3,000,000	3,000,000	
253	1.3.2.10.02.02.015	Cut Sheet Feeder	429313	0002	EPSON / L220	30-11-2015	4	3,000,000	3,000,000	3	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	4	0	4	0	3,000,000	3,000,000	
254	1.3.2.10.02.02.015	Cut Sheet Feeder	429078	0001	Lokal / -	11-06-2010	4	14,520,000	14,520,000	3	14,520,000	0	0	14,520,000	0	0	0	4	0	4	0	14,520,000	14,520,000	
255	1.3.2.10.02.02.015	Cut Sheet Feeder	429172	0004	Lokal / -	31-12-2013	4	1,000,000	1,000,000	3	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	4	0	4	0	1,000,000	1,000,000	
256	1.3.2.10.02.02.015	Cut Sheet Feeder	429171	0003	Lokal / -	31-12-2013	4	1,000,000	1,000,000	3	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	4	0	4	0	1,000,000	1,000,000	
257	1.3.2.10.02.02.015	Cut Sheet Feeder	429079	0002	CANON / CANON MP237	01-04-2013	4	1,250,000	1,250,000	3	1,250,000	0	0	1,250,000	0	0	0	4	0	4	0	1,250,000	1,250,000	
1.3.2.10.02.03	**PERALATAN PERSONAL KOMPUTER**							**82,361,280**	**82,361,280**		**82,361,280**	**0**		**82,361,280**		**0**			**0**		**0**	**82,361,280**	**82,361,280**	
258	1.3.2.10.02.03.001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	429231	0003	Lokal / - -	17-12-2010	4	6,970,000	6,970,000	3	6,970,000	0	0	6,970,000	0	0	0	4	0	4	0	6,970,000	6,970,000	
259	1.3.2.10.02.03.001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	429082	0002	Lokal / -	20-10-2009	4	2,580,000	2,580,000	3	2,580,000	0	0	2,580,000	0	0	0	4	0	4	0	2,580,000	2,580,000	
260	1.3.2.10.02.03.001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	429223	0001	Lokal / -	31-12-2008	4	2,260,000	2,260,000	3	2,260,000	0	0	2,260,000	0	0	0	4	0	4	0	2,260,000	2,260,000	
261	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5397905	0002	Printer Canon / Pixma G1010	17-11-2020	4	1,950,000	1,950,000	3	1,950,000	0	0	1,950,000	0	0	0	4	0	4	0	1,950,000	1,950,000	
262	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	429170	0001	Lokal / -	13-09-2012	4	1,000,000	1,000,000	3	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	4	0	4	0	1,000,000	1,000,000	
263	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	429064	0001	epson / L210	14-03-2016	4	2,000,000	2,000,000	3	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	4	0	4	0	2,000,000	2,000,000	
264	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5397922	0001	Printer Canon / Pixma MP287	02-11-2020	4	1,500,000	1,500,000	3	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	4	0	4	0	1,500,000	1,500,000	
265	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5397921	0001	Printer Epson / L3110	17-11-2020	4	3,050,000	3,050,000	3	3,050,000	0	0	3,050,000	0	0	0	4	0	4	0	3,050,000	3,050,000	
266	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5397907	0002	Printer Canon / Pixma G1010	17-11-2020	4	1,950,000	1,950,000	3	1,950,000	0	0	1,950,000	0	0	0	4	0	4	0	1,950,000	1,950,000	
267	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5397919	0005	Printer Epson / L3110	17-11-2020	4	3,050,000	3,050,000	3	3,050,000	0	0	3,050,000	0	0	0	4	0	4	0	3,050,000	3,050,000	
268	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5428820	0002	Canon / Pixma MP287	30-11-2021	4	2,728,445	2,728,445	3	2,728,445	0	0	2,728,445	0	0	0	4	0	4	0	2,728,445	2,728,445	
269	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5428821	0003	Canon / Pixma MP287	30-11-2021	4	2,728,445	2,728,445	3	2,728,445	0	0	2,728,445	0	0	0	4	0	4	0	2,728,445	2,728,445	
270	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5428822	0004	Epson / L3110	30-11-2021	4	2,728,445	2,728,445	3	2,728,445	0	0	2,728,445	0	0	0	4	0	4	0	2,728,445	2,728,445	
271	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5428823	0005	Epson / L3110	30-11-2021	4	2,728,445	2,728,445	3	2,728,445	0	0	2,728,445	0	0	0	4	0	4	0	2,728,445	2,728,445	
272	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2401286	0002	Printer Epson L3110 / L3110	10-12-2019	4	2,800,000	2,800,000	3	2,800,000	0	0	2,800,000	0	0	0	4	0	4	0	2,800,000	2,800,000	
273	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	429066	0001	epson / L210	14-03-2016	4	2,000,000	2,000,000	3	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	4	0	4	0	2,000,000	2,000,000	

274	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	429080	0002	CANON / CANON MP237	01-04-2013	4	1,250,000	1,250,000	3	1,250,000	0	0	1,250,000	0	0	0	4	0	4	0	1,250,000	1,250,000	
275	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2401278	0003	Canon Pixma MX 497 / Pixma MX 497	14-05-2019	4	2,000,000	2,000,000	3	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	4	0	4	0	2,000,000	2,000,000	
276	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	429307	0004	EPSON / L220	15-02-2016	4	3,000,000	3,000,000	3	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	4	0	4	0	3,000,000	3,000,000	
277	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	429081	0003	CANON / CANON MP237	01-04-2013	4	1,250,000	1,250,000	3	1,250,000	0	0	1,250,000	0	0	0	4	0	4	0	1,250,000	1,250,000	
278	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	429127	0002	EPSON / L220	15-02-2016	4	3,000,000	3,000,000	3	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	4	0	4	0	3,000,000	3,000,000	
279	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	429111	0001	EPSON / L220	15-02-2016	4	3,000,000	3,000,000	3	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	4	0	4	0	3,000,000	3,000,000	
280	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2401270	0001	Canon Pixma MX 497 / Pixma MX 497	14-05-2019	4	2,000,000	2,000,000	3	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	4	0	4	0	2,000,000	2,000,000	
281	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	429137	0003	EPSON / L220	15-02-2016	4	3,000,000	3,000,000	3	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	4	0	4	0	3,000,000	3,000,000	
282	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2401279	0001	Canon Pixma MX 497 / Pixma MX 497	14-05-2019	4	2,000,000	2,000,000	3	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	4	0	4	0	2,000,000	2,000,000	
283	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2401280	0001	Canon Pixma MX 497 / Pixma MX 497	14-05-2019	4	2,000,000	2,000,000	3	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	4	0	4	0	2,000,000	2,000,000	
284	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	429249	0002	CANON / -	30-09-2013	4	1,500,000	1,500,000	3	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	4	0	4	0	1,500,000	1,500,000	
285	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2401298	0004	Canon Pixma MX 497 / Pixma MX 497	14-05-2019	4	2,000,000	2,000,000	3	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	4	0	4	0	2,000,000	2,000,000	
286	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2401299	0001	Canon Pixma MX 497 / Pixma MX 497	14-05-2019	4	2,000,000	2,000,000	3	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	4	0	4	0	2,000,000	2,000,000	
287	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2401300	0001	Canon Pixma MX 497 / Pixma MX 497	14-05-2019	4	2,000,000	2,000,000	3	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	4	0	4	0	2,000,000	2,000,000	
288	1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	429248	0001	CANON / -	30-09-2013	4	1,500,000	1,500,000	3	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	4	0	4	0	1,500,000	1,500,000	
289	1.3.2.10.02.03.007	External	429194	0001	Stabilizer TWIN 006 / -	31-12-2005	4	2,940,000	2,940,000	3	2,940,000	0	0	2,940,000	0	0	0	4	0	4	0	2,940,000	2,940,000	
290	1.3.2.10.02.03.007	External	429195	0002	Stabilzer TWIN DOG / -	31-12-2005	4	2,940,000	2,940,000	3	2,940,000	0	0	2,940,000	0	0	0	4	0	4	0	2,940,000	2,940,000	
291	1.3.2.10.02.03.007	External	429198	0003	Stabilizer TOYOSAKI / -	08-12-2006	4	2,957,500	2,957,500	3	2,957,500	0	0	2,957,500	0	0	0	4	0	4	0	2,957,500	2,957,500	
1.3.3		**Gedung dan bangunan**						**1,182,573,086**	**454,715,596.41**		**454,715,596.41**	**727,857,489.59**		**1,182,573,086**		**727,857,489.59**			**0**		**22,454,442.55**	**1,182,573,086**	**477,170,038.96**	
1.3.3.01		**BANGUNAN GEDUNG**						**1,182,573,086**	**454,715,596.41**		**454,715,596.41**	**727,857,489.59**		**1,182,573,086**		**727,857,489.59**			**0**		**22,454,442.55**	**1,182,573,086**	**477,170,038.96**	
1.3.3.01.01		**BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA**						**1,182,573,086**	**454,715,596.41**		**454,715,596.41**	**727,857,489.59**		**1,182,573,086**		**727,857,489.59**			**0**		**22,454,442.55**	**1,182,573,086**	**477,170,038.96**	
1.3.3.01.01.01		**BANGUNAN GEDUNG KANTOR**						**1,182,573,086**	**454,715,596.41**		**454,715,596.41**	**727,857,489.59**		**1,182,573,086**		**727,857,489.59**			**0**		**22,454,442.55**	**1,182,573,086**	**477,170,038.96**	
292	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	429334	0001	/	29-12-2000	50	674,977,000	107,996,320	41	107,996,320	566,980,680	8	674,977,000	0	566,980,680	0	50	0	42	0	674,977,000	107,996,320	
293	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	429335	0002	/	31-12-2008	47	20,000,000	12,488,950.64	45	12,488,950.64	7,511,049.36	1	20,000,000	0	7,511,049.36	5	52	0	46	0	20,000,000	12,488,950.64	
294	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	429336	0003	/	28-07-2009	50	334,280,000	54,526,303.76	46	54,526,303.76	279,753,696.24	3	334,280,000	0	279,753,696.24	4	54	0	47	0	334,280,000	54,526,303.76	
295	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	429337	0001	/	31-12-2012	50	45,500,000	71,979,634.05	45	71,979,634.05	-26,479,634.05	4	45,500,000	0	-26,479,634.05	3	53	0	46	0	45,500,000	71,979,634.05	
296	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	429289	0001	Paving Blok /	26-11-2015	50	94,580,000	56,344,050	38	56,344,050	38,235,950	11	94,580,000	0	38,235,950	0	50	0	39	5,634,405	94,580,000	61,978,455	
297	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	429333	0001	/	01-11-2016	50	13,236,086	151,380,337.96	39	151,380,337.96	-138,144,251.96	10	13,236,086	0	-138,144,251.96	4	54	0	40	16,820,037.55	13,236,086	168,200,375.51	
1.3.4		**Jalan, irigasi dan jaringan**						**197,639,000**	**67,424,966.67**		**67,424,966.67**	**130,214,033.33**		**197,639,000**		**130,214,033.33**			**0**		**6,587,966.66**	**197,639,000**	**74,012,933.33**	
1.3.4.02		**BANGUNAN AIR**						**197,639,000**	**67,424,966.67**		**67,424,966.67**	**130,214,033.33**		**197,639,000**		**130,214,033.33**			**0**		**6,587,966.66**	**197,639,000**	**74,012,933.33**	
1.3.4.02.04		**BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALA**						**197,639,000**	**67,424,966.67**		**67,424,966.67**	**130,214,033.33**		**197,639,000**		**130,214,033.33**			**0**		**6,587,966.66**	**197,639,000**	**74,012,933.33**	
1.3.4.02.04.04		**BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI**						**121,999,000**	**44,732,966.67**		**44,732,966.67**	**77,266,033.33**		**121,999,000**		**77,266,033.33**			**0**		**4,066,633.33**	**121,999,000**	**48,799,600**	
298	1.3.4.02.04.04.002	Saluran Drainage	429283	0001	/	12-12-2014	30	121,999,000	44,732,966.67	17	44,732,966.67	77,266,033.33	12	121,999,000	0	77,266,033.33	0	30	0	18	4,066,633.33	121,999,000	48,799,600	
1.3.4.02.04.05		**BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN SUNGAI/PANTAI**						**75,640,000**	**22,692,000**		**22,692,000**	**52,948,000**		**75,640,000**		**52,948,000**			**0**		**2,521,333.33**	**75,640,000**	**25,213,333.33**	
299	1.3.4.02.04.05.008	Bangunan Pelimpah Banjir	429067	0001	Rabat Beton dan Turap /	26-04-2016	30	75,640,000	22,692,000	19	22,692,000	52,948,000	10	75,640,000	0	52,948,000	0	30	0	20	2,521,333.33	75,640,000	25,213,333.33	
									2,187,209,411.08											**74,648,159.21**		**2,261,857,570.29**	

Kamis, 5 Maret 2026

Pengguna Barang

dr. I MADE PUTRA NEGARA, M.M

NIP : 19661116 199903 1 002

DAFTAR BMD PADA PENGGUNA BARANG
DAFTAR AMORTISASI
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2025

Provinsi : KALIMANTAN BARAT
Pemerintah Daerah : BENGKAYANG
Pengguna Barang : DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

no	Kode Barang	Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi nama barang	Merek / Tipe	Spesifikasi lainnya		Lokasi	Kendaraan Dinas					Jumlah	Satuan	Harga satuan perolehan	Nilai perolehan	Penyusutan					Cara perolehan	Tanggal perolehan	Status peng gunaan	Keterangan
							ukuran	Bahan		CC	Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB	Nomor Mesin					umur	Akum s/d tahun lalu	Beban	Koreksi Akumulasi	Akum s/d tahun ini				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	1.3.8.03.01.01.0001	Aset Tak Berwujud		00001	Website Kantor Dinsos PPPA	/		false							1		28,426,680	28,426,680	5	11,370,672	5,685,336	0	17,056,008		29-05-2023		
2	1.3.8.03.01.01.0001	Aset Tak Berwujud		00001	-	/		false							1		100,000,000	100,000,000	5	20,000,000	20,000,000	0	40,000,000	DAU	31-12-2024		
																				31,370,672	**25,685,336**	**0**	**57,056,008**				

Kamis, 5 Maret 2026
Pengguna Barang

dr. I MADE PUTRA NEGARA, M.M
NIP : 19661116 199903 1 002

REKAPITULASI DAFTAR MUTASI BARANG
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2025

Provinsi : KALIMANTAN BARAT
Pemerintah Daerah : BENGKAYANG
Pengguna Barang : DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

no	Gol	Bid	Nama Bidang Barang	Keadaan per 1 Januari 2025	Mutasi Perubahan Selama 1 Januari 2025 S/D 31 Desember 2025											Keadaan per 31 Desember 2025	Ket.
					Bertambah					Berkurang							
					Belanja Modal	Kapitalisasi	Mutasi	Reklas	Jumlah	Penghapusan	Extracomtable	Mutasi	Reklas	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17
	-																
1	**01**	**01**	**TANAH**	**114.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**114.400.000,00**	
	-																
2	**02**		**PERALATAN DAN MESIN**	**1.719.461.598,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1.719.461.598,00**	
		01	Alat Besar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		02	Alat Angkut	570.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		570.218.000,00	
		03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.380.000,00	
		04	Alat Pertanian / Peternakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		05	Alat Kantor dan Rumah Tanggal	548.820.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		548.820.650,00	
		06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	16.475.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.475.200,00	
		07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		08	Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		09	Alat Persenjataan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		10	Komputer	580.567.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		580.567.748,00	
		11	Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		12	Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		14	Alat Bantu Explorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		15	Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		16	Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		17	Peralatan Proses / Produksi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		18	Rambu - Rambu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		19	Peralatan Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	-																
3	**03**		**GEDUNG DAN BANGUNAN**	**1.369.713.336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1.369.713.336,00**	
		01	Bangunan Gedung	1.369.713.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.369.713.336,00	
		02	Monumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		03	Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		04	Tugu Titik Kontrol / Pasti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	-																
4	**04**		**JALAN , IRIGASI DAN JARINGAN**	**197.639.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**197.639.000,00**	
		01	Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		02	Bangunan Air/Irigasi	197.639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		197.639.000,00	
		03	Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		04	Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	-																
5	**05**		**ASET TETAP LAINNYA**	**3.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**3.300.000,00**	
		01	Bahan Perpustakaan	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.300.000,00	
		02	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		03	Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		04	Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		05	Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		06	Barang Koleksi non Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		07	Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	-																
6	**06**		**KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	
	-																
	-		**JUMLAH NILAI PEROLEHAN**	**3.404.513.934,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**3.404.513.934,00**	
	-		**Akumulasi Penyusutan**	**(2.187.209.411,08)**	**(74.648.159,21)**	**0,00**	**(0,00)**	**0,00**	**(74.648.159,21)**	**(0,00)**	**(0,00)**	**(0,00)**	**(0,00)**	**(0,00)**		**(2.261.857.570,29)**	
	-		**JUMLAH ASET TETAP**	**1.217.304.522,92**			**0,00**		**-74.648.159,21**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1.142.656.363,71**	
	-																
7	**07**		**ASET LAINNYA**	**98.056.008,00**	**-25.685.336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.685.336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**72.370.672,00**	
		01	Aset Tak Berwujud	128.426.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		128.426.680,00	
		02	Aset Lain-lain	299.790.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			299.790.210,00	
		05	Penyusutan Lain-lain	(298.790.210,00)	(0,00)	0,00	0,00	(0,00)		0,00	0,00	0,00	0,00			(298.790.210,00)	
		04	Amortisasi	(31.370.672,00)	(25.685.336,00)	0,00	0	0	(25.685.336)	(0)	(0)	0	0	(0,00)		(57.056.008,00)	
	-																
	-		**JUMLAH ASET**	**1.315.360.530,92**					**-100.333.495,21**					**0,00**		**1.215.027.035,71**	

Kamis, 5 Maret 2026
Pengguna Barang

dr. I MADE PUTRA NEGARA, M.M
NIP : 19661116 199903 1 002

REKAPITULASI LAPORAN ASET
MENURUT JENIS
INTRAKOMTABLE
DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2025

Provinsi : KALIMANTAN BARAT
Pemerintah Daerah : BENGKAYANG
Pengguna Barang : DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

no	Gol.	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
	-				
1	**01**	**01**	**TANAH**	**2,00**	**114.400.000,00**
	-				
2	**02**		**PERALATAN DAN MESIN**	**306**	**1.719.461.598,00**
		01	Alat Besar	0,00	0,00
		02	Alat Angkut	17,00	570.218.000,00
		03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1,00	3.380.000,00
		04	Alat Pertanian / Peternakan	0,00	0,00
		05	Alat Kantor dan Rumah Tanggal	193,00	548.820.650,00
		06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	4,00	16.475.200,00
		07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00
		08	Alat Laboratorium	0,00	0,00
		09	Alat Persenjataan	0,00	0,00
		10	Komputer	91,00	580.567.748,00
		11	Alat Eksplorasi	0,00	0,00
		12	Alat Pengeboran	0,00	0,00
		13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0,00	0,00
		14	Alat Bantu Explorasi	0,00	0,00
		15	Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00
		16	Alat Peraga	0,00	0,00
		17	Peralatan Proses / Produksi	0,00	0,00
		18	Rambu - Rambu	0,00	0,00
		19	Peralatan Olah Raga	0,00	0,00
	-				
3	**03**		**GEDUNG DAN BANGUNAN**	**2**	**1.369.713.336,00**
		01	Bangunan Gedung	2,00	1.369.713.336,00
		02	Monumen	0,00	0,00
		03	Bangunan Menara	0,00	0,00
		04	Tugu Titik Kontrol / Pasti	0,00	0,00
	-				
4	**04**		**JALAN , IRIGASI DAN JARINGAN**	**2**	**197.639.000,00**
		01	Jalan dan Jembatan	0,00	0,00
		02	Bangunan Air/Irigasi	2,00	197.639.000,00
		03	Instalasi	0,00	0,00
		04	Jaringan	0,00	0,00
	-				
5	**05**		**ASET TETAP LAINNYA**	**1**	**3.300.000,00**
		01	Bahan Perpustakaan	1,00	3.300.000,00
		02	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olahraga	0,00	0,00
		03	Hewan	0,00	0,00
		04	Biota Perairan	0,00	0,00
		05	Tanaman	0,00	0,00
		06	Barang Koleksi non Budaya	0,00	0,00
		07	Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00
	-				
6	**06**		**KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN**	**0,00**	**0,00**
	-				
	-		**JUMLAH ASET TETAP**	**0**	**3.404.513.934,00**
	-		**Akumulasi Penyusutan**	**0**	**(2.261.857.570,29)**
	-		**Jumlah Aset Tetap Nilai Buku**	**0**	**1.142.656.363,71**
	-				
7	**07**		**ASET LAINNYA**	**176**	**72.370.672,00**
		01	Aset Tak Berwujud	2,00	128.426.680,00
		02	Aset Lain-lain	58,00	299.790.210,00
		03	Amortisasi	0	(57.056.008,00)
		04	Penyusutan Aset Lain-lain	0	(298.790.210,00)
	-				
	-		**JUMLAH ASET**	**489**	**1.215.027.035,71**

Kamis, 5 Maret 2026
Pengguna Barang

dr. I MADE PUTRA NEGARA, M.M
NIP : 19661116 199903 1 002